RUSUH MEREBAK SIAPA BERMAIN
FORUM
KEADILAN
Wiranto:
"Kalau Mau,
Dua Kali
Saya Punya
Kesempatan"
TEKA-TEKI
KUDETA
ISSN 0215-8280
MINGGUAN NO. 42 TAHUN VIII, 30 JANUARI 2000
Rp 7800,00
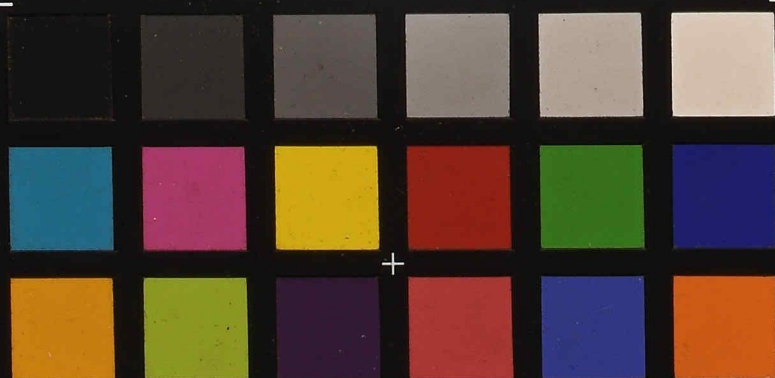
RVM. MILITIBVS. L
RANGE ROVER.
A LUXURY LIMITED ONLY
BY YOUR IMAGINATION.
CBS 728

LAND-ROVER

MAJALAH MINGGUAN

FORUM KEADILAN

Penerbit: PT Forum Adil Mandiri
SIUPP: No. 265/SK/MENPEN/D2/1990 Tanggal: 25 April 1990
Alamat: Kebayoran Center - Blok A No. 11 - 15 Kebayoran Baru - Velbak Jakarta 12120 PO BOX 1104/JKS Jakarta 12011 Telp. (021) 7255625 (Hunting System) Fax 7255645 (Redaksi), Fax 7255650 (Pemasaran).
E-mail: redaksi@forum.co.id. **Web Site:** http: //www.forum.co.id
Pencetak: PT Enka Parahiyangan, Jakarta (Isi di luar tanggung jawab percetakan).

Evaluasi Produk untuk Hasil Terbaik

Di tengah persaingan ketat antarmedia, masalah mutu menjadi hal utama. Karena itulah, evaluasi produk yang merupakan *gawean* bagian Litbang yang dikomandani L.R. Baskoro menjadi acara yang selalu ditunggu. Di ajang itulah, secara serius tapi santai, bahkan tak jarang diselingi kritikan cukup pedas kepada para penulis, kami membahas serta mengevaluasi isi dan penampilan FORUM.

Pembaca, membuka tahun yang baru, kami kembali menggelar forum evaluasi. Kali ini, kami mengundang Eep Saefulloh Fatah, pengamat politik yang sedang naik daun. Tentu saja, kami punya alasan kuat mengundang laki-laki kelahiran Bogor, 31 tahun silam, ini. Selain karena Eep dikenal punya pemikiran kritis dan jernih, ia juga "dekat" dengan kehidupan media massa. Maklum, sebelum dikenal sebagai pengamat politik, Eep adalah Kepala Litbang di *Republika*. Jadi, kami percaya ayah satu anak ini dapat memberikan buah pikirnya yang kritis tentang isi majalah ini.

Tentu saja, bukan soal mudah menangkap tokoh satu ini. Akhir-akhir ini, ia memang sangat sibuk. Selain masih mengajar di FISIP UI, Eep juga "laris" dalam acara-acara diskusi di sana-sini. Bahkan, ia rutin membawakan acara Indonesia Baru di layar kaca. Tapi, yang membuat kami tetap *ngebet* mengundang Eep adalah karena kami mendengar kabar, akhir Februari ini akan terbang ke Ohio untuk mendapatkan gelar doktor. "Kita harus mengundang Eep sebelum ia pergi," kata salah seorang reporter. Untunglah, di tengah kesibukannya, laki-laki yang hobi melukis ini bersedia menyempatkan diri mampir ke FORUM.

Selama dua jam, Eep memberikan "pencerahan" kepada awak FORUM. Ia memaparkan dengan gamblang berbagai persoalan yang tengah dihadapi Indonesia di masa transisi ini. Termasuk, "membagi" kecemasan-kecemasannya menyaksikan perkembangan politik belakangan ini. Dengan pemaparan tersebut, Eep berharap FORUM ikut berperan serta dalam mengawal reformasi ini agar tidak keluar jalur. "Sekarang ini adalah momentum yang pas bagi FORUM untuk menegaskan kembali posisinya," kata Eep.

M. RIZAL

EEP SAEFULLOH FATAH DI DEPAN REDAKSI FORUM. *Agar tak keluar jalur.*

Bagi sebuah industri yang komoditasnya adalah produk intelektualitas seperti FORUM, kehadiran pengamat dari luar seperti Eep memang sangat diperlukan. Selain untuk bercermin, hal itu juga dibutuhkan untuk "mengisi baterai" para wartawan. Karena itu, kami menjadwalkan akan mengundang pakar-pakar luar untuk ikut membedah isi FORUM. ❑

DAFTAR ISI

MAJALAH MINGGUAN
FORUM KEADILAN
NO. 42, TAHUN VIII
24 - 30 JANUARI 2000

FORUM UTAMA
ISU SARA DAN PEMBANGKANGAN TNI

Kerusuhan berdarah di Ambon dan Maluku Utara mulai menjalar ke daerah lain. Gereja-gereja dibakar di Mataram, membuat ibu kota NTB bak kota mati. Suasana panas juga mulai terasa di Makassar dan Madura. Ada skenario besar apa di balik letupan-letupan kerusuhan di berbagai daerah ini? Benarkah ada pembangkangan TNI dan Polri dalam kasus ini?

14

AFP PHOTO

SELINGAN
INDONESIA SURGA NARKOBA DUNIA

Indonesia ternyata merupakan surga bagi pengedar dan pemakai narkoba. Menurut pantauan Polisi Watch of Indonesia, hal ini berkaitan dengan tidak adanya penegakan hukum yang keras bagi pelaku dan pengedar. Bahkan polisi yang terlibat tidak diadili sebagaimana mestinya.

38

BISNIS
SEGEPOK MASALAH DALAM RAPBN

Meski dinilai lebih transparan RAPBN 2000 banyak mengandung kekurangan. Yang menyedihkan, ada kemungkinan sebagian besar jatah kenaikan gaji pegawai jatuh pada pejabat dan sisanya baru dibagikan kepada 4,5 juta PNS.

82

AGUS BUATH BUTAR/DOK. FORUM

73

M. RIZAL

NASIONAL
TEKA-TEKI KUDETA

Jakarta kini tengah diguncang isu kudeta. Situasi Indonesia belakangan ini secara teoretis memang kondusif untuk memicu gerakan kudeta. Benarkah Angkatan Darat yang berada di balik kudeta ini? Apa kata Menko Polkam Wiranto?
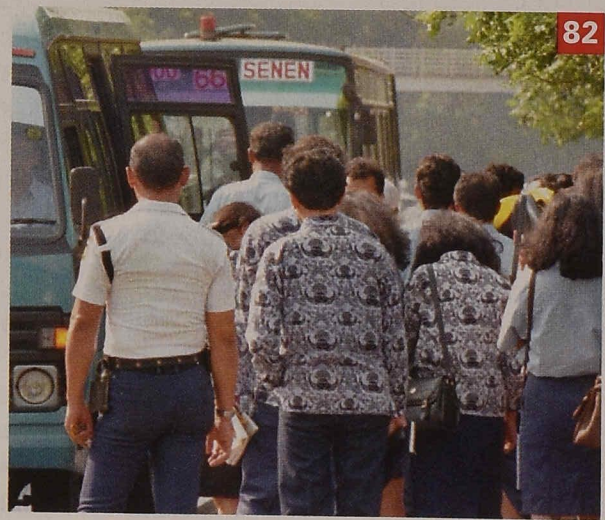
KULIT MUKA: *SELO SUMARSONO*
FOTO: DOK. FORUM

Kenaikan Gaji Tidak Realistis

Sehubungan dengan rencana kenaikan gaji para pejabat negara yang rata-rata 200-360 persen, saya menyatakan tidak setuju. Gaji presiden dan wakil presiden tidak perlu dinaikkan. Sebab, menurut UU No.7/1978, semua kebutuhan mereka ditanggung negara. Apalagi, dalam UU itu pun disebutkan bahwa gaji presiden enam kali gaji tertinggi pejabat tinggi; sedangkan untuk wakil presiden empat kali.

Alangkah lebih baik jika gaji ketua/wakil ketua lembaga tertinggi dan tinggi negara serta menteri cukup dinaikkan maksimum 50 persen. Soalnya, mereka sudah mendapatkan rumah dinas, mobil dinas, tunjangan pembayaran telepon, listrik, dan air yang semua ditanggung negara. Sedangkan gaji anggota lembaga tinggi negara boleh dinaikkan maksimum 100 persen. Hanya pegawai negeri, kecuali eselon I, yang berhak memperoleh kenaikan gaji sesuai dengan rencana pemerintah.

Dengan anjloknya nilai rupiah hingga 200 persen dibandingkan sebelum krisis moneter, kenaikan yang terlalu tinggi bagi para pejabat negara, terutama gaji presiden dan wakilnya, sangat tidak layak dilakukan pada saat ini.

Kita semua tahu, gara-gara krisis ekonomi, harga-harga barang melonjak hingga 200 persen, sedangkan penghasilan masyarakat menurun antara 30-60 persen. Jangan membandingkan gaji pejabat tinggi negara dengan eksekutif BUMN dan perusahaan swasta yang dituntut menghasilkan uang. Jabatan selaku pejabat tinggi negara di mana pun di dunia ini adalah suatu kehormatan/amanah.

Tengok saja, yang dilakukan George Bush ketika terpilih sebagai Wakil Presiden AS. Ia rela meninggalkan jabatannya sebagai salah seorang eksekutif sebuah perusahaan yang menggaji US$ 1 juta per tahun. Padahal, dengan jabatan Wapres itu ia hanya memperoleh penghasilan tidak lebih dari US$ 150.000 per tahun.

Karena itu, tidak layak jika standar kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia yang sudah merosot tidak dirasakan juga oleh para pejabatnya.

Dr. H.M. Ridhwan Indra R.A., S.H.
Bekasi Plaza Blok B 19
Jalan Ir. H. Juanda No. 81 Bekasi

Harga BBM Tak Pantas Dinaikkan

Apa pun alasannya, untuk saat ini harga bahan bakar minyak (BBM) tidak pantas dinaikkan. Meskipun Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudoyono mengharapkan dengan sangat agar masyarakat bisa mengerti kebijakan itu, seharusnya pemerintah bisa lebih mengerti akan beban hidup masyarakat yang saat ini sungguh luar biasa berat.

Saya setuju harga BBM dinaikkan. Tapi, tuntaskan dulu semua persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan para pejabat. Jika hal itu sudah dituntaskan, barulah soal beban negara yang harus dikeluarkan untuk subsidi BBM diperhitungkan.

Jangan lupa, masalah BBM itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Hampir semua kebutuhan rakyat sangat bergantung pada bahan bakar itu. Sebut saja, untuk membawa daun singkong dari kebun ke pasar diperlukan mobil yang memakai BBM. Atau, untuk mengolah benih sampai menjadi beras, sangat bergantung pada BBM. Belum lagi yang lain. Jadi, jika harga BBM dinaikkan, berarti meningkatkan beban hidup rakyat.

Yang perlu diingat lagi, ketika harga BBM dinaikkan tahun lalu, Jakarta jadi membara, Indonesia jadi memanas. Untunglah, pemerintah tahu diri dan menurunkannya kembali.

Rakyat jadi trauma. Apalagi, di masa Orde Baru dulu, setiap Pak Harto dan keluarganya serta kroni-kroninya baru kembali dari berkeliling dunia, pasti buntut-buntutnya harga BBM dinaikkan. Kenaikan harga BBM saat ini pun tidak lama setelah Gus Dur pulang dari luar negeri. Jangan ditiru, dong, gaya rezim Orde Baru yang mau enaknya saja.

Syaiful Pandu
Jalan T. Zainal Abidin C-15
Duri-Riau 28884

Tanggapan atas Usulan

Menelaah surat pembaca pada FORUM No. 40, edisi 9 Januari 1999, yang berjudul "Usulan untuk Alwi Shihab", saya tergelitik memberi tanggapan.

1. Mengenai postur perwakilan RI yang disebutkan demikian gemuk dan tidak efisien, tidaklah semestinya disamaratakan antara seratus lebih perwakilan RI di luar negeri. Perlu dicatat bahwa dalam mengantisipasi krisis moneter pertengahan 1997, Departemen Luar Negeri menarik pulang 206 diplomat dari luar negeri. Hingga kini, banyak jabatan yang ditinggalkan mereka belum diisi atau tidak ada penggantinya, sehingga terjadi perangkapan tugas. Mungkin ada sebagian perwakilan RI yang dinilai gemuk, tapi itu pun berdasarkan aturan yang melekat pada tingkatan diplomatik D-1, D-2, atau D-3; serta K-1, K-2, dan K-3. Suatu kriteria baru boleh saja diterapkan dalam hal penempatan pegawai di luar negeri. Namun, perlu ada studi perbandingan dan penilaian yang matang serta jelas untung-ruginya. Kendati demikian, tidak semua produk masa lalu itu jelek.

2. Entah apa jadinya jika 90 persen perwakilan RI—suatu jumlah yang sangat besar—harus ditutup, mengingat berbagai alasan. Di antaranya, faktor dalam dan luar negeri, dampak hubungan bilateral serta keuntungan multilateral, aspek hubungan bilateral, serta asas resiprositas yang lazim berlaku. Memang, di masa sulit keuangan, negara-negara seperti AS, Rusia, dan Thailand pernah menutup

sejumlah perwakilannya, khususnya tingkat konsulat jenderal atau konsuler. Pemerintah Indonesia dalam era reformasi ini dapat saja mengambil langkah-langkah ke arah itu dengan memperhatikan berbagai faktor pengaruh. Namun, apakah logis atau realistis jika mesti sampai 90 persen?

3. Penulis mungkin tidak memahami secara persis mengenai kedutaan besar AS yang hampir di semua negara mempunyai personel (*home staff* dan *local staff*) yang demikian besar dan sering tidak ada tandingannya dengan perwakilan negara-negara lain. Perlu pula diteliti lebih lanjut, apakah kedutaan besar asing yang ada di Jakarta justru lebih banyak membantu kepentingan nasional RI ketimbang perwakilan RI di luar negeri. Sebab, secara umum suatu perwakilan bekerja untuk kepentingan negaranya. Yang jelas, keberhasilan politik luar negari suatu negara sangat ditentukan oleh kebijakan atau politik dalam negeri negara tersebut.

Siuaji Raja
Ciledug-Tangerang.

Nepotisme di Kapuas Hulu

Sungguh sangat disesalkan, di saat demokrasi diagung-agungkan untuk diterapkan, justru praktek-praktek nepotisme masih mencengkeram di badan birokrasi pemerintah. Paling tidak hal itu terjadi di Pemda Tingkat II Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Hal itu bisa dilihat terutama pada saat penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sudah menjadi rahasia umum, nama-nama para CPNS yang akan diangkat biasanya sudah bisa diramal dan perkiraan-perkiraan seputar calon tersebut biasanya tidak meleset.

Panitia Penerimaan CPNS Daerah Tingkat II Kapuas Hulu selama ini terkesan tidak pernah menjaring calonnya secera selektif. Sebab, kelulusannya tidak dilihat dari bobot kualitas dan kuantitas calon, tapi dari sejauh mana hubungan keluarga dan lobi yang dilakukan CPNS dengan pihak panitia. Bahkan, tidak jarang kelulusan para calon itu dilakukan dengan jalan pintas, memberi sejumlah uang sebagai jaminan.

Selain itu, soal-soal tes yang yang diberikan kepada CPNS selama ini hanya formalitas. Agar tampak pelaksanaan penerimaan pegawai itu dilakukan secara jujur dan adil di mata semua peserta tes.

Memang tidak semua CPNS yang lulus tes melakukan praktek tidak terpuji itu karena ada juga yang di antara mereka yang lulus secara secara murni. Untuk yang lulus dengan cara ini, patut diberikan ucapan selamat dan acungan jempol.

Kalau begini keadaannya, bagaimana mereka bisa melahirkan sumber daya manusia yang bisa diharapkan dan memiliki integritas tinggi, jika secara mental belum sanggup menjadi yang terbaik?

Cosmas Priya Utama
Putussibau
Kabupaten Kapuas Hulu.

Imbauan Mahkamah Agung

Belakangan ini, ada oknum yang menelepon para hakim di seluruh lingkungan peradilan se-Indonesia, terutama para wakil ketua pengadilan negeri. Ia mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung-RI atau ketua-ketua pengadilan tinggi. Inti pembicaraan telepon tersebut, meminta imbalan sejumlah uang yang dikirim melalui rekening di suatu bank dengan dalih sehubungan dengan mutasi para hakim.

Maka, dengan ini diminta kepada para hakim untuk tidak melayaninya. Sebab, berita tersebut bohong dan merupakan upaya penipuan.

Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI
Kepala Bagian Humas dan Protokol
M. Hardjito Abd, S.H.
NIP. 220000235

Jacom Merevisi Hasan Zein

Sangat disayangkan, pernyataan Hasan Zein Mahmud (HZM) tentang Jacom di sebuah media ekonomi terbitan Jakarta, belum lama ini, yang isinya berupa fitnah. Ataukah HZM belum membaca proposal Jacom? Jika demikian, mengapa ia memberi komentar yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Selama ini, promotor Jacom (Jakarta Commodities Exchange) prihatin atas sikap Ketua Bappebti (Badan Pelaksana Bursa Komoditi) Arifin Lumban yang sengaja mematikan Jacom, meskipun mantan Menperindag Rahardi Ramelan sudah "It's OK". Padahal, Jacom tidak pernah mengusik kepentingan BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) ataupun mengomentari keberadaan HZM di sana. Bahkan, sampai saat ini Jacom masih menghormati HZM, sehingga pernyataannya itu *slip of tongue* belaka.

Adalah tidak benar bila dikatakan Jacom tidak mau bergabung ke BBJ. Sebab, pada awalnya promotor Jacom sudah mendaftar, bahkan sudah menyetor dana untuk pendirian Bursa Berjangka Indonesia—nama BBJ waktu itu. Sayang, pejabat pemerintah Orde Baru meminta untuk penggantian nama pendiri dengan nama sopir atau pembantu, seperti modus Eddy Tansil saat mendirikan Golden Key Group. Tentu saja, mereka tidak menerima akal-akalan seperti Eddy Tansil itu dan merasa diperlukan tidak adil, sampai akhirnya dibentuklah Jacom.

Apabila HZM sempat membaca proposal Jacom, terbukti komoditas yang diperdagangkan adalah komoditas *asli* Indonesia, seperti beras, jagung, dan gula. Bukan produk yang ada di luar negeri, apalagi sekadar melempar order ke bursa luar negeri. Secara tertulis, setiap kontrak berjangka diakhiri dengan penyerahan barang, sehingga mengakomodasi kepentingan petani dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tidak sekadar jual beli angka, seperti berjudi indeks saham.

Bertentangan dengan keraguan HZM terhadap petani, ternyata justru petani Indonesia sangat pandai memprediksi harga komoditasnya. Cuma, sayang, sering mereka "dikerjai" dalam pengadaan bibit , pupuk, dan obat antihama. Jadi, permasalahannya bukan prediksi harga panen, tapi justru dalam pengadaan sarana produksi pertanian.

Bukankah terbukti hanya sektor pertanian yang mampu bertahan menghadapi krisis dibandingkan sektor keuangan dan perbankan. Marilah kita tidak melecehkan petani dan saling introspeksi posisi diri.

Drh. Brata Wardhana, M.B.A.
Jalan Cipare 01/12 Desa Pancawati Kecamatan
Caringin, Bogor

Surat Salah Alamat

Kamis, 6 Januari lalu, saya menerima surat dari seseorang yang tidak saya kenal, yakni E.V. Arie

yang beralamat Kotak Pos 1, Calai Karangan-Sanggau, Kalimantan Barat. Semula, saya menyangka isinya adalah kartu Lebaran. Ternyata, isinya berupa selebaran berjudul *Engkau Memerlukan TUHAN*. Pada intinya, si pengirim mengharapkan agar saya mengakui "kehebatan" Yesus Kristus.

Lalu, saya pun bernostalgia. Pada 8 Agustus 1994, saya sendirian di stasiun kereta bawah tanah (*subway*) di Shinjuku, Jepang. Tiba-tiba, tiga orang ibu setengah baya menegur saya dalam bahasa Melayu yang fasih. Sebuah sikap yang sangat aneh karena orang Jepang paling tidak suka berbahasa asing. Ujung-ujungnya, saya diajak untuk *ngobrol* di sebuah gereja. Karena saat itu menjelang magrib, saya mohon maaf dan buru-buru mencari taksi untuk pulang ke Takao.

Sekitar dua tahun lalu, saya bersahabat dengan seorang *bule* asal Amerika. Ia sering datang ke rumah saya dan menanyakan hal-hal yang sensitif dalam Islam. Misalnya, tentang poligami dan harta warisan. Pembicaraan kami itu direkam dengan *tape recorder*. Sayang, hingga kini hasil rekaman itu tidak pernah saya dapatkan. Padahal, saya telah beberapa kali memintanya. Anehnya, ketika ia menawarkan Injil dalam bahasa Indonesia, hanya berselang dua hari, kitab itu telah sampai di meja saya.

Terus terang, setelah saya membolak-balik injil tersebut, saya semakin mantap dengan keyakinan saya sebagai seorang muslim, bahwa Alquran benar-benar mukjizat. Kebenarannya bersifat absolut dan satu-satunya kitab suci otentik yang berasal dari wahyu Allah swt.

Jadi, saudara E.V. Arie sangat keliru dan salah alamat ketika mengirimkan selebaran itu kepada saya. Apalagi, saya selalu mengikuti informasi media cetak dan elektronik yang menyajikan fakta: minoritas muslim yang berada di negara yang mayoritas penduduknya nonmuslim selalu ditindas, diperkosa, dan diperlakukan sewenang-wenang. Sebaliknya, jika mayoritas penduduknya beragama muslim, penduduk minoritas nonmuslim justru bisa hidup tenang.

Anwar Yusuf
PO Box 2188
Sigli- DI Aceh

Ingin Melacak Uang

Saya mengalami musibah ditipu Rp 60 juta oleh orang yang mengaku sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Sumatra Utara dengan nomor HP 0811813139—saya sempat menghubunginya tiga kali. Sekali waktu, ada pula oknum yang mengaku sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, Dr. Azrul Azwar, dengan nomor HP 0818822032 dan 0818336291.

Uang itu saya transfer (terkondisi harus segera) pada 3 dan 4 Januari 2000 ke rekening atas nama Amur Muchasyim, BNI Cabang Setia Budhi-Jakarta dengan nomor rekening 28 10300544 95902.

Saat ini saya sangat terpukul, mohon bantuan pembaca untuk menginformasikan bagaimana caranya agar saya dapat melacak si penipu ini dan mendapatkan kembali uang tersebut. Apakah melalui Bank BNI atau pihak lain yang bisa melacaknya? Sekali lagi saya mohon bantuan pembaca.

Nama dan alamat diketahui redaksi

Jangan Menghujat TNI

Membaca dan mencermati pendapat Prof. Dr. Bilveer Singh, pengamat militer Indonesia dari Universitas Singapura, yang dimuat di *Republika*,

halaman 2, terbitan 31 Desember 1999, dengan judul *RI "Bunuh Diri" Bila TNI Terus Dipojokkan,* saya sebagai salah seorang anggota TNI menyampaikan rasa salut dan penghargaan yang tinggi kepadanya.

Dalam hati saya bertanya, kenapa orang lain masih menghargai dan menganggap penting peranan TNI bagi kelangsungan hidup negara Republik Indonesia, tapi di Indonesia sendiri akhir-akhir ini TNI selalu dipojokkan dan dipersalahkan. Kalau kita mau jujur menilai kejadian-kejadian yang dituduhkan kepada TNI, apakah benar dilakukan oleh TNI sebagai suatu lembaga/institusi ataukah oknum-oknum TNI (anggota atau pejabat)?

Jawabannya pasti bukan lembaga TNI. Karena TNI mempunyai pedoman Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, 11 Asas Kepemimpinan yang selalu menjiwai pelaksanaan tugas prajurit TNI. Dan, saya kira masih banyak prajurit TNI yang menjunjung tinggi, menghormati, dan melaksanakan pedoman tersebut dalam pengabdiannya sebagai prajurit bagi negara Indonesia. Masih banyak tugas yang telah dilaksanakan dengan baik oleh TNI.

Kendati pepatah mengatakan "nila setitik merusak susu sebelanga", apakah pepatah tersebut pas untuk dipikulkan ke pundak TNI? Karena kesalahan dan kekhilafan beberapa oknum TNI, akankah menghancurkan dan menghabiskan semua keberhasilan pengabdian TNI kepada negara? Marilah kita berpikir secara jernih dan menatap ke depan.

Dalam milenium ketiga ini, beban negara Indonesia sangat berat. Di satu pihak, Indonesia harus keluar dari krisis total dengan mewujudkan negara sipil yang demokratis. Di lain pihak, Indonesia dituntut mengikuti agenda dunia seperti APEC, NAFTA, dan WTO, serta peningkatan kualitas kriminalitas.

Apakah Indonesia masa depan mampu berdiri tegak tanpa peran serta dari TNI yang kuat? Jika tidak, marilah kita menghentikan hujatan kepada TNI. Marilah kita duduk bersanding membicarakan masa depan bangsa dengan melibatkan semua komponen masyarakat (TNI, birokrat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan purnawirawan).

Nama dan alamat ada pada redaksi

Setuju Polisi Swasta

Saya sangat setuju dengan dibolehkannya polisi swasta atau lebih populer disebut detektif partikelir beroperasi di Indonesia. Sebab, dari peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, terlihat betapa polisi Indonesia kewalahan dalam menangani kasus kriminalitas. Hal ini bukan semata-mata karena mereka kurang profesional, tapi banyak disebabkan kendala psikologis dan dana yang tidak memadai.

Kendala psikologis misalnya ditemui dalam kasus pembakaran, penjarahan, dan pembunuhan peristiwa Mei 1998, Trisakti, Semanggi, dan lain-lain. Tampaknya, ada hambatan psikologis, sehingga polisi tidak mampu (tidak mau?) mengungkapnya.

Redaksi menerima kiriman naskah untuk rubrik Forum Pembaca, Kolom, dan Rehal. Setiap pengiriman naskah harus disertai fotokopi bukti diri pengirim. Naskah tidak akan dikembalikan kecuali disertai perangko secukupnya. Redaksi berhak menyunting isi naskah tanpa menghilangkan substansinya dan naskah yang sama hendaknya tidak dikirim ke media lain.

Sebab, dari tayangan rekaman video sebenarnya dapat diketahui siapa pelakunya karena jelas terlihat di situ. Namun, karena ada istilah "satu guru satu ilmu jangan saling mengganggu", kasus tersebut tidak pernah terungkap sampai sekarang.

Saya yakin, jika kasus ini ditangani polisi swasta/detektif, akan dapat terungkap karena mereka tidak ada hambatan psikologis tadi. Begitu juga masalah dana. Bukan rahasia lagi bahwa dana yang disediakan untuk menangani suatu kasus dalam jajaran polisi sangat kecil. Karena itu, biaya transportasi sang polisi sendiri tidak memadai.

Itulah yang menyebabkan masyarakat enggan melaporkan kasus kejahatan karena salah-salah bisa terbebani biaya operasi. Namun, di lain pihak, saya berharap, dengan gagasan polisi swasta akan beroperasi di Indonesia, akan menggugah pemimpin Polri agar dapat segera membenahi hambatan-hambatan itu. Hal ini harus juga menjadi pekerjaan rumah DPR dalam membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), agar dapat memberikan dana yang memadai bagi Kepolisian Negara.

Mudah-mudahan, dengan tantangan ini Kepolisian Indonesia tidak kecil hati, dan justru dapat memacu untuk segera membenahi diri.

P. Simorangkir

Jalan Balai Kota II No. 36 A
Kendari
Sulawesi Utara, 93117

Tak Perlu Mencari Dalil

Saya punya sebuah pengalaman menarik ketika masih bekerja di sebuah perusahaan yang sebagian besar karyawan dan pengelolanya adalah nonmuslim. Dengan santun, santai tapi tegas, saya mengatakan bahwa ajaran agama saya tidak membenarkan kami mengucapkan "Selamat Natal". Jadi, mohon hargailah pendirian saya ini.

Reaksi kawan-kawan dan manajemen yang sebagian besar beragama Kristen Protestan dan Katolik itu biasa-biasa saja. Mereka umumnya bisa mengerti. Ada yang mengatakan, "Bagi kami, bila Anda tidak mengucapkan 'Selamat Natal', tentu kami tidak perlu berprasangka buruk. Kami harus tetap menghargai pandangan Anda."

Bahkan, tetangga sebelah rumah saya yang tergolong Katolik taat mengatakan, "Tuhan, melalui Alkitab, tidak mengharuskan siapa pun mengucapkan 'Selamat Natal' kepada siapa pun. Bahkan, Alkitab sebenarnya tidak mengenal 'Hari Natal' yang dirayakan umat Nasrani pada 25 Desember.... Umat Kristen tidak pernah berprasangka negatif apabila umat Islam atau siapa pun tidak mengucapkan "Selamat Natal" kepada kami...."

Kawan dekat istri saya juga mengatakan hal senada, "...tidaklah diperkenankan memaksa orang lain mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani...."

Umat Kristiani (Protestan dan Katolik) yang saya kenal sehari-hari pada umumnya tahu benar bahwa umat Islam mengakui eksistensi Nabi Isa hanya sebagai nabi (utusan Allah), bukan anak Tuhan dan bukan sebagai juru selamat dunia. Dan mereka pun sejauh ini cukup bijaksana, tidak mempermasalahkan perbedaan pandangan itu.

Kalau memang demikian, mengapa Gus Dur, Alwi Shihab, Tolchah Hasan, dan Said Agil Siradj repot-repot mencari dalil pembenaran untuk meyakinkan umat Islam bahwa mengucapkan "Selamat Natal" itu tidak bertentangan dengan akidah Islam?

Mereka tampak lebih Kristen dari orang Kristen sendiri. Mungkin juga mereka itu termasuk orang Islam yang mengidap *inferiority complex* yang malu dengan wajahnya sendiri. Kalau memang demikian, gunakan saja topeng.

Doddy Syafrudin

Jalan Karapitan Timur 55/195
Burangrang, Lengkong
Bandung 40262

KARIKATUR

FISIBILITAS KUDETA

M.T. ARIFIN
Pengamat
Masalah Militer

Secara umum kekhawatiran bahwa tentara akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Gus Dur, setidaknya hingga Januari 2000, diperkirakan belum akan fisibel (*feasible*). Kuatnya kesadaran yang kental dari kelompok menengah perkotaan tentang jaminan dan kebebasan berpolitik—dengan nilai-nilai dan keyakinan yang cenderung kepada standar-standar internasional—mulai berhasil membentuk ikatan organik dengan kekuasaan melalui kontrol legalitas dan standar moral baru. Kelemahan pokok dari pemerintahan hasil kudeta menurut nilai-nilai itu, karena tidak otomatis menghasilkan rumusan politik dan ideologis yang menciptakan hak sehingga bisa diterima rakyat sebagai legitimasi terhadap kehadirannya.

Meski demikian, isu kudeta memang terus bergulir. Sebagian besar dikaitkan dengan indikasi kerusuhan sosial yang makin meluas serta keresahan tentara di tengah polemik terbuka antarperwira tinggi terhadap pemanggilan beberapa jenderal tentang pelanggaran HAM di Timtim pascajajak pendapat. Di samping itu juga dikaitkan dengan keterpinggiran peran para jenderal dalam pengambilan keputusan politik di kabinet, yang mengakibatkan munculnya ketegangan hubungan mereka dengan Presiden.

Jika benar gagasan kudeta akan dilakukan tentara, yang akan dipertimbangkan pertama kali adalah apakah prasyarat terjadinya kudeta terpenuhi, di samping perhitungan tepat tentang solidnya kekuatan internal militer untuk kepentingan itu. Seperti pada Mei 1998 di mana peluang terbuka bagi TNI untuk mengambil alih kekuasaan tetapi tidak dilakukan karena tidak solidnya elite militer dan kesatuan-kesatuannya, terutama yang ada pada tingkat komando utama. Perhitungan-perhitungan semacam itu memberikan kesimpulan tentang kecilnya kemungkinan TNI akan melakukan kudeta. Bukan hanya tidak terpenuhinya prasyarat dan relatif tak solidnya kekuatan internal tentara, tetapi juga karena menguatnya jaringan perwira tinggi reformis yang berusaha melakukan penataan ulang struktur kerja dan doktrin TNI. Karena itu, wajar jika pimpinan TNI membantah tudingan kemungkinan akan kudeta. KSAD Jenderal TNI Tyasno Sudarto pun memberi jaminan akan tidak adanya kudeta.

Persoalannya, apakah isu kudeta hanya isapan jempol? Beberapa informasi memberikan kecenderungan bahwa gagasan kudeta itu memang benar ada. Terdapat keterangan seorang jenderal pensiunan akan desakan untuk kudeta, di samping terdapat tokoh yang mengaku akan duduk dalam kepemimpinan pascaalih kekuasaan. Jika secara institusional jajaran TNI tidak paham, tentu karena gagasan kudeta itu memang muncul di luar struktur ketentaraan resmi.

Persoalannya, apakah isu kudeta hanya isapan jempol? Beberapa informasi memberikan kecenderungan bahwa gagasan kudeta itu memang benar ada.

Cukup menarik adanya pernyataan beberapa pihak bahwa terdapat aparat keamanan terlibat beberapa kerusuhan di daerah. Hal ini memang belum menjamin keterlibatan oknum-oknum tentara secara struktural. Namun, random dari "keterlambatan" dan "kesederhanaan" penanganan secara hukum terhadap oknum-oknum itu menunjukkan kecenderungan hubungan korelasional perilaku oknum dengan ketidakpuasan struktural. Kecurigaan demikian dapat dipahami karena merebaknya berita tentang ketegangan hubungan Presiden dengan beberapa perwira tinggi dalam kaitan kasus Aceh, Ambon, penataan pimpinan TNI, serta tidak adanya pembelaan Presiden terhadap para jenderal yang sedang diperiksa KPP-HAM. Lontaran tentang penolakan terhadap "keterlibatan Presiden dalam pembinaan internal TNI" dan gagasan "Presiden bukan Panglima Tinggi TNI" dari sementara perwira tinggi yang memiliki pengaruh pada lingkar-dalam militer serta didukung pakar yang dikenal dekat dengan kelompok militer dan politik tertentu, merupakan indikasi kuat terhadap kecurigaan di atas. Namun, yang mengherankan, sikap resmi pimpinan TNI tentang hal itu tak terdengar. Mengapa diam? Ketidaklaziman ini karena melibatkan kekuatan yang memiliki otoritas melampaui Panglima TNI. Di samping kemungkinan keterbatasan dari Laksamana Widodo AS yang sebenarnya lebih berperan sebagai Panglima TNI *de jure*, sementara masih terdapat *joint chief of staff* lain secara *de facto*.

Akhirnya, pertimbangan yang komprehensif tentang ketentaraan yang solid sebagai alat negara, merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mungkin di sini persoalannya, interaksi tentara dengan kehidupan politik baru dalam pemerintahan hasil Pemilu 1999 bukan sekadar menyangkut perubahan yang bersifat transisional, tapi juga berkaitan dengan ketidakpedulian normatif dari wilayah politik bebas terhadap ketentaraan, yang oleh Alfred Stepan disebut "bias liberal". Tanpa suatu pengembangan wacana yang mempertemukan kedua pihak untuk dapat duduk pada satu meja, maka konflik-konflik politik multipartai yang tidak sehat dapat mendorong implikasi yang penting bagi fisibilitas kudeta. Karena itu, kepemimpinan merupakan variabel kunci dalam menegakkan supremasi sipil yang faktor kuncinya adalah tumbuhnya institusi-institusi politik yang tahan lama. Justru di sinilah letak batu uji bagi kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Sementara, kelemahan dari jaringan kekuatan kuasi-militer untuk mengambil alih pemerintah adalah karena lebih mewakili tampilan jaringan "poros-poros lama" yang *prostatus quo*, sehingga tidak banyak memperoleh sambutan karena kecil kemungkinan mampu menyajikan suatu bentuk "kudeta reformatif". □

Lewat Mataram, Api Maluku Menuju

DEDI HERMAWAN

uju ke Jakarta

Kelambanan penanganan konflik di Ambon membuat kerusuhan merembet ke wilayah lain. Target akhir Jakarta?

Untaian kepulauan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mirip rantai petasan yang bagian ujungnya menyala. Aceh di barat dan Ambon di timur. Ledakan itu terus menjalar. Semakin lama semakin ke tengah, dan mungkin menuju ke pusat kekuasaan.

Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, orang yang kini berada di pusat kekuasaan, seperti mulai kehabisan kesabaran menghadapi kekacauan yang tak usai, terutama di Maluku. Ia menilai ada "tangan-tangan jahat" yang berada di belakang peristiwa yang terjadi di Ambon, Maluku. "Selama ini, kita bersabar karena masih merasa sebangsa, setanah air. Bahkan, dicaci pun kita masih berdiam diri. Tapi, ini tidak akan berlaku lama. Kita tidak akan mengambil tindakan keras yang menunjukkan kita mampu bertindak keras kepada siapa pun," kata Presiden yang biasa dipanggil Gus Dur itu.

Sayang, pertikaian antarkelompok di Maluku tak langsung padam setelah Gus Dur bersuara. Menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi tersendiri tetap tak membuat pertikaian mereda. Umat Islam di Maluku Utara telah mengumandangkan pula semangat jihad. "Jihad itu dilakukan untuk mengembalikan hak-hak yang dirampas. Kami ini mau damai, sehingga ketika ada isu dan selebaran segala macam, kami diam saja. Tapi, akhirnya kami justru dibantai habis," kata Ketua MUI Maluku Utara, H. Syarief Sahafin.

Sementara, bara perang di Maluku Utara belum padam, apinya merembet ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, pekan silam. Awalnya adalah tablig akbar sebagai wujud keprihatinan atas apa yang terjadi wilayah kepulauan itu. Acara yang bertajuk "Aksi Sejuta Umat" itu didukung 13 ormas Islam di sana. Organisasi itu antara lain, Muhammadiyah, HMI, Dewan Dakwah Islamiah, dan GP Ansor.

Dalam acara yang diadakan di lapangan Mataram itu, beberapa tokoh masyarakat Mataram tampil sebagai pembicara. Mereka, antara lain, Tuan Guru Haji (Tgh.) Harmi, Tgh. Shafwan Hakim, Abdul Hanan, tokoh Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga anggota DPRD Kodya Mataram, dan Zainal Asikin yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram. Zainal bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan tablig akbar itu. Mereka berceramah tentang keprihatinan yang sedang dialami masyarakat muslim di Ambon dan Maluku Utara.

Menurut Sekretaris Dinas Penerangan Polda NTB, Kapten Agus Sutisna, beberapa dari penceramah itu menampilkan isi ceramah yang ekstrem, tanpa memerinci contohnya. "Yang jelas, isinya membuat emosi massa bangkit," katanya.

Namun, menurut Tgh. Shafwan Hakim yang juga Ketua MUI Lombok Barat, ia justru mengajak umat Islam untuk bersabar dan bersimpati pada nasib muslim di Maluku. "Silakan saja dengar hasil rekaman ceramah saya itu," katanya.

Yang jelas, tidak berapa lama setelah acara yang dihadiri tidak kurang dari 6.000 umat itu usai, sekitar pukul 10.30 WITA, ada sekelompok orang berteriak, "Bakar-bakar!" Dan, yang menjadi sasaran pertama adalah Gereja Imanuel, tak jauh dari lapangan itu. Untungnya, rumah dinas Gubernur yang terletak persis di depan gereja itu luput dari amukan massa setelah lebih dari satu truk pasukan PHH dari Polda NTB memagarbetisi rumah orang nomor satu di wilayah itu.

Bahkan, massa tidak puas dengan hanya membakar satu gereja. Tercatat, sembilan gereja mengalami nasib serupa dan lima lainnya dirusak. Tak hanya itu, aksi massa akhirnya berkembang menjadi aksi penjarahan toko-toko di Mataram. Aksi penyerangan terhadap rumah milik warga Kristen hampir terjadi di seluruh wilayah Kota Madya Mataram.

Aparat yang berusaha meredakan kerusuhan bentrok dengan massa. Akibatnya, 12 orang luka dan satu orang meninggal dunia terkena tembakan. Aparat kepolisian dibantu aparat TNI AL dan TNI AD baru bisa menguasai keadaan tiga hari setelah tablig akbar.

AP PHOTO

WARGA MUSLIM MALUKU BERJAGA-JAGA. *Jihad demi hak yang dirampas.*

Aparat keamanan menahan sedikitnya 12 orang yang diduga telah memprovokasi massa. Kapolri Letjen Roesdihardjo menyatakan, para tersangka itu kini tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk mengetahui dalang kerusuhan. Namun, Roesdihardjo mengakui, peristiwa itu merupakan akibat luapan emosi massa. "Peritiwa itu terjadi karena terus-menerus mendengar kasus Ambon," katanya.

"Saya benar-benar tidak mengerti kenapa kerusuhan bisa terjadi," kata Shafwan Hakim. Apalagi, katanya, pihak Polda dan Pemda NTB telah menjamin keamanan penyelenggaraan acara itu. "Kami berani melakukan kegiatan ini karena aparat menjamin keamanannya," ucap Shafwan.

Keheranan serupa diperlihatkan Gubernur NTB, Harun Al Rasyid. Selama ini, wilayahnya termasuk dalam kategori daerah yang aman. "Mungkin ada skenario yang telah direncanakan, bisa jadi ada pihak yang tidak senang dengan kondisi seperti itu," kata Gubernur.

Akibat amuk massa itu, tidak kurang dari 1.144 warga Mataram mengungsi ke berbagai markas militer setempat dan 1.500 warga lainnya mengungsi di markas Polda NTB. Yang lebih memalukan, peristiwa itu membuat sekitar seribu turis asing yang sedang berwisata lari tunggang-langgang meninggalkan Pulau Lombok.

Dalam pandangan Ketua MPR, Amien Rais, penyebab kerusuhan Mataram ada dua. Pertama, kekecewaan umat Islam karena peristiwa Ambon tidak beres-beres; kedua, ada kesan pemerintah meremehkan pertikaian antarpenduduk di sana. Apalagi, menurut Amien yang juga Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), dalam masalah Maluku, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Forum Ukhuwah Islamiyah NTB, M. Husni Thamrin. "Sikap pemerintah yang terkesan diam mengakibatkan masyarakat Mataram jadi kehilangan kesabaran," katanya.

Cendekiawan Nurcholish Madjid pun berpendapat bahwa sikap lamban pemerintahlah yang telah memicu peristiwa-peristiwa beraroma SARA. "Tidak sepatutnya pemerintah membiarkan konflik di Maluku hingga lebih dari setahun dan memakan korban tidak kurang dari 1.600 jiwa," katanya. Meski begitu, "Guru Bangsa" ini menduga bahwa konflik di Maluku meluas hingga ke Mataram karena tidak ada informasi yang jelas dan lengkap mengenai kasus Ambon.

Bisa saja, peristiwa yang terjadi di Mataram itu memang wujud kekecewaan masyarakat.

KRIS HARYANTO

PENGUNGSI MALUKU. *Pemerintah lamban bertindak.*
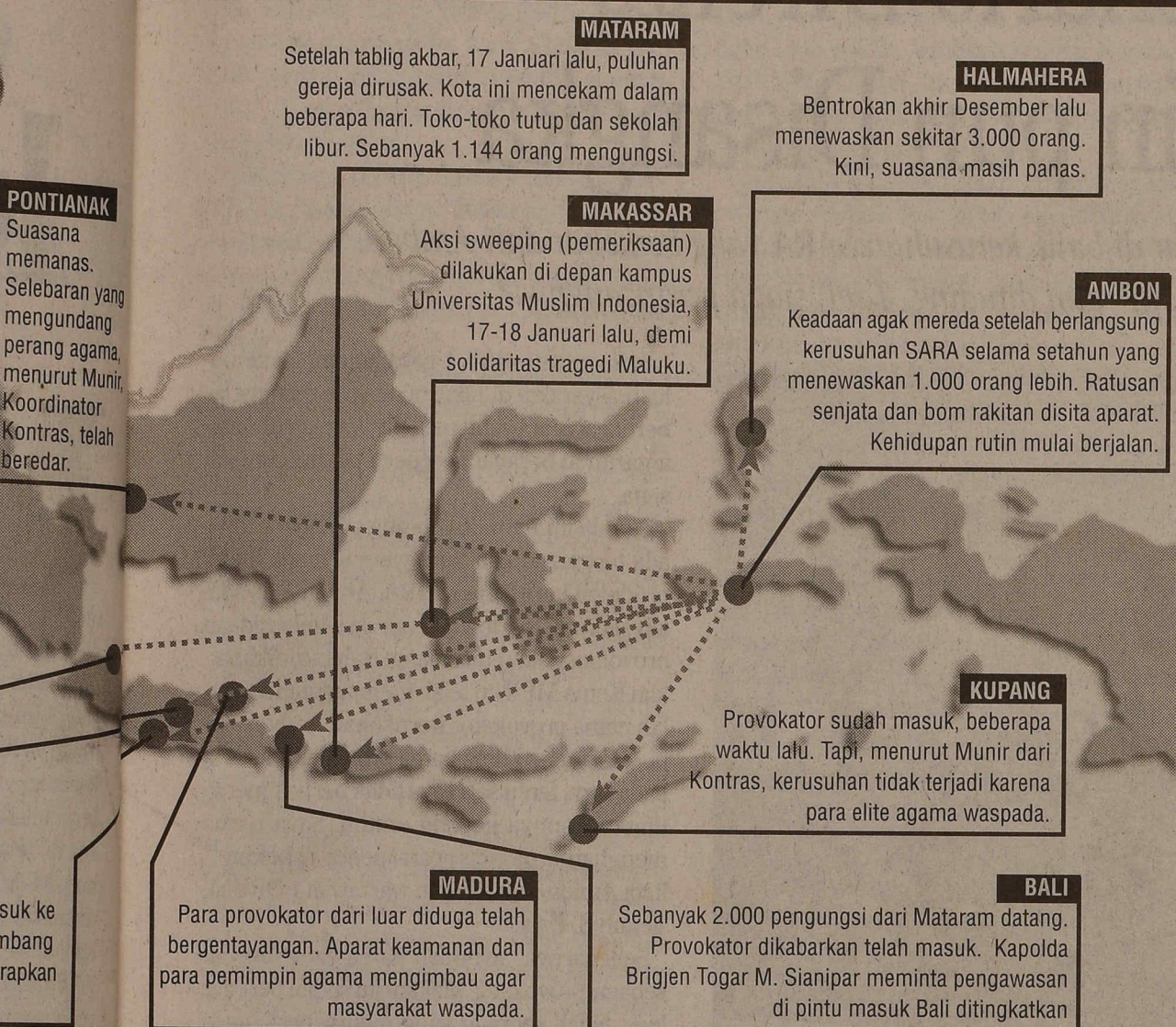
Tapi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tyasno Sudarto mensinyalir kemungkinan keterlibatan provokator. "Saya minta agar masyarakat tidak terlalu mudah terpancing, meski saat ini emosi masyarakat kita sedang tinggi," kata Tyasno.

Penduduk Mataram yang beragama Kristen merasa memang ada pihak yang "bermain" di kota itu. Seperti disebutkan Ketua Lithurgi Gereja Katolik Santo Antonius, Remmy Giusnaga, sebelum aksi massa terjadi, mereka telah beberapa kali menerima surat ancaman yang memaksa agar warga Kristen di NTB membuat pernyataan yang mengutuk golongan Kristen ekstrem di Ambon. "Surat itu ditandatangani Tgh. Sibawaihi, Ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) NTB. Ketika hal itu kami konfirmasikan, mereka membantahnya. Setelah itu, kami tidak tahu lagi harus bagaimana sampai akhirnya terjadi aksi itu," ujar Remmy.

Kendati belum secara tegas menyebutkan nama provokator yang "bermain" di Mataram, Polda NTB telah mengidentifikasi tiga orang dari Jakarta. "Mereka yang dikenal sebagai orang tertentu dari Jakarta itu diketahui berada di Mataram sebelum tablig akbar dan tidak berapa lama kembali lagi. Semoga ada benang merah yang menghubungkan kejadian itu dengan orang-orang tersebut," kata Kapolda NTB Kolonel Sukandari.

Tak hanya itu, Kapolda Bali, Brigjen Togar M. Sianipar, telah memerintahkan aparatnya untuk mencegah para "tersangka" itu memasuki daerah Lombok. "Kalau mereka *ngotot,* akan ditangkap. Dan, jika melawan akan ditembak," ujarnya.

Ketegasan yang ditunjukkan aparat itu bertujuan mencegah agar aksi massa yang diakibatkan sentiman agama dan solidaritas terhadap konflik di Maluku merembet ke tempat lain. Apalagi, penduduk di beberapa kota di Pulau Jawa sempat dicekam kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan. "Jika hal ini terjadi, usia RI hanya tinggal hitungan hari," kata Amien Rais mewanti-wanti.

Memang ada dugaan, seperti disebutkan Tyasno, target akhir para provokator adalah menyulut kerusuhan di Jakarta. "Apabila kerusuhan itu terjadi di Ibu Kota, akan menjadi sangat berbahaya dan bisa mengancam eksistensi pemerintahan," ucapnya. "Jangan sampai apa yang terjadi di Ambon diekspor ke Jakarta," kata Pangdam Jaya Mayjen TNI Ryamizard Ryacudu.

Beberapa hari setelah kerusuhan Mataram, warga Solo sempat mencemaskan acara tablig akbar memperingati satu tahun pertikaian di Maluku akan menyulut kerusuhan pula. Ketika acara itu dilaksanakan, 19 Januari lalu, hampir semua sekolah milik kaum Kristen diliburkan. Toh, kerusuhan tak terjadi. Kapolda Jawa Tengah, Mayjen Nurfaizi, telah berjanji akan memberikan sejumlah hadiah kepada siapa saja yang bisa menangkap provokator. "Namun, kepada siapa saja yang akan melakukan kerusuhan di wilayah ini, tidak ada perintah lain kecuali tembak di tempat," katanya.

Sebenarnya, upaya menyulut kerusuhan telah pula dilakukan di Madura. Menurut Kapolwil Madura Kolonel Djoko Sutriyo, beberapa provokator berada di wilayahnya. Di sana telah beredar selebaran yang mengajak masyarakat Madura memerangi kaum Kristen. Selebaran itu mengatasnamakan Bassra. Akibatnya, seluruh ulama NU menarik diri dari organisasi Badan Musyawarah Ulama Pesantren Madura itu.

Upaya mencegah aksi kekerasan sebagai dampak dari konflik di Maluku itu tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan. Di Jawa Timur, 66 organisasi politik, agama, LSM, dan mahasiswa membentuk Posko Kewaspadaan. "Posko ini dibentuk hingga keadaan Indonesia menjadi tenang kembali," kata Ketua PWNU Jawa Timur, Choirul Anam.

Sentimen keagamaan yang ditimbulkan oleh konflik di Maluku memang bisa merembet menjadi kerusuhan di banyak tempat. Ada dugaan bahwa pertikaian Maluku, yang akan memicu kerusuhan berbau SARA lainnya, dipakai pihak tertentu sebagai alat strategi "desa mengepung kota" yang bertujuan menggoyang pemerintahan Gus Dur. Sebelumnya, kasus Ambon pula yang turut menambah nilai merah di rapor pemerintahan Habibie, sehingga pertanggungjawabannya tak diluluskan MPR. Lihat saja nanti, saat Sidang Umum tahunan MPR, Agustus 2000, rapor Gus Dur boleh jadi juga akan dinilai merah.

Fahmi Imanullah, Dedi Hermawan (Mataram), Fenty Effendy dan Mustopa (Ternate)

Skenario Direka, Pemain pun Disangka

Diduga ada skenario besar di balik kerusuhan SARA yang berkobar dari Ambon. Sejumlah "pemain" pun dituding. Tapi, siapa perancangnya?

ANNAS

PERDAMAIAN PEMUKA AGAMA MALUKU DAN GUBERNUR. *Ada nama-nama di kantong Amien Rais.*

Kerusuhan di Mataram yang meletus Senin pekan lalu itu benar-benar memukul Harun Al-Rasyid. Gubernur Nusa Tenggara Barat ini sama sekali tidak mengira wilayahnya yang selama ini adem-ayem bisa tercebur juga ke dalam gejolak berbau SARA. Saat menjenguk warganya yang mengungsi karena ketakutan, Harun tak kuasa menahan tangis. "Saya sangat sedih atas kejadian ini," ujarnya terbata-bata sambil berlinangan air mata.

Huru-hara berupa perusakan gereja itu tak hanya membuat Harun masygul. Sebagian besar masyarakat Indonesia pun cemas. Jangan-jangan, para provokator telah bergentayangan di mana-mana, sehingga api konflik SARA yang berasal dari Maluku itu bakal membakar daerah lain.

Kecemasan itu cukup beralasan. Diduga, kerusuhan Mataram dipicu oleh sejumlah "tangan-tangan jahat". Mereka membonceng acara tablig akbar untuk solidaritas umat muslim Maluku yang digelar di Lapangan Umum Mataram. Soalnya, banyak saksi mata yang melihat kerusuhan sudah pecah sebelum acara itu selesai.

Tak mengherankan bila Eggy Sudjana, Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), yakin kerusuhan itu sengaja dilakukan oleh kelompok tertentu untuk melahirkan citra jelek orang Islam. Selain itu, peristiwa tersebut akan menutupi pembunuhan besar-besaran terhadap orang Islam di Ambon. "Inilah yang namanya politik praktis, sehingga yang terpojok umat Islam," ujar Eggy yang sempat disebut-sebut berada di balik kerusuhan Mataram itu.

Yang jelas, letupan di Mataran sangat memprihatinkan. Apalagi, "perang antarumat beragama" di Ambon, Halmahera, dan sekitarnya, sampai kini belum juga mereda. Bentrokan antara kelompok Islam dan Kristen di wilayah itu terus terjadi. Upaya kelompok pemuka masyarakat di Jakarta dengan menggelar berbagai acara yang mencitrakan kerukunan antarumat beragama seperti tak bergema di sana.

Semua itu membuat orang percaya bahwa ada tangan-tangan kuat yang sengaja memproduksi kerusuhan SARA. Amien Rais adalah seorang tokoh yang percaya keberadaan provokator ataupun dalang. Bahkan, dikabarkan Ketua MPR itu telah mengantongi sejumlah nama provokator kerusuhan Ambon. Tapi, "Kalaupun nama-nama provokator itu ada pada saya, tentu saja saya tidak berhak mengungkapkannya kepada umum. Saya harus menghargai otoritas aparat penegak hukum," kata Amien saat dicegat wartawan FORUM, Teguh S. Usis.

Sebenarnya, sejumlah nama yang disebut sebagai provokator Maluku itu sudah beredar luas. Salah seorang yang membeberkannya adalah Thamrin Amal Tomagola, pakar politik dari Universitas Indonesia. Laki-laki kelahiran Maluku itu menyebut empat nama. Mereka adalah tokoh organisasi Pemuda Pancasila Yorrys Raweyai, mantan Komandan Pasukan Pengawal Presiden Kolonel CPM (Purn.) Dicky Wattimena, mantan guru seorang guru SD Buce Sarpala, dan Sultan Ternate Mudzafar Syah.

Cuma, setelah memancing kontroversi, Thamrin memperjelas klasifikasinya. Untuk keterlibatan Buce dan Yorrys, menurut doktor lulusan Universitas Essex, Inggris, itu lemah sekali buktinya. Sementara, untuk Dicky disebutnya "ada indikasi awal". Tapi, untuk Sultan Ternate, "Seperti orang Islam bilang tidak ada keraguan kepadanya. Harus dibongkar habis," ujarnya kepada FORUM.

Tudingan terhadap Mudzafar Syah itu muncul gara-gara ia menyimpan ambisi ingin menjadi Gubernur Maluku Utara. Karena itu, konon, ia menggerakkan kerusuhan itu dengan cara merangkul kelompok Kristen untuk berperang melawan kelompok muslim.

Ini dilakukan Mudzafar lantaran saingan terberatnya menuju kursi gubernur adalah dari etnis Makian yang didukung Sultan Tidore. Pemilihan gubernur itu baru dilakukan setelah pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD Tingkat I yang direncanakan berlangsung Juni tahun ini

Tak urung, sikap Sultan itu mengundang reaksi kalangan Islam. "Kalau ingin menjadi gubernur, mestinya ia harus membangun simpati, bukan memusuhi," ujar Muslim Arbi, Ketua Komite Solidaritas Kemanusiaan Makayoa.

Namun, semua tudingan itu disanggah Mudzafar Syah. Menurut Mudzafar, justru Thamrin Amal Tomagola itulah yang patut dicurigai sebagai provokator atau penghasut. "Ia tidak mengetahui masalah pokok dan hanya mendengar sepotong-potong, lalu *ngomong*," kata Mudzafar, Jumat pekan lalu, kepada pers di Jakarta. Ia juga berniat memperkarakan Thamrin lewat jalur hukum lantaran merasa nama baiknya telah dicemarkan.

Lain lagi tudingan yang beredar untuk Dicky Watimmena. Sudah lama ia disebut-sebut sebagai "pemain" dalam kerusuhan Ambon tahap pertama yang terjadi awal tahun silam. Itu gara-gara Dicky dikabarkan saat itu terlibat aktif dalam rapat di sebuah gereja di Batumerah, yang isinya antara lain merancang strategi penyerangan kaum muslim. Dicky juga dikabarkan mendapat tugas utama "menggarap" Maluku Tengah. Tapi, meskipun Thamrin menyatakan Dicky berstatus "ada indikasi awal", sebenarnya tidak ada bukti yang benar-benar kuat mengenai keterlibatannya.

Demikian pula Yorrys Raweyai. Dikabarkan, Ketua Pelaksana Harian Pemuda Pancasila itu "mengatur" kerusuhan itu dari Jakarta. Dengan menuding Yorrys, skenario politik di balik kerusuhan Ambon pun seakan tampak jelas. Soalnya, laki-laki kelahiran Srui, Papua, itu sering datang ke rumah mantan Presiden Soeharto.

Kendati begitu, Yorrys membantah keterlibatan dirinya. Ia justru menyebut orang yang menuduh dirinyalah sebagai provokator. "Sekarang pemerintah sudah berupaya mengambil tindakan tegas. Kerusuhan sudah mereda. Tapi, di tengah situasi ini, ia malah memprovokasi lewat opini. Ia kan justru membuat suasana memanas," ujarnya kepada FORUM.

Diakui Munir, memang sulit mengungkap dalang kerusuhan di Ambon. Yang paling mungkin, menurut Ketua Kontras ini, mengidentifikasi para provokator di lapangan. Tapi, kalau ingin mengaitkan dengan elite politik, lembaga seperti Kontras tidak akan mampu. "Itu harus dilakukan lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan memeriksa," ujarnya.

Namun, Munir yakin, pada tahap awal, kerusuhan Ambon digerakkan oleh elite di Jakarta. Wilayah itu mudah disulut karena secara sosiologis Ambon memang rentan. Orang Islam cenderung berkumpul dalam satu kampung. Orang Kristen demikian pula. Peluang konflik sosial semakin terbuka ketika datang para pendatang dari suku lain yang umumnya muslim. Lantas, persaingan untuk berebut jabatan di birokrasi lokal juga menambah sumber pertikaian. Pendeknya, kata Munir, "Ambon telah menyediakan sejuta bahan bakar untuk sebuah ledakan."

Ketika "perang" sudah meletup, bahkan meluas seperti belakangan ini, provokasi dari luar tak diperlukan lagi. Peran itu sudah diambil alih elite lokal. Apalagi, dendam dan saling curiga di antara kedua belah pihak sudah mendarah daging. Tanpa selebaran gelap pun, menurut Munir, bentrokan bisa terjadi. "Sebab, di otak mereka sudah ada berjuta-juta selebaran yang dibuat sendiri di dalam persepsi pertikaian," ujarnya. Celakanya, dendam dan kecurigan, seperti wabah penyakit, bisa menular ke mana-mana.

Sayangnya, ya itu tadi, siapa yang merancang "kerusuhan menular" itu belum terungkap. Secara tersirat, Munir pun hanya menggambarkan bahwa dalangnya berposisi cukup kuat. Bahkan, TNI dan Polri pun tak sanggup menghadapinya sendiri. Lembaga itu membutuhkan dukungan Presiden, Wakil Presiden, dan DPR ataupun MPR sekaligus. "Untuk menghadapi pemain Ambon, mereka harus kompak," ujar Munir.

Yang jelas, kerusuhan itu merupakan proyek defensif orang-orang tertentu untuk menyelamatkan diri. Munurut Indria Samego, mereka adalah kelompok lama yang selama ini mengeruk keuntungan ekonomi lewat KKN. "Kalau sekarang Indonesia dibawa ke sistem persaingan pasar yang kompetitif, kelompok itu jelas akan tersingkir. Karena itu, mereka bermanuver," ujar peneliti LIPI itu.

Ada juga target politiknya, seperti digambarkan pengamat politik Salim Said. Mereka menginginkan agar tidak ada stabilitas. Kebetulan sekarang ada orang yang harus diadili karena melakukan KKN. Nah, "Orang itu merasa bahwa pengadilan atas dirinya hanya mungkin dilakukan ketika keadaan stabil," kata Salim.

Semua itu tentu sebuah teori yang harus dibuktikan di lapangan. Jadi, ujar Salim Said, "Ini tugas pemerintah dan aparat untuk membuktikan apakah itu semua benar adanya." Dan, siapa tahu rekaan itu tak meleset.

L.R. Baskoro dan Mochammad Husni

AFP PHOTO

PROTES PELAJAR AMBON UNTUK PEMERINTAH. *Proyek defensif kelompok lama.*

MEGAWATI MENYERAHKAN SUMBANGAN PADA PENGUNGSI AMBON. *Tak bakal bersikap netral.*

Masih Bisakah Mega Diharap?

Setelah jadi Wakil Presiden, Megawati rupanya masih setia dengan sikap lamanya: diam. Padahal, tugas yang dibebankan Presiden Abdurrahman Wahid kepada Mega tak main-main, yakni menyelesaikan pertikaian di wilayah Timur, termasuk kasus Ambon. "Pokoknya, Mbak Mega kebagian tugas yang enggak enak," kata Gus Dur, saat pengumuman susunan Kabinet Persatuan Nasional, Oktober tahun lalu. Penugasan kepada Mega itu dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 151/1999 tentang Pembentukan Tim Kerja Papua, Riau, dan Ambon.

Tapi, banyak yang menilai Mega lamban. Tak mengherankan bila Ketua Umum PDIP itu kerap mendapat tekanan. Sebulan setelah ditunjuk Gus Dur, Mega diminta untuk segera mengunjungi Ambon dan bertemu dengan pihak-pihak yang tengah bertikai di sana. Permintaan itu, antara lain, datang dari DPR. "Kami minta supaya Ibu Mega segera mengunjungi Ambon," kata Ketua DPR, Akbar Tandjung.

Dan, "ditemani" Gus Dur, awal Desember tahun silam, Mega akhirnya mendatangi Ambon. Tapi, anehnya, kehadiran dua orang pucuk pimpinan negeri ini tidak membawa hasil apa-apa. Malah, konflik pertikaian di provinsi seribu pulau itu makin mengganas dan merambah sampai ke Maluku Utara dan Halmahera.

Diduga ketidakmampuan Mega menyelesaikan kasus di Maluku karena partai yang dipimpinnya terlibat dalam konflik. Tudingan itu antara lain dilontarkan Faisal Salampessy, Ketua Gerakan Ukhuwah Islamiyah Maluku (GUIM). Faisal menduga Alex Litay, Sekjen PDI Perjuangan, ikut "bermain" di Maluku. Buktinya, "Tanggal 23 Juli 1999, Litay berada di Ambon dan bertemu dengan tokoh-tokoh gereja. Esoknya, setelah Litay pulang ke Jakarta, pecah kerusuhan di Ambon," tutur Faisal kepada FORUM.

Sebelum pemilu pun, menurut Faisal, PDIP sudah "bergerilya" di Ambon. Targetnya tak lain menyapu kursi di DPR dari wilayah tersebut. Tapi, dengan keberadaan 60 persen penduduk Islam di Ambon, keinginan itu tak gampang diraih. Maka, dibuatlah skenario agar orang Islam hengkang dari Ambon. Caranya, dengan melakukan teror terhadap orang Islam di Ambon. Terbukti, memang, setelah kerusuhan Ambon meletus saat Lebaran 1999, ratusan ribu orang Bugis, Buton, dan Makassar (BBM) pun meninggalkan Ambon.

Ternyata, hasil pemilu Juni lalu di Ambon pun menyokong teori Faisal. Di sana, PDIP berhasil meraih 296.793 suara, setara dengan dua kursi DPR. Tapi, celakanya, "Walau pemilu sudah usai, konflik di Ambon tetap terjadi karena sudah telanjur," ujar Faisal.

Hanya, tudingan dan teori Faisal itu dibantah oleh Alex Litay, Sekjen PDIP. "Aduh, sepanjang tahun 1999, saya enggak ke mana-mana. Saya juga tidak pernah ke Ambon," ujarnya. Ia menganggap tudingan itu sebagai fitnah. Lantas, Alex pun menepis keterlibatan PDIP. "Saya ini mati-matian berupaya agar konflik di Maluku bisa diselesaikan," katanya kepada FORUM.

Mega sendiri juga membantah dirinya hanya diam. "Keberangkatan saya dengan Presiden ke Ambon adalah dalam rangka tanggung jawab dan kewajiban kami untuk bisa menyelesaikan masalah di sana," kata Mega saat berlebaran bersama wartawan, awal Januari lalu. "Masalah Ambon ini kan sebenarnya tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa," ujarnya.

Tapi, kalau Mega pun berniat untuk menyelesaikan kasus Ambon, akan sulit. Sebab, menurut Arbi Sanit, pengamat politik dari UI, Mega tak bakal bersikap netral. Kalau tidak memihak, "Orang Kristen di Maluku tidak akan percaya lagi kepada PDIP. Selama ini, orang Kristenlah yang memilih PDIP pada pemilu," ujarnya.

Selain itu, kemelut di Ambon dan Halmahera memang rumit. Jadi, teori Faisal tadi hanya satu kemungkinan. Kenyataan, berbagai faktor berpengaruh. Di antaranya, konflik persaingan berebut jabatan di daerah, kecemburuan ekonomi, masalah agama, dan bahkan ada kemungkinan provokasi dari tangan-tangan elite di Jakarta.

Di tengah kerumitan itu, tekanan terhadap Megawati kian kencang. Front Islam Maluku, misalnya, 19 Januari lalu unjuk rasa di depan Istana Wapres. Mereka menuntut Megawati mundur jika tak sanggup mengatasi kemelut Maluku. Boleh jadi, itu tuntutan yang kelewat berat untuk pundak Mega.

Teguh S. Usis dan Yus Ariyanto

Mencari Netralitas di Air Keruh

Aparat terlihat tidak netral dalam pertikaian di Maluku. Ada yang memihak kubu Islam, ada pula yang menyokong Kristen. Diduga terjadi friksi di TNI.

Penggalan drama kerusuhan SARA di Maluku tergambar jelas di Pengadilan Negeri Ambon, pertengahan Januari lalu. Suatu hari, Lukas Paliaman dan Marlien Sitanala yang sedang berboncengan sepeda motor terjebak dalam kerumunan massa di wilayah Batu Merah Atas, Kota Madya Ambon.

Lalu, kedua dosen Universitas Pattimura itu ditangkap dan digiring ke rumah seorang purnawirawan TNI. Dari situ, mereka dibawa oleh enam orang dengan menggunakan mobil Kijang. Di suatu tempat, keduanya dihabisi dan mayatnya dibuang begitu saja di kawasan Air Kuning.

Kisah yang terjadi 1 Maret tahun lalu itu terungkap dalam sidang yang dipimpin Hakim Frans Takaria. Dalam perkara tersebut, seharusnya enam orang terdakwa diadili. Tapi, baru empat orang yang ditangkap. Dan yang cukup mengejutkan, menurut kesaksian Kacong, ada seorang petugas provos yang terlibat. Dialah yang mengatur menaikkan dua korban dan enam pelaku ke dalam mobil. "Naik satu per satu, cepat," ujar laki-laki berusia 40 tahun tersebut menirukan suara provos itu.

ANNAS

PROTES PADA INTELIJEN DI ISTANA WAPRES. *Polisi sempat mengungsi karena dikejar massa.*

Sepotong pengakuan Kacong itu cuma sebuah bukti: Oknum aparat keamanan yang menangani konflik Maluku tidak netral. Ini pun terlihat jelas dalam berbagai penggalan lain tragedi Maluku. Banyak aparat yang menyokong kubu Kristen, tak sedikit pula yang memihak Islam.

Lihat saja, yang terjadi di Desa Rinjani, Ambon, awal Maret tahun lalu. Semula, saat itu aparat Polres Ambon melakukan penyitaan senjata di dekat Masjid Al-Huda. Karena sebagian warga menolak menyerahkannya, diadakanlah proses negosiasi. Tapi, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Kapten L. Soplanit menembakkan senjatanya ke arah kerumunan warga.

Keruan saja, bentrokan pun pecah. Kelompok Kristen yang kebetulan berada di sekitarnya ikut menyerang. Akibatnya, empat orang muslim meninggal dunia. Tak lama kemudian, Kapten Soplanit, bersama Lettu Elyza Sopakoly, dan satu anak buahnya diperiksa oleh Polisi Militer setempat.

Tak urung, insiden Rinjani itu kian memperkeruh suasana. Apalagi, kabar yang beredar di masyarakat dan juga di media lain lagi: Aparat keamanan menembak orang yang tengah bersembahyang di masjid. Hal itu lantas segera ditepis Polri. "Memang ada warga yang tewas terkena tembakan aparat, tapi terjadi saat melerai," ujar Brigjen Togar Sianipar yang saat itu Kadispen Polri.

Upaya menegakkan netralitas bukan tak dilakukan. Jenderal Wiranto, Panglima TNI saat itu, tak lama kemudian menambah pasukan segar. Ia memberangkatkan Batalion Marinir dari Surabaya, Batalion 403 dari Purworejo, dan Batalion 503 Situbondo. Pengiriman pasukan dari Jawa itu, kata Wiranto, untuk menghindari keberpihakan secara etnis. "Saya tidak ingin upaya damai di Ambon dinodai oknum yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik," ujarnya kala itu.

Penambahan pasukan itu ternyata hanya mampu meredam kerusuhan untuk sementara waktu. Terbukti, berkali-kali bentrokan terjadi. Akhir November lalu, misalnya, sebuah "peperangan" terjadi di kawasan Mardika, Kecamatan Sirimau, Kodya Ambon.

Celakanya, aparat keamanan baru datang setelah kedua kubu bergerak. Mereka menghujani massa dengan tembakan. Yang terjadi akhirnya justru "perang" masyarakat melawan petugas. Ujung-ujungnya, tak kurang dari 29 orang, baik dari pihak Islam maupun Kristen, tewas.

Ketidakberesan aparat semacam itu pernah pula diakui Kapolda Maluku Brigjen Pol. I Dewa Astika. "Sesuai dengan tugasnya, Brimob melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Tapi, itu sulit dilaksanakan di daerah ini," ujarnya. Dewa Astika tak mengada-ada. Nyata-nyatanya, tak lama setelah bentrokan di Mardika, para anggota Polres Ambon harus mengungsi dari asrama karena dikejar-kejar masyarakat.

Semua itu tentu menambah rumit kemelut Ambon. Dan, akibat konflik SARA itu tidak bisa dipadamkan, apinya akhirnya menjalar sampai ke Maluku Utara. Memang banyak faktor penyebabnya. Tapi, andaikata aparat bisa netral, konflik Ambon bisa diredam. Penyebaran pun tak perlu terjadi.

Tak mengherankan bila Komnas HAM yang sudah dua kali ke Maluku pun mengingatkan lagi soal keterlibatan oknum aparat. "Kejadian Brimob berpihak ke Kristen dan Kostrad berpihak ke Islam tidak boleh terjadi lagi," ujar Albert Hasibuan. Sebab, menurut anggota Komnas HAM itu, netralitas aparat adalah salah satu kunci penyelesaian kasus Maluku.

Yang terjadi sekarang, seperti dilukiskan Dicky Mailoa selaku Ketua Crisis Centre Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) untuk kasus Maluku, sebagian oknum TNI mengalami demoralisasi. Mereka tak segan-segan melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Mestinya, kata Dicky, mereka lebih mengutamakan kepentingan negara. "Anggota TNI dan Polri yang muslim kan tidak dihalalkan membunuh temannya yang nonmuslim. Begitu pun sebaliknya," ujarnya.

Memang cukup sulit mencari netralitas di air keruh. TNI sendiri tak menepis ada keberpihakan oknum anggotanya. Tapi, menurut Kapuspen TNI Mayjen Sudrajat, hal itu terjadi pada beberapa anggota TNI lokal. Mengapa? "Sebab, mereka orang Maluku atau hidup dan tinggal bersama-sama orang Maluku. Terjadilah konflik kepentingan karena rumahnya ikut dibakar, saudaranya ikut dibunuh," katanya.

Tapi, kejadian di Maluku Utara baru-baru ini lain lagi ceritanya. Menurut Sudrajat, saat itu, TNI justru membuat suatu perisai atau penyekat untuk menghentikan konflik kedua kubu. Tapi, ada kelompok yang memaksa melewati, sehingga ada korban. "Ini risiko dari upaya penyekatan dan pencegahan," ujarnya. Pihaknya juga mengaku sudah menginvestigasi batalion yang bertugas. Hasilnya, kata Sudrajat, "Tidak ada indikasi TNI terlibat berpihak pada salah satu kelompok."

AP PHOTO

TNI DAN POLRI DI MATARAM. *Purnawirawan pun ikut bermain.*

Apa pun, kondisi aparat di Maluku itu membuat jalan menuju rekonsiliasi kian sulit. Soalnya, TNI tidak bisa menopang bangunan perdamaian yang hendak ditegakkan. Apalagi, dendam kesumat berbalut sentimen agama merasuk di kedua kelompok masyarakat.

"Saya bukan tidak percaya kepada TNI sebagai institusi. Saya juga tidak mengatakan TNI terlibat," ujar Indria Samego. Tapi, menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu, individu-individu di dalamnya jelas punya peranan. Dan, "Kalau sudah individu, bukan hanya aparat yang masih aktif, tapi juga para purnawirawan ikut bermain," ujarnya.

Sinyalemen Indria tak berlebihan. Seorang perwira purnawiran bernama Dicky Wattimena pernah disebut-sebut Thamrin Amal Tomagola, sosiolog UI, sebagai salah seorang provokator kerusuhan. Dalam kerusuhan Ketapang, Jakarta, beberapa waktu silam, nama Dicky pernah mencuat. Kini, dalam kasus Maluku, nama mantan komandan Pasukan Pengawal Presiden (1977-1983) itu disebut lagi. Pasalnya, Dicky sering terlihat di daerah kerusuhan di Maluku. Untuk Dicky, "Klasifikasinya, ada indikasi awal," kata Thamrin kepada FORUM.

Jadi, keterlibatan oknum purnawirawan dan aparat tidak harus diartikan TNI atau Polri terlibat secara institusi. "Kalau ada 'tangan-tangan profesional' yang bermain, besar kemungkinan itu bukan tentara," kata Salim Said. Tapi, kata pengamat militer itu, "Ia orang yang mempunyai cukup uang dan tenaga terlatih. Juga punya tujuan tertentu untuk menimbulkan kekacauan."

Walau begitu, seharusnya aparat keamanan sudah bisa mengetahui para provokator yang diduga bermain. Tapi, sejauh ini baik TNI maupun Polri belum mampu mengungkapnya. Itu bisa disebabkan kelemahan intelijen. Bahkan, di era Orde Baru pun, menurut Salim, pihak intelijen tak sehebat yang dibayangkan orang. Cuma, masyarakat saat itu takut. "Nah, di era keterbukaan sekarang, terbukti bahwa aparat intelijen tidak setangkas yang dibayangkan," ujarnya.

Namun, bisa pula kelambanan itu karena ada friksi di tubuh TNI sendiri. Karena yang dihadapi masalah rumit yang melibatkan orang kuat, pihak TNI tak cukup siap mengusutnya. Atau, seperti dilontarkan pengamat politik J. Kristiadi, "Mungkin belum ada kesepakatan bagaimana membongkar kasus itu."

Boleh jadi, harapan tidak bisa hanya ditumpukan kepada TNI. "Sebenarnya, yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah masyarakat sendiri. Bukan TNI saja. Kita harus selesaikan sama-sama," kata Sudrajat. Akur saja. Tapi, bagaimana konflik itu bisa dipadamkan kalau tak tahu dari mana sumber apinya?

Gendur Sudarsono, Yus Ariyanto, dan Victoria Sidjabat

Eggy Sudjana: "Umat Islam Memang Dipojokkan"

Setelah sempat dicurigai mendalangi kerusuhan di Situbondo, Jawa Timur, empat tahun silam, nama Eggy Sudjana kembali mencuat menyusul kerusuhan di Mataram awal Januari ini. Ia dituding sebagai provokator dalam tragedi tersebut. Kepada Ahmad Usmar dari FORUM, Eggy mengakui keberadaaan dirinya di Mataram saat itu. Tapi, untuk menghadiri tablig akbar yang diselenggarakan Pam Swakarsa AMPHIBI dan DPW Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) yang ia ketuai. Berikut petikan wawancaranya.

Sekarang umat Islam dipersalahkan akibat kasus di Mataram. Apa tanggapan Anda?

Inilah yang namanya politik praktis, sehingga dalam kasus tersebut yang terpojok justru umat Islam. Pembunuhan yang besar-besaran di Ambon jadi tenggelam dan semua nanti membicarakan pembakaran gereja. Akhirnya, umat Islam yang terpojokkan. Sebenarnya, ini sebuah skenario.

Maksud Anda?

By design. Setelah kerusuhan, saya melihat ke Mataram dan ada beberapa hal yang ganjil. Satu, pembakaran sudah terjadi di Ampenan sebelum massa tablig akbar tiba. Padahal, jarak Mataram-Ampenan sekitar lima kilometer. Kedua, terjadi pemilihan tempat-tempat terutama toko-toko yang dibakar. Kesannya sudah terprogram toko-toko mana yang harus dibakar. Ketiga, yang terasa sangat janggal, ada gereja yang bersebelahan dengan Kodim di Mataram ludes hancur terbakar. Pertanyaannya, Kodim itu kan markas, kok mereka tidak menghalau dan menyelamatkan? Apalagi saya terus dituduh. Tolong dicatat, Alquran, Surat Al-Hajj, surat ke-22, Ayat 40. Kita tidak boleh membakar rumah, tempat ibadah. Tidak mungkin saya melakukan hal itu. Saya beriman kepada Alquran, masak melakukan hal itu?

GATOT SW/DOK. FORUM

EGGY SUDJANA. *Dituduh sebagai provokator.*

Berarti umat Islam terpancing dengan pembakaran sehingga terjadi perusakan yang lebih besar?

Begini, ini kemurnian bercampur kepentingan politik. Kemurnian yang saya maksud adalah rasa solidaritas, semangat jihad umat Islam kepada saudaranya yang ada di Ambon. Jadi, peristiwa Mataram secara garis besar merupakan dua hal. Satu, konsekuensi logis pembelaan umat Islam terhadap saudaranya di Ambon. Kedua, merupakan implikasi dari lambannya pemerintah menangani masalah Ambon. Teman-teman di Monas bilang mau jihad, malah dibilang jahid. Sangat melecehkan ajaran Islam itu dan mengundang implikasi marah.

Apakah Anda melihat sendiri peristiwa di Mataram?

Saya tidak tahu-menahu karena kehadiran saya di sana itu terlambat. Jauh sebelum saya datang sudah terjadi kerusuhan.

Benarkah tablig akbar di Mataram masih ada hubungannya dengan tablig akbar di Monas?

Yang saya pahami, ini merupakan konsekuensi logis dari keterpanggilan umat Islam untuk membela saudaranya di Ambon dan Halmahera. Tablig akbar di Monas juga tidak berniat untuk menjatuhkan Gus Dur. Logikanya, andaikan Gus Dur dan Mega cepat tanggap mengurusi Ambon, apa mungkin ada pertemuan Monas? Tapi, kita semua tahu, Mega diam dan Gus Dur keluar negeri melulu! Akibatnya, orang tergerak dan geregetan. Kita tidak akan mempersoalkan Gus Dur dan Mega yang sudah *legitimated* lewat MPR dan DPR.

Apa tanggapan Anda tentang imbauan untuk menghindari tablig akbar yang dilakukan ormas Islam?

Yang melarang tablig akbar itu tidak mengerti konsekuensi logis. Otaknya tidak jalan. Sekarang begini, kalau nanti terjadi lagi di NTT yang umat Islam minoritas, di Ambon, di Halmahera, kemudian di tempat lain. Terus kita tidak boleh melakukan tablig akbar? Kita tidak boleh membalas? Tidak bisa seperti itu. Jadi, hal itu tetap situasional. Yang tidak boleh itu adalah bila tidak ada ujung pangkalnya tiba-tiba umat Islam melakukan tablig akbar, terus menyerang umat Kristen. Sebab, kita diajarkan: lakumdinukum waliyadin (bagimu agamamu, bagiku agamaku).

Lalu apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut?

Ini juga bukan persoalan SARA, tapi produk Soeharto yang terus dikembangkan. Perhatikan saja waktu Soeharto mau mundur, ia bertanya bagaimana kalau Soeharto mundur. Nanti ada disintegrasi, perpecahan, kerusuhan, dan lain-lain. Nah, sekarang apakah bukti dari omongan Soeharto? Gus Dur seharusnya cepat menyikapi, bagaimana mengadili Soeharto. Tapi, kok tidak berani. Saya khawatir, semuanya menjadi *psychology tricking forces*, penekanan secara psikologis, sehingga orang lupa pada masalah pengadilan terhadap Soeharto. □

Dicky Mailoa: "Pemerintah Harus Berani Ungkap Provokator"

Api kerusuhan telah merata di seluruh penjuru Maluku, menjelang pergantian tahun lalu. Pertikaian antara kelompok Islam dan Kristen semakin tajam sehingga menelan korban ribuan orang. Meski berbagai upaya perdamaian terus diupayakan, bara pertikaian terus saja menyala dan sulit dipadamkan. Bahkan, ada indikasi konflik di sana mulai menyebar ke daerah lain. Untuk mengetahui lebih jauh hal itu, wartawan FORUM Rusman Widodo mewawancarai Dicky Mailoa, Ketua Crisis Centre Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) untuk kasus Maluku. Berikut petikannya.

Mengapa konflik di Maluku bisa merembet ke Mataram dan daerah lain?

Ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada 19 Januari lalu dan mengakibatkan perluasan konflik. Kala itu, salah seorang penumpang kapal Pelni rute Jakarta-Surabaya-Ambon-Ujungpandang dibunuh. Pertikaian di Halmahera dapat terhindar jika masalahnya dilokalisir di daerah Kao dan Malifut saja. Hal itu bagian dari konflik Ambon dengan penebalan konflik agama. Masalah sebenarnya adalah pada seberapa segera masalah Maluku dihentikan. Ini tanggung jawab semua pihak. Proses penghentian kekerasan sangat lambat. Padahal, hal ini lebih penting dibandingkan mencari provokator masalah.

TNI menyebut jumlah korban yang jauh lebih sedikit dari data yang banyak beredar...

Saya kira itu cuma data yang diketahui TNI. Mereka tidak mengetahui data korban secara keseluruhan sehingga saya agak ragu dengan data tersebut. Kita mesti bertanya, sumber data TNI dari mana? Berdasarkan pengalaman empirik, data korban yang sesungguhnya lebih besar daripada yang disampaikan TNI. Militer tidak tahu persis jumlah korban yang langsung dimakamkan dalam satu lubang karena mesti dilakukan cepat sesuai dengan ketentuan agama.

Pendapat Anda terhadap pernyataan Amien Rais bahwa ia sudah tahu dalang kerusuhan Maluku?

Saya meragukan apakah benar Pak Amien punya data. Kalau benar ia punya data dan data itu bisa menopang pernyataannya sebagai Ketua MPR, tidak akan ada pernyataan yang bernada miring.

Maksudnya bernada miring bagaimana?

Pernyataan Amien Rais seperti di Monas. Kita bertanya-tanya, ia sedang bicara sebagai tokoh agama, tokoh politik golongan tertentu, atau sebagai pimpinan lembaga tertinggi negara? Seorang pimpinan lembaga tertinggi negara harus menunjukkan perhatiannya untuk menenangkan rakyat dan membuat rakyat cerdas melihat permasalahan. Tetapi, hal itu tidak sungguh-sungguh dilakukan Pak Amien karena tidak berdiri di atas data lengkap. Kalaupun ia mengaku punya data siapa dalang kerusuhan Maluku, masih perlu diuji kebenarannya.

DOK. PRIBADI

DICKY MAILOA. *Meragukan data TNI.*

Maksud Anda?

Ia harus berani menyampaikan data tersebut ke publik, transparanlah. Dari mana sumbernya, bagaimana ia mendapatkannya. Jangan mengemukakan sesuatu yang samar-samar ke rakyat yang tentunya selalu berhubungan dengan kepentingan yang menyamarkan.

Ada yang menduga, pihak Cendanalah dalangnya. Komentar Anda sendiri?

Memang, simpul Cendana masih dalam *grand theory* untuk membuat kerusuhan di beberapa daerah. Cendana juga bertaut dengan kepentingan elite militer dan kepentingan politik tertentu. Saya mendukung tinjauan yang mengatakan bahwa kerusuhan-kerusuhan lokal ini berkaitan dengan Cendana dalam satu konsep besar.

Menurut Anda, wilayah mana yang mungkin akan meledak setelah Mataram?

Saya kira Banjarmasin. Kemudian secara potensial adalah Irianjaya, Sumatra Barat (Padang), dan juga Jakarta sendiri. Kemarin yang sempat diguncang adalah Lampung dan Madura. Di sana sempat beredar selebaran gelap, tapi berhasil diklarifikasi dengan ulama-ulama Madura sehingga tidak meledak. Peluang juga terbuka untuk daerah Bali yang dekat dengan Lombok.

Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Maluku supaya tidak merembet lagi?

Pemerintah harus bertindak tegas terhadap para provokator dan berani tunjuk hidung jika sudah menemukan orangnya dan ada bukti. Aparat keamanan harus menemukan secepatnya pelaku di lapangan dan otak intelektualnya. Demikian pula dengan penegakan hukum. Juga butuh peran serta aktif dari masyarakat sendiri. ❑

Munir: "Jangan Tembak-Tembakan dengan Peluru Maluku"

M.RIZAL
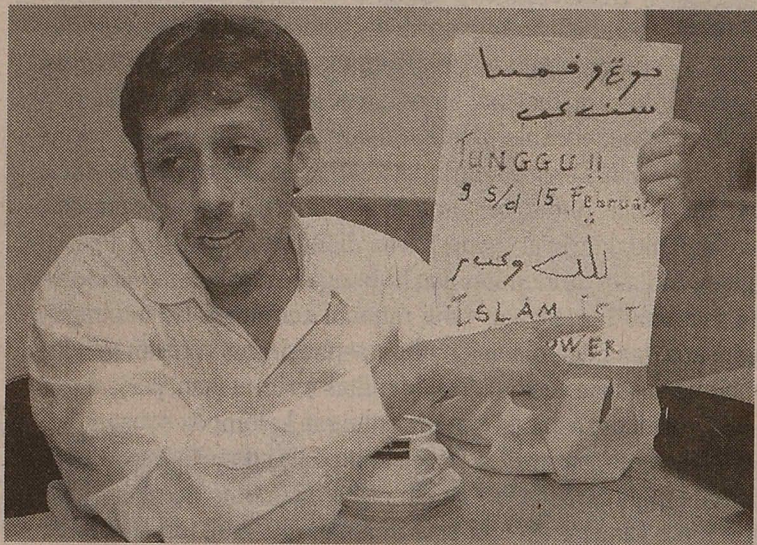
MUNIR. *Selebaran gelap laris.*

Beberapa waktu lalu, Munir mengirim hasil investigasi mengenai konflik Ambon kepada Presiden Gus Dur. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu juga memberikan berkas serupa kepada Wakil Presiden Megawati, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua DPR Akbar Tandjung. "Saya tidak mempublikasikan secara luas karena nanti dituduh bermanuver," kata arek Malang, Jawa Timur, ini. Selain itu, Munir juga tak mau mengklaim bahwa hasil investigasi setebal hampir 1.000 halaman folio itu yang paling benar.

Nah, menurut versi Kontras, mengapa konflik Maluku meletup? Munir membeberkan kepada FORUM. Berikut petikannya.

Mengapa Anda menyerahkan hasil investigasi Kontras kepada Gus Dur, Megawati, Amien Rais, dan Akbar Tanjung?

Kontras sebenarnya ingin mengoreksi empat orang Indonesia yang bertanggung jawab untuk kasus Ambon itu. Kami ingin mereka jangan sampai "tembak-tembakan" dengan peluru Maluku. Sebab, sekarang emosi terhadap Maluku telah menjadi alat tembak-menembak di antara mereka. Ini enggak benar. Untuk menghadapi kasus Ambon, empat tokoh ini harus kompak. Panglima TNI membutuhkan *back up* besar dari mereka.

Apa sebetulnya yang menyebabkan konflik SARA itu?

Di Ambon, secara geografis ada sekat-sekat perkampungan yang dibangun berdasarkan agama. Kalau ada warga perkampungan Islam yang masuk Kristen, ya dia harus pindah. Terjadilah konsentrasi penduduk berdasarkan ikatan agama. Sehingga, dengan gampang, terjadi perang antarumat dengan bendera agama. Itu problemnya.

Penyebab lain?

Di luar itu, orang Maluku kan sebenarnya punya karakter sebagai pemalas karena mereka dididik Belanda. Kalangan Kristen maupun Islam sebenarnya sama-sama terkontaminasi. Ada kecenderungan mereka tidak mau kerja kasar. Nah, kaum pendatang mengambil pekerjaan-pekerjaan kasar yang tidak diambil orang Ambon. Kemudian, komposisi jumlah masyarakat berdasarkan agama mengalami naik-turun. Dulu, kalangan Kristen menjadi mayoritas di wilayah Ambon. Tetapi. setelah terjadi proses mobilitas penduduk, jumlah orang Islam naik. Nah, di Ambon, sebab awalnya itu dobel: sentimen agama dan sentimen ras.

Konflik itu kan tidak mungkin meledak kalau tidak ada yang membakar?

Begini. Stimulan yang ada di Ambon muncul juga di wilayah lain. Tapi, tidak semua wilayah meledak. Di Ambon telah tersedia sekian juta bahan bakar. Daya tahan harmoni masyarakat semakin lama semakin melemah. Kronologi kejadian sendiri diawali dengan *clash* fisik antara mahasiswa dengan aparat Korem.

Peristiwa Ketapang di Jakarta?

Peristiwa Ketapang itu adalah pendorong percepatan. Jadi, yang terjadi di Ambon, Kelompok Islam menuduh gerakan mahasiswa di sana dipelopori kampus-kampus Kristen. Tuduhannya, mereka ingin tentara keluar agar Republik Maluku Selatan (RMS) menjadi kuat. Sementara, kelompok Kristen menuduh kelompok Islam ingin mengganti Danrem sebagai *back up* mereka. Semula, militer memang menjadi persoalan. Tapi, sekarang kan menjadi rebutan. Sejak itu, konflik vertikal berhenti total. Semua beralih menjadi ketegangan antarmasyarakat. Nah, di dalam situasi masyarakat yang sudah tegang, selebaran-selebaran gelap menjadi laris.

Adakah "tangan-tangan" dari Jakarta yang bermain?

Saya enggak mau menyebut nama. Misalnya di militer ada yang bermain. Tapi itu tidak institusi TNI. Gerombolan saja. Dulu, Mei 1999, saya pernah ketemu Wiranto dan saya ingatkan. Saya bilang aparat Anda itu ikut bermain di kedua belah pihak. Kata Wiranto, "Saya memang tahu itu dan itu sudah saya laporkan pada Habibie." Tapi, uniknya, peringatan itu enggak pernah ada langkah konkret pada waktu itu. Makanya, Wiranto harus ditanya. Bukan menuduh, ya.

Setelah konflik terjadi setahun lebih, ada yang mengusulkan pembentukan garis demarkasi seperti Lebanon...

Hal yang harus didemarkasi pertama kali adalah organisasi kekerasannya. Organisasi itulah yang masih memegang kendali. Hal yang kami desak pada pemerintah adalah membuat desain jangka panjang. Yang saya maksud, bagaimana pemerintah bisa mengambil alih kepemimpinan perang. Kemudian membantu pemimpin sosial lama di masyarakat untuk bekerja kembali. Dengan begitu, rekonsiliasi baru bisa jalan. □

Tragedi Kemanusiaan

Imam B. Prasodjo
Dosen sosiologi FISIP UI
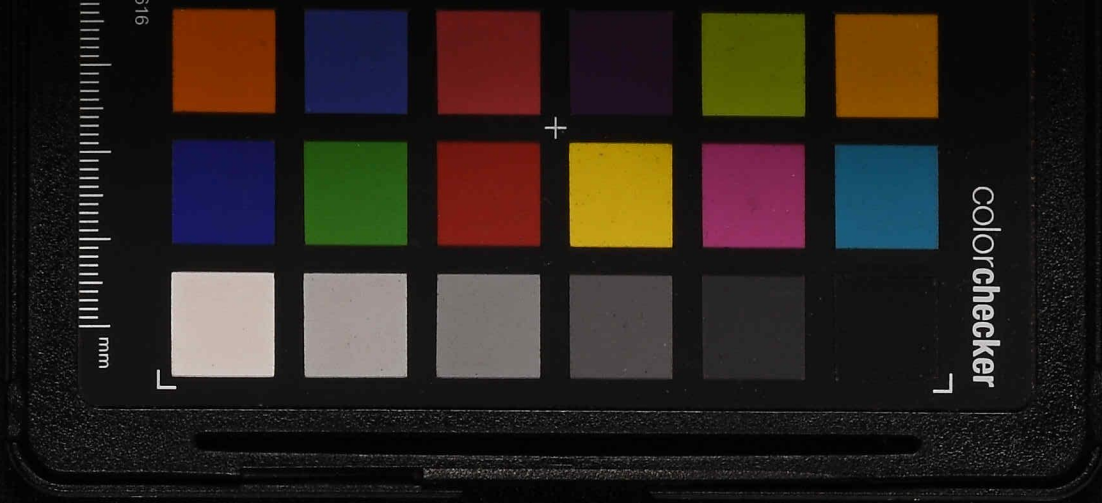
Di hari Minggu, 17 Mei 1992, Zlata Filipovic, 13 tahun, remaja Sarajevo, Bosnia, menggoreskan pena dalam buku hariannya: "Sekarang pastilah sudah, pertikaian telah menghentikan belajar kami, menutup sekolah kami, dan mengirimkan kami semua ke tempat pengungsian, bukan ke kelas." Dalam buku hariannya, Zlata bersaksi bahwa "perang bukanlah lelucon. Perang benar-benar menghancurkan, membunuh, membakar, memisahkan, dan membawa kepedihan" (*Zlata's Diary*, 1994).

Kini, tak disangka, kepedihan Zlata dialami pula oleh ratusan ribu anak dan remaja Indonesia. Saya pun teringat wajah penuh kepedihan seorang anak muda di pengungsian Bau-Bau, Buton, yang saya jumpai Maret tahun lalu, yang termenung kosong mengingat ayah, ibu, dan empat kakaknya mati terbunuh dalam tragedi Idul Fitri di Ambon. Kini, pertikaian antarkelompok pun melebar.

Wajah-wajah sengsara, apa pun agama dan suku mereka, tersebar di kemah-kemah pengungsian.

Apa sebenarnya yang tengah terjadi di negeri ini? Berbagai kelompok yang sebelumnya hidup berdampingan tiba-tiba agresif, penuh kebencian, bersemangat saling membunuh. Di tengah kita membutuhkan penjelasan yang memadai, kita seperti memasuki wilayah gelap karena studi tentang hubungan antarkelompok (etnik, ras, agama, dan kelas) di Indonesia memang tidak cukup. Selama Orde Baru, walau dalam forum ilmiah sekalipun, membahas masalah SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dibatasi karena dikhawatirkan akan membahayakan kesatuan bangsa. Akibatnya, tatkala bangsa ini terkena musibah konflik horizontal bertubi-tubi, pemahaman yang baik sulit didapat.

Namun, untuk sementara, dapat dikemukakan bahwa perubahan sosial-ekonomi yang terjadi beberapa dasawarsa ini jelas menghasilkan ketimpangan tajam di antara berbagai kelompok sosial. Kekuasaan yang sentralistik telah menghambat kelangsungan distribusi yang lebih merata akan sumber-sumber ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Potensi ketegangan antarkelompok menguat tatkala satu kelompok secara mencolok lebih diuntungkan dibanding kelompok lain. Ketika garis batas antarkelompok menjadi semakin tegas akibat berbagai sekat yang terkonsolidasi menjadi satu (baik ekonomi, etnis, agama, atau letak geografis domisili setiap kelompok), masyarakat kita yang majemuk ini menjadi terfragmentasi secara keras. Dinding pemisah antara "kita" dan "mereka" menjadi semakin kukuh akibat kelangkaan *cross-cutting socio-economic linkages*.

Tanpa disadari sepenuhnya, fragmentasi sosial yang terjadi ternyata menjadikan masyarakat kita sangat rentan. Bangunan masyarakat kita tampak benar-benar rapuh karena ternyata kelompok-kelompok sosial dominan yang tumbuh saat ini masih banyak yang berbasis ikatan-ikatan solidaritas yang bersifat mekanik (emosional), bukan solidaritas organik (fungsional/profesional). Kita pun melihat ikatan-ikatan kelompok atas dasar suku, ras, dan agama tampak semakin mengkristal. Dalam keadaan semacam ini, bila terjadi gesekan-gesekan antarkelompok, otomatis wilayah konflik akan mudah meluas, menjalar ke mana-mana.
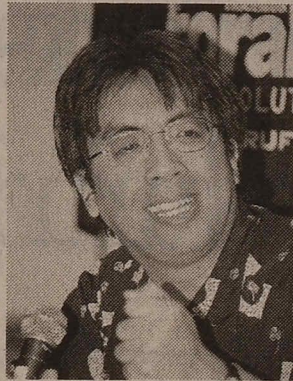
Dalam proses perubahan masyarakat Indonesia, ketegangan-ketegangan horizontal antarkelompok memang selalu terjadi. Namun, sejak reformasi, tampak secara kualitatif terjadi masalah baru, baik akibat proses redefinisi identitas maupun hubungan antarkelompok. Dengan jatuhnya kekuasaan otoriter Orde Baru, kebijakan publik untuk pertama kalinya harus dirumuskan atas dasar "kehendak rakyat" yang harus dinegosiasikan atau dipertarungkan. Akibatnya, identitas dan hubungan antarkelompok mengalami masalah. Pertanyaan yang muncul kemudian berhubungan dengan apa dan bagaimana identitas, aspirasi, dan kepentingan kelompok harus dirumuskan. Saat identitas terumuskan, perjuangan untuk menjadikan aspirasi dan kepentingan kelompok sebagai "kehendak bersama" menjadi tak terelakkan. Bila intensitas persaingan antarkelompok berjalan jauh lebih cepat dibanding pembangunan aturan main yang disepakati bersama, tak mustahil terjadi kesemrawutan atau bahkan dapat mengarah pada *chaos*.

Namun, penjelasan ini belum menyentuh jawaban atas pertanyaan: Mengapa suatu kelompok di kepulauan tertentu di negeri ini dapat melakukan pembunuhan massal (*genocide*) terhadap kelompok lain? Secara teoretis, hal ini hanya mungkin terjadi saat posisi kelompok pelaku dan kelompok korban berada dalam posisi tak seimbang (lengah), dan pelaku memiliki dorongan kuat akibat ada anggapan bahwa korbannya *"something less than fully human"*. Frank Chalk dan Kurt Jonasson (1990) mensinyalir bahwa pembunuhan massal dapat terjadi bila, pertama, didahului kampanye dehumanisasi terhadap korban, misalnya kelompok korban dianggap tak berharga, membahayakan manusia lain, pendosa bejat, dan lain-lain; dan, kedua, adanya otoritas yang terpusat. Bila hal ini benar, apakah yang sebenarnya terjadi di wilayah seperti Halmahera atau Sambas, yang jelas-jelas mencuatkan tragedi kemanusiaan berupa pembunuhan massal yang luar biasa sadis?

Pertanyaan seperti ini terus berkecamuk. Sementara itu, negeri kita kini benar-benar tengah dihadapkan pada persimpangan jalan. Apakah kita akan selamat, ataukah kita akan bunuh diri bersama, masih menjadi tanda tanya besar. Yang jelas, kini terlalu banyak penderitaan sebagaimana dialami Zlata di Bosnia sana, tapi tak terekam dalam catatan harian. Abad ini, agaknya merupakan abad pertarungan antara amarah dan hati-nurani. □
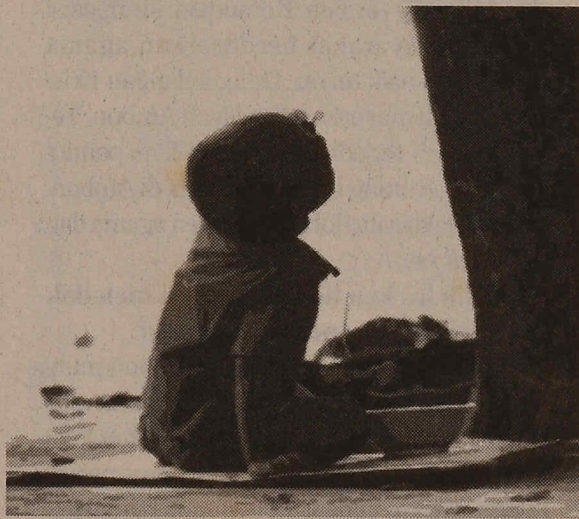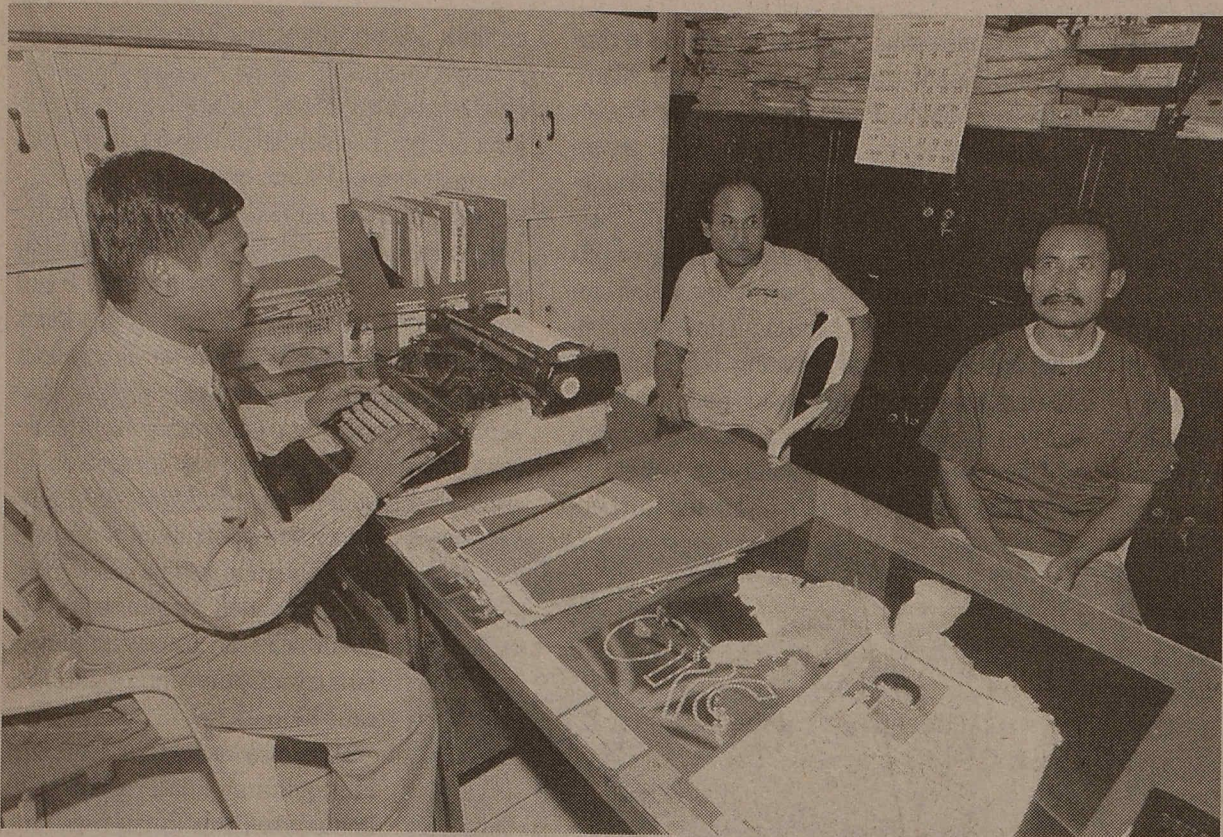
DOK SINAR PAGI

AGUS DAN SAMHUDI DI KANTOR POLISI. *Ingin punya anak sendiri.*

Mereka Diboyong ke Mranggen

Belasan bocah cilik di Jakarta diculik dua kakak beradik separuh baya. Benarkah si penculik mengidap pedofilia?

Lebaran kali ini sungguh membawa berkah bagi Agus Salim, 45 tahun. Pedagang jam tangan di Pasar Senen, Jakarta Pusat, itu tak kuasa menahan tangisnya saat anak ketiganya, Budiman Santoso, 9 tahun, tiba-tiba pulang ke rumah pada hari kedua Idul Fitri lalu. Padahal, sudah sebulan lamanya, persisnya 4 Desember 1999, Budi—begitu Budiman sering dipanggil—hilang bak ditelan bumi.

Selain Agus Salim, kegembiraan yang tak terkatakan juga menyeruak di beberapa rumah keluarga lainnya. Misalnya, di rumah keluarga Fauzi Azis Hutagalung, 53 tahun, di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Selasa malam, 18 Januari silam, Fauzi juga mendapatkan kembali anak perempuannya, Rona A. Nugraini, 14 tahun. Mantan pegawai negeri sipil di Kodam Bukit Barisan itu tak kuat menahan tangisnya saat melihat anak ketiganya yang hilang sejak berusia sembilan tahun itu berdiri di ambang pintu. Sedangkan Rona terlihat kaku karena nyaris tak mengenal lagi kedua orang tuanya.

Budi dan Rona hanya dua dari sembilan anak—setidaknya sebanyak itulah yang diakui—diculik kakak beradik Samhudi, 55 tahun, dan Agus Surya, 50 tahun, sejak 1992. Selain mereka, ada tujuh bocah lainnya yang telah diselamatkan polisi dari "pemeliharaan" Agus dan Samhudi. Di antaranya, Geri Purba, Kusnadi, Opik, Yudi, Muslimin, Andre, dan Dede. Semua berusia antara 8-16 tahun. Dari mereka, polisi baru berhasil mengembalikan tujuh anak ke keluarganya masing-masing. Sedangkan dua lainnya, yakni Opik dan Muslimin, hingga akhir pekan silam masih berkeliaran sembari berjualan rokok asongan di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur.

Aksi penculikan yang telah berlangsung selama sembilan tahun itu terbongkar pada hari pertama Idul Fitri 8 Januari lalu. Kala itu, secara tak sengaja, salah seorang tetangga Budiman, Rita, 15 tahun, melihat Budi sedang mengasong rokok dan permen di Terminal Bus Pulogadung. Ketika melihat Budi, Rita langsung memanggilnya dan Budi pun sempat menoleh. Tapi, karena buru-buru hendak bersilaturahmi ke keluarganya, Rita tak mengajak Budi pulang. Baru setelah kembali ke rumahnya di kawasan Senen, Rita mengadu ke bibi Budi, Leni, bahwa ia melihat Budi sedang berjualan rokok dan permen di Pulogadung. Langsung saja Leni mengajak Rita bersama-sama menjemput Budi.

Benar saja, setiba di terminal, Leni dan Rita melihat Budi sedang berjualan rokok, ditemani seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Agus Surya. Di saat Agus lengah, Leni langsung meraup kemenakannya dan membawanya pulang dengan taksi. Tiba di rumah, baru Budi menceritakan ke mana selama sebulan belakangan ini ia menghilang. Berbekal penuturan Budi itu, sang ayah, Agus Salim, pun melapor ke polisi. Polisi lalu menangkap Agus dan istrinya, Irah, dan kakaknya, Samhudi, di Desa Mranggen, Salaman, Magelang, Jawa Tengah, 18 Januari lalu. Dan, sejak itulah rahasia penculikan yang dilakukan kakak beradik tersebut terbongkar.

Kepada polisi, Agus mengaku menculik anak-anak itu karena ia dan abangnya samasama tak dikaruniai anak, kendati sudah menikah selama belasan tahun. Karena itu, sejak 1992, ia mengajak anak-anak yang ia temui di Pasar Senen dan Terminal Pulogadung untuk dirawat dan disekolahkan abangnya di Desa Mranggen, Magelang.

Dan, memang, seperti diakui Budi kepada FORUM, ia diajak pergi oleh Agus sewaktu sedang bermain dingdong usai sekolah di kawasan Senen, 7 Desember 1999. Ia diajak pergi ke Pulogadung setelah diiming-imingi permen dan uang Rp 1.000 oleh Agus (lihat: *Cukup dengan Permen dan Seribu Perak*). Dari Terminal Pulogadung, kata Budi, ia dan Agus naik bus Handoyo ke Mranggen, Magelang.

Menurut Budi pula, di Mranggen, ia lantas

dititipkan di rumah Samhudi. Sehari-hari, ia ikut bangun makan sahur dan di pagi hari ia disuruh mencabuti rumput di halaman dan mencuci piring dan baju. Di sana, kata Budi, juga ada anak lelaki lain, yakni Geri, yang sudah dua tahun tinggal di Mranggen. Dan, seperti Budi, Geri juga diculik Agus sewaktu berkeliaran di Pasar Senen.

Sebulan kemudian, tepatnya sehari menjelang Lebaran, Agus mengajak Budi kembali ke Jakarta. Tapi, Agus bukan mengantarkan Budi pulang, malah menyuruh bocah cilik itu berjualan rokok bersamanya di terminal Pulogadung. Nah, selama tinggal bersama Agus dan Samhudi, Budi mengaku mendapat perlakuan yang baik. Namun, kata Budi, ia juga pernah disakiti Agus, yang mencongkel salah satu kuku jari kaki kirinya, tanpa sebab yang jelas.

Bukan itu saja. Budi juga mengaku pernah disuruh Agus minum air kencing. Dan, yang tak diketahui Budi apa alasannya, Agus juga suka menciumi kemaluan sang bocah. Pengakuan Budi yang terakhir itulah yang kemudian membuat polisi mencurigai Agus dan Samhudi mengidap pedofilia alias kegemaran seksual terhadap anak-anak. Sampai Kamis pekan silam, Kapolres Jakarta Pusat, Letkol Timur Pradopo, mengaku masih menantikan hasil pemeriksaan kejiwaan Agus dan Samhudi dari psikiater.

Yang jadi soal, apakah tindakan Agus dan Samhudi memelihara dan menyekolahkan anak-anak itu bisa digolongkan tindakan penculikan? Menurut kriminolog UI, Adrianus Meliala, jawabannya jelas: ya. Sebab, "Kendati korban tak sadar bahwa ia diculik, sesungguhnya unsur kemerdekaannya sudah hilang," katanya. Dan salah satu ciri korban penculikan adalah hilangnya kemerdekaannya sebagai manusia. Karena itu, kata Adrianus, jika terbukti, Agus dan Samhudi tetap bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana tentang penghilangan kemerdekaan orang lain.

Apa pun alasan Agus dan Samhudi melakukan penculikan, semestinya mereka memang pantas diganjar hukuman yang berat. Tentu saja, jika pengadilan bisa membuktikan kesalahan mereka. Sebab, selain meninggalkan penderitaan pada sang anak, kedua laki-laki separuh baya itu juga telah menyengsarakan para orang tua anak-anak yang mereka culik. Ayah Budi, Agus Salim, misalnya, sejak anaknya hilang terpaksa menutup dagangannya karena sibuk mencari sang anak. Jutaan rupiah telah dihabiskan untuk membayar jasa paranormal dan ongkos ke sana-kemari.

Malah, ayah Rona, Fauzi Azis Hutagalung, telah menjelajah hampir seluruh Pulau Jawa untuk mencari putri kesayangannya sejak tujuh tahun lalu. Tak terbilang harta dan tenaga yang telah ia keluarkan. Maklum, Rona adalah anak perempuan pertama Fauzi.

Munawar Chalil

M. RIZAL
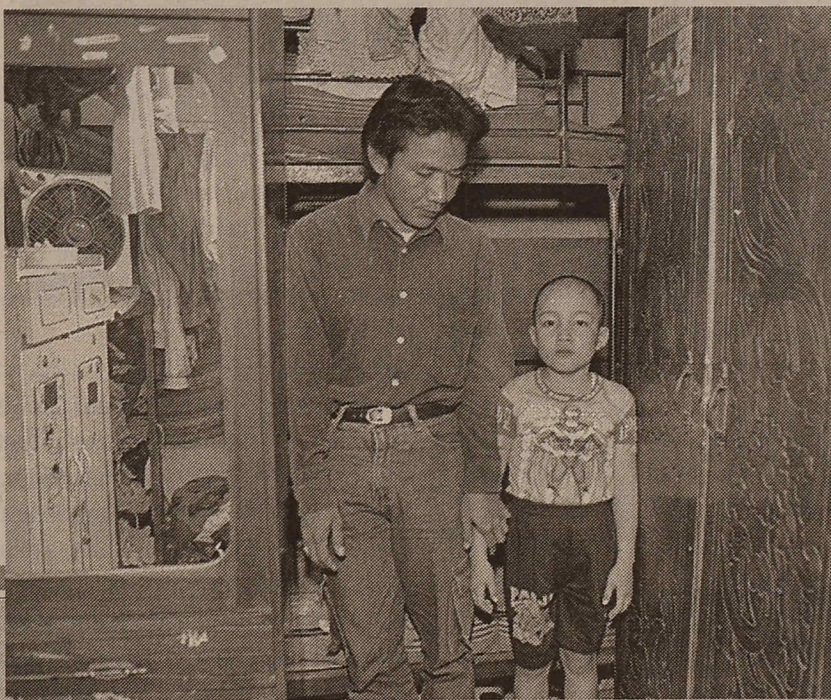
BUDI DAN AYAHNYA. *Sudah lupa alamat rumah.*

Cukup dengan Permen dan Seribu Perak

Kesan pertama melihat Budi, ternyata ia anak yang menyenangkan, lucu, penurut, dan pemberani. Sore itu Budi memakai celana pendek dan kaus oblong warna putih yang tampak berdebu, tanpa alas kaki duduk bebas di kursi kayu.

Budi tampak santai dan tidak takut menghadapi orang asing. Bahkan, saat FORUM mengeluarkan *tape* rekaman mini, ia langsung memegangnya. Ia merasa aneh dan baru sekali ini melihat *tape* seperti itu.

Berikut petikan percakapan Rusman Widodo dari FORUM dengan Budi.

Kapan bertemu Pak Agus?

Sewaktu bermain dingdong. Saya bertemu Pak Agus dan dikasih permen serta uang seribu rupiah. Terus diajak naik bus 52 (jurusan Pulogadung).

Dari Pulogadung terus ke mana?

Ke Mranggen naik bus Handoyo.

Budi tidak kangen Bapak di rumah?

Kangen.

Geri berasal dari mana?

Senen.

Dulu berangkatnya bersama-sama Budi?

Tidak.

Berapa lama Geri di sana?

Sudah dua tahun.

Sewaktu di Pulogadung, kenapa Budi tidak ingin balik ke rumah?

Sudah lupa, tidak tahu jalannya.

Pernah disakiti Pak Agus?

Iya. Kaki Budi dicongkel [maksudnya salah satu kuku jari kaki kirinya dicabut].

Kenapa kukunya dicongkel?

Gara-gara.... Budi tidak salah apa-apa, kuku Budi dicongkel. □

Terus, apa yang Budi lakukan?

Berdoa.

Minta *dipulangin* tidak?

[Diam beberapa saat] Pak Agus, Budi mau pulang. Tidak boleh ke Senen, nanti kamu kelihatan orang, nanti dikira diculik, kata Pak Agus.

Di sana ada teman Budi?

Cuma satu, namanya Geri.

TAWURAN

Sampai Kapan Mereka Terus Berkelahi?

Perkelahian antarkelompok pemuda di Medan, Sumatra Utara, terus berlanjut. Anggota Brimob Polri juga sempat jadi korban dalam pertarungan klasik itu.

Tahun telah berganti. Tapi, perkelahian antarkelompok pemuda di Medan, Sumatra Utara, tak kunjung berhenti. Malah, pertarungan klasik antara para anggota Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Pemuda Pancasila (PP) di sana kian hari kian menggila. Terakhir, Kamis malam, 13 Januari lalu, "pertempuran" kembali meletus di kawasan Delitua, Medan.

Memang, tak ada korban jiwa dalam tawuran massal itu. Tapi, sebuah rumah penduduk sempat terbakar dan beberapa rumah lainnya rusak berat. Menurut polisi, perkelahian itu terjadi setelah salah seorang pemuda warga Delitua, Sugianto, 22 tahun, babak belur digimbal anak-anak muda di kawasan Marindal, Medan. Tapi, Sugianto, yang anggota IPK itu, lolos dari maut dan mengadu ke teman-temannya di Simpang Stasiun Delitua.

Tak lama kemudian, anak-anak PP dari Marindal menyusul, menguber Sugianto ke Delitua. Melihat rombongan pemuda bersenjata kelewang menyerbu kampungnya, warga Simpang Stasiun kontan mengurung diri di dalam rumah. Sedangkan sebagian pemuda yang berada di kawasan itu langsung kabur menyelamatkan diri. Gerombolan pemuda yang menyerbu kemudian melampiaskan emosinya dengan merusak kaca-kaca jendela dan melempari rumah-rumah penduduk.

Beberapa jam sebelumnya, perkelahian massal antara IPK dan PP juga pecah di kawasan Pasar V, Jalan Pancing, Medan. Dalam pertikaian itu, salah seorang pemuda, Saur Sinaga, 38, kritis setelah terkena bacokan senjata tajam. Konon, peperangan itu muncul karena kedua organisasi berpengaruh itu memperebutkan lahan parkir dan uang setoran dari para sopir angkutan kota yang melintas di Jalan Williem Iskandar.

Semestinya, IPK dan PP tak perlu saling bunuh. Soalnya, selain dikenal "dekat" dengan Partai Golkar, keduanya juga tergolong "saudara". Maklum, pendiri IPK, Olo Panggabean, adalah bekas anggota PP, yang keluar dari organisasi itu pada awal 1980-an. Tapi, sejak saat itu pula, kedua organisasi itu terus berseteru, hingga korban di kedua pihak berjatuhan.

Pertarungan fisik antara IPK dan PP kembali marak—dan berlanjut hingga kini—sejak awal Desember tahun silam. Dan, seperti biasa, perkelahian itu pecah karena mereka saling berebut lahan, baik lahan parkir maupun "jasa keamanan" dari para pedagang, pemilik toko, tempat hiburan, dan terminal bus.

Kendati sudah merenggut beberapa korban jiwa, perkelahian iu terus saja berlanjut. Kedua kelompok itu terus bersiaga dan melakukan razia di jalan-jalan untuk mencari musuhnya. Bahkan, sempat pula pihak PP menuding polisi berpihak kepada lawannya, IPK.

Belakangan, pertarungan antara IPK dan PP justru meluas dan melibatkan beberapa oknum Brimob. Selasa dini hari, 28 Desember 1999, seorang anggota Brimob Polda Sumatra Utara, Serda Apriandi, 22 tahun, dianiaya dan ditombak perutnya oleh sekelompok anggota IPK, saat hendak kembali ke baraknya di kawasan Padang Bulan. Ketika melintas di Jalan Cirebon, ia dicegat sekelompok anggota IPK yang tengah menggelar *sweeping*, mencari anggota PP. Tapi, meski mengaku sebagai anggota Polri, Apriandi tetap dihajar hingga ususnya terburai.

Menjelang siang, rekan-rekan Apriandi menuntut balas. Beberapa angota Brimob menenteng senapan serbu dan menembaki "gedung putih", rumah milik Bos IPK, Olo Panggabean, di kawasan Sekip, Medan, yang juga menjadi "markas besar" IPK. Tak ada korban jiwa dalam aksi koboi-koboian itu, kendati dinding marmer rumah Olo sempat dihiasi lubang peluru. Belum puas juga, Selasa malam, beberapa rekan Apriandi kembali menyerbu kantor IPK di kawasan hiburan malam, Petisah, Medan, hingga kupak-kapik.

Aksi para oknum Brimob itu jelas mengagetkan warga Medan. Soalnya, baru kali itulah ada orang yang berani secara terang-terangan menantang Olo Panggabean dan IPK-nya. Dan memang, menurut seorang bintara Brimob kepada FORUM, aksi mereka hari itu merupakan puncak kejengkelan dan kemarahan kepada IPK yang seolah-olah kebal hukum.

Polisi yang tak mau disebut namanya itu menyebut, sebelum rekannya menjadi korban, anak-anak IPK juga pernah membunuh seorang anggota batalion kavaleri di Padang Bulan. Selain itu, beberapa anggota IPK juga pernah membacok dua anggota TNI AD dan seorang anggota Polisi Militer. Tapi, "Tak seorang pun anak IPK yang diajukan ke pengadilan," katanya kesal.

Namun, Kadispen Polda Sumatra Utara, Letkol Amrin Karim, membantah aksi penyerbuan rumah Olo Panggabean itu sebagai "perintah resmi". "Itu cuma aksi solidaritas mereka kepada temannya," kata Amrin kepada Emil W. Aulia dari FORUM. Dan, menurut Amrin, para prajurit Brimob yang melanggar disiplin itu sudah diberi sanksi.

Ketua IPK Medan, Moses Tambunan, mengaku amat menyesalkan aksi penganiayaan yang dilakukan anak buahnya. Karena itulah, kata Moses, ia telah menyerahkan dua anggota IPK yang diduga sebagai pelaku penganiayaan Apriandi ke polisi. Oke. Lantas, bagaimana dengan perang antara IPK dan PP?

Munawar Chalil

DUKUN SANTET

Isu Beredar, Malang Berdebar-debar

Di Malang, sejumlah orang tewas lantaran dituduh sebagai dukun santet. Beberapa di antaranya guru mengaji. Lagi-lagi, aparat diduga terlibat.

Rabu pagi, 19 Januari lalu, Mapolres Malang didatangi banyak "tamu". Jangan kaget. Mereka yang memadati lapangan tenis di dalam Mapolres itu tak lain adalah para "tersangka" pembunuhan dari Desa Pringgodani, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. "Kami bertekad untuk bersama-sama menyerahkan diri kepada polisi," kata Marsuli, *jagabaya* Pringgodani. Sekitar 200 warga itu menyambangi Mapolres Malang seusai membunuh Ny. Martiyah, 45 tahun, warga Pringgodani yang dituduh berpraktek sebagai dukun santet.

Peristiwa itu terjadi Selasa malam, 18 Januari silam, saat korban tengah bercengkerama dengan suaminya, Irsyad, dan dua anaknya, Yani dan Mul, di ruang tamu. Keasyikan keluarga ini tiba-tiba terusik dengan kedatangan sejumlah warga. Melihat bahaya mengancam, Irsyad sempat melarikan diri. Tapi, tak demikian dengan sang istri. Massa langsung menggiring perempuan itu ke luar. Kejadian berikutnya sungguh mengenaskan: Orang-orang itu melempar-lemparkan tubuh Martiyah ke udara sampai ia jatuh pingsan. Mereka lalu membawa Martiyah ke kompleks pemakaman, tak jauh dari rumah korban. Lalu, masya Allah, tubuh Martiyah digantung di sebatang pohon.

Menurut Marsuli, semula warga ingin menyerahkan Martiyah kepada polisi. Tapi, saat digelandang dari rumahnya, Martiyah sempat meminta maaf dan mengakui bahwa selama ini telah menyantet 19 warga desa. "Pengakuan inilah yang membuat warga marah," kata Marsuli. Kapolres Malang Letkol Drs. Herry Prastowo menyatakan, sebelum Idul Fitri, warga sudah mengancam suami-istri itu. Karena itu, mereka sempat mengungsi selama dua minggu. "Tapi, tanpa memberi tahu kami, mereka kembali," kata Herry.

M TOHA

BEBERAPA TERSANGKA KASUS SANTET, MALANG. *Sudah ngawur sekali.*

Martiyah adalah korban kesepuluh sejak pembunuhan dengan isu dukun santet merebak di daerah Malang Selatan. Kasus pertama terjadi di Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading, 7 November 1999. Korbannya adalah Mbok Armi, 70 tahun. Korban kedua dengan isu serupa menimpa Muki, 70 tahun, warga Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Seperti juga Mbok Armi, Muki tewas karena dibantai massa. Sebelumnya, kakek malang ini memang dituding sebagai dukun santet. Soalnya, menurut warga setempat, setiap warga desa yang berurusan dengan Muki, esok harinya dapat dipastikan sakit atau langsung meninggal dunia.

Selanjutnya, 19 Desember 1999, pembunuhan terjadi lagi di Desa Petuk Rejo yang masih di wilayah Kalipare, yang menewaskan Sugito dan Siamah. Pada 21 Desember, aksi pembunuhan terjadi lagi. Kali ini, sang korban adalah Munakip, 70 tahun, warga Kalipare. "Sehari-hari, almarhum adalah guru mengaji dan petani," kata H. Hanif, Ketua GP Ansor Malang. Tiga hari berikutnya, korbannya adalah seorang pembuat genting yang juga guru mengaji bernama Munatip, 64 tahun. Ia diculik ketika sedang melakukan tadarus di surau dekat rumahnya.

Dalam keterangannya di Mapolres Malang, Ny. Kasmi, istri korban, mengungkapkan, para pelaku mengenakan tutup kepala ala ninja. "Mereka masuk beberapa saat setelah kami melakukan tadarus. Ketika masuk, mereka sudah menghunus pedang, kampak, bambu, dan senjata lainnya," katanya. Dan, segalanya berlangsung sangat cepat. Kasmi dan keluarganya hanya bisa menonton sampai akhirnya Munatip tewas. Salah seorang pembunuhnya dikenali Kasmi sebagai Tukidi, warga setempat. Tapi, ketika polisi menggerebek rumahnya, ia sudah tak ada. "Ini sudah *ngawur* sekali. Masak guru mengaji dituding sebagai dukun santet," ujar Hanif.

Menurut Agus Yunianto dari LBH Surabaya Pos Malang, daftar nama para dukun santet itu diduga memang sudah beredar di masyarakat. Konon, daftar itu diperoleh dari Serka Djuari, seorang anggota Koramil Kalipare. Tapi, kata Agus, "Pemeriksaan yang dilakukan Denpom V/3 Malang dan Pomdam Brawijaya hingga sekarang tidak jelas kelanjutannya," ujar Agus.

Mengenai daftar itu, Herry Prastowo berkomentar, "Saya sendiri enggak tahu.. Tapi, saya akan cek." Kini, 49 orang menjadi tersangka. Nasib 200 "tersangka" yang menyerahkan diri itu belum jelas. Tapi, yang pasti, kata Ketua Banser Malang Abdussommad, "Mereka disuruh pulang setelah mendapatkan penjelasan dari Kapolwil Malang."

Jangan-jangan kasusnya akan kembali menguap seperti peristiwa serupa sebelumnya.

Yus Ariyanto dan M. Toha (Surabaya)

Lagi, Penjahat Dibakar Massa

AKSI menghakimi penjahat dengan cara membakar hidup-hidup tampaknya sudah menjadi mode. Ratusan tukang becak di Cilacap, Jawa Tengah, membakar hidup-hidup Latun, 35 tahun, Rabu petang, 19 Januari lalu. Warga Desa Ayam Alas, Kecamatan Kroya, Cilacap, itu dikeroyok karena kerap membuat onar di kawasan Kroya.

Kendati dikenal sebagai pencopet, Latun tidak terbunuh karena profesinya itu. Tapi, hanya gara-gara "sepele". Ceritanya, sehari sebelumnya, becak yang sedang ditumpangi Latun ditabrak seorang pengendara sepeda. Si penabrak dan becak yang dinaiki latun terguling. Latun tak menerima itu. Ia lantas memaki-maki si tukang becak dan menganiaya pengendara sepeda hingga babak belur. Esoknya, ratusan tukang becak mencegat dan menangkap Latun, lalu menghajarnya. Dalam kondisi setengah mati, ia sempat dibawa ke puskesmas untuk diobati. Ketika luka-lukanya sedang dijahit itulah, orang-orang menyerbu dan menarik Latun keluar dan membakarnya hidup-hidup di halaman puskesmas. □

Wartawan Gadungan Dihukum

RABU, 19 Januari lalu, majelis hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, akhirnya memvonis sembilan bulan penjara untuk I Made Govinda, 32 tahun. Lelaki berkulit legam itu dinyatakan bersalah karena menipu Ny. Dhani dengan mengaku sebagai wartawan *Republika*. Seperti diberitakan *Republika* sebelumnya, Govinda juga pernah dipenjara selama empat bulan karena kasus penipuan.

Dalam persidangan terungkap, sekitar medio 1999, Govinda mendatangi Ny. Dhani dengan mengaku sebagai wartawan *Republika*. Govinda mengaku bisa menyelesaikan masalah Ny. Dhani, yang kebetulan sedang bersengketa dengan sebuah bank di pengadilan. Untuk itu, Govinda meminta Ny. Dhani yang bekerja sebagai guru itu menyediakan dana Rp 2 juta plus beberapa gram perhiasan emas. Tapi, setelah empat bulan, Govinda tak kunjung muncul. Ny. Dhani pun mencarinya ke Kantor Biro *Republika* di Bandung. Dan, tersadarlah Ny. Dhani bahwa Govinda adalah wartawan gadungan. Govinda sendiri justru ditangkap wartawan *Republika* yang asli, Djoko Suceno, saat tengah berkeliaran di Kantor Wali Kota Bandung, Oktober silam. □

Penipu Gendam Kembali Beraksi

DUA laki-laki yang berbicara logat Malaysia berhasil menipu Ny. Nina Hartini, 60 tahun, sebesar Rp 124 juta. Ny. Nina yang tinggal di Jalan Kartini, Jakarta Pusat, bertemu kedua laki-laki perlente yang mengaku dari Malaysia itu pada Selasa, 18 Januari lalu, di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Saat itu, mereka menegur Ny. Nina seraya mengatakan bahwa mereka kesulitan menukarkan mata uang dolar Bolivia yang mereka miliki dengan rupiah. Padahal, uang itu, kata mereka, hendak disumbangkan ke Gereja Katedral Jakarta. Karena itu, mereka meminta Ny. Nina bersedia menukarkan berapa pun uang rupiah miliknya, dengan dolar Bolivia yang disebut senilai sekitar Rp 200 juta itu.

Para penipu itu akhirnya setuju menukarkan dolar Bolivia tadi dengan semua tabungan Ny. Nina yang berjumlah Rp 124 juta. Tapi, sewaktu hendak menukarkan sebagian dolar itu ke pedagang valuta asing, barulah Ny. Nina sadar telah menjadi korban penipuan. Sebab, para pedagang valas menyebut uang itu sudah tak berlaku. Menurut Ny. Nina, boleh jadi para penipu itu menggunakan gendam, sehingga ia tak berkutik sewaktu diminta mencairkan semua tabungannya. □

Perampokan Pedagang Valas

BARU sepekan lebih Lebaran berlalu, aksi perampokan berdarah kembali terjadi di Jakarta. Rabu siang pekan silam, Arifianto, 35 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam mobil Isuzu Panthernya yang terparkir di bekas landasan pacu lapangan udara Kemayoran, Jakarta Pusat. Diduga, laki-laki bujangan yang dikenal sebagai pedagang valuta asing itu menjadi korban perampokan. Soalnya, dua kakak korban mengaku, uang adiknya yang baru diambil dari bank sebesar Rp 200 juta sudah tak ada di dalam mobil tersebut.

Sebelumnya, polisi sempat kesulitan mengungkap identitas korban. Soalnya, si perampok yang diduga dikenal korban itu telah mengambil semua kartu identitas dan petunjuk lain yang melekat di pakaian korban. Satu-satunya petunjuk yang dapat digunakan polisi hanyalah kartu servis kendaraan yang tergantung di *dashboard* mobil Arifianto, sehingga polisi bisa mengecek ke bengkel yang menerbitkan kartu servis tadi. Baru kemudian polisi berhasil menemukan alamat Arifianto. Hingga Kamis pekan silam, belum seorang pun tersangka ditahan aparat. □

M. RIZAL

DJOKO S. TJANDRA SEDANG DIPERIKSA KEJAKSAAN. *Khawatir menghilangkan jejak.*

Takut Kabur, Djoko Ditahan

Kejaksaan Agung mulai bertindak tegas dalam perkara Bank Bali. Tapi, mengapa pejabat dan mantan pejabat bersangkutan tak kunjung disidik?

Selalu ada hal menarik seputar kasus Bank Bali. Setelah menyaksikan drama panjang pembeberan skandal tersebut, kini giliran pengacara para tersangka dan tim penyidik Kejaksaan Agung saling tarik urat. O.C. Kaligis dan Asfifudin, masing-masing pembela Dirut PT Era Giat Prima Djoko S. Tjandra dan mantan Wakil Ketua BPPN Pande Lubis, menuding kejaksaan bertindak diskriminatif karena hanya klien mereka yang ditahan. Djoko dimasukkan ke sel kembali, 14 Januari lalu.

Semula, dari empat tersangka kasus pidana khusus itu—Setya Novanto, Rudy Ramli, Djoko S. Tjandra, dan Pande Lubis—hanya Pande yang ditahan sejak 30 Desember 1999. Tak mengherankan jika pengacaranya memprotes, bahkan membawa masalah ini ke Menteri Negara Urusan HAM. "Ada indikasi penahanan Pande lebih berbau politis ketimbang yuridis, sehingga kejaksaan telah melanggar HAM klien saya," kata Asfifudin.

Asfifudin ataupun Pande layak merasa sendirian. Sebab, ketika ia melayangkan protes, pengacara tersangka lainnya diam seribu basa. Tapi, ketika pekan lalu Djoko yang juga Bos Mulia Group masuk ke Rutan Kejaksaan Agung, Kaligis langsung bereaksi. Kini, giliran ia yang menuding kejaksaan diskriminatif dan mau pamer kekuasaan. "Kan cuma mereka yang dinilai punya hubungan dengan pemerintahan terdahulu," kata Kaligis berang.

Toh, kejaksaan tampaknya tenang-tenang saja. "Kami tentu punya alasan mengapa sampai menahan Djoko. Ia telah melanggar KUHAP tentang Tahanan Kota," ujar Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Chairul Imam. Menurut Chairul, tidak ada alasan bagi Djoko untuk mengatakan tidak tahu bahwa kepergiannya ke Bogor, Jawa Barat, melanggar aturan sebagai tahanan kota. "Anak lulusan SMP pun tahu bahwa Bogor itu, wali kota dan gubernurnya lain," ujar pejabat yang mengeluarkan surat penahanan tersebut.

Dalam hal ini, Kaligis mengakui kliennya lalai karena pergi ke Bogor untuk *nyekar* ke makam ibunya. "Djoko beranggapan Bogor masih di wilayah Jakarta, dengan asumsi Jabotabek (Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi) merupakan satu wilayah. Ia tidak akan berani melarikan diri," katanya.

Untuk membebaskan kliennya yang telanjur ditahan, Kaligis telah pula memberi jaminan kepada Jaksa Agung Marzuki Darusman. Sayang, Marzuki agaknya "kesal" dengan aksi protes para pengacara tersangka skandal Bank Bali yang menyebabkan negara dirugikan Rp 546 miliar itu. "Tidak akan ada kemudahan apa pun bagi Djoko. Sekalipun ada permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan keluarga atau pengacaranya, pasti saya tolak," ujar Marzuki, seperti dikutip *Kompas*.

Lepas dari keputusan kejaksaan untuk mengubah status penahanan Djoko dari tahanan kota menjadi tahanan rutan, argumentasi Kaligis ihwal kelalaian Djoko terkesan mengada-ada. Anehnya lagi, Purwaning, pengacara Kantor Kaligis yang biasa mendampingi Djoko, malah membantah kliennya pergi ke luar kota pada 14 Januari lalu.

"Ia tidak pernah ke luar kota. Saya akan membawa saksi yang menyatakan bahwa dari pagi sampai saat penahanannya, ia berada di Jakarta," ujarnya. Sebab, pada hari itu Djoko justru ke dokter di Plaza Senayan untuk operasi gigi. Tak jelas, mana alibi yang benar. Atas penahanan tersebut, Kaligis pun mem-

praperadilankan Jaksa Agung c.q. Direktur Tindak Pidana Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 18 Januari lalu.

Ahli hukum pidana dari UI, Harkristuti Harkrisnowo, menilai tindakan kejaksaan itu sahsah saja. "Jika ia [Djoko] melanggar aturan tahanan kota, kenapa tidak boleh ditahan?" ujarnya. Sedangkan untuk tersangka lain, Harkristuti berpendapat, mereka tidak perlu ditahan sepanjang tidak melanggar ketentuan.

Apa pun, kontroversi bertalian dengan kasus Bank Bali memang tidak akan usai sampai kejaksaan mengajukan perkara itu ke pengadilan. Marzuki sendiri merencanakan paling lambat akhir Januari, perkara tersebut selesai diberkas. Pihaknya juga masih membuka kemungkinan akan memanggil tersangka lain, entah pejabat atau mantan pejabat. Bahkan, mantan Presiden B.J. Habibie juga termasuk orang yang mungkin dimintai keterangan. "Tergantung pada rekomendasi dari tim penyidik," kata Marzuki. Tapi, Ketua Tim Penyidik, Chairul Imam, tak berkomentar ihwal itu. "Tanya Jaksa Agung. Itu bukan porsi saya," ujarnya.

Sebaiknya, sidang itu segera digelar, agar saling lempar untuk memberi jawaban segera berakhir.

Sen Tjiauw dan Anton Bachtiar Rifa'i

Chairul Imam: "Saya Tidak Diskriminatif Menahan Tersangka"

Pengacara O.C. Kaligis memprotes tindakan Kejaksaan Agung menahan kembali kliennya, Direktur Utama PT Era Giat Prima Djoko S. Tjandra. Kejaksaan dinilai diskriminatif karena hanya Djoko dan Pande Lubis yang ditahan sehubungan dengan skandal Bank Bali. Apa penjelasan Chairul Imam, Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, yang mengeluarkan surat perintah penahanan? Berikut petikan wawancara Anton Bachtiar Rifa'i dari FORUM dengan Chairul Imam.

Pengacara Djoko S. Tjandra, O.C. Kaligis, menganggap penahanan Djoko tidak berdasar...

Ada dasarnya, yaitu KUHAP tentang Tahanan Kota. Sebagai tahanan kota, tentu tidak diperbolehkan ke luar kota. Nah, ia melanggar ketentuan ini, sehingga kami mengalihkan penahanannya menjadi tahanan rutan lagi.

DOK. PRIBADI

Kaligis bilang, Djoko lalai karena mengira Jabotabek masih wilayah tahanan kota. Alasan ini bisa ditoleransi?

Saya rasa, Djoko bukan orang yang tidak bersekolah. Anak lulusan SMP pun tahu bahwa Bogor itu lain dengan Jakarta. Gubernurnya dan wali kotanya berbeda. Kok, bisa dikatakan masih dalam kota. Itu bagaimana? Jabotabek itu kan bukan wilayah administratif.

Jadi, alasan itu mengada-ada?

Iya. Itu enggak masuk akal.

Menurut Kaligis, dengan tidak diterimanya dakwaan jaksa terhadap Rudy Ramli dkk. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak ada alasan yuridis untuk menahan kliennya...

Itu kan perkara pidana umumnya. Sedangkan ini perkara korupsi, pidana khusus.

Pengacara Pande dan Djoko menilai kejaksaan diskriminatif karena hanya menahan dua tersangka. Komentar Anda...

Wah, penilaian itu sangat subyektif. Kami tidak diskriminatif dalam menahan tersangka. Sebab, menahan orang itu harus dengan alasan yang cukup. Kalau kami main tahan, sementara alasannya belum kuat, nanti urusannya dengan HAM. Iya, kan? Semula, sewaktu kami menahan Pande Lubis, dibilang diskriminatif karena cuma Pande. Sekarang Djoko kami tahan, dianggap diskriminatif karena cuma Djoko dan Pande. Nanti yang kami tahan 100 orang, lo kok cuma 100 orang, bukan 200 orang? Kan repot kalau begitu.

Ada yang bilang penahanan Djoko hanya untuk mendongkrak citra menjelang 100 hari pemerintahan Gus Dur...

Wah, jangan ikut-ikutan politislah. Saya enggak bisa mengomentarinya. Urusan apa saya? Mau Gus Dur 100 hari, 200 hari, tidak ada hubungannya dengan kasus yang saya tangani. Sering juga kami tidak menahan seseorang sampai ke pengadilan.

Kenapa Rudy Ramli dan Firman tidak ditahan?

Ya itu tadi, kami harus punya dasar-dasar yang cukup kuat untuk menahan seseorang, selain mengingat: takut melarikan diri, takut mempengaruhi saksi-saksi, menghilangkan barang bukti, dan segala macam itu. Harus ada dasar yang kuat. Tapi, kalau kami tidak takut ia melarikan diri, *ngapain* ditahan?

Intinya, kejaksaan berhati-hati dalam kasus ini?

Iya. Anda tahu, kejahatan kerah putih itu berbeda dari kejahatan biasa karena pelakunya intelektual. Para intelektual itu ibarat orang main catur. Ketika ia pertama kali melangkah sudah memikirkan langkah kelima. Iya, kan? Berbeda dengan kejahatan lain. Ibaratnya, strategi berperang orang yang memakai tangan kosong berbeda dengan perang melawan orang yang memakai senjata nuklir.

Soal perkembangan pemeriksaan kasus ini sendiri bagaimana?

Ya, peningkatan *step by step* itu ada, pembuktian-pembuktian baru. Tapi, memang ini bukan kasus yang ringanlah.

Bisa dijelaskan lagi?

Wah, *sorry*. Enggak bisa. Kalau itu saya jelaskan, nanti lawannya pasang kuda-kuda. Yang jelas, ada kemajuan dan bukti-bukti baru yang signifikan.

Apa ada kemungkinan B.J. Habibie diperiksa?

Oh, itu *you* tanyakan ke Pak Jaksa Agung, deh. Itu bukan porsi saya.

Menurut kabar, dalam waktu dekat ada yang bakal ditahan lagi...

He... he.. he.... Kok senang sekali sih menahan orang? Saya yang jaksa saja tidak suka menahan orang, *you* jadi wartawan menyuruh menahan orang. Kita lihat saja nanti. Kalau masih ada yang menganggap diskriminatif, biar saja. Saya enggak [menjadikan] masalah itu. Kalau mengikuti omongan orang, kacau kami. ❑
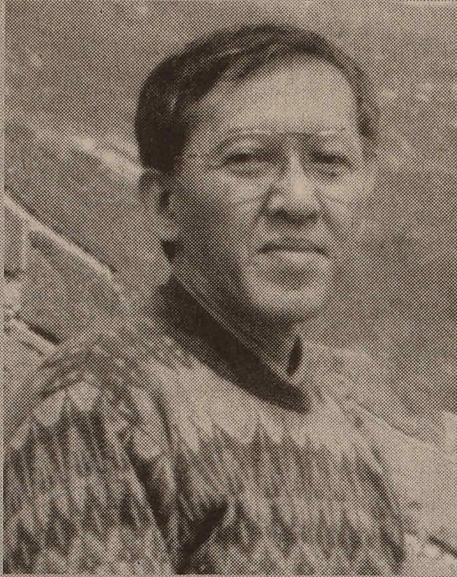
M. RIZAL

HASHIM DJOJOHADIKUSUMO. *Menginginkan penyelesaian damai.*

■ KEPAILITAN

Gebrakan BPPN untuk Debitor Bandel

Untuk pertama kali, BPPN menggugat pailit debitor yang dinilai tidak kooperatif, PT Tirtamas Comexindo. Tergugat lebih menginginkan jalan damai.

Habis sudah kesabaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menghadapi PT Tirtamas Comexindo (TC). Tahun lalu, perusahaan milik pengusaha Hashim S. Djojohadikusumo itu sudah dianggap sebagai debitor yang tidak kooperatif. Sebab, ia tidak dapat menyerahkan tambahan jaminan sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam *letter of commitment* (pernyataan kesanggupan) yang diminta BPPN. Cuma, saat itu BPPN masih memberi kesempatan TC untuk bernapas.

Namun, ketika utang TC kepada PT Bank Tamara Tbk (bank *take over*) sebesar Rp 38,19 miliar jatuh tempo pada 8 Oktober 1999, ternyata perusahaan *trading* yang beraset Rp1,73 miliar rupiah itu (per Oktober 1997) tetap tidak memenuhi kewajibannya. Maka, BPPN pun menempuh jalur hukum. Lewat pengacaranya, Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, lembaga tersebut melayangkan gugatan pailit kepada TC di Pengadilan Niaga Jakarta. Dan, perkaranya mulai digelar medio Januari lalu.

Dalam sidang pertama, Abdul Hakim meminta majelis hakim yang diketuai Hirman Purwanasuma melibatkan hakim *ad hoc* dalam memeriksa permohonan kepailitan tersebut. Memang, hal ini dimungkinkan dalam peraturan kepailitan. "Apalagi, ini merupakan langkah pertama BPPN menggugat pailit debitor yang dinilai tidak kooperatif," ujarnya.

Ia yakin, perkara ini memerlukan wawasan keahlian dan ilmu pengetahuan khusus dalam menangani permohonan BPPN. Harap maklum, selama ini putusan Pengadilan Niaga sering menjadi pergunjingan lantaran minimnya pengetahuan hakim Pengadilan Niaga. Terlebih lagi dalam kasus-kasus transaksi bisnis modern. Toh, Hirman menyarankan agar pemohon menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Niaga. Sebab, dialah yang berwenang menentukan ada-tidaknya hakim *ad hoc*, sekaligus menentukan susunan majelis hakim.

Lain halnya tanggapan Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara TC yang sebelum 1996 bernama PT Prima Comexindo itu. "Kendati Mahkamah Agung sudah mengeluarkan ketentuan mengenai penetapan hakim *ad hoc*, sampai saat ini belum ada seorang pun hakim *ad hoc* yang diangkat," kata Hotman.

Permohonan pernyataan kepailitan BPPN juga dinilai Hotman cacat hukum. Sebab, lembaga ini bukanlah kreditor atau belum menjadi kreditor TC. Dalam gugatannya, BPPN mendasarkan tuntutan pailitnya pada perjanjian *cessie* (pengalihan piutang) 22 Juni 1999 antara BPPN dan Bank Tamara. Namun, Hotman berkeras *cessie* itu tidak mengikat kliennya karena TC tidak pernah diberi tahu ihwal perjanjian itu. Ia lalu menunjuk Pasal 613 KUH Perdata yang mengatur pengalihan hak atas piutang.

Yang menarik, kata Hotman, sebenarnya antara BPPN dan TC ada kesepakatan untuk selama 10 hari menetapkan *status quo* perkara tersebut guna mencari solusi damai. Tapi, kuasa hukum BPPN mengaku tidak mengetahui kesepakatan itu.

Tak mengherankan bila Hashim menyesalkan gugatan pailit tersebut. "Apalagi, pada kesepakatan awal, BPPN memberi TC kesempatan hingga akhir Januari 2000 menyelesaikan semua kewajiban," ujarnya lewat Jannus O. Hutapea, *General Manager & Head of Corporate Relation* Grup Tirtamas. Ia mengaku pihaknya tengah mempersiapkan proposal penyelesaian komprehensif untuk menyelesaikan kewajiban TC di BPPN.

Hashim tampaknya menyadari, bila permohonan kepailitan itu dikabulkan Pengadilan Niaga, bakal merugikan citranya sebagai pengusaha. Memang, di kalangan pengusaha nasional, tidak ada yang lebih menakutkan daripada dipailitkan. Sebab, itu bisa diartikan sebagai tanda ketidakbecusan si pengusaha menangani bisnisnya.

Dan, gugatan pailit BPPN selaku pemegang hak piutang Bank Tamara terhadap TC memang tidak bisa dipandang enteng. Bahkan, menurut data BPPN, jumlah utang pokok TC yang diperoleh dari sembilan bank nasional mencapai Rp 69,7 miliar dan US$ 95,7 juta. Dan, semuanya telah dialihkan kepada BPPN. Suatu jumlah yang cukup besar dan menjadi tugas BPPN untuk menyelesaikannya.

Jadi, para debitor tidak kooperatif lainnya harus bersiap-siap. Agaknya BPPN sudah risi dituding bekerja lamban. Dan, Pengadilan Niaga pun diharap mampu memberikan putusan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Ronald Raditya dan Retno Kustiati

VONIS I

Uang Sendiri Bukan Money Politics

Kendati mantan Ketua Golkar Boyolali mengaku membagi uang saat kampanye Pemilu 1999, ia divonis bebas. Bagaimana kansnya sebagai calon bupati?

Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Pepatah kaum bijak ini agak terabaikan Pengadilan Negeri Boyolali, Jawa Tengah, yang menjatuhkan vonis bebas bagi mantan Ketua Golkar Boyolali, Sri Mulyanto, Selasa pekan lalu. Padahal, ini tergolong perkara *money politics* yang pertama kali disidangkan, menyusul terbitnya UU Pemilihan Umum (Pemilu) tahun lalu. Tak heran bila banyak yang pesimistis akan penegakan hukum di bidang politik.

Toh, Majelis Hakim yang diketuai Ny. Harnani yakin akan putusannya. Menurut mereka, perbuatan Mulyanto bukanlah *money politics* alias politik uang seperti dakwaan jaksa. Maka, salah satu kandidat bupati Bayolali itu dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar UU Pemilu. Untuk itu, Putut Kuntadi, Siswoyo, dan Turmurniningsih, yang menjadi pengacara Mulyanto, meminta agar nama baik kliennya dipulihkan. "Seluruh haknya pun harus direhabilitasi," kata Putut.

Tak pelak, putusan hakim tersebut mengecewakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Boyolali. Maklum, merekalah yang pertama kali melaporkan kasus suap ini kepada kepolisian setempat. Praktek bagi-bagi uang itu berlangsung saat kampanye perdana Partai Golkar berlangsung di lapangan Desa Trosobo, Boyolali, pada 22 Mei 1999. Kebetulan, Mulyanto dan rekannya, Ny. Wasiqah Fahrudin, menjadi juru kampanye Golkar pada hari itu.

Layaknya kampanye yang lalu-lalu, hajatan itu pun ditandai dengan acara simbolik berupa pencoblosan tanda gambar Pohon Beringin. Jamari, salah seorang peserta kampanye, lalu naik ke panggung dan mencoblos lambang partai bernomor 33 itu dengan bambu. Spontan, Mulyanto mengeluarkan uang Rp 10 ribu dari sakunya. Melalui Wasiqah, sampailah duit ke tangan Jamari. Aksi Ketua Golkar Jawa Tengah, Moh. Hasbi, juga sempat terekam Panwaslu setempat ketika ia membagi uang Rp 40-50 ribu kepada peserta kampanye di daerah Kemusuk.

ANNAS
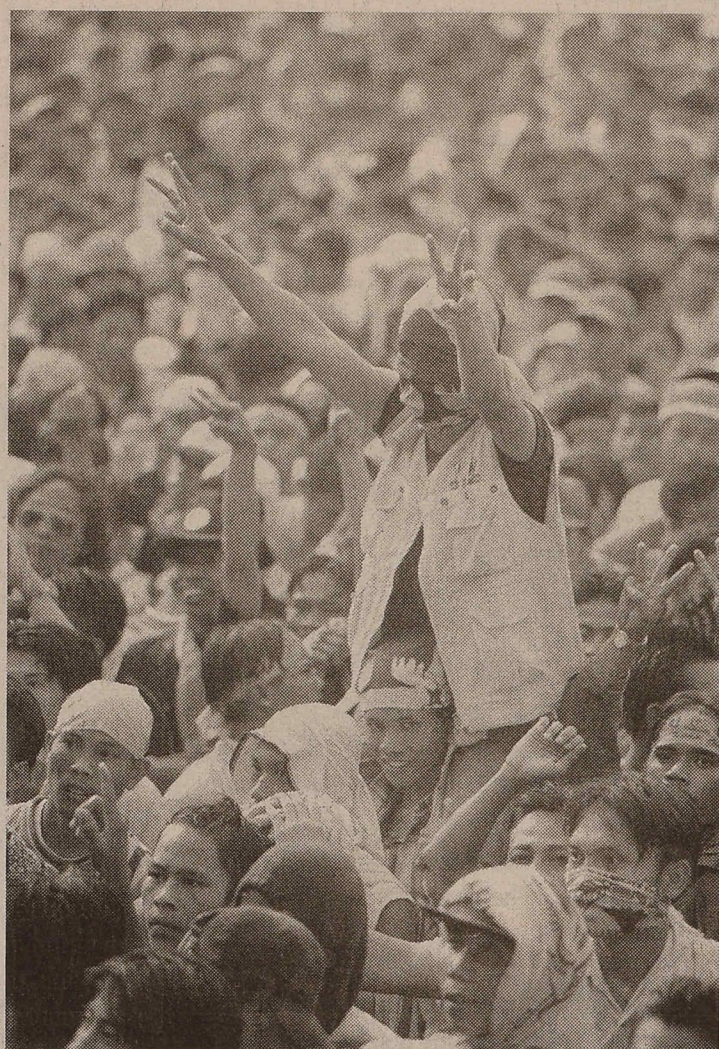
KAMPANYE GOLKAR. *Sering bagi-bagi uang.*

Mulyanto dan Hasbi rupanya lupa bahwa Pemilu 1999 beda dengan sebelumnya. Semua kegiatan kampanye dicatat Panwaslu, termasuk transaksi kecil tersebut. Akibatnya nama Mulyanto, Wasiqah, dan Hasbi pun masuk dalam daftar peserta pemilu yang disangka melakukan politik uang.

Berdasarkan Pasal 73 ayat 3 UU Pemilu, pihak yang dengan pemberiannya atau janji menyuap, menyebabkan seseorang tidak menjalankan haknya atau memilih dengan cara tertentu, dapat dipidana, maksimal tiga tahun penjara. Begitu pula penerima janji. Dalam perkara ini, Mulyanto dituntut tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan.

Kendati Panwaslu dan aktivis LSM di Boyolali yakin tindakan Mulyanto dan Wasiqah itu tergolong politik uang, kepolisian dan Jaksa Pudji Hardjono sendiri terkesan sangsi. Alasannya, definisi pemberian atau janji menyuap dalam pasal tersebut tidak jelas. Tak heran jika untuk mengegolkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus dari kepolisian ke kejaksaan, massa dari beberapa partai dan aktivis LSM harus berdemo dulu ke kantor polisi. Itu pun baru perkara Mulyanto yang disidangkan sejak 7 Desember lalu.

Sementara, kasus Wasiqah dan Hasbi sampai kini tidak jelas juntrungannya. Pudji mengaku merasa ditekan kedua kubu dalam kasus ini. Pendukung Panwaslu menganggap tuntutannya terlalu ringan, sedangkan pendukung Mulyanto—calon kuat Bupati Boyolali—menuduh ia mengada-ada.

Mulyanto sendiri dalam pembelaannya mengakui memberi uang kepada Jamari. "Tapi saya memberi secara spontan dengan uang sendiri, bukan uang Golkar," ujarnya. Ia memang harus berkilah. Soalnya, jika terbukti bersalah, peluangnya untuk menjadi orang nomor satu di Boyolali terancam gagal.

Di pihak lain, Suparno, mantan anggota Panwaslu Boyolali, sudah menaruh curiga sejak awal penanganan kasus. "Jelas-jelas terjadi pelanggaran, tapi untuk maju ke pengadilan saja susahnya bukan main. Masak perlu didemo dulu," katanya. Ia juga menuding kerja polisi yang tak kunjung memanggil Hasbi yang kini menjadi anggota DPR-RI. Alasan polisi, mereka belum mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Padahal, izin memeriksa anggota Dewan datangnya dari presiden, bukan bawahannya.

Maka, benarlah kata pepatah tadi, sekali hakim membebaskan terdakwa yang diyakini banyak orang salah, selamanya orang tak percaya pada peradilan.

Sen Tjiauw dan M. Faried Cahyono (Yogya)

■ VONIS II

Ketukan Palu bagi Penjagal Maut

Pengadilan Negeri Banyumas memvonis mati terdakwa pembunuh sembilan orang TKI. Kata sosiolog, mestinya tak melulu diselesaikan secara hukum.

REPRO SUARA MERDEKA
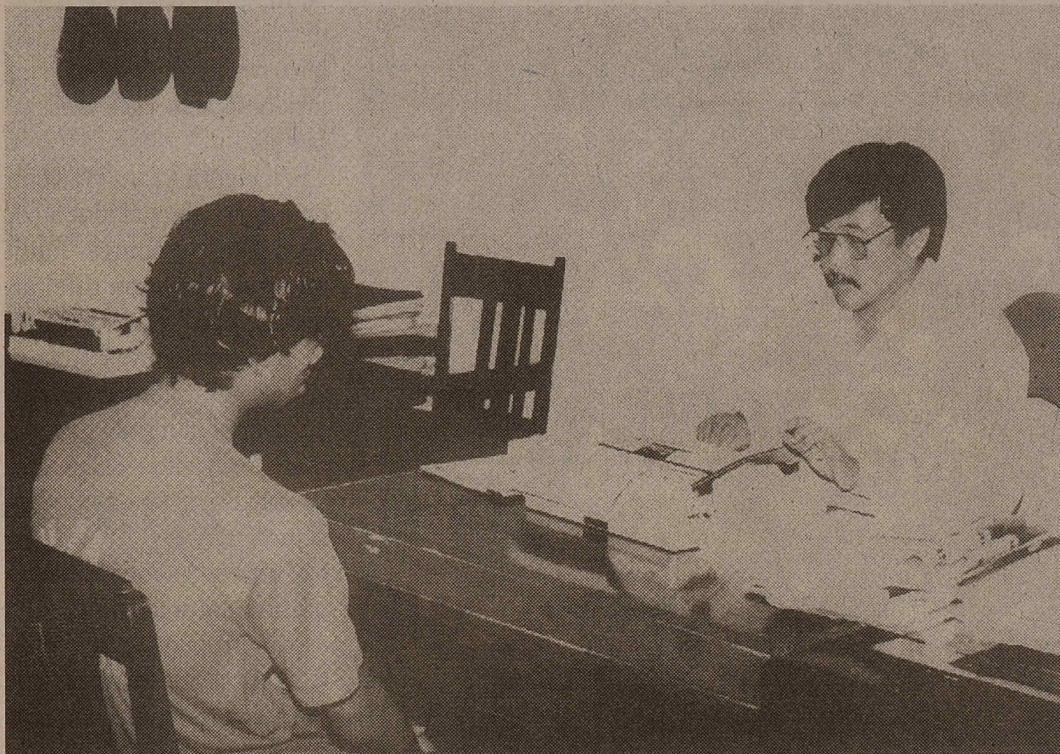
MUHAMAD SYAMSUDIN SEDANG DIPERIKSA POLRES BANYUMAS. *Sebelum didahului dibunuh.*

Belum genap sebulan tahun 2000 melangkah, jagat hukum Indonesia sudah tertoreh sebuah vonis mati. Pada 4 Januari lalu, Pengadilan Negeri Banyumas, Jawa Tengah, menjatuhkan vonis mati kepada Mochamad Syamsudin alias Aidit yang mendapat julukan "Jagal Maut dari Banyumas". "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana," ujar Samsudin, Ketua Majelis Hakim, saat membacakan vonis.

Memang, lelaki 27 tahun itu diajukan ke meja hijau dengan dakwaan pembunuhan berencana terhadap sembilan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang gagal diberangkatkan sesuai dengan kesepakatan semula. Dalam persidangan yang dimulai Agustus tahun lalu, Aidit mengaku merasa terteror dengan sikap para TKI yang semula hendak dicaloinya. Soalnya, sembilan calon TKI yang berasal dari kampung halaman Aidit di Cirebon itu terus mendesaknya untuk mengembalikan uang sebesar Rp 5 juta per orang guna mengurus keberangkatan ke luar negeri. Celakanya, menurut Aidit, uang itu habis untuk mengurus paspor dan biaya tes kesehatan, selain untuk membangun rumah dan berfoya-foya.

Pening dengan tuntutan mantan "klien"-nya, Aidit lantas berunding dengan anak buahnya, yaitu Rojak bin Carda, 19 tahun. Akhirnya, mereka berdua memutuskan akan membunuh kesembilan calon TKI tadi sebelum didahului. Maklumlah, para korban sempat pula mengeluarkan ancaman serupa.

Korban pertama adalah Saifulrahman yang dibunuh di sebuah rumah di Gombong. Ia disuguhi minuman yang oleh Aidit dikatakan sebagai obat kuat. Padahal, diam-diam sudah dibubuhi bubuk kecubung yang mengakibatkan pingsan. Begitu korban teler, lehernya langsung dijerat. Lalu, dengan darah dingin Aidit menghunjamkan potongan besi ke leher korbannya sebanyak dua kali untuk meyakinkan bahwa korban sudah meninggal dunia. Setelah ditelanjangi, mayatnya dibuang di daerah Gombong. Saat hakim menanyakan kenapa pakaian korban dilucuti, dengan lugu Aidit mengatakan, "Orang mati kan tidak memakai pakaian, Pak Hakim."

Kebiadaban serupa dialami korban Suranto, Sarna, dan Firdaus. Bahkan, mayat Suranto ditenggelamkan di *septic tank* WC di bekas rumah Aidit di Banyumas. Sedangkan lima korban lainnya dibunuh pada waktu bersamaan di sebuah rumah. Dengan memakai mobil sewaan, Aidit meminta bantuan Casmadi yang bisa menyopir untuk ikut membuang mayat-mayat tersebut di beberapa tempat di wilayah Banyumas.

Pembantaian yang berlangsung antara Januari dan Maret 1999 itu akhirnya tercium oleh polisi. Lima bulan berselang, kasus itu disidangkan. Jaksa Karyono menuntut Aidit dan Rojak dengan hukuman mati.

Atas tuntutan itu, tim pengacara Aidit dan Rojak dari LBH Kosgoro Purwokerto meminta keringanan hukuman. Menurut mereka, keduanya membunuh karena terpaksa. "Bukan direncanakan, tapi dilakukan secara spontan," ujar M. Yusron, salah seorang pembela.

Namun, majelis hakim menganggap kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340, Pasal 55 Ayat 1, dan Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Aidit dianggap sebagai perencana sekaligus pelaksana dan divonis hukuman mati. Sedangkan Rojak yang terbukti sebagai pelaksana dan pembantu Aidit dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara, Casmadi dalam sidang terpisah divonis 20 tahun penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Helmi Sukri. Atas semua vonis yang dijatuhkan, ketiganya menyatakan banding.

Toh, bagi sosiolog UGM Yogyakarta, Lambang Triyono, peningkatan tindak kriminalitas di masa krisis ini tidak bisa diselesaikan secara hukum saja. Kasus Jagal Maut dari Banyumas itu mengharuskan berbagai pihak mencari akar permasalahan yang menyebabkan kriminalitas di pedesaan meningkat. Boleh jadi, akibat kerusakan struktur masyarakat tradisional yang terjadi di zaman Orde Baru dan tak ada tawaran pengganti. "Pembangunan yang menciptakan disparitas sosial juga merupakan faktor pemicu. Inilah yang harus ditata lagi oleh penguasa baru, tidak hanya ditindak menurut aturan hukum," ujarnya.

Memang, penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri bagaikan menara gading. Bukankah ia hasil interaksi antaranggota masyarakat itu sendiri?

Ronald Raditya dan M. Farid Cahyono (Yogyakarta)

Berebut Kursi, Menebar Doku

Persaingan untuk menjadi orang nomor satu di Sumatra Barat makin panas. Bau politik uang pun kian menyengat.

Tak seperti biasanya, Selasa pekan lalu ruang sidang gedung DPRD I Sumatra Barat penuh sesak oleh pengunjung. Tak kurang dari seribu orang yang hadir membuat ruang di lantai sidang dan balkon hampir tak ada yang tersisa. Mereka tampak tak sabar menunggu 55 wakil rakyat menetapkan lima pasang calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang berhak maju ke babak selanjutnya. Beberapa di antara mereka terlihat mencoret-coret notes mencoba menghitung kemungkinan suara yang diperoleh jagonya. Sebagian lagi tampak hilir mudik bagai setrikaan, bicara bisik-bisik dari satu anggota ke anggota Dewan yang lain. Istilah kerennya, mereka sedang melakukan lobi. Tentunya dengan harapan jagonya bisa terus melaju.

Kali ini masyarakat Sumbar memang pantas memusatkan perhatian atas jalannya pemilihan gubernur dan wakilnya. Soalnya sesuai UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, inilah untuk pertama kalinya masyarakat setempat menyodorkan sendiri para kandidat kepala daerah. Pemilihan itu makin menarik karena Sumbar merupakan daerah pertama yang menerapkan UU baru tersebut.

Proses pemilihan cagub dan cawagub Sumbar sendiri sebenarnya telah dimulai DPRD I Sumbar pada akhir 1999 lalu dengan cara menampung surat atau usulan masyarakat. Ternyata, dari 1.863 aspirasi yang masuk, terjaring 166 cagub dan 170 cawagub. Memang, ada kecurigaan bahwa surat-surat tersebut tidak sepenuhnya datang dari masyarakat. Buktinya, ada beberapa surat yang bentuk huruf, ketikan, maupun redaksionalnya serupa.

Tapi, menurut Ketua DPRD Sumbar, Arwan Kasri, adalah hak fraksi untuk menentukan seleksi terhadap pasangan cagub dan cawagub yang memenuhi syarat. Sedangkan DPRD sendiri lanjut Kasri berpatokan pada tata tertib yang menyebutkan calon harus memahami situasi dan kondisi daerah Sumbar serta minimal berdomisili di daerah itu selama dua tahun. Setelah melalui penyaringan, dari jumlah hampir dua ratus pasang ternyata yang lolos penyaringan pertama cuma 24 pasang cagub dan cawagub. Dari jumlah itu, satu orang calon yaitu jago PKB, Rusdi R. Latif, mundur sebelum bertarung.

INDRA SAKTI NAULI

ZAINAL BAKAR. *Melaju karena kekuatan uang?*

Setelah anggota Dewan masing-masing memasukkan lima pasang calon, maka lima besar pasangan yang lolos masuk babak final adalah paket Brigjen Dasrul Lamsuddin (mantan Kapolda Sumbar) - Rusmazar Ruzuar (Wakil Ketua DPW PAN Sumbar) yang meraih 30 suara, Zainal Bakar (Wagub Sumbar) – Fachri Achmad (Rektor Universitas Bung Hatta) dengan 29 suara, Man Nas K Suleiman (mantan Kakanwil Kehutanan Sumbar) – Kolonel Syahrial (Wakil Ketua DPRD Sumbar) dengan 28 suara, M. Saleh Khalid - Dasman Lanin (Sekum DPW PAN Sumbar) yang memperoleh 26 suara, serta Patrialis Akbar (anggota DPR) – Darmadi (Ketua DPW PPP Sumbar) yang memperoleh 23 suara. Anehnya, beberapa calon unggulan seperti mantan JAM Intel Kejagung Mayjen Syamsu Djalal atau Rektor Unand Marlis Rachman justru harus terhenti langkahnya.

Tak mengherankan jika kemudian marak isu politik uang. Sekitar seratus mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Kisi Anak Nagari (KAN) menggelar aksi unjuk rasa di luar gedung DPRD I Sumbar. Mereka curiga ada politik uang dalam proses pemilihan gubernur yang sedang berlangsung di dalam gedung tersebut. Dasrul Lamsuddin, misalnya, dituding menjanjikan uang masing-masing Rp 50 juta kepada 30 orang anggota Dewan yang memilih dirinya.

Memang bukan bukan Dasrul sendiri yang menawarkan imbalan, tetapi melalui Anwar Syamsuddin, Ketua Fraksi PAN yang masih beripar dengan Dasrul. Dugaan itu makin kuat karena tokoh PAN, Khaidir Khatib Bandaro, juga membenarkan adanya iming-iming kepada para anggota partainya. Cuma, ketika ditanya siapa yang menawarkan dan untuk siapa suara mesti diberikan, Khatib Bandaro tutup mulut. "Tak usah ditanggapilah. Itu kan sudah lagu lama," ujar Anwar Syamsuddin.

Hal sama juga dilontarkan Zainal Bakar yang juga dituding bagi-bagi duit kepada para wakil rakyat agar bisa lolos jadi gubernur. "Dari mana saya dapat uang. Saya maju karena kawan-kawan di partai yang meminta," ujar Zainal yang dijagokan Partai Golkar, PDIP, dan sejumlah partai kecil.

Jika babak lima besar saja sudah demikian kuat aroma politik uang, rasanya bukan tidak mungkin dalam pertarungan paling menentukan pada 2 Februari mendatang, para wakil rakyat akan kebanjiran duit.

Wahid Rahmanto
dan Indra Sakti Nauli (Padang)

Tarian Narkoba Semakin Mengerikan

Di masa krisis, narkotik dan obat-obatan terlarang (narkoba) semakin eksis. Pada saat bisnis lain terkapar, bisnis haram itu tetap laris manis. Bahkan, omzetnya meningkat cukup drastis. Nilai transaksi narkoba di Indonesia mencapai Rp 390 miliar per hari. Yang mengerikan, sekitar Rp 145 miliar dari nilai transaksi itu terjadi di kalangan pelajar.

M.RIZAL

Tak terlalu mengejutkan ketika memasuki tahun 2000, Kapolri saat itu, Jenderal Roesmanhadi, memaparkan statistik kejahatan narkoba meningkat secara mencolok sampai akhir 1999, yaitu naik 32,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Begitu pula dengan korbannya. Akhir 1999, jumlah pasien yang berobat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Fatmawati mencapai 8.000 orang. Padahal, tiga tahun sebelumnya "hanya" sekitar 1.779 orang.

Itu yang tercatat berobat di RSKO Fatmawati. Bagaimana dengan gambaran pemakai narkoba di seluruh Indonesia? Ternyata, cukup mengerikan. Seperti diungkapkan Ruchadi, Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial, sampai Agustus 1999—sebelum departemen itu dibubarkan Presiden Abdurrahman Wahid—paling tidak 1,3 juta warga Indonesia menjadi pecandu narkoba.

Jumlah itu tentu bukan kenyataan yang sebenarnya, yang tentu akan jauh lebih besar. Sebab, menurut psikiater Prof. Dadang Hawari, gejala mengerikan itu menunjukkan fenomena gunung es. Yang terlihat di permukaan lebih kecil dibandingkan yang ada di bawahnya.

Fenomena itu agaknya menjadi realitas yang memprihatinkan. Narkoba telah merasuki hampir semua lapisan masyarakat. Siswa SD pun kini banyak yang keranjingan narkoba. Menurut Ekodjatmiko Sukarso, Direktur Pembinaan Kesiswaan Dirjen Pendidikan Dasar, dari 45 juta siswa SD, SMP, dan SMA di Indonesia, sekitar 2 juta siswa di antaranya terjangkit narkoba. Bila anak-anak yang belum berpenghasilan sendiri sudah kerasukan memakai narkoba, bagaimana dengan yang sudah berpenghasilan sendiri?

Celakanya, polisi dan tentara yang semestinya diandalkan menangkal peredaran narkoba malah ikut-ikutan mengonsumsi obat-obatan setan itu. Selama 1999, tercatat 276 anggota polisi dan tentara, mulai dari perwira menengah sampai bintara, terlibat kasus narkoba [lihat: tabel]. Keterlibatannya pun beragam: Ada yang menjadi pengedar, pemakai, dan menjadi beking. Berdasarkan data dari Mabes Polri, kasus aparat itu terdapat di 16 provinsi. Ada pula praktisi hukum seperti Suharyono, seorang pengacara hukum di Surabaya, yang kini diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena kasus narkoba.

Jelas, peningkatan pemakai narkoba itu menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar tempat transit perdagangan narkoba, tapi juga telah menjadi negara tujuan. Hal ini tampak pula dari jumlah narkoba yang disita. Berdasarkan data kepolisian, dari Januari sampai September 1999, sekitar 8,8 ton heroin, 3,4 kilogram morfin, 300 kilogram hashis, 12,499 kilogram kokain, dan 12 ton ganja disita sebagai barang bukti. Sedangkan narkoba jenis psikotropik, seperti ekstasi, sebanyak 18.697 tablet, bubuk ekstasi hampir mencapai 28 kilogram, dan shabu-shabu 143 kilogram.

Jumlah perolehan sitaan itu melebihi hasil sitaan pada 1998. Contohnya, heroin, polisi hanya berhasil menyita 27 kilogram dan ganja 1 ton. Lalu, ekstasi yang disita sekitar 11 ribu tablet. Begitu pula shabu-shabu, hanya sekitar 8 kilogram [lihat: tabel].

Pasokan narkoba agaknya tak lagi mengandalkan kiriman dari luar negeri, tapi juga telah diproduksi secara gelap di dalam negeri. Itu terlihat dari bubuk ekstasi yang disita polisi, sekitar 28 ribu gram.

Peredaran narkoba memang telah mencapai taraf gila-gilaan karena barang-barang haram itu bisa ditemukan di permukiman penduduk, warung-warung kecil sekitar sekolah, rumah indekos, kafe, dan diskotek-diskotek. Ironisnya, para bandar juga memasang beberapa siswa sebagai kaki tangannya untuk mengedarkan narkoba di sekolah. Seperti yang terjadi di sebuah SMP di kawasan Perumnas III Bekasi. Sekitar September 1999, terungkap bahwa dari sekitar 20 orang siswa yang ditangkap polisi karena kedapatan mengisap ganja, dua orang di antaranya adalah kaki tangan pengedar. "Pengedarnya tak jauh dari sekolahan itu," kata seorang polisi Polres Bekasi.

Lain lagi yang terjadi di Serang, Jawa Barat. Narkoba jenis pil Nipam diedarkan oleh seorang anak jebolan SMP dengan cara berpura-pura menjadi siswa. Menurut pengedar yang bernama Wawan, 14 tahun, selain bisa mengelabui polisi, cara itu juga tak mengundang kecurigaan satpam sekolah. "Sehari saya bisa mengantongi Rp 200 ribu, kan lumayan, tak perlu minta duit ibu," kata Wawan.

Oknum TNI dan Polri Pemakai Narkoba (hingga Desember 1999)

Pangkat	Jenis Tindakan
7 Perwira Menengah	1 orang diproses DKP; 1 orang diproses Mahmil; 3 orang dimutasikan; dan 2 orang belum ditindak
69 Perwira Pertama	15 orang sedang diproses provos; 2 orang diproses Denpom; 1 orang diproses Mahmil; 9 orang dimutasikan; 3 orang ditahan; 19 orang di-nonjob-kan; 1 orang penundaan Usul Kenaikan Pangkat (UKP); 5 orang direhabilitasi; 6 orang dibina; dan 8 orang belum ditindak
185 Bintara	67 orang diproses provos; 4 orang diproses Denpom; 5 orang diproses Mahmil; 19 orang dimutasikan; 44 orang ditahan; 11 orang dipecat; 13 orang direhabilitasi; 6 orang penundaan UKP; 16 orang belum ditindak
15 Tamtama	7 orang diproses provos; 2 orang sedang diproses Mahmil; 1 orang ditahan; 1 orang di-nonjob-kan; 2 orang direhabilitasi; dan 2 orang belum ditindak
3 Sipil (Kepolisian)	2 orang diproses provos dan 1 orang sedang diproses Denpom

Sumber: Mabes Polri

Selain mendapatkan barang dari pengedar besar di Serang, Wawan juga membelinya langsung dalam jumlah karungan di Tanahabang, Jakarta. Pil Nipam itu dijualnya kepada para siswa seharga Rp 500 per tablet. Ia juga memasarkan putaw dengan harga Rp 5.000 per paket. Kalau lagi mujur, kata Wawan, kadang-kadang ada siswa anak penggede yang membeli dalam jumlah besar. "Katanya sih untuk persediaan," ujar Wawan, yang kini mengaku telah berhenti menjadi pengedar karena ketahuan ibu dan paman-pamannya.

Sementara, di Jakarta Selatan, kompleks perumahan tentara pun dipakai sebagai tempat peredaran narkoba. Konon, nama Fransur, Bodongan, Dabuah, Agusta, Tombanky, dan Kompirang dikenal sebagai pengedar narkoba di kompleks Kostrad di kawasan Tanahkusir. Tak jauh dari kompleks itu, hanya dibatasi sebuah jalan, terdapat kompleks Kodam Jaya. Ada kabar, di situ bercokol bandar putaw bernama Dayutnana. Apakah mereka bandar besar atau bukan, yang jelas para penikmat alam halusinasi mengenalnya sebagai pengedar. Tampaknya, "kesangaran" kedua kompleks itu membuat operasi mereka aman dan terlindungi.

BARANG BUKTI NARKOBA YANG DISITA

Narkotik	1997	1998	Januari-September 1999	Januari 2000
Candu	1.000 botol opium 620 kapsul opium	30 gram	6841 gram	
Morfin	320 gram		3494 gram 202 bungkus	
Heroin	20.432,78 gram	27.761,26 gram	8.857.827,4 gram	2 kilogram
Hashish	4.017,3 gram	690,04 gram 23 batang	300.004,5 gram	
Kokain	3.301,3 gram	4.784,1 gram	12.499,2 gram	1,6 kilogram
Pohon Ganja	132.748 batang	47.515 batang	254.887 batang	
Bibit Ganja		225 batang	660 batang	
Ladang Ganja	80,89 hektare	19,22 hektare	21.2607 hektare	
Daun Ganja	715.735,22 gram	1.071.862,26 gram	2.112.386,24 gram	406,6 kilogram
Biji Ganja	1.218,45 gram	299 gram 1 kotak 4 pot	311,505,8 gram 2 botol	

Psikotropik	1997	1998	Jan-Sept 1999	Jan 2000
Daftar G	2.070.066 tablet	589.210 tablet 48 dos 840 ampul 60 kaleng 178,8 botol	337.521 tablet 160 botol 2 bungkus 16 kaleng 70 dos	
Bahan Daftar G		3 kaleng 7 botol	10.825 kilogram	
Ekstasi	89.413 tablet	11.655 tablet 1 kotak	18.697,75 tablet 56 bungkus	
Bahan ekstasi		367 gram 15 botol 13 kantong 8 tabung 6 galon 10 plastik 4 toples 1 karton	27.957,27 gram	
Bubuk ekstasi		1 plastik 3 bungkus	12 gram	
Shabu-shabu		7.761,22 gram 2 kantong 4 cepuk	93.183,84 gram 50 kilogram	41 gram

Sumber: Mabes Polri

Namun, transaksi narkoba lebih banyak dilakukan di hotel ketimbang di rumah pribadi. Ini hasil pengamatan Police Watch Indonesia (PWI) Fakultas Hukum UI. Mereka menyatakan bahwa 53 persen transaksi narkoba dilakukan di hotel, 24 persen di rumah pribadi, penginapan, dan rumah indekos, 10 persen di sekitar sekolah, serta 13 persen dijajakan di tempat-tempat seperti warung kopi, warung rokok, dan sebagainya. Dan, menurut catatan polisi di akhir 1999, wilayah peredaran narkoba yang semula hanya mencakup delapan provinsi kini telah merambah ke 18 provinsi.

Berapa nilai transaksi narkoba di Indonesia? Dadang Hawari memperkirakan Rp 390 miliar per hari, dengan jumlah dagangan seperti ganja misalnya, mencapai 1 ton per hari. Sementara, bila mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Narkoba Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, uang yang dibelanjakan kalangan pelajar untuk membeli narkoba sebesar Rp 145 miliar per hari. "Jadi, jika Rp 2 miliar saja digunakan bandar narkoba untuk menyogok aparat hukum, itu tak ada artinya," kata Dadang Hawari.

Pantas saja, narkoba kian marak di pasaran. Para ban-

dar dan pengedar itu, dengan dibekingi aparat, seolah tak menggubris kegeraman masyarakat. Kalaupun ada bandar atau pengedar yang tersentuh hukum, penyelesaiannya sering tak memuaskan. Ada kesan, penyelesaian kasus narkoba sama susah dengan penyelesaian korupsi pejabat tinggi. Lihat saja, dari 2.465 kasus narkoba yang masuk jalur hukum sepanjang tahun 1999, baru 1.908 kasus yang bisa diselesaikan.

Di antara kasus yang tak terselesaikan itu, ada pula kasus yang menguap. Salah satunya, kasus yang melibatkan putra mantan KSAD Jenderal Subagyo H.S., Letda Agus Isrok. Kasus itu mencuat, 6 Agustus 1999, ketika Agus Isrok dan temannya, Dony Hendrian, tertangkap aparat Polda Metro Jaya, di Hotel Travel, Jakarta Barat. Saat itu, dari kamar mereka, polisi menyita 7.000 pil ekstasi, 4 kilogram shabu-shabu, dan setengah ons heroin. Sementara, dari kantong celana Agus yang ketika tertangkap memakai nama "Decky Setiawan", polisi menyita dua plastik shabu-shabu.

DOK SCTV

AGUS ISROK DITANGKAP. *Menguap ke mana?*

Sebagai warga sipil, Dony disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sedangkan Agus dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Polisi Militer Kodam Jaya. Tapi, apa yang kemudian terjadi? Sampai kini tak terdengar kasus itu diproses secara hukum. Bahkan, dalam Berita Acara Pemeriksaan Dony di pengadilan, nama Agus sebagai pelaku koneksitas dalam kejahatan narkoba bersama Dony, tak secuil pun tercantum. Yang ada hanya nama Decky Setiawan yang beralamat di kawasan Dago, Bandung. "Setelah saya cek ke Bandung, ternyata nama dan alamat itu tidak dikenal. Nama itu fiktif," kata pengacara Dony. Agaknya, kasus Agus sengaja dihilangkan.

Memang, tampaknya ada ketidakadilan antara perlakuan terhadap Agus dibanding perlakuan yang diterima, misalnya, Kapten Polisi Lintang Trisno Suharto, Kepala Pusat Pusat Komando dan Kendali Opareasi Polres Jawa Tengah. Karena kasus narkoba, pada pertengahan Januari lalu, Lintang dipecat dari keanggotaan polisi. Sedangkan 26 polisi lainnya yang juga terlibat diberi sanksi hukuman disiplin dan administrasi berupa penurunan pangkat. "Hukuman itu sebagai wahana bagi Polri untuk instrospeksi atas potret dan perilaku Polri selama ini," kata Mayjen Nurfaizi, Kapolda Jawa Tengah.

Seharusnya, sikap Kodam Jaya terhadap Agus setidaknya sama seperti yang dilakukan Nurfaizi. Sebab, seperti kata Gus Dur pada Munaslub Dharma Wanita baru-baru ini, para pelaku narkoba harus diperlakukan sama di hadapan hukum. "Tidak peduli anak siapa pun, kalau ia mengedarkan ganja, harus ditindak," kata Gus Dur.

Di mata Gus Dur, *trend* penggunaan narkoba yang meluas di masyarakat telah menjadi ancaman nasional. Karena itulah, pada Sidang Kabinet Bidang Polkam, Gus Dur menyebut-nyebut kemungkinan pemberlakuan hukuman mati bagi pengedar, seperti yang diterapkan di Malaysia dan Singapura. Departemen Hukum dan Perundang-undangan sedang mempersiapkan amandemen untuk mengubah UU No. 22 Tahun 1997 tentang sanksi narkoba dan psikotropik dengan hukuman yang lebih keras. "Hukuman paling berat: dihukum sampai mati," kata Menko Polkam Jenderal Wiranto.

Selama ini, para pengedar narkoba bisa bertingkah seenaknya karena ancaman hukuman atas perbuatannya terlalu ringan. Misalnya, kasus Liem Chun Chuan, warga Singapura yang kedapatan membawa 6.806 pil ekstasi dan 250 gram shabu-shabu untuk diedarkan di Indonesia. Toh, Pengadilan Negeri Medan, pada pertengahan tahun 1999, hanya menjatuhkan hukuman 16 bulan penjara. Sangat kontras dibandingkan dengan hukuman yang diterima Khairul, yang membawa 3,2 kilogram ganja. Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada 1997, menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara untuknya. Sementara, Fahmi, teman sindikat Khairul, yang jelas-jelas menampung ganja dari Khairul, malah dibebaskan dari hukuman oleh hakim di pengadilan yang sama.

Terlihat bahwa fungsi penghukuman terhadap pelaku pidana agar jera dan tak mengulangi perbuatannya tidak berjalan dengan baik. Tampak kelemahan institusi hukum Indonesia, tak hanya di tingkat kepolisian, tapi juga mencakup kehakiman. Kelemahan penegakan hukum inilah, termasuk orang-orangnya, yang menjadi kekuatan narkoba.

Riza Sofyat

Para Kurirnya dari Cianjur

Lima anggota sindikat perdagangan narkotik berkulit hitam tewas ditembak polisi. Mereka sudah lama beroperasi di Indonesia.

SINAR PAGI

MAYAT ORANG NIGERIA DI CIPETE. *Pura-pura berbisnis konveksi.*

Namanya rada aneh untuk orang Sunda: Meirika Franola. Tapi, sungguh, perempuan berkulit kuning berusia 30 tahun itu asli Cianjur, Jawa Barat. Dan yang makin membuat orang terperangah adalah gaya hidup dan profesinya. Meirika alias Ola alias Cunbe Fransiska yang menikah dengan seorang pedagang narkotik internasional asal Afrika itu adalah koordinator para kurir narkotik di Indonesia.

Kedok perempuan bertubuh mungil itu terungkap ketika aparat reserse Polda Metro Jaya menangkap Deni Setya Maharwan dan Ranni Andriani di Terminal Penumpang Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Rabu, 12 Januari lalu. Sebelumnya, kedua warga negara Indonesia asal Cianjur itu dicurigai membawa sejumlah barang narkotik di dalam koper mereka. Karena itu, kendati sudah lolos dari pemeriksaan sinar X dan naik ke kabin pesawat, polisi tetap memaksa mereka turun.

Hasilnya, dari dalam koper mereka, polisi dan aparat Bea dan Cukai menemukan 11 kilogram kokain yang dikemas rapi, sehingga lolos dari sinar X. Deni dan Ranni tentu saja tak mau apes sendirian. Mereka lantas bernyanyi bahwa keduanya adalah kurir narkotik yang bekerja di bawah koordinasi Meirika Franola alias Ola.

Petugas pun bergerak cepat. Di pelataran parkir Bandara, Ola tampak sedang mengobrol dengan enam orang laki-laki dan perempuan. Saat itu juga, Ola dan enam kurirnya ditangkap. Dari tangan mereka, petugas menyita 1,6 kilogram heroin senilai lebih dari Rp 1,5 miliar dan empat kilogram kokain seharga sekitar Rp 3 miliar.

Di kantor polisi, Ola dkk. tak bisa lagi mengunci mulut. Ola mengaku, ia bekerja untuk suaminya, Mouza Sulaiman Domula, warga negara Pantai Gading, Afrika. Polisi tak membuang waktu, mereka pun menyerbu rumah kontrakan pasangan itu di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Namun, kedatangan polisi yang dipimpin Kepala Satuan Narkotik dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) Polda Metro Jaya, Letkol Haji Abdullah, seolah sudah dinantikan. Mouza menyambut mereka dengan membuka tembakan pistol. Walhasil, baku tembak seru bak film-film laga pun tak terhindarkan. Setelah asap mesiu mereda, tampak Mouza dan empat laki-laki kulit hitam lainnya, yakni Ebraheem Mohammed, Freeman Charles Saifa, Mueddin Boca Rinwa, dan Semeiu Jhola Olda Pupo, tewas terkapar di dalam rumah.

Sekali lagi, sukses polisi menggulung aksi komplotan warga Afrika itu menunjukkan bahwa para pendatang asal Afrika yang sering berkedok menjadi pedagang konveksi, masih menganggap Indonesia, khususnya Jakarta, sebagai tempat beroperasi yang aman.

Cuma, mereka mulai mengubah strategi untuk mengecoh polisi. Misalnya, mereka tak lagi tinggal di kawasan Tanahabang yang berada di pusat kota. Melainkan ke pinggiran Jakarta. Tentu saja, agar tak mudah tercium aparat keamanan.

Selain itu, orang-orang Afrika yang semula banyak menjadi *swallower* alias kurir yang membawa narkotik terbungkus kondom dalam perutnya, kini mulai naik pangkat: menjadi bandar. Mereka malah merekrut orang-orang Indonesia sebagai kurir narkotik untuk hilir mudik ke seluruh dunia.

Fenomena itu terbukti dari pengakuan Ola kepada polisi dan wartawan yang menge-

rubunginya sewaktu ia ditangkap. Ola mengenal Mouza sejak tiga tahun silam, sewaktu ia masih menjadi wanita penghibur di kafe-kafe di kawasan Tanahabang. Semula, ia percaya bahwa Mouza adalah pedagang pakaian jadi. Setelah beberapa bulan pacaran, mereka pun menikah pada Oktober 1997 di Cianjur, hingga membuahkan seorang anak yang kini berusia satu tahun enam bulan.

Baru pada 1998 Ola mengetahui profesi suaminya sebenarnya: pedagang narkotik internasional. Kendati begitu, Ola bukan mencoba menyadarkan sang suami. Ia malah rela menjadi kurir bisnis narkotik "keluarga".

MEIRIKA FRANOLA. *Naik pangkat.*

FOTO: SCTV

Awalnya, ia hanya bertugas di sekitar Jakarta. Tapi, setelah ia diajak berkunjung ke berbagai kota besar di Asia dan Eropa, Ola pun terjun menjadi kurir narkotik internasional. Belakangan, ia mulai dipercaya menjadi koordinator bagi para kurir asal Afrika, Thailand, dan Nepal yang bekerja untuk kelompok Mouza.

Ketika aparat Bea dan Cukai dan polisi mulai memperketat pengawasan terhadap warga Afrika, Thailand, dan Nepal yang hilir mudik ke Jakarta, setahun silam, Mouza pun mengubah taktik. Ia meminta sang istri untuk merekrut dan mendidik kurir domestik. Ola pun mengontak kerabatnya di Cianjur. Termasuk, Deni dan Ranni yang tertangkap bersama Ola di Soekarno-Hatta, dua pekan silam itu.

Sindikat Mouza hanyalah salah satu bagian dari jaringan pengedar narkotik di Indonesia yang konon terbesar di dunia. Bahkan, Badan Pemberantasan Narkotik Amerika Serikat (DEA, Drugs Enforcement Administration) melaporkan, setiap hari, paling sedikit 1,5 kilogram heroin masuk ke wilayah Jakarta dan Bali.

Indonesia pun ternyata tak lagi semata-mata wilayah transit bagi perdagangan barang haram itu. Melainkan, sudah menjadi "pasar" tersendiri. Jumlah pecandu narkotik di Tanah Air, setahun silam, bahkan diperkirakan sudah mencapai 1,3 juta orang. Sementara, tiap bulan, hampir 30 orang mati akibat kelebihan dosis.

Data di Mabes Polri juga menunjukkan bahwa sebagian besar narkotik yang "melintas" di kawasan Asia berhenti di Jakarta dan Denpasar. Jalur pasokan heroin dan morfin, misalnya. Dari 10 jalur yang dideteksi polisi, terutama yang berasal dari Bangkok dan Singapura, setelah melalui beberapa kota di Kalimantan dan Sumatra, hampir semuanya berhenti di Jakarta, Denpasar, Bagan Siapi-api, dan Medan. Cuma dua jalur, yakni yang berasal dari Bangkok, yang dikirim untuk tujuan Australia dan Jepang. Bahkan, ada pula jalur pasukan heroin yang "tembak langsung" dari Amsterdam, Belanda, ke Jakarta.

Begitu pula dengan jalur pasokan kokain. Dari negeri asalnya, di Amerika Selatan, semua langsung dikirim ke Denpasar. Tampaknya, sasaran jaringan pedagang kokain itu memang para turis bule. Apalagi, kokain lebih mahal ketimbang heroin.

Indonesia kini juga menjadi sasaran utama aksi sindikat perdagangan shabu-shabu. Menurut data di kepolisian, semua pengiriman zat amfetamin berbentuk kristal yang terjejak polisi datang dari Guangzhou, RRC, melalui Hong Kong, dan berhenti di Jakarta. Tidak mengherankan jika shabu-shabu kini mewabah hingga ke segenap pelosok negeri kita. Buktinya, polisi di Majene, Sulawesi Selatan, saja sudah ada yang tertangkap basah atasannya menggunakan shabu-shabu.

Yang jadi pertanyaan, bagaimana barang-barang laknat itu masuk ke Indonesia. Memang, yang sering diberitakan adalah penagkapan para kurir yang menyelundupkan narkotik dalam perut, dubur, ataupun koper melalui bandara-bandara internasional, seperti Soekarno-Hatta, Ngurah Rai Bali, atau Polonia Medan. Tapi, kalaupun dibuat perhitungan yang lebih terperinci, niscaya, narkotik yang lolos melalui penumpang pesawat udara itu pasti akan lebih besar jumlahnya. Apalagi, seperti diakui Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai I Soekarno-Hatta, Tonny Soenanto, sebagian besar penangkapan itu berkat intuisi anak buahnya yang mengamat-amati penumpang yang dicurigai.

Maklum, kata Tonny, peralatan yang ada di terminal penumpang Bandara Cengkareng mulai sulit menandingi kecanggihan akal para penyelundup narkoba. Misalnya, "Kami belum memiliki alat sinar X yang mampu mendeteksi narkotik dalam perut anggota sindikat," ujar Tonny kepada FORUM, suatu kali.

Anehnya, sangat jarang terdengar barang narkotik yang tertangkap melalui pelabuhan-pelabuhan kargo, baik laut maupun udara. Padahal, seperti disebutkan sumber FORUM, sebagian besar narkotik, terutama kristal shabu-shabu yang diboyong dari RRC ke Indonesia, masuk melalui jasa kargo. Lalu, apakah Bea dan Cukai dan polisi tak punya petugas di pelabuhan kargo?

Munawar Chalil
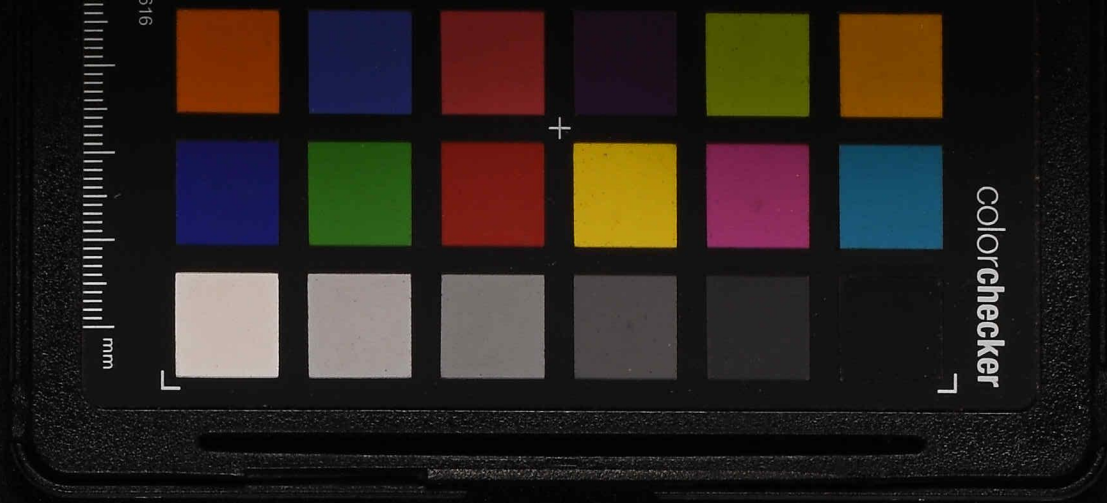
Manajemen Aduk-Aduk

Sulit disangkal bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja Kabinet Persatuan Nasional (KPN) negatif. Tidak tampak adanya koordinasi kerja "yang menjanjikan" bagi upaya kita keluar dari krisis multidimensi yang berkepanjangan ini. Tiap menteri bekerja menurut interpretasi mereka terhadap tugas masing-masing, tanpa ada gambaran jelas tentang kausalitas kerja di antara mereka. Para menteri masih banyak yang asyik dengan dirinya sendiri. Kalaupun ada kontak di antara mereka, lebih bernuansa konflik, jegal-menjegal, yang akhirnya dibaca rakyat sebagai munculnya indikasi upaya tiap menteri memaksimalkan posisi yang dipegangnya untuk kepentingan partai atau kelompoknya dalam pemilu 2004 nanti.

Riswandha Imawan
Pengamat Politik

Andaikata Presiden Gus Dur dan Wapres Mega mampu bertindak *decisive*, ceritanya mungkin lain. Tapi,Presiden dan Wapres sama-sama pemimpin bertipe *solidarity maker* yang selalu berusaha menyenangkan semua orang. Sikap ini "memperoleh pembenaran" bila dikaitkan dengan fakta bahwa mereka "naik" lebih karena hasil kompromi politik daripada pilihan langsung rakyatnya. Repotnya, mereka memiliki *self-confidence* tinggi sekali. Boleh jadi, ini merupakan produk langsung dari kenyataan bahwa mereka di kelompok masing-masing sudah hampir sejajar dengan dewa. Semua ini ternyata menghasilkan gaya kepemimpinan super cuek, sikap *easy going*, seenaknya sendiri. Ketika gaya kepemimpinan ini diterapkan dalam manajemen pemerintahan, praktek mengaduk-aduk, *trial and error*, mencuat, menyingkirkan kebutuhan prinsip persistensi dan prediktabilitas. Kecuali Presiden dan Wapres sendiri, tampaknya tidak ada yang bisa menduga "kejutan" apalagi yang akan muncul esok hari di cakrawala politik Indonesia.

Mengapa sampai begini? Banyak orang menunjuk karakter KPN yang akomodatif sebagai penyebabnya. Namun, bila dicermati, persoalannya bukan pada karakter KPN, tapi pada mekanisme pengisian jabatan-jabatan di KPN yang menggunakan garansi. Dalam kaitan ini, ada dua hal yang patut dicatat. Pertama, sistem garansi membuat para menteri lebih loyal kepada para garantor daripada kepada Presiden. Kedua, sebenarnya lewat sistem garansi, Presiden di-*fait accompli*, ditodong, oleh para garantor untuk memakai seseorang sebagai menteri.

Sangat mungkin Presiden (dan Wapres) tidak setuju dengan keberadaan seseorang dalam KPN. Namun, demi prinsip akomodasi, demi menyenangkan banyak orang, mereka terpaksa menerimanya. Maknanya, Presiden dan Wapres sebenarnya sadar betul bahwa para pembantunya adalah juga para musuh politiknya. Namun, yang paling logis dikemukakan, kesadaran inilah yang mendorong lahirnya badan atau struktur jabatan baru di seputar Presiden dan Wapres. Dan, mereka ini paham bahwa KPN di-*back-up* oleh lima *godfathers*. Mereka sadar akan kecenderungan para menteri patuh pada *godfathers* masing-masing. Tapi, agar mereka tidak sekadar dijadikan kuda Troya bagi kepentingan—politik—tiap menteri, Presiden tampaknya memandang perlu membentuk badan dan struktur jabatan baru di luar KPN. Pejabat-pejabatnya ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Artinya, mereka benar-benar orang kepercayaan Presiden dan Wapres. Karena itu, bukan mustahil pertimbangan atau opini mereka yang dijadikan dasar pengambilan keputusan. Satu kekhawatiran yang beralasan yang membuat banyak menteri bersikap pasif, atau justru tambah gencar memperkuat posisi mereka melalui lobi payung proteksi politik yang disediakan pada garantor KPN.
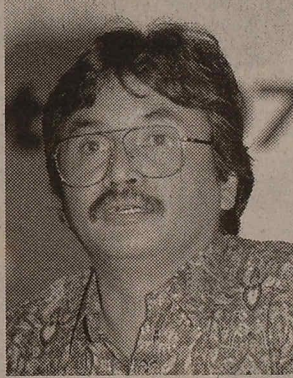
MUFRODI

Di titik ini, dua hal bertemu dan membuat anggota KPN tambah gelisah. Isu tiga menteri terlibat KKN, satu tuduhan yang sangat mengerikan di zaman reformasi ini, membuat lirik-lirikan di antara para menteri semakin tajam. Belum lagi teka-teki ini terjawab, Presiden meluncurkan isu *reshuffle* KPN.

Berpijak pada realita, *reshuffle* KPN memang dibutuhkan. Namun, dua hal berikut harus diperhatikan. Pertama, atas dasar alasan apa beberapa menteri dicopot? Kalau terlibat KKN, itu harus dibuktikan dulu di pengadilan. Kalau dinyatakan gagal, tentu mereka protes keras. Apa yang diharapkan dalam masa kerja 100 hari, bila masalah yang dihadapi demikian kompleks? Selain itu, mereka pun selama ini lebih banyak dibuat sibuk dengan percikan-percikan ide Presiden yang bersifat kasuistik, yang sulit dibingkai dalam satu gambaran visi dan misi yang utuh. Bukankah selama 100 hari pemerintahannya, Presiden lebih piawai membuat isu daripada menuntaskannya? Kedua, Presiden harus segera mengakhiri manajemen aduk-aduk saat menentukan para pembantunya. Negara ini tidak bisa diurus dengan cara *trial and error*. Orangnya ditunjuk dan dilantik dulu. Bila nanti bermasalah, bisa diganti. "Kok repot-repot," sebuah ungkapan yang sering muncul bila Presiden menghadapi satu masalah.

Presiden harus memulainya dengan mengutarakan visi dan misi yang jelas tentang bentuk masyarakat Indonesia Baru yang kita perjuangkan. Berdasarkan itu, Presiden (dan Wapres) menentukan kriteria orang yang dipandang mampu menyelesaikan sebuah misi. Setelah jelas kriterianya, baru didaftar siapa saja yang memenuhi kriteria itu. Dengan mencermati *track record*, atau berkonsultasi dengan DPR, atau menguji mereka, baru ditetapkan salah satu di antaranya. Cara ini terasa lebih *scientific*, sehingga tindakan Presiden dan Wapres bisa dipertanggungjawabkan. Setidaknya, pada tataran logika. Ini tentu dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyatnya, bahwa mereka benar-benar kaum profesional yang bisa segera menuntaskan krisis. □
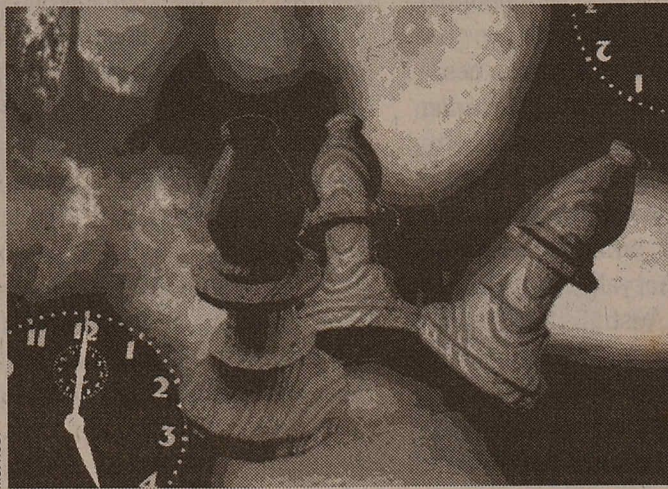
Katanya Diundang, Kok Sekarang Ditendang

Kendati ketentuan bebas becak masih berlaku, para tukang becak tetap berkeliaran di Ibu Kota. Hati-hati jika membuat "undangan", Pak Gubernur.

Niatnya sih baik, mengangkat nasib orang-orang yang kehilangan mata pencaharian akibat resesi ekonomi. Tapi, "undangan" kepada tukang becak agar datang ke Ibu Kota yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, satu setengah tahun lalu, ternyata merupakan *blunder*. Jakarta, yang sejak 1991 adalah daerah bebas becak, kini mulai dipadati kendaraan roda tiga yang sering dianggap biang kemacetan lalu lintas itu. Saat ini, tercatat sekitar 7.000 becak hilir-mudik di Ibu Kota.

Puluhan becak, misalnya, terlihat di sekitar Kebon Sirih, Karet Kuningan, Kali Pasir, Kwitang, atau Senen. Bahkan, beberapa tukang becak mulai berani beroperasi di sepanjang Jalan Sudirman, dari sekitar Benhil sampai Bundaran HI. Mereka biasanya *mangkal* di pertigaan atau perempatan jalan. Malah, saat hujan, para tukang becak itu tak segan menawarkan jasa kepada orang yang sedang menunggu bus di halte-halte sepanjang jalan protokol tersebut.

Kehadiran kembali becak di Jakarta belakangan ini jelas memunculkan pertanyaan. Soalnya, Perda No. 11 Tahun 1988 yang mengharamkan kehadiran becak di Jakarta masih belum dicabut. "Kami tetap memegang dasar hukum yang ada, yang melarang kehadiran becak di Jakarta," ujar M. Yanis, Kahumas Kodya Jakarta Pusat, kepada Rusman Widodo dari FORUM.

Sebenarnya, menurut Yanis, tahun 1991 becak sudah bersih dari Ibu Kota. Tapi, ketika krisis ekonomi melanda, banyak becak berdatangan dari luar Jakarta. Dalam keadaan seperti itu, Yanis mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. "Saat itu kan situasi krisis, lalu muncul era reformasi. Situasinya sangat kacau. Saat itu masyarakat cenderung memanfaatkan kebebasan tersebut untuk melanggar beberapa aturan hukum," ujar Yanis. Artinya, kemarakan becak di DKI hanya bersifat situasional dan bertautan dengan euforia politik kala itu. Kondisi seperti itu, kata Yanis, jelas tak bisa dibiarkan.

M. RIZAL

DEMO PENGEMUDI BECAK DI MONAS. *Datang memenuhi "undangan" Gubernur.*

Dan, para tukang becak pun resah. Senin pekan lalu, sekelompok tukang becak berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Menurut Konsorsium Kemiskinan Kota (UPC), Pemda DKI tidak bisa mengusir para tukang becak begitu saja. Memang, aturan yang melarang kehadiran becak di Jakarta masih berlaku. "Tapi, yang memfasilitasi itu siapa? Sewaktu reformasi, supaya terlihat reformis, mereka mengatakan OK, becak boleh. Karena krisis, becak boleh beroperasi di Jakarta," ujar Ketua UPC, Wardah Hafidz, kepada Ahmad Usmar dari FORUM. Akibatnya, kata Wardah, orang-orang yang semula memang berprofesi sebagai tukang becak, mendengar undangan seperti itu, lantas menjual harta anak-istri, menggadaikan tanah untuk membeli becak, dan mengadu nasib ke Jakarta. Dalam situasi seperti itu, menurut Wardah, mereka jelas tidak bisa digusur seenaknya. "Mereka tidak punya alternatif. Mereka telanjur menghabiskan uang untuk pekerjaan yang "dibuka" Gubernur. Menurut saya, gubernur semacam itu tidak berkompeten. Mundur saja," ujar Wardah.

Wardah juga menolak alasan kesemrawutan yang diakibatkan kehadiran becak. "Omong kosong. Sekarang, jalan tol yang tidak ada becaknya semrawut juga. Yang bikin semrawut adalah seperti polantas yang bisa disogok. Tapi, yang dijadikan kambing hitam yang paling lemah. Ya, tukang becak itu," tutur Wardah. Lagi pula, kata Wardah, pilihan pekerjaan atau profesi merupakan hak asasi. Jadi, orang bebas memilih sesuai dengan kemampuan mereka sendiri.

"Jika alasan mereka adalah hak asasi manusia untuk berusaha dan mencari nafkah, kami juga membenarkan," ujar Yanis. Cuma, menurut Yanis, hak asasi tentu tidak berarti harus melanggar hukum. "Jadi, kami kembalikan kepada prinsip demokrasi itu sendiri, yaitu upaya penegakan hukum untuk menimbulkan tertib sosial bermasyarakat," ujar Yanis. Dengan landasan itulah, menurut Yanis, Pemda Jakarta Pusat akan bertindak tegas membersihkan becak dari wilayahnya.

"Kami akan melakukan gugatan hukum kepada Pemda," kata Wardah tidak mau kalah gertak. Tampaknya, "perang" akan semakin seru.

Wahid Rahmanto

Kisah Gubernur BI dan Kapolri

Belum lama ini, media massa memberitakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Sjahril Sabirin menolak mengundurkan diri menyusul adanya hasil audit BPK. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI, Sjahril memang dapat bersikap begitu, mengingat posisi BI independen terhadap pemerintah. Jadi, dalam hal ini Presiden tidak dapat memberhentikan Gubernur BI. Dalam pengangkatannya pun, posisi pemerintah hanyalah sebagai pihak yang mengangkat dengan persetujuan DPR.

Adrianus Meliala
Kriminolog UI

Sungguh, situasi seperti itulah yang dikehendaki Polri menyusul keluarnya lembaga ini dari ABRI dan menjadi organisasi sipil. Suara Polri sejauh ini menghendaki struktur yang menempatkannya langsung di bawah presiden, sejajar dengan kementerian, tapi independen. Maka, ya, persis BI. Pertimbangannya mudah saja. Bila tidak langsung di bawah presiden, dikhawatirkan nasib Polri sama ketika menjadi bagian dari ABRI. Bila tidak sejajar dengan kementerian, dikhawatirkan alokasi anggaran tidak akan cukup besar menggerakkan 200.000 lebih personel Polri. Lalu, bila tidak independen, dikhawatirkan kepolisian tetap saja [bisa] menjadi *instrument of policy* pemerintah. Hal ini bertentangan dengan hakikat kepolisian sebagai *instrument of law* yang seharusnya hanya tunduk pada konstitusi dan hukum-hukum di bawahnya. Dan, kisah kemunculan Roesdihardjo sebagai Kapolri baru, menggantikan Roesmanhadi, lebih terlihat sebagai kemunduran dari proses menuju Polri mandiri tersebut.

Seperti diberitakan media massa, Gus Dur menginginkan Roesmanhadi diganti. Lantas, menyusul berita Roesmanhadi datang bersama dua jenderal polisi menemui Presiden. Hasilnya, secara tidak resmi dikabarkan bahwa Presiden Gus Dur sepakat salah seorang jenderal polisi itu akan diangkat sebagai Kapolri dan satunya lagi sebagai Wakil Kapolri. Namun, kemudian muncul berita bahwa Roesdihardjo tiba-tiba dipanggil Presiden dan selang beberapa jam kemudian dilantik menjadi Kapolri.

Kisah di atas sama sekali tidak mencerminkan suatu organisasi kepolisian yang, setidak-tidaknya, mencoba "berjarak" dengan pemerintah. Yang dipermasalahkan di sini tentu saja bukan hak prerogatif presiden mengangkat seseorang menduduki posisi tertentu. Di samping itu, juga tidak mempermasalahkan perihal gaya Presiden Gus Dur yang sering membuat kejutan. Yang dipermasalahkan, sekali lagi, adalah hubungan antara fenomena di atas dan kemungkinan di masa mendatang seorang kapolri bisa menolak mundur serta diganti, sejauh terdapat dasar hukum mengenai hal itu. Tapi, segera bisa dicermati bahwa harapan Polri agar bisa menjadi seperti BI ternyata masih jauh. Berangkat dari fakta ini, beberapa analisis bisa diajukan.
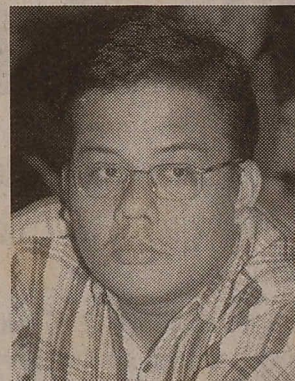
Pertama, amat mungkin pemimpin Polri tidak bisa atau tidak terbiasa mengartikulasikan kepentingan politik dan rencana organisasi Polri secara baik. Jadi, dalam hal ini Presiden mungkin saja tidak mengetahui hal itu. Kita ingat, baru setelah Presiden Gus Dur membacakan susunan Kabinet Persatuan Nasional, barulah Roesmanhadi menyampaikan aspirasi Polri. Bila sebelumnya telah mafhum, bisa jadi Presiden akan lebih mendahulukan pembentukan Komisi Kepolisian ataupun Badan Penanganan Keluhan/Pengaduan Masyarakat—dua lembaga yang tengah dipersiapkan dalam Rancangan UU Kepolisian yang baru—ketimbang buru-buru mengganti Kapolri.

Kedua, dalam kondisi hukum tidak dihormati dan penegakan hukum amat lemah seperti sekarang ini, seharusnya setiap upaya memberdayakan instansi penegakan hukum disambut baik. Pernyataan ini muncul dengan sebelumnya berasumsi bahwa pihak pemerintah telah mengetahui rencana Polri tersebut di atas. Namun, dengan berbagai pertimbangan, ternyata tidak melakukannya. Terdapat kemungkinan perubahan posisi Polri itu sekadar ditunda dengan pertimbangan yang bersangkutan belum siap. Namun, dapat pula muncul dugaan bahwa pemerintah sendiri tidak tahu apa itu indikator siap dan tidak siap. Juga tidak tahu perihal apa-apa yang perlu dilakukan untuk mengubah yang tidak siap menjadi siap. Walhasil, selalu mungkin pada Polri akan terjadi skenario yang sebelumnya terjadi pada BI. Pemerintahan Soeharto, ketika itu, akhirnya terpaksa menyatakan BI independen setelah ditekan IMF.

Ketiga, analisis yang paling pesimistis, pemerintahan Gus Dur mungkin tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya dalam hal keinginan mengendalikan polisi selaku alat negara. Dalam hal ini, termasuk menentukan perihal bagaimana Polri sebaiknya dikembangkan. Secara terbatas, hal itu telah kita lihat melalui sambutan Presiden Gus Dur saat melantik Roesdihardjo. Gus Dur menyatakan Polri perlu meningkatkan kemampuan investigasi. Tapi, benarkah persoalan terpenting Polri adalah investigasi? Singkatnya, ada kepentingan pemerintah di balik pengangkatan Roesdihardjo. Mungkin hal ini analog dengan mengapa Soeharto memilih Dibyo Widodo, yang mantan ajudannya, menjadi Kapolri.

Di pihak lain, kepentingan masyarakat tetap tidak terwadahi dalam struktur pembentukan, implementasi, apalagi pengubahan kebijakan kapolri. Roesdihardjo, misalnya, bukan tidak mungkin akan lebih mengutamakan keinginan Gus Dur dibanding mendahulukan pemolisian bergaya pelayanan. Roesdihardjo juga bisa dikhawatirkan cenderung lebih mengikuti kemauan pemerintah ketimbang mendesakkan keinginan Polri untuk independen, yang memungkinkannya [entah kapan] berkata "tidak" bila pemerintah memintanya mundur. □

MUFRODI
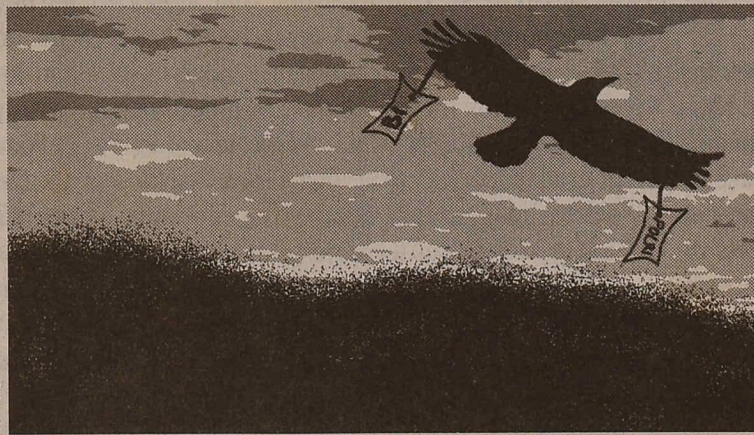
Siasat Kekuasaan dari Arok

Satu lagi roman sejarah yang sangat memikat karya Pramoedya. Tokoh-tokohnya tak seperti yang dikenal dalam buku-buku pelajaran sejarah.

TRAGEDI NASIONAL

PENGANGKATAN KORBAN G30S. *Tak ada lagi moral yang bisa jadi patokan.*

Satu hal yang sering, bahkan umum, dilakukan orang ketika mengomentari karya-karya Pram adalah "kekaguman" kepada penulisnya. Baik karena kemampuan Pram dalam menulis maupun wawasannya yang luas dan mendalam, khususnya sejarah, menjadikan tulisannya "sesuatu" yang sangat real dengan perjalanan dan kehidupan bangsa Indonesia—karena itu sering disebut sebagai novel sejarah—hingga bayangan dalam situasi dan kondisi seperti apa karya itu dilahirkan. Buku yang satu ini tampaknya juga tak lepas dari aroma seperti itu.

Tokoh Ken Arok, Ken Dedes, dan Tunggul Ametung yang dalam pelajaran sejarah di sekolah-sekolah selama ini digambarkan amat "kering", "hitam-putih", dan sekadar catatan kronologi sejarah, oleh Pram diubah menjadi "sesuatu" yang amat dinamis, kompleks, sukar ditebak, bahkan penuh misteri. Banyak ruang yang sifatnya "abu-abu" dan penuh paradoks di dalamnya. Namun—ini memang kelebihan Pram—semua digambarkan dengan kalimat lancar dan pilihan kata yang pas. Satu lagi, dengan latar belakang masyarakat dan budaya Jawa yang sangat diakrabi Pram, lengkap sudah buku ini.

Ken Arok memang seorang penjahat, perampok, dan seterusnya yang sejenis. Namun, sebagaimana diungkap Pram, ia juga seorang yang pandai dalam ilmu pengetahuan. "Arok tak pernah belajar paramasastra Sansekerta. Untuknya setiap mata pelajaran terlalu mudah disimpannya dalam ingatannya." (hlm. 47). Ia orang muda cerdas, giat, gesit, ingatannya baik, berani, kritis, dan tabah menghadapi segalanya. Yang menarik lagi, asal-usul Arok penuh misteri. Untuk menjadi brahmana, ia belajar kepada mahaguru Dang Hyang Lohgawe.

Toh, karena keberanian dan kekritisannya, dengan caranya, ia pun mengungkapkan kemunafikan gurunya sendiri. Sementara itu, karena kelebihannya, kegelapan asal-usulnya menjadikan Arok dipandang sebagai utusan para dewa untuk berbuat "sesuatu" yang mulia bagi masyarakat. Arok sendiri berarti "pembangun". Seperti dua sisi koin, atau Dewa Janus bermuka dua, begitu juga Pram menggambarkan Ken Arok: Seorang bandit, tapi ala Robin Hood; pembunuh tapi selektif terhadap mereka yang dianggap penindas. Memang, Pram bukan seorang penulis yang penuh slogan, propaganda, dan jargon politik, tetap konsisten di wilayah sastra. Tapi, pesan yang disampaikannya jelas: Kambing hitam dan berbagai trik politik kotor. Pembunuhan dan pengorbanan tidak bisa dipahami secara mudah dalam kaidah-kaidah moral.
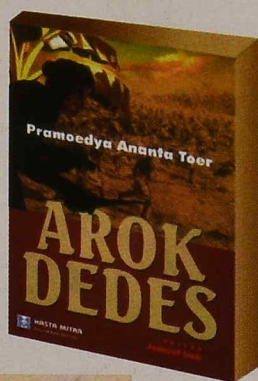
Sementara, hal sama juga hadir dalam sosok Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Yang pertama, ia seorang gadis kasta terhormat dan bangga akan diri, keluarga, dan lingkungannya. Namun, perjalanannya, yang selalu diyakini sebagai kehendak dewa, membawanya harus bersanding dengan Tunggul Ametung dan kemudian Ken Arok. Ia pun ikut berputar dalam pusaran perubahan sosial-politik yang begitu kompleks, juga kejam. Tak ada lagi moral yang bisa jadi patokan. Semua bergeser, berubah, dan menjelma baru sesuai dengan dinamika yang ada.

Tunggul Ametung pun tak jauh berbeda. Seorang perampok yang meniti perjalanan hidupnya menjadi seorang antek raja, dan selanjutnya menjadi raja itu sendiri. Ia berambisi besar untuk bisa bersentuhan dengan tangan-tangan dewa—hal yang sarat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Tumpang-tindih dan saling bergesekan antara kekuasaan dan kemuliaan, pembunuhan dan keadilan, persaudaraan dan fitnah, dan seterusnya, tereksplorasi dalam buku ini.

Maka, yang bisa kita renungkan: Apa seperti ini perubahan sosial-politik yang harus dilalui bangsa Indonesia? Kata-kata bijak bahwa sejarah selalu berulang mungkin tidak sepenuhnya benar. Namun, disandingkan dengan peristiwa G30S dan runtutan di belakangnya, sebagaimana disinggung, dan juga mungkin peristiwa-peristiwa lain yang sudah dan sedang terjadi di Indonesia sekarang, tulisan Pram melalui tokoh Ken Arok dan Ken Dedes ini bisa juga jadi cermin kita.

Nur Iman Subono

AROK DEDES
Pengarang: Pramoedya Ananta Toer
Penerbit: Hasta Mitra, 1999,
Jakarta, x + 418 hlm.

Ita Purnamasari:

"Perang Saudara Ini Harus Dihentikan"

M. RIZAL

KONSER "Panggilan Nurani untuk Duka Halmahera dan Ambon" yang digelar pada 18 Januari lalu, di Wisma Antara, memberi kepuasan tersendiri bagi Ita Purnamasari. Bukan saja mampu mengumpulkan dana lebih dari Rp 500 juta, tapi juga lantaran acara itu ternyata mendapat dukungan luas dari para artis dan musisi Ibu Kota. Dan Ita, bersama sang suami, Dwiki Dharmawan, berperan penting di balik acara itu. Memang, lewat Yayasan Skema (Seni untuk Kepedulian Masyarakat) yang mereka motori, acara itu berlangsung mulus dan meriah. "Setidaknya kami telah berbuat sesuatu untuk para korban tragedi di tempat itu," kata ibu muda 31 tahun dari Mohammad Fernanda, 2 tahun, ini.

T: Bagaimana ceritanya hingga diadakan konser amal ini?
J: Sebenarnya, kami sudah lima kali menyelenggarakan konser-konser amal seperti ini. Jadi, saya berharap agar ini berseri. Yang pernah kami lakukan, salah satunya, adalah menjual kaset tembang peduli. Hasil penjualan kaset itu kami salurkan ke Dompet Dhuafa Republika.
T: Khusus yang untuk Maluku ini...
J: Sehabis mudik, kami datang ke Jakarta dan membaca berita-berita yang semakin membuat kami terenyuh. Saya dan Mas Dwiki langsung bergerak malam itu juga, tepatnya pada 14 Januari silam. Malam itu juga kami langsung mengumpulkan teman-teman. Kami harus berbuat sesuatu.
T: Kenapa tertarik menggelar acara seperti ini?
J: Kebetulan saya dan Mas Dwiki punya Yayasan Skema. Justru lewat yayasan ini kami bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan acara-acara sosial seperti ini, yang sifatnya mengumpulkan dana untuk kami sumbangkan kepada yang membutuhkan. Kami paling senang bekerja begini, Mas. Kami bekerja di luar yang komersil. Jadi, supaya seimbang.
T: Selain menggagas konser amal, apa lagi yang akan Anda lakukan?
J: Kayaknya ini bakal berseri. Kami enggak berhenti sampai di sini karena masih banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan. Karena itu, nanti kami mau menggalang seperti ini lagi. Tapi, dengan artis-artis lain, dan lebih banyak lagi.
T: Sampai saat ini, pemerintah belum mampu menuntaskan kemelut di Maluku. Anda kecewa?
J: Wah, kalau itu, bagaimana ya? Yang pasti, saya cuma berharap agar pemerintah segera menuntaskan kasus-kasus yang sekarang ini terjadi. Perang saudara kayak begini harus segera dihentikan. Pemerintah harus segera bersikap. Jangan lambat menangani. ❑

Raja Abdullah

Menyamar

RAJA Abdullah dari Yordania punya hobi yang sering bikin repot pengawalnya: Menyamar.

Sejak menggantikan sang ayah, Raja Husein yang mangkat tahun lalu, sudah empat kali ia mengecoh para pengawal pribadinya. Terakhir, awal tahun ini, raja muda lulusan sekolah militer di Inggris ini berpura-pura jadi pasien di Rumah Sakit Umum Zarga di pusat Kota Amman.

Rupanya, sebelumnya Abdullah mendapat kabar, pelayanan di rumah sakit bagi kalangan menengah bawah itu sangat amburadul. Pasien-pasien miskin tak pernah dilayani semestinya. Nah, untuk membuktikannya, ia memakai cara yang dinilainya jauh lebih efektif ketimbang mendengar laporan staf-stafnya. Selama dua jam, ia menyaksikan pasien antre menunggu pelayanan, sementara tak seorang pun dokter menampakkan diri. "Ia mendapatkan informasi langsung dari tangan pertama," kata salah seorang stafnya.

Tak jelas, bagaimana ia selalu berhasil menyelinap ke luar istana yang dijaga ketat itu. Yang pasti, begitu tiba di luar, ia pun "berkelana" sebagai reporter televisi, sopir taksi, atau lelaki tua. Sementara, stafnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, begitu tahu ulah *nyentrik* Raja mereka. ❑

Aning Katamsi

Lumayan

BAGI Aning Katamsi, musik seperti darah yang mengalir di tubuhnya: Terus berputar. Seharinya, ibu seorang putri ini penuh dengan urusan musik. Jika tak mengajar piano dan vokal di YPM (Yayasan Pendidikan Musik) atau Sekolah Musik Farabi, ia bisa ditemui di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah. Di tempat itu, Twilite Orchestra, rombongan orkes yang "diikutinya", berpentas setiap dua bulan sekali.

"Sekarang, konser musik klasik agak lumayan," katanya. "Seperti Hotel Darmawangsa. Mereka sudah mengkhususkan diri menggelar konser musik klasik. Bahkan, sudah punya program hingga tahun 2000," katanya. Toh, ketika ditanya siapa musisi klasik favoritnya, Aning hanya tersenyum. "Semua musik bagi saya menyenangkan," ujar solis papan atas ini. ❑

M. RIZAL

Ikang Fawzi

Salawat

"KALAU dikategorikan sebagai pendatang baru, ya, saya siap," kata Ikang Fawzi. Rupanya, itu berhubungan dengan album salawat yang tengah dikerjakannya bersama Dwiki Dharmawan. "Dulu, asal *jreng* saja bisa langsung dibuat album. Sekarang lain," ujarnya. Yang ia maksud lain itu, antara lain, ia harus menyodorkan demo dulu. Jika dianggap layak, baru dibuat album.

Sejak sibuk jadi pengusaha properti dan kafé, lelaki bernama asli Ahmad Zulfikar Fawzi itu memang kian meninggalkan citra *rocker*-nya. Bahkan, belakangan, ia lebih banyak tampil dalam acara-acara yang berbau keislaman. Contohnya, ya album salawat tadi. "Bagaimanapun, media musik ini juga harus kita jadikan sarana melakukan siar," kata Ikang. "Mudah-mudahan perubahan ini merupakan hidayah," katanya seraya berharap ada produser yang bersedia memodali [calon] album terbarunya itu. ❑

M. RIZAL

Burung Unta Pembawa Petaka

Purwakarta, Karawang, dan Bekasi dinyatakan sebagai daerah endemik anthrax. Hewan dan manusia yang tertular bisa tewas mengenaskan.

M. RIZAL

BANGKAI BURUNG UNTA DI PURWAKARTA. *Bisa bertahan sampai 30 tahun.*

Rasa waswas menghinggapi warga Desa Cipasungsari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pekan-pekan ini. Pasalnya, tiga orang warga desa itu menunjukkan gejala-gejala terkena penyakit anthrax setelah memakan daging burung unta yang mereka jarah dari peternakan plasma burung unta milik PT Cisada Kema Suri. Sungguh sial, burung unta *(ostrich)* yang mereka sikat itu ternyata terjangkit penyakit anthrax. Selain warga, ratusan ribu ekor hewan ternak setempat juga terancam tertular penyakit itu.

Warga yang terjangkit anthrax dikhawatirkan tak hanya tiga orang. Sebab, ada ratusan warga desa yang menjarah dan memakan burung-burung unta yang hendak dimusnahkan itu, sejak awal Januari lalu. Menurut Hasan, Kepala Desa Cipasungsari, dari sekitar 3.000 burung unta yang akan dimusnahkan, baru 2.662 ekor yang sempat dibunuh. "Selebihnya dijarah warga desa," kata Hasan.

Kini, setelah mengetahui akibatnya, warga membuang bangkai-bangkai burung unta yang belum sempat dikonsumsi ke lokasi peternakan. "Padahal, dulu, sewaktu kami ingatkan, mereka tak peduli," kata Hasan.

Untuk mengantisipasi wabah anthrax, Dinas Kesehatan Purwakarta membuka posko penanggulangan penyakit anthrax di puskesmas desa di sekitar lokasi peternakan. Menurut Yosi Sukmayasa, Kepala Dinas Peternakan Purwakarta, pihaknya juga sudah melakukan vaksinasi antianthrax terhadap 3.463 ekor sapi dan 7.292 ekor kambing di 30 desa di Kabupaten Purwakarta. "Semua ternak di Purwakarta yang berjumlah sekitar 225 ribu ekor akan divaksin, dan baru selesai dua-tiga bulan," ujar Yosi.

Selain Pemda Purwakarta, Pemda Karawang dan Pemda Bekasi juga akan melakukan vaksinasi antianthrax karena kedua wilayah itu termasuk jalur merah endemik anthrax. Soalnya, penyebaran anthrax juga tak terbatas di daerah sekitar lokasi awal. Hewan ternak yang berada jauh dari lokasi pun bisa terkena anthrax bila memakan rumput yang berasal dari daerah endemik.

Sementara itu, untuk mencegah penyebaran bakteri anthrax *(bacillus anthracis)*, menurut Dr. Budi Tri Akoso, Direktur Bina Kesehatan Hewan Departemen Pertanian, pihaknya telah menginstruksikan agar bangkai burung-burung unta yang terkena anthrax dimasukkan ke dalam liang sedalam tiga-empat meter, lalu dibakar dan ditaburi gamping. Daerah sekitar lokasi peternakan juga harus dinyatakan tertutup untuk lalu lintas ternak selama dua minggu. Namun, hewan yang berada di sekitar lokasi mesti terus divaksinasi.

Di lokasi peternakan, bangkai-bangkai burung unta memang telah dikubur. Tapi, tak jelas apakah bangkai-bangkai itu juga dibakar dan ditimbuni gamping. Yang tersisa hanyalah dua lubang yang ditimbuni tanah serta 12 ekor bangkai tanpa kaki dan kepala yang dibiarkan teronggok. Sementara, papan tanda "daerah tertutup" tak ada lagi di tempatnya, sehingga status daerah itu tak jelas.

Padahal, jika tak dibakar, bangkai burung unta yang terkena anthrax akan mengeluarkan kuman ketika membusuk. Kuman ini akan membentuk spora yang bisa bertahan selama 15-30 tahun, bahkan di dalam tanah. Burung unta terkena penyakit anthrax karena mereka suka memakan tanah untuk membantu pencernaannya. Tapi, penyakit ini bisa pula tertular dari hewan liar yang menjadi *carrier* (pembawa kuman penyakit) anthrax.

Diduga, burung unta milik PT Cisada tertular bakteri yang berasal dari lokasi peternakan. Sebab, sejak zaman Belanda, Purwakarta dikenal sebagai daerah endemik penyakit anthrax. Namun, sejauh ini masih belum jelas dari mana tepatnya asal *bacillus anthracis* itu.

Celakanya, bukan hanya hewan yang bisa terjangkit kuman antrax. Melalui pernapasan, makanan, dan luka, kuman tersebut bisa masuk ke dalam tubuh manusia. "Orang yang dimasuki kuman akan terinfeksi," kata Budi. Kulit yang terinfeksi akan membengkak, dan suatu ketika akan pecah, sehingga menimbulkan luka berbentuk cekung dengan warna hitam di tengahnya. Jika terlambat diobati, infeksi tersebut akan sulit disembuhkan. Umumnya, obat yang diberikan kepada penderita anthrax adalah penisilin dan streptomisin.

Lebih parah lagi bila kuman masuk ke dalam pembuluh darah atau *intestinal*. Penderitanya bisa meninggal dunia. Karena itulah, Dinas Kesehatan Purwakarta mengimbau agar warganya yang merasa memakan daging burung unta segera memeriksakan diri ke puskesmas.

Riza Sofyat

Korek Kuping dari Yogyakarta

Dengan gaya naif, Handiwirman menyuguhkan kekumuhan dan kekerasan. Toh, korek kuping itu tak hanya nyaman, tapi juga menghentak.

Pernahkah Anda menyelinap ke perumahan-perumahan kumuh, tempat pemandian umum menjadi salah satu ciri? Pengalaman itulah, mungkin, yang teringat ketika kita menyaksikan *Sabun*, salah satu karya perupa Handiwirman di Galeri Lontar, Jakarta Timur. Karya itu menyuguhkan kembali aroma kekumuhan dan kemiskinan yang berlangsung di sekitar kita: Wadah sabun murahan yang pudar warna aslinya, sabun yang mengering, dan sisa gumpalan rambut.

Dan, kekumuhan, juga kekerasan, memang menjadi aura utama pameran Handi kali ini. Itu tak hanya disajikannya lewat *Sabun* tadi, tapi juga *Mencibir* dan *Bungkus*. *Mencibir* tak lebih dari sebuah kolase foto yang dilengkapi coretan kekanak-kanakan di sana-sini. Gambar tadi dibingkai sebuah bingkai usang, sebagaimana foto yang jadi obyek dan fokus kolase tadi. Sedangkan *Bungkus*, tak lain adalah segumpal kain putih berbercak merah—mengingatkan kita kepada darah—dibungkus kantong plastik.

Aura kekerasan bisa kita rasakan lewat *Lidah* dan *Tunas*. Yang pertama adalah empat potong "lidah". Adapun *Tunas*, sepucuk tanaman yang diselipi pisau dapur, seakan menggambarkan pemangkasan atau pembunuhan sebuah generasi. Sedangkan di bagian lain, Handi menyajikan potongan tangan dan bagian-bagian tubuh lainnya.
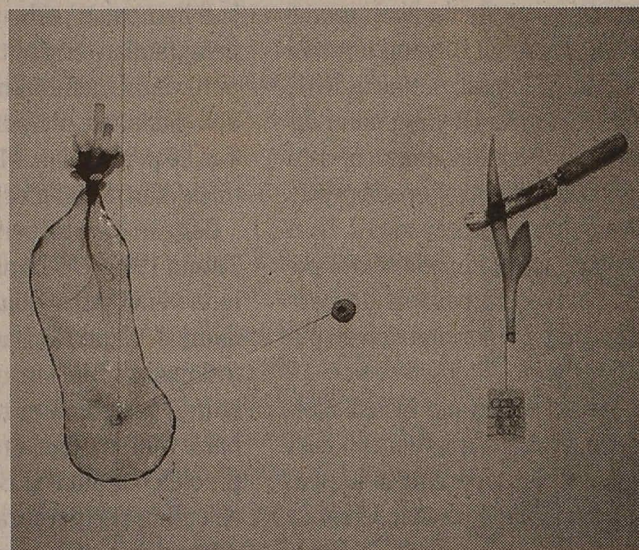
Walhasil, menyaksikan pameran perupa kelahiran Bukittinggi itu adalah menikmati sebuah teror. Meskipun, di sana-sini, teror itu lebih bersifat menggelikan, bukan menyeramkan. Ya, tampaknya, selain menyuguhkan teror, Handi juga berniat bermain-main sekaligus meledek. Semangat meledek dan bermain-main itu tak hanya disajikannya lewat *Mencibir*, yang dari judulnya pun terasa sekali niat perupanya, tapi juga dalam *Potong, Cuci, Korek, Sumpal.*

Berwujud sebuah bak mandi ditempeli sepasang kuping yang sedang dikorek, karya ini sebenarnya bisa disebut yang paling "waras" di antara lainnya. Dalam arti, terasa sekali kesungguhan si perupa dalam memikirkan konsep ataupun mewujudkannya. Asosiasi kemapanan secara cerdik disimbolisasikan lewat bak mandi dan mengorek kuping, lengkap dengan dinamo yang terus berputar. Terbayang, bagaimana "mapan"-nya berendam di bak mandi seraya *merem-melek* karena telinga dikilik-kilik. *Potong* benar-benar nyaman sekaligus menghentak.

Soal kemapanan tadi perlu ditegaskan. Sebab, Handi adalah salah seorang anggota Jendela, kelompok seni rupa yang beranggota sejumlah mahasiswa ISI, Yogyakarta, tempat pemuda kelahiran Bukittinggi itu menimba ilmu. Dan, karya-karya mereka tak hanya memakai bahan-bahan yang tidak umum dan kerap bersifat minimalis, tapi juga seakan mempertanyakan batasan patung yang mapan selama ini. "Kalaupun bukan membebaskan batas-batas yang pernah ada, memberikan efek untuk memfasirkan kembali batasan patung," kata pengamat seni rupa Hendro Wijanto, beberapa waktu silam, kala mengomentari karya-karya eksponen Jendela lainnya, Rudi Mantovani dan Yusra Martunus (FORUM, 5 Desember 1999).

Jika kedua rekannya membisikkan pertanyaan tadi secara halus, bahkan liris dan puitis, Handi, yang salah satu lukisannya sempat mendapat penghargaan Philip Morris, melakukannya dengan gaya naif. Maka, "kekumuhan" kerap menyembul dari karya-karyanya. Apakah Handi menyadari hal itu atau tidak, entahlah. Yang jelas, itulah yang terasa dari pameran yang berakhir pada 20 Januari 2000 itu.

Maman Gantra

ANNAS

PAMERAN SENI PATUNG "POTONG, CUCI, KOREK, SUMPAL" KARYA HANDIWIRMAN. *Simbolisasi yang cerdik.*
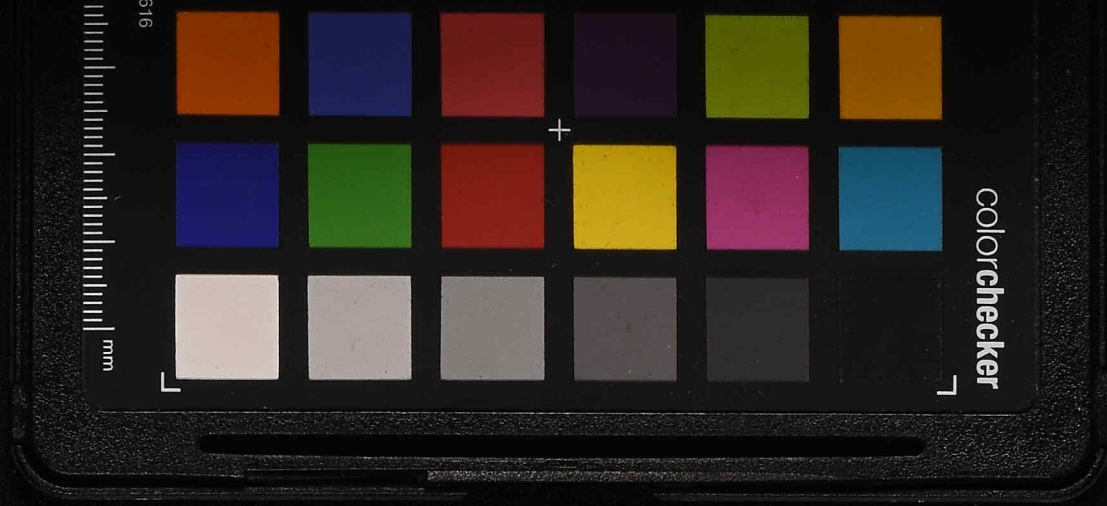
KOLOM

"Pertikaian" BI-Pemerintah

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU Bank Indonesia) dewasa ini tampaknya menjadi titik sentral dalam "pertikaian" antara manajemen Bank Indonesia (BI) dan pemerintah. Friksi menajam ketika ada indikasi Presiden Gus Dur akan mengganti Gubernur BI Sjahril Sabirin. "Pertikaian" itu bermula dari hasil audit BPK yang memberikan predikat *disclaimer* atau tidak ada opini atas pemeriksaannya terhadap BI, terutama yang berhubungan dengan temuannya mengenai kemungkinan penyimpangan terhadap pemberian fasilitas BLBI. Saling mengancam dan menyalahkan berkembang, kendati akhirnya antara BI dan Departemen Keuangan ada "sedikit" pengertian, terutama mengenai perlu-tidaknya BI direkapitalisasi atau disuntik dana untuk menambah modal sebagai tambahan atau pengganti terhadap modal BI yang tererosi karena kerugian yang diderita. Cuma, yang janggal, menurut IMF, pemerintah masih mempunyai "piutang" kepada BI yang nanti dapat dikonversi menjadi tambahan modal BI. Padahal, menurut data dan pengalaman selama ini, BI tidak pernah berutang kepada pemerintah. Sebaliknya justru pemerintah yang berutang kepada BI. Dari neraca BI November 1999, terlihat pos tagihan BI kepada sektor pemerintah tercatat sekitar Rp 255 triliun. Sementara, pos rekening pemerintah sekitar Rp 101 triliun, sehingga neto pemerintah masih punya kewajiban kepada BI senilai Rp 154 triliun.

Rijanto
Pengamat Perbankan

Namun, terlepas dari itu semua, upaya menggoyang Sjahril oleh pihak-pihak tertentu semakin kuat karena ada anggapan posisi Gubernur BI sangat vital dan strategis untuk kepentingan-kepentingan tertentu di masa mendatang. Tapi sayang, upaya tersebut tampaknya tidak mudah dilakukan karena BI "terlindungi" UU Bank Indonesia, sehingga bank sentral tersebut tidak dapat dicampuri atau diintervensi pihak-pihak di luar BI, termasuk Presiden Gus Dur. Maka, semua manuver terpaksa ditempuh untuk "menggiring" dan membuat Sjahril Sabirin tidak berkutik dan akhirnya secara sukarela terpaksa mengundurkan diri. Situasi seperti ini memang tampaknya diharapkan terjadi, sehingga aturan main dalam UU Bank Indonesia tidak tersimpangi. Sementara, pemerintah dan juga Gus Dur tidak hilang muka dan tidak merasa dilecehkan. Namun, tampaknya Sjahril Sabirin tahu posisinya cukup kuat mendapat dukungan legalitas, sehingga ia berani mengatakan tidak akan mundur karena persyaratan yang diperlukan untuk penggantian belum terpenuhi.

Salah satu pasal (Pasal 41 Ayat 5) dalam UU Bank Indonesia menegaskan bahwa anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan enam tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan berikutnya. Ketentuan lain menyebutkan bahwa anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, atau berhalangan tetap. Dalam hal ini, pengunduran diri dimaksudkan sebagai pengunduran sukarela. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, upaya penggantian Gubernur BI saat ini pada dasarnya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Dan, jika penggantian Gubernur BI itu dipaksakan, supremasi hukum akan terlanggar.

Menghadapi situasi seperti ini, posisi pihak-pihak yang bersangkutan serbasulit. Padahal, diperlukan solusi segera agar permasalahan tidak berlarut-larut karena tertundanya penuntasan permasalahan akan menjadi hambatan pada upaya pemulihan ekonomi nasional. Kalau toh penggantian tersebut dipaksakan, mekanisme yang ada perlu ditempuh, yaitu membuktikan bahwa Gubernur BI telah melakukan tindak pidana kejahatan yang memungkinkan pejabat tersebut diajukan ke pengadilan. Masalahnya, mungkinkah proses tersebut dapat dilakukan dengan cepat?

Bagaimanapun, berbagai ketentuan yang tertera dalam UU No. 23 Tahun 1999 (UU Bank Indonesia) memang sulit untuk ditembus, diintervensi, atau dilakukan penyesuaian-penyesuaian tanpa berdampak negatif terhadap sikap independensi, kemandirian, dan profesionalitas BI. Dan, di samping itu, dalam UU tersebut juga banyak aturan yang belum mungkin diterapkan saat ini. Misalnya, bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas tidak mungkin lagi memperoleh bantuan KLBI secara serta-merta tanpa memberikan jaminan cukup berupa surat-surat berharga yang solid. Apabila aturan ini diterapkan untuk menghadapi situasi krisis baru, diperkirakan tidak ada satu pun bank yang sanggup beroperasi alias tutup.

Fasilitas kredit, misalnya, untuk usaha kecil, koperasi, ataupun kredit program lainnya, dengan keberadaan UU No. 23 Tahun 1999 tidak mungkin lagi dilakukan dengan pengucuran KLBI, tapi sepenuhnya menjadi beban pemerintah (APBN). Masalahnya, apakah fasilitas kredit atas beban APBN itu bisa diberikan pada setiap saat diperlukan tanpa menimbulkan distorsi terhadap kebijakan fiskal (moneter) yang sudah digariskan?

Kembali kepada masalah penggantian Gubernur BI yang ternyata tidak mudah itu. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya harus dicari mekanisme yang memungkinkan terlaksananya penggantian dengan sejauh mungkin tetap mempertahankan posisi independen bank sentral seperti yang diidamkan. Dalam hubungan ini, memang ada baiknya dilakukan perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 1999 yang mengakibatkan "kebuntuan" dan mekanismenya perlu disesuaikan untuk mengantisipasi permasalahan serupa di masa mendatang. □
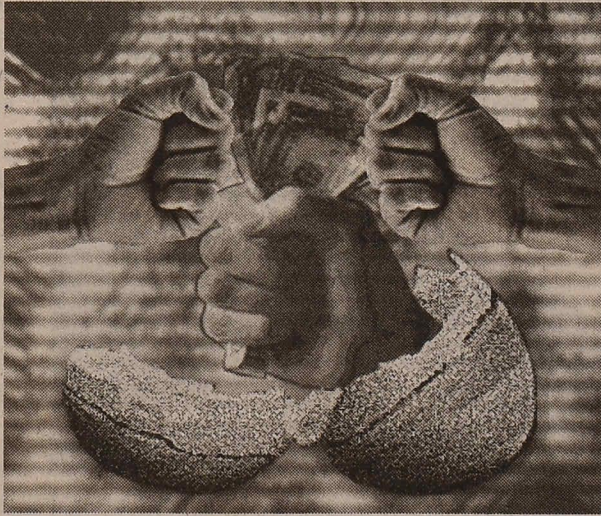
ALBUM

AMARTIWI SALEH

MENINGGAL DUNIA: **Amartiwi Saleh,** mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandung, meninggal dunia, Jumat, 14 Desember 1999, dalam usia 76 tahun di Rumah Sakit Santo Boromeus. Dokter menemukan flek di dada kiri bagian dalam yang diduga tumor. Tapi, sebelum dilakukan tindakan medis lainnya, tokoh hukum ini mengembuskan napas terakhirnya.

Sejak dua tahun lalu, Amartiwi mulai mengundurkan diri dari dunia hukum yang selama puluhan tahun digelutinya. Semasa hidupnya, Amartiwi dikenal sebagai tokoh yang keras dan selalu bersemangat. Bahkan, di usia senja, Amartiwi ikut berkiprah di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai pengurus *caretaker* di saat YLBHI mengalami gejolak pada 1995.

BUDIONO SANTOSA

PROMOSI (I): Dr. **Budiono Santosa,** Ph.D. dipercaya Badan Kesehatan Dunia (WHO) menduduki jabatan tetap sebagai Regional Advisor in Pharmaceutical di Western Pacific Regional Office. Budiono selama ini menjabat Kepala Pusat Studi Farmakologi Klinik dan Kebijaksanaan Obat di Universitas Gadjah Mada.

Nama Budiono memang sudah tak asing lagi di lingkungan WHO. Selama 15 tahun terakhir, ia sudah dilibatkan dalam berbagai program di sektor obat dan farmasi di WHO serta berbagai organisasi internasional lainnya di negara-negara berkembang.

ECOSOC

PROMOSI (II): Mengawali tahun 2000, Indonesia mendapat kepercayaan masyarakat internasional. Tanggal 27 Januari ini, Indonesia akan menerima tanggung jawab sebagai Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc). Menurut Dr. Makarim Wibisono, wakil tetap RI di PBB, kepercayaan ini sangat berarti bagi Indonesia, khususnya dalam pemulihan citra Indonesia yang tengah terpuruk belakangan ini.

Posisi ini pun memiliki nilai historis yang tinggi. Sebab, Indonesia menjadi negara pertama yang memimpin Ecosoc pada abad dan milenium baru, sehingga peran Indonesia menjadi sangat diperhitungkan dalam Millennium Assembly, South Summit, dan Unctad pada tahun ini yang akan dihadiri para kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk Indonesia. ❑

OBITUARI

Awan Kelabu di Panggung Lawak

Ramadan lalu, Iskak sempat tampil di acara "Warna-Warni" di RCTI. Saat itu, pelawak kelahiran Solo, 67 tahun silam, ini tampak lemah. Maklum, sudah lama penyakit jantung menggerogoti tubuhnya. Namun, tak ada yang menduga, itulah penampilan terakhir Iskak, sebelum akhirnya ayah empat anak ini benar-benar pamit dari keluarganya, kawan-kawan sesama pelawak, dan para penggemar seni lawak.

Sebagai pelawak, nama Iskak berkibar sejak akhir 1960-an saat ia bergabung bersama Bing Slamet, Eddy Sud, dan Ateng dalam Kwartet Jaya. Sebelumnya, pelawak yang bernama lengkap Iskak Darmosuwiryo ini bekerja sebagai karyawan RRI. Kemudian, ia merintis karir sebagai pelawak pada 1955.

Anak pedagang yang pernah berkuliah di Fakultas Ekonomi UGM ini termasuk pelawak yang lama bertahan. Setelah Kwartet Jaya bubar, bersama Ateng ia membentuk kelompok lawak Ateng-Iskak Grup. Semasa inilah, Iskak tak cuma laku di panggung-panggung lawak, tapi juga di layar lebar. Tidak kurang 20 film telah dibintanginya.

Kendati begitu, menjelang usia senja, Iskak mulai menjauhi panggung. Soalnya, dua tahun silam, suami Ustoriyah ini ketahuan mengidap penyakit jantung. Toh, ia bertekad tidak pernah sepenuhnya meninggalkan dunia lawak. "Bagaimanapun, periuk nasi saya ya di sini," katanya. Seminggu setelah Lebaran, pelawak kelahiran 3 Maret 1933 itu mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Kematian Iskak seakan menambah kelam mendung yang menyelimuti panggung lawak Indonesia. Dua minggu sebelumnya, Suprapto Wibowo, teman lawak Iskak dalam acara "Ria Jenaka", mendahului pergi ke alam baka. Pelawak yang lebih dikenal dengan nama panggung Esther ini sudah lama mengidap penyakit diabetes, lever, dan asam urat. Namun, Prapto memang dikenal bandel, tak mau mendengar nasihat dokter. Ayah satu anak itu baru menyerah setelah kakinya luka melepuh dan membengkak. Ia pun mau dibawa ke Rumah Sakit Islam Jakarta. Di rumah sakit inilah Suprapto mengembuskan napas terakhir di usia 55 tahun.

Nama ayah satu anak ini mulai dikenal masyarakat setelah bergabung dengan Abdul Ayub Djalal dan Herry Koko dalam Surya Grup. Namanya makin berkibar saat ia bergabung dengan kelompok Jayakarta Grup bersama Cahyono, Jojon, dan Uuk. Perannya sebagai perempuan manja, centil, dan gemar memakai daster bunga-bunga itu membuat sosok Prapto alias Esther tak mudah dilupakan, meski belakangan ini *job* melawak tak lagi ramai.

KOMPAS & BINTANG INDONESIA

UUK, SUPRAPTO (ESTER), DAN INSET ISKAK.

Prapto seakan menyusul kepergian sahabatnya sendiri, Uuk Hasanuddin, yang meninggal dunia pada 18 Desember 1999. Pelawak berusia 47 tahun ini meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Lestari, Kalimalang, Bekasi, karena penyakit kanker kelenjar getah bening. Semula, karena merasa penyakitnya tidak parah, Uuk mengobatinya dengan jamu-jamuan dan pengobatan tradisional. Namun, tiga bulan sebelum mengembuskan napas terakhirnya, penyakitnya semakin parah. Akhirnya, pihak keluarga membawa Uuk ke RSCM.

Meski sudah ditangani secara medis, penyakit Uuk tak kunjung sembuh. Akhirnya, Uuk dibawa ke Rumah Sakit Budi Lestari karena tenggorokannya sulit menelan makanan. Tidak ada pesan terakhir yang diucapkannya sebelum meninggal dunia. Iskak, Prapto, dan Uuk, selamat jalan.... ❑

Ali Muda Siregar:

"Pesangon Saya Diam-Diam Diambil Kembali"

Niat Ali Muda Siregar, 58 tahun, untuk bisa menikmati uang pesangon di hari tua harus ditangguhkan. Pasalnya, uang ia terima dari bekas tempat bekerjanya, PT Caltex Pacific Indonesia, yang disimpan di Bank Dagang Negara (BDN) telah diambil kembali oleh perusahaan minyak itu. Ali sendiri tak pernah diberi tahu ihwal pengambilan tersebut. Toh, polisi menganggap tindakan itu tak mengandung unsur pidana. Padahal, pengambilan paksa itu jelas-jelas melanggar UU Perbankan. Berikut penuturannya kepada FORUM.

Rasanya, pengabdian saya selama 30 tahun di PT Caltex Pacific Indonesia sia-sia saja. Loyalitas saya selama lebih dari seperempat abad dibalas dengan ketidakadilan. Perusahaan minyak raksasa itu telah menahan uang pesangon saya sebesar Rp 86 juta. Padahal, uang tersebut telah sempat ditransfer ke rekening saya di Bank Dagang Negara (BDN) cabang Pekanbaru.(sekarang Bank Mandiri). Namun, tanpa seizin saya, bank milik pemerintah itu telah membekukan rekening saya atas permintaan Caltex.

Padahal, uang itu merupakan bekal hidup untuk menjalani masa tua setelah pensiun. Hingga kini, hampir empat tahun setelah saya mengajukan pensiun dini, bayangan untuk menikmati hidup dengan mengandalkan uang hasil jerih payah setelah bekerja puluhan tahun lenyap sudah. Seakan tenggelam seiring dengan belum jelasnya perjuangan saya untuk mendapatkan kembali hak saya itu.

Musibah, jika saya boleh menyebutnya dengan istilah ini, bermula ketika saya mengajukan diri untuk ikut program Home Equity Loan Plan (HELP) pada 1994. Program ini dirancang guna membantu karyawan Caltex untuk memiliki rumah sendiri. Saya tertarik ikut. Sebab, selain saya belum memiliki rumah, program ini dijamin perusahaan tempat saya bekerja. Apalagi, saat itu saya menganggap Caltex sudah menjadi bagian dari hidup saya dan bisa memberi perlindungan bagi saya sekeluarga.

WAHYUDI EL PANGGABEAN

ALI MUDA SIREGAR IN ACTION. *Berpegang pada klausul perjanjian.*

Melalui program itu, saya memutuskan untuk membeli rumah di Depok, Jawa Barat. Tepatnya, di perumahan Griya Depok Asri. Saya memilih rumah tipe Alamanda dengan harga Rp 162 juta. Sesuai kesepakatan, perusahaan akan memotong gaji saya sebesar Rp 650 ribu setiap bulan sebagai angsuran kepemilikan rumah.

Medio Desember 1996, kondisi kesehatan saya tidak memadai lagi untuk bekerja. Karena itulah, saya pun mengajukan permohonan pensiun dini kepada perusahaan. Saat itu, usia saya masih 55 tahun. Caltex rupanya memahami kondisi kesehatan saya hingga akhirnya mereka mengabulkan permohonan tersebut. Perusahaan berjanji akan memberikan pesangon sesuai dengan masa kerja saya. Meski demikian, saya tidak lupa akan kewajiban saya untuk membayar uang cicilan rumah kepada Caltex. Apalagi, saat itu saya ma-

sih memiliki tunggakan sebesar Rp 120,6 juta.

Namun, sesuai ketentuan dalam program HELP, setiap karyawan yang mengajukan pensiun dini hanya perlu membayar sisa angsuran sebesar 50 persen. Tentu saja, ketentuan itu sangat melegakan. Apalagi, kondisi kesehatan saya sudah tidak memungkinkan lagi untuk mencari penghasilan tambahan.

Pada 19 Desember 1996, Caltex mentransfer uang pesangon ke rekening saya di BDN. Namun, belum lagi saya sempat menikmatinya, tiba-tiba saya dihubungi Manajer Personalia Caltex, Iwan.H. Jalinus. Tanpa diduga, ia menyebutkan adanya salah perhitungan soal sisa cicilan rumah yang harus saya bayar. Iwan mengatakan, ketentuan pembayaran 50 persen bagi yang mengajukan pensiun dini sudah tidak berlaku. Berarti, saya harus membayar penuh semua sisa cicilan kepada Caltex.

Tentu saja saya menolak mentah-mentah pernyataan itu. Apalagi, salah satu klausul perjanjian yang dilakukan di hadapan notaris menyebutkan, bila di kemudian hari terjadi perubahan, yang dipakai adalah perjanjian yang sudah dibuat.

Meski begitu, Iwan tetap ngotot agar uang itu dikembalikan. Sementara saya berpegang teguh pada perjanjian yang sesuai prosedur hukum. Namun, tanpa diduga, Caltex bersekongkol dengan BDN. Ketika saya mengecek rekening saya, pesangon sebesar Rp 86 juta telah lenyap. Uang yang saya harapkan menjadi bekal di hari tua dicuri begitu saja tanpa sepengetahuan saya.

Saya menganggap BDN melanggar UU Perbankan. Karena itu, saya menggugat kedua pihak ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sekaligus melaporkan secara pidana ke polisi.

Dasar gugatan adalah Pasal 49c UU Perbankan. Di situ disebutkan, pemindahan rekening tanpa sepengetahuan pemilik diancam pidana penggelapan dan bisa dikenai penjara 15 tahun atau denda Rp 10 miliar.

Pada persidangan April 1997, Majelis Hakim yang dipimpin M.T.L. Tobing mengabulkan gugatan saya. Juga memerintahkan para tergugat untuk mengembalikan uang yang telah mereka rampas. Bahkan, hakim pun mengabulkan nilai gugatan saya sebesar Rp 200 juta sebagai ganti rugi atas tindakan sewenang-wenang. Meski demikian, hingga saat ini, uang tersebut belum pernah saya terima. Pasalnya, perkara itu masih menggantung di tingkat kasasi dan keputusan akhir untuk masalah ini belum jelas.

Yang membuat hati saya teriris adalah soal pengaduan saya ke polisi menyangkut pelanggaran UU Perbankan yang dilakukan oleh BDN dan Caltex. Masalah yang saya yakini menyangkut perkara pidana ini saya ajukan ke Polda Riau. Namun, nyaris tiga tahun berlalu, pengaduan itu tak kunjung ditindaklanjuti.

Berulang kali saya menanyakannya, tapi tidak satu pun jawaban yang keluar dari mereka hingga tiba-tiba mereka mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam surat itu, polisi menyebutkan tidak ada unsur pidana dalam kasus yang saya alami. Padahal, tindakan dua lembaga itu jelas-jelas merupakan pelanggaran perbankan sebagaimana pertimbangan hakim di pengadilan.

Tapi, semua seakan-akan sudah bersekongkol untuk tidak memenangkan saya. Kini, satu-satunya harapan saya adalah keluarnya putusan kasasi yang adil. Juga adanya tindakan hukum terhadap para pelanggar UU Perbankan yang merugikan saya.

Fahmi Imanullah
dan Wahyudi E.L. Panggabean (Riau)

WAHYUDI EL PANGGABEAN

GEDUNG BDN PEKANBARU. *Tindakannya melanggar UU Perbankan.*

Dirman:
"Tindakan Itu Lumrah"

Agaknya, bagi Bank Dagang Negara (BDN) yang kini bernama Bank Mandiri, pengambilan dana nasabah Ali Muda Siregar tidak terlalu menjadi masalah yang serius. Salah seorang kuasa hukumnya, Dirman, yakin tindakan yang dilakukan kliennya tidaklah salah. "Tindakan itu adalah hal yang lumrah. Apalagi BDN merupakan tempat pembayaran gaji karyawan Caltex," kata Dirman.

Begitu pula sikap Mayor S. Pandiangan, Kadispen Polda Riau, perihal pengaduan Siregar yang tak kunjung ditindaklanjuti. "Kasus itu adalah kasus perdata, tidak ada unsur pidana. Jadi, tidak ada masalah lain dan tidak dicampuri urusan-urusan lain dalam mengeluarkan SP3 itu," katanya. Toh, ia membantah anggapan menyepelekan meski pengaduan Siregar sempat mengendap selama tiga tahun. "Pengaduan itu baru bisa ditangani karena kesibukan kami yang demikian padat," ujar Pandiangan. Ia juga menegaskan, tidak ada persekongkolan dalam menangani perkara ini seperti yang dituduhkan Siregar. □

Pak Ci, Banjir Itu Datang Lagi

Jalan tol Prof. Sedyatmo kembali terkena banjir.
Proyek Pantai Indah Kapuk dituding sebagai penyebabnya.

Jadwal penerbangan sejumlah pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta, kacau-balau di pengujung tahun lalu. Keberangkatan sejumlah pesawat tertunda akibat banyak penumpang yang terlambat datang. Penyebabnya, jalan tol Prof. Sedyatmo yang menghubungkan Jakarta dengan Bandara Soekarno-Hatta tergenang air setelah diguyur hujan sepanjang hari.

SUARA PEMBARUAN

BANJIR DI JALAN TOL. *Telah ditengarai sejak lama.*

Seperti tahun-tahun lalu, kesalahan pun ditimpakan kepada PT Mandara Permai sebagai pengelola kawasan permukiman Pantai Indah Kapuk (PIK), milik Ciputra. Menneg Lingkungan Hidup Sonny Keraf, pekan lalu, mengimbau agar Pemda DKI meneliti sejauh mana kesalahan pihak pengelola proyek PIK.

Sebetulnya, daerah Angke-Kapuk merupakan kawasan hutan bakau (*mangrove)* yang berfungsi menjaga garis pantai dan melindungi daratan dari masuknya air laut. Pada 1977, Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan, kawasan Angke-Kapuk merupakan hutan lindung, cagar alam, hutan wisata, hutan pembibitan, dan "lapangan dengan tujuan istimewa (LTDI)". Masih menurut SK tersebut, Dirjen Kehutanan akan mengatur LTDI secara lebih spesifik.

Namun, pada 1982, Dirjen Kehutanan mengirim surat kepada PT Metropolitan Kencana, milik kelompok Ciputra, tentang upaya pengembangan hutan Angke-Kapuk. Metropolitan Kencana kemudian menunjuk Mandara Permai sebagai pelaksana operasional. Dua tahun kemudian, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 40, Mandara Permai mengantongi izin pengelolaan kawasan Angke-Kapuk bersama Departemen Kehutanan dan Pemda DKI.

Pada 1985, terbit SK pengesahan hasil pengukuran dan pemancangan batas. Dari areal seluas 1.154, 49 hektare itu, Mandara Permai mendapat 813,63 hektare yang lalu dijadikan proyek PIK. Sisanya untuk cagar alam, hutan lindung, hutan wisata, dan tempat pembibitan kehutanan, saluran air (*drain*) Cengkareng, transmisi tegangan tinggi, jalan tol, dan jalur hijau. Mencermati desain lokasi di atas, tak diragukan lagi, proyek PIK merupakan penerjemahan dari LTDI. Tahun itu juga, pembangunan PIK dimulai.

Tapi, sejak awal, Proyek PIK telah ditengarai bakal menyebabkan banjir di daerah sekitar Cengkareng, termasuk jalan tol Prof. Sedyatmo yang juga dibangun pada tahun yang sama. Tak kurang Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup saat itu, Emil Salim, pernah melayangkan surat ke Pemda DKI agar menghentikan proyek PIK.

Ciputra sendiri menepis dugaan itu. "Saya telah menyiapkan tiga pompa dengan biaya Rp 6 miliar," kata Pak Ci, panggilan akrab Raja Properti itu. Menurut dia, pompa tersebut berfungsi sebagai penyedot air bila musim hujan tiba. Air itu kemudian ditampung dalam sebuah waduk yang dibuat khusus. Untuk itu, pihaknya telah mengundang sebuah perusahaan Belanda, NEDECO, sebagai konsultan ahli. Sementara, Pemda DKI menyalakan lampu hijau.

Saat itu, salah satu pihak yang paling berkeberatan adalah PT Cakar Bumi, pemegang hak paten konstruksi cakar ayam yang dipakai untuk jalan tol Prof. Sedyatmo. Menurut Direktur Utamanya, Rijanto P. Hadmojo, Proyek PIK bakal menyebabkan penurunan jalan tol. Kini, dugaan itu menjadi kenyataan: permukaan jalan tol Prof. Sedyatmo telah turun sekitar 90 centimeter.

Wakil Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), Hadi S. Alikodra, juga menyalahkan PIK. "Dengan dibangunnya PIK, air laut akan mudah masuk dan air dari darat mudah keluar," katanya kepada Rusman Widodo dari FORUM. Maka, Hadi yakin, PIK adalah penyebab utama banjir di jalan tol Prof. Sedyatmo. Selain itu, Hadi melihat pula bahwa Pemda DKI mempunyai saham kesalahan karena mereka memberikan izin kepada PIK dengan mengabaikan faktor lingkungan.

Toh, Ciputra berkukuh bahwa pihaknya tak bersalah. Kepada harian *Kompas*, ia mengatakan, penyebab utama genangan adalah tak berfungsinya pompa-pompa, tanggul, serta saluran air di kedua sisi jalan tol. Ciputra menambahkan, kota Amsterdam, Belanda, yang juga berada di bawah permukaan laut tidak terendam air lantaran pompa, kanal, dan saluran airnya berfungsi sangat baik.

Nah, seperti yang diimbau Sonny Keraf, sebaiknya Gubernur DKI Sutiyoso yang biasa dipanggil Bang Yos itu segera mencari tahu penyebab sebenarnya banjir di Cengkareng. *Kagak suseh* kan, Bang Yos?

Yus Ariyanto

M TOHA

PERKAMPUNGAN DI PANTAI KENJERAN YANG TERCEMAR. *Kecerdasannya menurun.*

PENCEMARAN

Ibu Hamil Berisi Logam Berat

Pencemaran di kali sekitar Surabaya semakin berat. Akibatnya, kecerdasan anak-anak Pantai Kenjeran menurun.

Kandungan air susu ibu (ASI) dan kandungan darah ibu hamil di daerah Pantai Kenjeran, Surabaya, mengandung timah hitam, merkuri, dan kadmium. Ini merupakan dampak pencemaran Pantai Kenjeran yang dibiarkan selama bertahun-tahun. Kasus itu dilansir dalam catatan akhir tahun 1999 Divisi Lingkungan Hidup LBH Surabaya.

Yang mencemaskan, timah hitam yang terdapat dalam ASI akan mengakibatkan anemia, menurunkan kecerdasan, dan kerusakan otak pada anak-anak yang masih menyusui. Demikian pula merkuri. Unsur itu bisa merusak jaringan otak pada janin ibu hamil. Sedangkan kadmium menyebabkan kerusakan ginjal dan mengubah bentuk tulang.

Bahaya logam berat terhadap ibu hamil dan menyusui ini bukan omong kosong. Setidaknya, menurut penelitian tiga orang staf dosen Fakultas Psikologi Universitas Surabaya pada akhir 1999. Hasil penelitian mereka menyebutkan, 80 persen populasi anak sekolah di Kenjeran, pantai timur Surabaya, mengalami kemunduran intelektualitas.

Ibu hamil dan yang sedang menyusui disupi logam berat akibat mereka sering mengkonsumsi ikan dari Pantai Kenjeran. Padahal, pantai Kenjeran menjadi muara logam berat yang dibawa aliran kali di Surabaya, Kali Wonorejo dan Kali Wonokromo. Logam berat itu berasal dari limbah yang dibuang tak kurang dari 150 pabrik di sekitar kali-kali tersebut. Bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti merkuri, disinyalir berasal dari limbah pabrik yang beroperasi menggunakan bahan soda kostik, misalnya pabrik sabun, sedangkan kadmium dan timah hitam berasal dari pabrik logam berat dan pelapisan logam.

Berbagai penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan, ikan-ikan dan biota air lainnya di kali sekitar Surabaya mengandung merkuri dalam kadar yang tinggi, melebihi kadar baku mutu yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 0,004 miligram per liter. Logam berat yang masuk melalui hewan laut yang dikonsumsi ibu hamil dan menyusui akan menyebar dari tulang ke seluruh darah dan mencemari ASI. Prigi Arisandi dari Ecological and Environmental Observation (Ecoton) menyatakan, pada 1998 saja, kandungan kadmium pada ibu-ibu menyusui sudah mencapai 36,1 ppm (*part per million*). "Kondisinya sama dengan gejala *Minamata Desease* di Jepang dulu," kata Prigi.

Menurut Prigi, Pantai Kenjeran dan kali-kali sekitar Surabaya harus segera dibersihkan dari kontaminasi logam berat pencemar seperti yang pernah dilakukan di Teluk Minamata, Jepang. Lumpur yang tercemar logam berat itu harus diangkat dari pantai agar kerang-kerangan dan ikan tidak terus tercemar.

Untuk jangka panjang, Ecoton menyarankan agar pantai timur Surabaya dikembalikan pada kondisi semula sebagai kawasan hutan bakau. Upaya mengembalikan pantai timur Surabaya menjadi kawasan konservasi itu tak lain agar ada kejelasan, instansi mana yang mesti bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara independen.

Memang, selama ini, penanganan pencemaran kali sekitar Surabaya dan Pantai Kenjeran sangat lamban. Wajar kalau Ecoton mengecam pihak Pemda Surabaya dan Gubernur Jawa Timur yang terkesan menganggap ringan masalah pencemaran itu. "Kami menuntut tanggung jawab mereka yang telah lalai mengemban tugas," kata Prigi.

Di sisi lain, para pencemar kali di Surabaya dan Kenjeran juga harus dituntut secara hukum. Menurut Turmudzi, Kuasa Hukum Gubernur Jawa Timur, sebenarnya upaya hukum terhadap para pencemar telah dilakukan. Gubernur telah memerintahkan Polda untuk mengusut perusahaan yang dituding mencemari kali Surabaya. "Bahkan, kami pernah memberikan sanksi kepada perusahaan pencemar," kata Turmudzi. Perusahaan yang dimaksud, antara lain, PT Surabaya Agung Kertas yang memproduksi bubur kayu dan kertas.

Perusahaan di atas juga pernah digugat LBH Surabaya ke pengadilan, pada 1994. Namun, gugatan itu kandas, baik di Pengadilan Negeri Surabaya maupun di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Pengadilan menyatakan, tak ada bukti yang menunjukkan perusahaan itu mencemari lingkungan. Sampai kini, kasusnya masih menunggu putusan kasasi.

Sementara, pada pertengahan 1999, PT Surabaya Agung Kertas bersama belasan pabrik lainnya, antara lain PT Wym Cicle, Asia Tile, dan PT Kedawung, juga digugat Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) ke pengadilan. Belum jelas apakah gugatan ini akan kandas pula. "Untuk menangani kasus lingkungan itu kan tak mudah," kata Turdmuzi. Tidak mudah toh bukan berarti tidak bisa.

Riza Sofyat dan Moh. Toha (Surabaya)

Laki-Laki Sepuh yang Terus Mengejar Pela

Bagi Djoko Soegianto, pengabdian untuk menegakkan nilai-nilai keadilan rupanya tak pernah surut. Saat usianya terbilang sepuh, ketika sejumlah rekan atau koleganya kini kongko-kongko di rumah menikmati hari tua atau hasil kerja puluhan tahun, ia justru berkutat dengan persoalan yang tak pernah habis: Penegakan hukum dan keadilan. Mungkin, itu telah menjadi garis tangan lelaki kelahiran Gemolong, Sragen, 25 Oktober 1926, ini. Atau, hal itu adalah konsekuensi pilihannya saat ia muda dulu: Memilih dunia hukum dengan alasan yang sangat ideal: membela orang lemah.

Djoko Soegianto:

Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 25 Oktober 1926
Pendidikan: Universitas Gadjah Mada
Karir: Hakim Pengadilan Negeri Surabaya (1953-1959)
Ketua Pengadilan Negeri Lamongan (1959-1961)
Ketua Pengadilan Negeri Gresik (1961-1963)
Hakim Tinggi Makassar (1963-1964)
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (1964-1967)
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar (1967-1972)
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya (1972-1974)
Hakim MA (1974)
Ketua Muda MA (1981)
Jabatan di Komnas HAM:
Sekretaris Subkomisi Pengkajian (1993-1996)
Wakil Subkomisi Pengkajian (1996-1998)
Wakil Ketua I (1998-2000)
Ketua Komnas HAM (2000-2005)

Dan, Jumat, 14 Januari lalu, beban sekaligus tanggung jawab Djoko menegakkan keadilan semakin bertambah. Laki-laki yang bisa dibilang semua rambutnya telah memutih itu terpilih sebagai Ketua Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), menggantikan Marzuki Darusman yang kini menjadi Jaksa Agung. Sebuah tugas yang jelas tak ringan. Bukan saja lembaga semacam ini masih bisa dikatakan barang baru di Indonesia, lebih dari itu, di hadapan Komnas HAM kini bertumpuk persoalan yang harus diselesaikan. Semua mata, baik nasional maupun dunia internasional, dengan saksama menatap ke lembaga yang secara resmi didirikan lewat Keppres No. 50 Tahun 1993 itu. Sebut saja, kasus pemeriksaan sejumlah jenderal yang dianggap bertanggung jawab atas kerusuhan di Timor Timur, Aceh, Maluku, Mataram, dan setumpuk kasus pelanggaran keadilan dan kemanusiaan lainnya. "Ini memang tugas berat," kata Djoko.

Djoko terpilih sebagai Ketua Komnas HAM lewat sidang pleno tertutup yang dihadiri 20 anggota komisi itu. Ia meraih sebelas suara. Sedangkan Saparinah Sadli yang sebelumnya santer disebut kandidat terkuat ketua mendapat sembilan suara. Saparinah otomatis terpilih sebagai Wakil Ketua. Di hari yang sama, sidang juga memilih Asmara Nababan sebagai Sekretaris Jenderal. Duet yang dianggap pas untuk menyetir lokomotif Komnas HAM di atas rel era reformasi. "Pemilihan berlangsung sempurna, demokratis, dan tidak diduga hasilnya amat baik," kata Marzuki Darusman dengan senyum mengembang usai pemilihan di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat. Menurut Marzuki, salah satu yang mesti dilakukan Djoko adalah menjalankan komunikasi yang luas dan menanamkan pengertian yang baru kepada publik mengenai ketidakberpihakan Komnas. "Komnas HAM harus digerakkan tidak hanya sebagai institusi, tapi sebagai lembaga kemasyarakatan," ujarnya.

Djoko mafhum tugasnya memang tak ringan. Bagi laki-laki langsing ini, memimpin Komnas bisa dibilang benar-benar sebagai pengabdian. Djoko bergabung ke Komnas HAM pada 1993, saat lembaga itu baru didirikan dan dipimpin almarhum Ali Said. Saat itu Djoko menampati posisi anggota Subkomisi Pengkajian Instrumen HAM.

Layaknya anggota Komnas lainnya, Djoko terlibat dalam berbagai kasus yang ditangani lembaga ini. Begitu didirikan, Komnas memang langsung panen tugas. Bisa jadi, ini juga sebagai indikator bahwa harapan masyarakat terhadap peran dan ketajaman taring penegakan hukum lembaga ini sangat tinggi. Lihat saja, baru setahun didirikan, sedikitnya komisi ini menerima sekitar 2.400 surat pengaduan. Pengaduan terbanyak menyangkut soal tanah. Dan, seperti kita tahu, di masa Orde Baru, penggusuran dan perampasan tanah yang selama ini didu-

...ar Pelanggar HAM

ANNAS

duki dan dimiliki masyarakat memang berlangsung "gila-gilaan". Alasan pengambilalihan itu—atau tepatnya perampasan—pun bermacam-macam. Antara lain, untuk kepentingan industri, perkebunan, atau sosial yang ujung-ujungnya sebenarnya untuk kepentingan sekelompok orang. Kalaupun ada ganti rugi, nilainya kadang-kadang sangat menyakitkan hati masyarakat pemiliknya. Bayangkan, bahkan ada yang dihargai cuma Rp 50 per meter persegi.

Djoko pun berkali-kali terjun ke lapangan untuk mengusut persoalan semacam ini. Ia memang bisa dikategorikan sebagai anggota Komnas "spesialis soal-soal tanah". Djoko, misalnya, pernah melakukan investigasi dan mengumpulkan data untuk penyelesaian kasus penggusuran tanah milik petani Rancamaya, Bogor, yang digusur dan disulap menjadi rumah mewah berharga ratusan juta hingga miliaran rupiah. Demikian juga dengan sejumlah kasus pelanggaram HAM yang berhubungan dengan tanah lainnya, yang terjadi di sejumlah wilayah Republik ini. Kakek enam cucu ini nyaris selalu ikut "turun gunung". Wawasan dan pengalamannya di bidang hukum memang sangat membantu kerja Komnas HAM untuk bertempur menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, yang di negeri ini bak cendawan di musim hujan.

Dalam usia yang terbilang sepuh, Djoko seperti tak kehabisan energi. Fisiknya yang kecil seperti menyimpan tenaga yang tak habis-habis. Ia, misalnya, masih kuat membaca dan membolak-balik tumpukan berkas
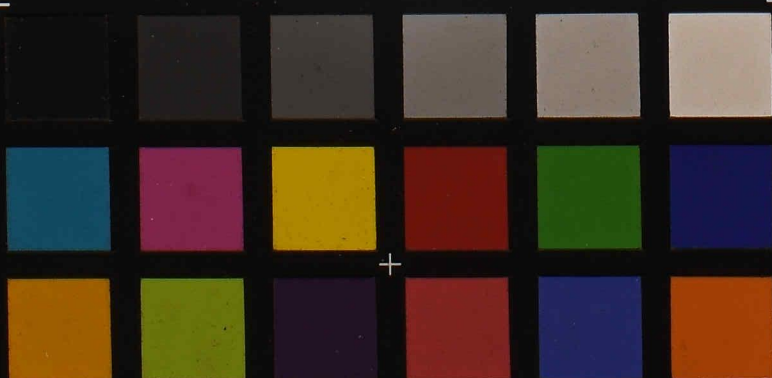
pengaduan atau perkara selama berjam-jam. Ini belum lagi ditambah dengan ketekunan dan ketelitiannya yang bisa membuat orang berdecak kagum. "Pak Djoko memang sangat disiplin. Ia juga sangat rapi menyimpan berkas-berkas kasus yang dipegangnya," kata Sriyana, salah seorang karyawan Kantor Komnas HAM.

Kendati pakar di bidang agraria, bukan berarti Djoko tak pernah terlibat penyelesaian kasus-kasus politis. Ia, misalnya, ikut menangani kasus pelanggaran HAM di Irian dan Timor Timur. Ketika rakyat Timor Timur bersiap melakukan jajak pendapat, Djoko ditunjuk sebagai Koordinator Komisi Perdamaian dan Stabilitasi (KPS). Selama berminggu-minggu, bersama sejumlah anggota Komnas lain, penggemar olah raga jalan kaki ini tinggal di bumi Loro Sae itu. Di sana ia bahkan berkali-kali berjalan kaki naik-turun gunung untuk menemui sejumlah pemimpin Falintil. Salah satu tugas Djoko saat itu memang meredam pertikaian antara kelompok prokemerdekaan dan prointegrasi.

"Sebagai orang tua, saya hanya bilang sekarepmulah (terserah kamu sajalah). Tapi, ya, mbok dilihat dulu hasil kerja Komnas HAM selama ini."

Perjalanan hidup Djoko sebagai "orang hukum" memang panjang. Ia mengakui masuk ke bidang hukum lantaran ada tawaran dari Departemen Kehakiman untuk mengisi jabatan jaksa atau hakim yang ditinggalkan orang-orang Belanda. Tentu saja, tawaran itu disertai iming-iming lain: Disediakan ikatan dinas dan biaya sekolah. "Waktu itu saya berpikir, nah ini, dapat uang dan bisa sekolah lagi," katanya sembari tersenyum. Menurut Djoko, tawaran itu semacam berkah karena kehidupannya ketika itu tergolong susah. "Masih *kere* (miskin sekali)," katanya.

Alumni UGM ini mulai meningkat karirnya ketika ditunjuk sebagai hakim PN Surabaya, 1953, setelah sebelumnya ia "hanya" menjabat panitera pengganti. Di Kota buaya inilah ia bertemu Sulastri, yang kemudian dinikahinya pada 1956.

Layaknya seorang hakim, tugasnya selalu berpindah-pindah. Ia, misalnya, sempat menjadi Ketua PN Lamongan (1959-1961), Ketua PN Gresik (1961-1963), Hakim Tinggi di Makassar sekaligus Ketua PN Surabaya (1964-1967), Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar (1967-1972), dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya (1972-1974), sebelum akhirnya ditarik menjadi Hakim Agung. Di "benteng keadilan terakhir" ini, cukup lama juga Djoko mengabdi, yakni dari 1974 hingga 1991. Jabatan terakhir yang dipegangnya di MA adalah Ketua Muda MA. Seperti juga saat menjadi hakim di pengadilan negeri atau di pengadilan tinggi, di MA Djoko juga dikenal sebagai sosok hakim yang lurus dan bersih.

Soal sosok yang bersih ini memang bukan sekadar omong kosong. Sejumlah sumber FORUM menyebut, dari segi satu ini, yang berhubungan dengan uang atau materi, Djoko memang bukan tipe orang yang "bermata hijau". Ia bahkan terkesan tak peduli soal-soal demikian. Baginya, bekerja adalah bekerja. Mendapat gaji ya dari bekerja itu. Karena itu, ketika sejumlah selentingan tak sedap pernah berdengung-dengung menunjuk ada hakim agung yang bisa "didekati", nama Djoko tak pernah terdengar.

Di MA, hubungannya dengan Ali Said, yang saat itu Ketua MA, makin akrab. Bisa jadi, hubungan inilah yang membuat Ali Said "menarik" Djoko ke Komnas HAM saat lembaga itu didirikan tujuh tahun silam. "Saya diajak, *yo wis, melok* (ya sudah, ikut). Waktu itu saya tahu HAM memang sesuatu yang perlu diperjuangkan," kata Djoko. Di komisi terhormat itu, ia pernah memegang jabatan sebagai Sekretaris Subkomisi Pengkajian (1993-1996), Wakil Subkomisi Pengkajian (1996-1998), hingga Wakil Ketua I (sejak 1998).

Sebelum terjun di Komnas HAM, seusai pensiun pada 1991, Djoko diajak Sudharmono, yang saat itu juga baru lengser dari jabatan Wakil Presiden, mendirikan Yayasan Amal Pelayanan Hukum (YAPH). Di lembaga yang bergerak dalam bidang bantuan hukum secara cuma-cuma itu, ia diminta Sudharmono menjadi "administratur" yayasan.

Djoko mengaku sangat senang mendapat tugas itu. Tentu saja, bukan lantaran soal materi, karena memang bisa dibilang tak seberapa gajinya, tapi yang terpenting ia masih bisa mengabdikan diri dan menyumbangkan ilmunya. Di kantor bantuan hukum yang berlokasi di sebelah rumah Sudharmono itu, di Jalan Senopati, tugas Djoko sejatinya tak sekadar administratur. Selain sebagai konsultan hukum untuk kasus-kasus yang masuk ke YAPH, ia sesekali juga menerima sejumlah orang kecil yang datang mengadukan ketidakadilan yang menimpa mereka. Seperti juga di Komnas HAM, kasus pengaduan soal tanah termasuk salah satu kasus pengaduan yang paling banyak diterima YAPH. Bisa jadi, karena sudah demikian menyatu dengan YAPH, sampai saat ini

ANNAS

RAPAT BERSAMA ANGGOTA KOMNAS HAM. *Menegakkan visi dan misi Komnas HAM.*

pun status Djoko di YAPH tetap tak berubah. Kendati bisa dibilang sembilan puluh persen waktunya habis di Komnas HAM, sesekali Djoko menyempatkan diri menjenguk YAPH. Tampaknya, para pengacara YAPH pun memaklumi kesibukan Djoko.

Kini, tugas berat memang membentang di depan bapak lima anak ini. Bukan saja sekarang ini kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai HAM makin tinggi, tapi ada sejumlah "PR" berat yang harus segera diselesaikan Komnas. Baik ke dalam yang berurusan dengan institusi Komnas, maupun ke luar yang berhubungan dengan penyelesaian kasus-kasus.

Djoko menyatakan sudah mempunyai sejumlah rencana untuk mengoptimalkan kerja lembaganya. Ia, misalnya, menjamin semua awak Komnas HAM akan bekerja keras dan tak ada yang menerima gaji buta. Selain itu, Djoko menegaskan bahwa ia akan terus melanjutkan visi dan misi Komnas HAM, yakni melindungi dan menegakkan HAM. Menurut Djoko, dalam lima tahun ke depan, program yang cukup mendesak adalah masalah yang berhubungan dengan kewenangan baru Komnas tentang penyidikan, yang akan menjadi bahan *pro justitia* oleh jaksa dan pengadilan.

> *"Kalau tidak mau melihat apa faedah Komnas HAM, seharusnya dilihat bahwa kadang-kadang satu diplomasi yang memukul Indonesia tertolong karena soal HAM."*
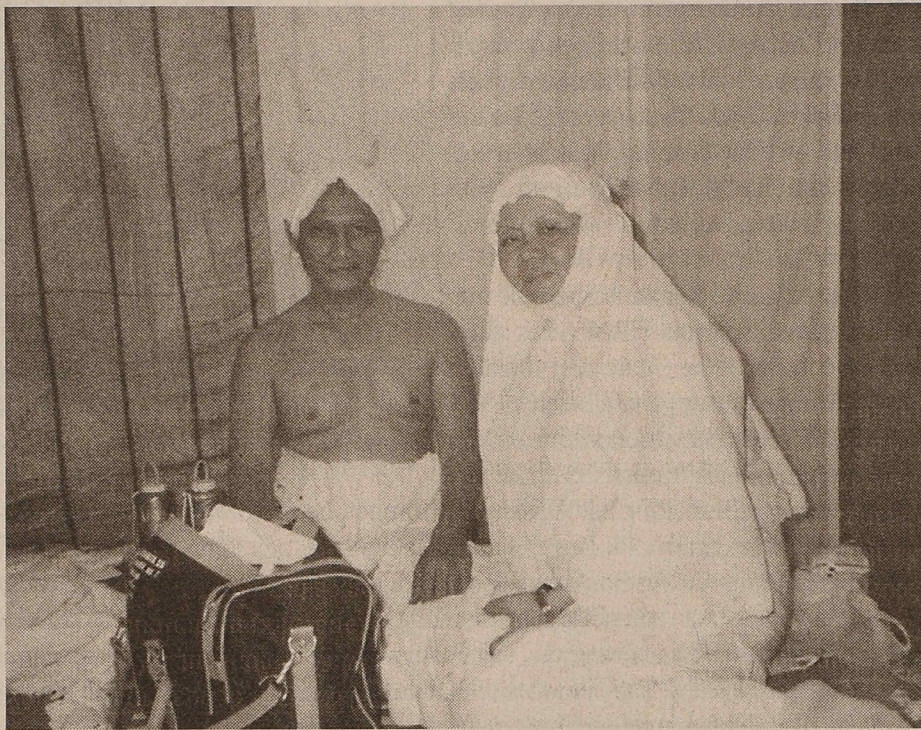
SAAT MENUNAIKAN IBADAH HAJI. *Marah jika melihat ketidakadilan.*

DOK. PRIBADI

Di luar itu, Djoko juga akan menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal sebagai tindak lanjut UU No. 39/1999 tentang Komnas HAM. Selain itu, yang tak kalah penting, Djoko juga berkeinginan membentuk perwakilan Komnas HAM di daerah. Pembentukan "cabang" itu, kata Djoko, tak bisa ditawar-tawar. "Ini sesuatu yang mendesak," ujarnya.

Kendati demikian, Djoko mengakui pembentukan Komnas HAM di daerah tidaklah semudah membalik telapak tangan. Perlu SDM dan anggaran yang harus disiapkan secara matang. Karena itulah, rencana ini pun tetap menjadi salah satu agenda kerjanya, yang, menurut Djoko, harus terealisasi dalam masa jabatannya.

Sebagai "Komandan" Komnas HAM yang baru, Djoko juga menyadari sejumlah sinisme yang diluncurkan orang tehadap lembaga yang dipimpinnya. Bukan semata dituding bisa disetir pemerintah, tapi, yang juga membuat kuping merah, lembaga ini dianggap tak becus menyelesaikan sejumlah kasus yang diadukan ke lembaga ini. Antara lain, kasus Tanjungpriok, Marsinah, atau "Tragedi 27 Juli". Apakah kasus ini sebenarnya sudah dilepas Komnas HAM? "Tidak. Itu masih dalam agenda kami. Kasus Marsinah, kami terus mengejar-ngejar. Juga Dwi Sumaji, itu tetap diteruskan," kata Djoko.

Sebagai orang hukum, Djoko tampaknya memang berhati-hati meng-

DOK. PRIBADI

MEMASUKI PURNABHAKTI DI MAHKAMAH AGUNG. *"Diajak" Sudharmono dan Ali Said.*

hadapi kasus-kasus yang masuk ke Komnas HAM. Ia tentu saja tak mau salah melangkah dalam menyelesaikan sebuah kasus. "Pelanggaran hukum yang muncul belakangan ini ada yang benar-benar berupa persoalan hukum dan ada yang politis," ujarnya. Djoko mengambil kasus kerusuhan di Mataram, NTB. Menurut Djoko, kasus itu banyak dilingkari aroma politis. "Mau tidak mau, kami harus berpikir apa *background* kasus itu," katanya. Menurut pengamatan Djoko, memang kini terjadi kegoyahan sejumlah nilai yang ada di masyarakat. Bukan hanya hukum tidak ditaati, adat istiadat pun sudah dikangkangi. Inilah yang di mata Djoko, misalnya, terjadi di Maluku atau Ambon.

DOK. PRIBADI

BERSAMA KELUARGA. *Masih kategori hakim lurus.*

Djoko menjamin, kendati dibentuk melalui Keppres, Komnas HAM tidak akan menjadi corong pemerintah atau melakukan diskriminasi kasus yang dibelanya. Memang, suara-suara yang menuduh Komnas HAM melakukan diskriminasi sempat terdengar nyaring akhir-akhir ini. Alasannya, Komnas begitu memperhatikan soal pelanggaran di Timor Timur. Sementara, pelanggaran HAM di Maluku atau Ambon seperti menjadi urusan nomor dua. Ujung-ujungnya bahkan ada suara yang meminta lembaga itu lebih baik dibubarkan saja. "Sebagai orang tua, saya hanya bilang *sekarepmulah* (terserah kamu sajalah). Tapi, ya *mbok* dilihat dulu hasil kerja Komnas selama ini. Kalau tidak mau melihat apa faedah Komnas, seharusnya dilihat, kadang-kadang satu diplomasi yang memukul Indonesia tertolong karena soal HAM. Saya pribadi, saya hanya bilang alangkah naif mereka yang menyatakan Komnas HAM tak ada gunanya," ujar Djoko.

"Saya pribadi, saya hanya bilang alangkah naif mereka yang menyatakan Komnas HAM tak ada gunanya."

Tuduhan bahwa Komnas HAM hanya memeloti pelanggaran HAM di Timor Timur pun sudah dibantah Djoko. Buktinya, antara lain, Komnas HAM sudah membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM di Maluku yang diketuai Bambang Soeharto. Pekan lalu, komisi ini terbang ke Maluku untuk mengumpulkan data pelanggaran HAM di sana. Yang jelas, menurut Djoko, soal pelanggaran HAM di Timor Timur yang melibatkan tersangka sejumlah jenderal, Komnas HAM akan menanganinya secara profesional. Murni atas nama hukum dan tidak berdasar tekanan dari siapa pun. Djoko juga memaklumi jika banyak orang bereaksi atas pemanggilan sejumlah jenderal ke Kantor Komnas HAM. Namun, menurut Djoko, itu hal wajar. "Yang bereaksi kan orang per orang. Sekarang jangan bicara orangnya, tapi institusi. Ini perlu sekali," ujarnya.

Melihat semangat Djoko menyetir Komnas HAM, yang tergambar memang keoptimistisan institusi ini menjalankan visi dan misinya. Tapi, ada juga yang menyangsikan kelangsungan Komnas HAM di bawah Djoko. Misalnya, Ketua PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi) Hendardi. Di mata Hendardi, latar belakang Djoko yang birokrat akan membuat Komnas sulit tampil sebagai institusi yang menjalankan tugasnya secara bebas-merdeka. "Bagaimanapun, saya percaya orang-orang bekas birokrasi, apakah itu dari sipil atau militer, hatinya masih tidak begitu gampang ditarik dalam keberpihakan kepada masyarakat," kata Hendardi.

Hendardi menyatakan, secara pribadi, dari awal ia menginginkan sosok ketua Komnas yang baru dipegang oleh mereka yang muda dan terutama bukan bekas birokrat. "Saya pikir, banyak pertimbangan politik yang membuat Djoko dipilih sebagai Ketua. Antara lain, karena ia bekas birokrat, setidaknya akses ke birokrasi pemerintahan masih tetap diharapkan dapat dimainkan oleh Djoko," kata Hendardi.

Selain Hendardi, suara pesimistis datang dari Ahmad Sumargono, anggota DPR yang juga Ketua Partai Bulan Bintang. Cuma, alasan Sumargono lebih kepada pengamatannya bahwa ada dominasi minoritas orang Kristen di komisi itu. "Tengok saja, kasus Ambon. Setelah ditekan masyarakat, baru Komnas HAM membentuk KPP HAM," kata Sumargono. Karena itu, ia tak yakin Komnas HAM bisa bersikap netral dalam menangani sebuah kasus. "Bukan berarti Komnas HAM harus berpihak kepada Islam. Saya cuma menginginkan Komnas bisa netral," kata laki-laki yang akrab dipanggil Gogon ini kepada Tegus S. Usis dari FORUM.

Semua kritik semacam ini tentu saja diterima secara lapang dada oleh Djoko yang jelas sudah kenyang makan asam-garam kehidupan ini. Apa boleh buat, seperti kata orang bijak, semakin tinggi pohon, semakin kuat pula angin yang meniupnya.

Djoko sendiri menyatakan semua kritik yang masuk ke Komnas HAM akan dipandangnya sebagai masukan berharga. Tapi, sekali lagi, ia menegaskan bahwa yang terpenting ia akan menegakkan visi dan misi Komnas HAM. Ia juga tak peduli dengan suara miring lainnya bahwa ada anggota lain Komnas yang lebih cocok menjadi Ketua Komnas ketimbang dirinya. "Saya enggak *mikir* itu. Enggak dihitung, silakan. Saya hanya menjalankan tugas dan panggilan. Kalau ada yang menilai, silakan," katanya.

L.R. Baskoro dan Widiarsi Agustina

Misteri di Balik Kematian Arkan

Siapa pembunuh Arkan diduga tidak bakal terungkap. Benarkah ini pembunuhan politis atas perintah Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic?

Peristiwa pembunuhan Zeljko Raznatovic sudah seminggu berlalu. Tapi, misteri di balik kematiannya tetap menggelayut. Hingga saat ini polisi Yugoslavia belum juga berhasil mengungkap siapa pembunuh mantan Kepala Pengawal Nasional Serbia, tentara milisi yang menjadi buldozer pembersihan etnis pada perang di Kroasia dan Bosnia Herzegovina. Konon, seorang kaki tangan si pembunuh telah diamankan. Namun, polisi belum dapat mengorek informasi. Soalnya, lelaki itu terluka parah dan tak sadarkan diri.

Raznatovic yang lebih dikenal sebagai Arkan—salah satu nama yang kerap digunakan dalam paspor palsunya—dibunuh di lobi Intercontinental Hotel, di pusat Kota Beograd, Yugoslavia, Sabtu, 15 Januari lalu. Tiga tembakan jarak dekat mengenai mata kiri, dahi, dan mulutnya. Lelaki 47 tahun ini tewas setibanya di rumah sakit. Pengawal Arkan dan seorang lelaki lain yang kebetulan berada di tempat itu juga tewas. Beberapa orang lainnya, termasuk seorang perempuan, terluka dalam aksi penembakan itu.

Tak jelas bagaimana peristiwa penembakan itu terjadi. Polisi langsung mengisolasi tempat kejadian dan melarang wartawan masuk ke lokasi. Para saksi mata memberi keterangan yang berbeda-beda. Seorang saksi mengatakan penyerangnya hanya satu orang, mengenakan topeng, dan membawa pistol otomatis. Tapi, banyak yang percaya bahwa si pembunuh yang berhasil lolos itu tak beraksi sendirian, melainkan berkelompok. Salah seorang yang diduga anggota kelompok itu kini berada di tangan polisi.

Di lokasi kejadian, polisi menemukan 38 selongsong peluru. Melihat bahwa peluru itu ditembakkan dari jarak dekat, diduga Arkan mengenal pembunuhnya. Seorang saksi mata, seperti dikutip *Politika*, koran terbesar milik pemerintah Yugoslavia, mengaku melihat Arkan berbincang-bincang dengan si pembunuhnya.

Dalam keterangan resminya beberapa hari setelah peristiwa berdarah itu, pemerintah menyatakan motif pmbunuhan ini karena persaingan antargeng. Menurut Menteri Penerangan Yugoslavia, Goran Matic, seperti dikutip *New York Times*, pembunuh Arkan adalah lawannya, mafia dari Montenegro.

Tapi, beberapa analis lainnya percaya bahwa pembunuhan Arkan tidak sesederhana itu. Kemungkinan besar, ia menjadi korban kebrutalan negara. Artinya, Arkan sengaja dihabisi Slobodan Milosevic, Presiden Yugoslavia, karena sejumlah alasan. Arkan dinilai terlalu kuat, sehingga bisa membahayakan posisi Milosevic. Selain punya uang, ia juga memiliki pasukan yang sangat setia. Kedua, Arkan layak mati karena terlalu banyak tahu sepak terjang Milosevic dalam perang Bosnia dan Kroasia. Saat itu, Arkan menjadi tangan kanan Milosevic.

Belakangan, memang tersiar kabar, Pengadilan untuk Kejahatan Perang PBB yang berpusat di Den Haag, Belanda, tengah bernegosiasi dengan Arkan untuk merayu Arkan agar memberikan keterangan tentang mantan-mantan bosnya. Jadi, sebelum Arkan memutuskan membuka mulut, lebih baik pemilik klub sepak bola ini dihabisi lebih dahulu.

Kematian Arkan menambah jumlah korban pembunuhan politik di Beograd. Selama beberapa tahun belakangan ini, tak kurang dari 500 tokoh publik, dari wartawan, tokoh politik, sampai kriminalitas, tewas di tangan pembunuh misterius. Penyelidikan kasus-kasus tersebut tidak pernah tuntas. Karena itu, ba-

TIME

ZELJKO RAZNATOVIC DENGAN MASKOT DAN BRIGADE PASUKANNYA, 1991. *Dinilai terlalu kuat dan membahayakan.*
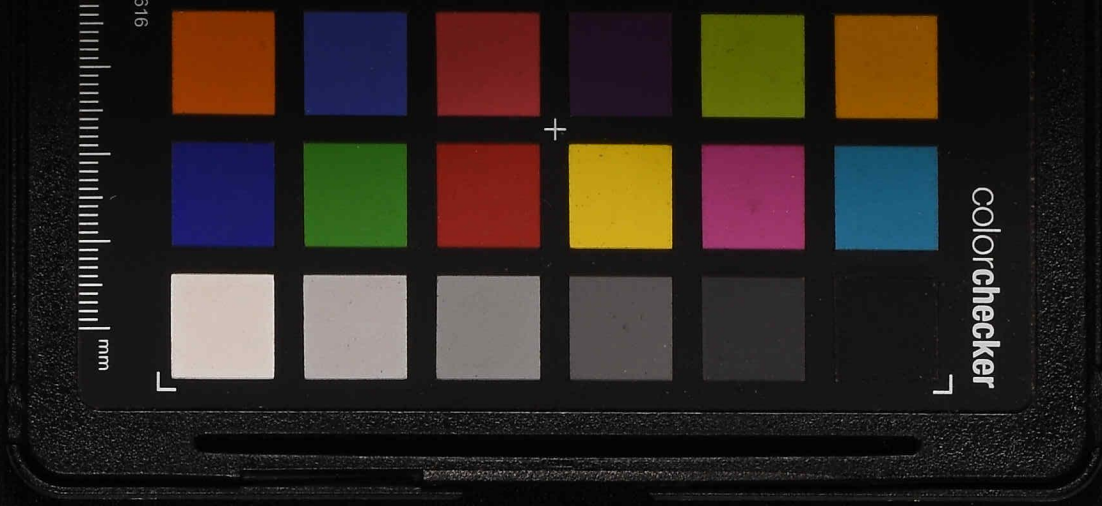
nyak kalangan menilai bahwa kasus Arkan ini pun akan dipetieskan. "Kasus ini tak akan terselesaikan sebagaimana kasus-kasus pembunuhan sebelumnya," kata Vladan Batoc, pemimpin kelompok oposisi di Beograd.

Dunia Barat menyesalkan kematian Arkan. "Satu-satunya yang saya sesalkan dari kematiannya adalah bahwa kita tidak bisa memberikan keleluasaan kepada korban-korbannya untuk menyeret (Arkan) ke Mahkamah Den Haag," kata Menteri Luar Negeri Inggris Robin Cook. Hal senada juga dilontarkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madeleine Albright.

Kematian Arkan ini juga disesalkan Kepala Penyelidik Kejahatan-Kejahatan Perang, Carla del Ponte. "Kami sebenarnya berharap bisa mengadilinya," katanya. Carla menyangkal tudingan bahwa kematian Arkan berhubungan dengan upaya pendekatan Mahkamah Den Haag agar Arkan membuka mulut dan membocorkan keterlibatan Milosevic dalam perang pembersihan etnis di wilayah bekas Yugoslavia itu. "Saya tidak tahu apa yang menyebabkan ia tewas. Yang pasti, kami sama sekali tidak pernah menjalin kontak dengannya," kata Carla. Kendati Arkan tewas, Carla optimistis bisa menyeret penjahat perang lainnya, termasuk Milosevic, ke meja hijau.

Sri Raharti

Buronan Interpol yang Jadi Pahlawan Serbia

Sekitar 2.000 orang berkumpul di Pemakaman Baru, di luar Kota Beograd, Yugoslavia, Rabu, 19 Januari lalu. Tokoh-tokoh politik, tentara paramiliter, dan pemain sepak bola berbaur dengan keluarga Zeljko Raznatovic alias Arkan untuk memberikan penghormatan terakhir. Kedukaan menyelimuti wajah mereka saat peti jenazah Arkan perlahan turun memasuki perut bumi. Meskipun di mata dunia Barat dan Interpol (International Police) dianggap sebagai penjahat perang kelas wahid, bagi sebagian besar masyarakat Serbia, Arkan adalah pahlawan perang yang dihormati.

Kehidupan Arkan memang penuh warna, bahkan layak dijadikan cerita telenovela. Lahir di Slovenia pada 1950, Arkan sudah bermasalah sejak usia muda. Hobinya berkelahi, mencuri, dan mencopet. Padahal, ia bukan dari keluarga miskin. Ayahnya adalah pejabat senior di Angkatan Udara Yugoslavia. Saking kewalahan menghadapi kelakuan Arkan yang kelewat batas, sang ayah menyerahkan anak lelakinya ini kepada polisi.

Penjara bagi Arkan malah menjadi tempat untuk mematangkan perilaku "preman"-nya. Buktinya, setelah bebas, ia malah jadi penjahat sungguhan. Spesialisasinya: Merampok bank. Dan, wilayah jarahannya tak cuma Yugoslavia, tapi juga sampai ke Belanda, Italia, Swedia, dan Belgia. Hebatnya, meski sempat mendekam di penjara Belgia dan Belanda, ia bisa lolos. Tak mengherankan bila namanya pun masuk ke dalam daftar buronan Interpol.

Rupanya, sembari menjadi perampok di luar negeri, Arkan juga menyambi menjadi "algojo" bagi Dinas Rahasia Komunis Yugoslavia. Tugasnya menghabisi pembakang politik yang lari ke luar negeri.

Menjelang perang saudara yang merobek-robek Yugoslavia, Arkan kembali ke kampung halamannya. Tahun 1991, ia mendirikan Pengawal Nasional Serbia (Serb National Guard) yang lebih dikenal sebagai Tigers—maskot pasukan milisi ini adalah boneka macan. Bersama "macan-macan" lainnya, yang selalu tampil khas dengan seragam hitam dan topeng penutup muka, pasukan pimpinan Arkan melakukan pembersihan etnis sepanjang perang di Krosia, 1991, dan di Bosnia Herzegovina, 1992-1995. Di sinilah ia mendapat julukan "Algojo dari Balkan".

Pada 1997, Pengadilan Penjahat Perang Internasional di Den Haag, Belanda, dalam sidang *in absentia*, memvonis Arkan bersalah melakukan kejahatan atas kemanusiaan dalam Perang Kroasia dan Bosnia. Namun, Arkan membantah tudingan itu. Menurut Arkan, apa yang ia lakukan tak lebih dari menjaga keselamatan warga Serbia. "Saya tidak bersalah," katanya dalam wawancara dengan CNN, belum lama ini.

Pascaperang Bosnia, Arkan berganti penampilan. Ia yang semula tampil garang berselempang senjata otomatis, berubah menjadi pengusaha kelimis dengan senyum kekanak-kanakan, membuat penampilannya jauh lebih muda dari usia yang sebenarnya. Bidang usaha diterjuninya, dan tak semua usaha yang "bersih". Selain menggeluti bisnis garmen, ia juga melakukan bisnis gelap, seperti menyelundupkan senjata. Tak mengherankan bila ayah sembilan anak ini tercatat sebagai orang terkaya di Beograd. Meski Pasukan Pengawal Nasionalnya belakangan dibubarkan Slobodan Milosevic, ikatan dengan anak buahnya tetap kuat. Bekas anak buahnya turut membesarkan kerajaan bisnis Arkan.

TIME

ARKAN DAN ISTRI. *Dikenal romantis dan royal*

Di lingkungan kerabatnya, Arkan C. Bersama istri keduanya, bintang musik *folk*, Svetlana "caca" Velickovis, Arkan sering terlihat menonton berbagai pertunjukan *fashion show*, makan di restoran mewah, dan menginap di hotel berbintang lima, atau menonton konser musik yang digelar dua anaknya. Sebagai penggemar sepak bola, Arkan juga memiliki klub sepak bola sendiri, Belgrade Obilic, yang cukup disegani di negaranya.

Toh, meski sudah beralih profesi, darah dan kekejian masih membayangi Arkan. Bahkan, kematiannya pun bersimbah darah. "Arkan hidup dalam kekejaman. Tak mengherankan bila ia mati secara kejam," kata Menteri Luar Negeri Inggris, Robin Cook, mengomentari kematian Sang Algojo Balkan.

Sri Raharti

SHEIKH AL AZHAR, MOH SAYED & PAPA SHENUDA. *Akibat ulah LSM luar negeri.*

■ MESIR

Amuk SARA di Negeri Sphinx

Bentrokan berdarah antara umat Islam dan Kristen pecah di Mesir. Presiden Mubarak bertindak tegas terhadap pelaku kerusuhan dan para provokator.

Ribuan kilometer dari kepulauan Maluku, tepatnya di Mesir, bentrokan antarpemeluk agama yang berbeda ternyata terjadi tidak kalah sengitnya. Yang jelas, kerusuhan ini bukanlah rembetan dari Maluku sebab peristiwa serupa sudah terjadi di Mesir sejak tujuh tahun silam. Bahkan di tahun 1997 dan 1998 benturan kembali terulang.

Ironisnya, tragedi berdarah yang pecah di desa Al-Kosheh yang berada di Kabupaten Dar Al-Salam, Provinsi Sohag, terjadi di saat masyarakat Mesir, sebagaimana yang dikatakan Syekh Al-Azhar, mendapat "Hadiah Tuhan". Pasalnya, di tahun 2000 ini perayaan hari Natal dan Idul Fitri jatuh pada hari yang sama yaitu tanggal 7 Januari. Memang, Gereja Kristen Ortodox Koptik merayakan Natal pada tanggal 7 Januari dan bukan 25 Desember seperti umat Katolik dan Kristen Protestan. Tapi pada hari itu ternyata yang terjadi adalah bentrokan hebat antar umat beda agama tersebut. Bahkan, akibat parahnya bentrokan kali ini, Gabriel Abdul Masih, seorang pendeta gereja "Malaikat Michael", berucap sedih,"Tak ada Natalan tahun ini, kami telah mati."

Kerusuhan kali ini sebenarnya bermula dari masalah sepele yaitu penolakan seorang pedagang kain beragama Kristen untuk menukar kain yang telah dibeli seorang muslimah. Buntut percekcokan yang terjadi tanggal 31 Desember 1999 itu mengakibatkan daerah yang berjarak 450 kilometer selatan Kairo dilanda prahara. Amukan kedua kubu berujung saling bunuh dan pembakaran pertokoan tanpa ada aparat keamanan yang melerai.

Perundingan antara pemuka kedua agama dalam "Majelis Perdamaian" ternyata tak berperan banyak, malahan pertikaian justru makin meruncing di hari Minggu, 2 Januari 2000, saat umat Kristen usai mendoakan dua orang yang terbunuh dua hari sebelumnya. Siapa yang memulainya tetap tidak jelas. Pihak Kristen menuduh lawannya memberondong mereka dengan peluru begitu jemaat keluar gereja. Sebaliknya, umat Islam menuduh pihak Koptiklah yang pertama kali melepaskan tembakan dari menara gereja. Bentrokan pun langsung meluas ke desa-desa sekitar dan mengakibatkan 21 orang meninggal dan puluhan lainnya terluka. Sekitar 50 bangunan ludes dimakan api.

Atas tragedi itu, banyak pihak yakin ada provokator yang berulah di desa yang pada Agustus 1998 pernah mengalami kerusuhan serupa. "Tangan-tangan asing berusaha mengipasi bara api agar berkobar," ucap Dr. Refat Said, Sekjen Partai Tajammu' dari sayap kiri. Salah satu indikasinya adalah adanya isu bahwa pihak Kristen akan meracuni air minum umat Islam. Selain itu, di Minggu pagi ada sebuah mobil dengan pengeras suara mengelilingi desa-desa di sekitar Al-Kosheh dan mengajak umat Islam berjihad membela saudaranya yang "tertindas" untuk melawan polisi. Akibatnya, massa desa di sekitar Al-Kosheh yang dipenuhi emosi kemudian mengepung desa itu dengan senjata api dan tajam.

Lalu siapakah para provokator itu? Sementara tudingan tertuju kepada umat Koptik yang berada di luar negeri, terutama Amerika. Tujuannya agar negara-negara maju menekan Mesir dalam persoalan minoritas. Kecurigaan ini beralasan bila ditilik kerusuhan berbau SARA sebelumnya yang selalu pecah menjelang keberangkatan Husni Mubarak ke Amerika. Sedianya sang Presiden akan berkunjung ke Amerika bulan Februari depan. Bahkan, Papa Shenuda III (kepala gereja Ortodoks Koptik yang posisinya setara dengan Paus bagi gereja Katolik) pernah mengeluarkan teguran keras kepada para Koptik overseas karena ulah LSM-LSM bentukan mereka yang mengeruk keuntungan dari kerusuhan berbau SARA yang terjadi dua tahun lalu.

Syukurlah, Mubarak langsung bergerak cepat dan membentuk tim yang langsung dipimpinnya. Desa Al-Kosheh pun diisolasi beberapa hari oleh pihak keamanan. Selanjutnya, 86 orang tertuduh pembuat makar ditangkap dan dua diantaranya dicurigai menyebarkan isu peracunan air minum. Pihak kejaksaan pun siap mengajukan para terdakwa ke pengadilan. Bahkan, Perdana Menteri Mesir, Atef Abied, berjanji, "Pemerintah akan menyapu habis radikalisme Islam maupun Kristen." Jelas, pemerintah Mesir tidak ingin kecolongan lagi.

Itu cerita di negeri sana. Di negeri awak?

Ronald Raditya dan Qaris Tadjuddin (Kairo)

■ KUBA

Rumitnya Membaca Garis Tangan Seorang Bocah

Gara-gara seorang bocah laki-laki, hubungan Kuba dan Amerika menegang. Cermin arogansi orang yang mengaku dewasa?

Empat puluh tahun lalu, krisis rudal nuklir dan insiden Teluk Babi membuat hubungan Amerika dan Kuba ke titik nadir. Kini, perseteruan dua negara yang bertetangga itu kembali memanas lantaran seorang bocah bernama Elian Gonzalez. Setelah tiba di Amerika, anak yang masih berusia enam tahun ini kini menjadi rebutan antara pemerintah Kuba dan komunitas masyarakat Kuba yang anti-Fidel Castro di Amerika, yang mendapat dukungan kalangan politisi terkemuka di negeri Paman Sam itu.

Pemerintah Kuba *ngotot* menginginkan pemulangan Elian. Semula, Dinas Imigrasi dan Naturalisasi AS (INS) juga memutuskan mengirim kembali Elian ke Kuba pada 14 Januari lalu. INS menilai bahwa wali Elian yang sah menurut hukum adalah sang ayah, yaitu Juan Migule Gonzales yang tinggal di Cardenas, Kuba. "Memulangkan Elian adalah tepat secara hukum dan moral," ujar Komisaris Imigrasi AS, Doris Meissner.

Kontan saja, keluarga Elian dan masyarakat Kuba di Florida menentang keras keputusan itu. Serangkaian demo besar-besaran digelar menuntut agar Elian tetap di Amerika. Para politisi pun ikut mendompleng demi keuntungan mereka masing-masing. Buntutnya, Jaksa Agung AS Janet Reno mengundurkan tenggat yang diberikan INS agar keluarga Elian mempunyai kesempatan bertarung di pengadilan federal untuk mempertahankan bocah tampan itu. Kendati begitu, Reno terkesan tetap memihak INS.

Perjuangan Elian untuk mencapai pantai Amerika sangat mengharukan. Pada suatu malam di bulan November 1999, ia bersama ibu dan ayah tirinya bergabung dengan sepuluh warga Kuba lainnya menumpang sebuah perahu yang akan menyelundupkan mereka ke luar Kuba. Elizabet Broton Rodriguez, sang ibu, adalah seorang karyawan pada Hotel Varadero Beach, sebuah resor di timur Havana. Malang tak dapat ditolak, cuaca dan ombak laut Atlantik ternyata terlalu ganas bagi perahunya yang kecil. Setelah dihajar ombak, perahu itu akhirnya tenggelam. Setelah bertahan selama beberapa jam, akhirnya ibu dan ayah tiri Elian hilang tertelan ombak.

Entah dari mana stamina yang didapat, Elian tetap bertahan dengan memegang sebuah tabung selama 48 jam sebelum ditemukan oleh nelayan, 60 mil dari Miami. Pasukan penjaga pantai AS kemudian menjemputnya pada 25 November 1999.

AFP PHOTO

KAUM IBU YANG PROTES DI KUBA. *Demi kemanusiaan atau politik?*

Pengadilan keluarga Florida lalu memutuskan paman-kakek Elian yang tinggal di Florida berhak mengasuh sang bocah malang itu untuk sementara waktu dan menunda pemulangannya ke Kuba. "Jika Elian dikembalikan ke Kuba, bisa membahayakan si anak sendiri," ucap hakim Rosa Rodriguez. Jelas, keputusan itu disambut gembira oleh kalangan yang menginginkan Elian tetap di Amerika. Bahkan, diusahakan pula agar sanak keluarga Elian mendapatkan perwalian hukum, sehingga Elian dapat diwakili untuk meminta status pengungsi.

Putusan pengadilan ini mengundang kontroversi hukum di AS. Soalnya, menurut UU AS, yang berhak menentukan tempat tinggal dan kebangsaan seorang anak adalah orang tuanya, bukan pengadilan. Terlebih lagi, sistem hukum di AS menentukan bahwa orang tua bebas membesarkan anak tanpa campur tangan negara. Kewenangan pengadilan negara bagian Florida juga dipertanyakan karena sudah memasuki kewenangan sebuah keputusan federal.

Pemerintah Kuba pun mencak-mencak dan menuduh mereka yang menentang pemulangan Elian melakukan penculikan. Tuduhan ini bisa menjadi serius lantaran AS terikat dengan perjanjian internasional tentang penculikan anak. Fidel Castro bahkan menempuh jalur diplomatik dengan meminta dukungan Sekjen PBB Kofi Annan dan Paus Yohannes Paulus II.

Tim pengacara yang disiapkan untuk mempertahankan Elian di AS menolak perintah pemulangan dari INS, kecuali terbit perintah resmi deportasi. Hal ini akan membuat citra buruk bagi kubu Clinton menjelang tahun pemilihan mendatang. Apalagi, jumlah imigran Kuba di AS juga cukup signifikan. Beberapa anggota Kongres AS malahan mengajukan RUU agar Elian dihadiahi status warga AS saat Kongres mengakhiri masa reses 24 Januari mendatang. Sepanjang sejarah, status itu hanya diberikan kepada segelintir orang, seperti Winston Churchill dan Bunda Teresa. Juru bicara Gedung Putih, Joe Lockhart, hanya berkomentar, "Kami akan membicarakannya ketika saatnya tiba."

Bagaimana dengan Elian sendiri? Ternyata, ia tetap asyik dengan kesibukan seorang bocah: Bermain. Panasnya perdebatan politik dan hukum tampaknya sama sekali tidak berpengaruh kepadanya.

Ronald Raditya

Politik Post Militerisme

Apakah kerusuhan di Mataram hanya ekspresi dari sentimen antarmasyarakat yang berdasarkan sentimen etnis, solidaritas komunitas agama tertentu, faktor ekonomi, atau politik lokal? Memang, faktor-faktor itu tak bisa diabaikan, malah sebagian menjadi pemicu utama awal pertikaian. Bahkan, "sumbu agama" yang terbakar "perang antarkomunitas agama" sulit berakhir, sehingga sebagian orang pun cenderung menyimpulkan konflik itu juga sulit berakhir karena ada infeksi luka agama yang dialami dua pihak yang saling bertikai.

Laode Ida
Direktur Pusat Studi Pengembangan Kawasan, Jakarta

Namun, penjelasan itu agaknya sulit membuat para pembaca puas. Sebab, peristiwa-peristiwa kerusuhan seharusnya segera berakhir ketika tokoh-tokoh masyarakat yang bertikai mulai sering bertemu dan bergandengan tangan untuk berdamai. Ataupun, sudah akan segera berakhir ketika para pemimpin agama atau tokoh masyarakat lokal mengimbau agar menghentikan pertikaian. Di Ambon sendiri, sudah dua kali terjadi kesepakatan antarkelompok agama yang secara *de facto* bertikai. Toh, kesepakatan selalu saja dilanggar, seolah-olah massa berjalan sendiri tanpa peduli lagi kepada tokoh-tokoh panutan mereka yang sudah sepakat berdamai.

Padahal, watak patrimonial dalam suatu komunitas agama atau etnis biasanya selalu dominan. Dan, tindakan massa awam, utamanya dalam hubungan dengan tindakan politik, selalu dikonsultasikan kepada patron (tokoh di berbagai level), sehingga tindakan massa merupakan sikap kolektif di bawah pengaruh kuat para tokohnya. Dalam konteks pola hubungan sosiologis seperti itu, berlanjut-tidaknya tindakan massa dianggap lebih tergantung pada para patronnya. Maka, penyelesaian kerusuhan di Maluku Utara, misalnya, yang di dalamnya yang menonjol adalah unsur kelompok (subetnik), seharusnya tidak terlalu rumit. Soalnya, dengan asumsi ada watak mekanik dalam pola hubungan patrimonial, para tokoh masyarakatnyalah—sebagai pemilik *means of mental production*—yang harus dipegang dan dimintai pertanggungjawaban. Tentu saja, pemerintah juga harus secara efektif mengidentifikasi dan mendeteksi sumber-sumber penyebab masalah, lalu menyelesaikannya, termasuk—kalau perlu—menggunakan cara-cara kekerasan. Sebab, negara mana pun pada dasarnya mempunyai hak menggunakan cara-cara kekerasan, asal tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara dalam arti sesungguhnya.

Kendati begitu, upaya pemerintah menciptakan kestabilan sosial dan politik haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat utama, yakni intern pemerintahan harus solid, kompak, dan garis komando di bidang keamanan mesti jelas dan tegas. Sebaliknya, jika di kalangan aparat sendiri tidak seirama, apalagi terjadi pertentangan atau keretakan intern, jangan bermimpi masalah bisa diselesaikan. Sangat dikhawatirkan kalau dalam hubungan dengan kasus Maluku dan Mataram yang terjadi adalah keretakan intern pemerintahan Gus Dur, sehingga aparat pemerintahan Gus Dur akan sulit menyelesaikan "perang sipil" yang terjadi. Tampaknya, gejala ini akhirnya tercium juga oleh sebagian masyarakat Maluku, sehingga mereka meminta bantuan pasukan keamanan PBB untuk datang mengamankan provinsi "Seribu Pulau" itu, di samping juga mensinyalir ada "permainan" sebagian elite TNI.

Maka, berangkat dari penjelasan di atas, sebagian elite di lingkaran pemerintahan Gus Dur, utamanya yang berperan di bidang keamanan, bukan mustahil secara tidak langsung melakukan pembangkangan dari dalam, dengan cara tidak memerankan elemennya secara fungsional dalam menciptakan stabilitas. Atau, bahkan mungkin ada keinginan sistematis untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan Gus Dur-Megawati. Sementara, dalam menanggapi masalah kerusuhan ini, Gus Dur-Megawati serba lamban dalam mengambil langkah-langkah tegas untuk meminta pertanggungjawaban elite pada elemen di bidang keamanan.

Barangkali memang pembangkangan langsung para elite di bidang keamanan tak akan terjadi, karena disadari bahwa publik bangsa ini sedang menyorot mereka. Namun bahwa terjadi perubahan sikap berupa menurunnya derajat loyalitas terhadap kepemimpinan politik bangsa ini, yang berpengaruh pada sikap mereka dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial yang terjadi, agaknya sulit dibantah. Paling tidak, mungkin para elite di bidang keamanan berupaya menguji daya tahan kepemimpinan sipil Indonesia sekarang ini, dengan bukan saja tidak secara sungguh-sungguh menyelesaikan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, melainkan juga bisa meng-*create* konflik-konflik politik dan sosial melalui strategi *invisible hands*-nya, yang sesungguhnya merupakan bagian substansi dari upaya mempertahankan *status quo* mereka. Harapan terselubung di balik itu adalah menyadarkan masyarakat untuk kemudian mengundang tentara kembali masuk dalam politik dan kekuasaan.

Perubahan dari pemerintahan militer yang otoriter ke sipil yang lebih demokratis memang selalu menimbulkan *cost of civilization,* berupa kekerasan-kekerasan dalam masyarakat. Ini akibat dari perubahan kepemimpinan di tengah sikap para elite militer yang tidak semua bisa menerima, ditambah masyarakatnya yang belum terbiasa hidup dalam situasi yang lebih bebas. Dalam konteks ini, bukan tak mungkin kekerasan yang terjadi sebenarnya lebih sebagai *by designed,* ketimbang *by accident,* yang di dalamnya para elite yang tidak puas dengan perubahan-perubahan berperan di dalamnya.

Seandainya asumsi-asumsi itu mengandung unsur kebenaran, tentu sangat memprihatinkan. ❑
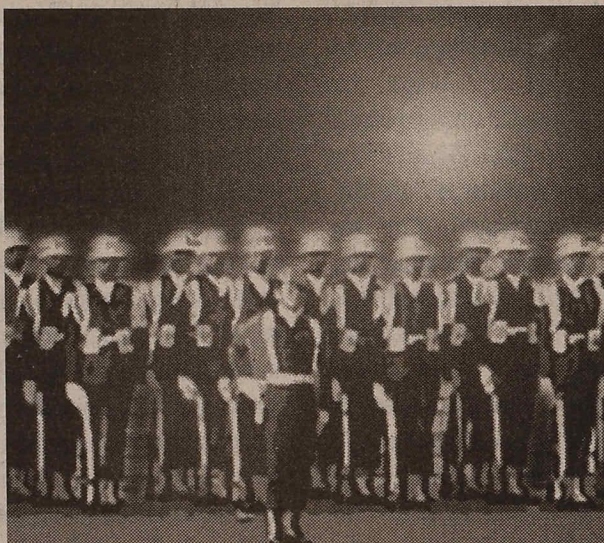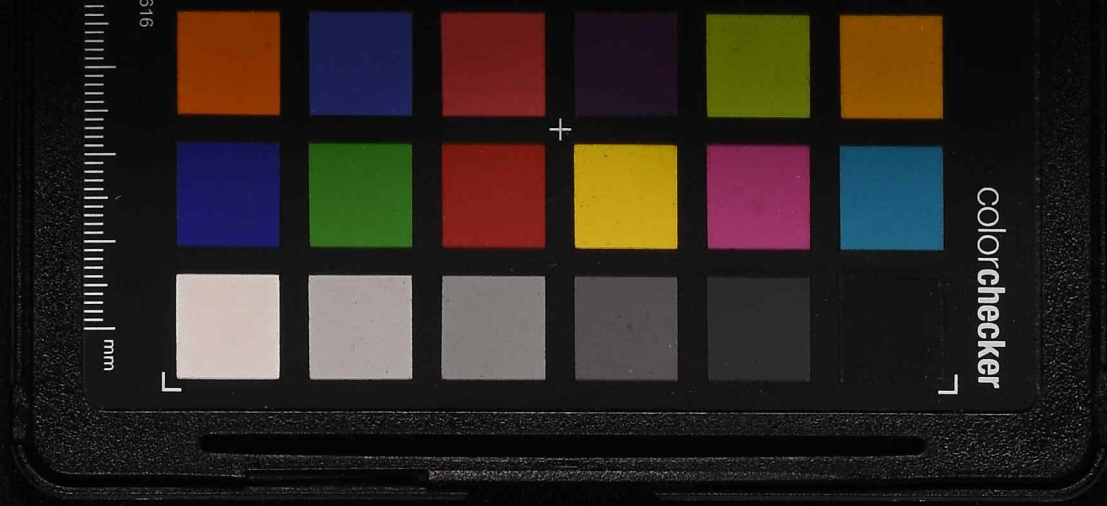
"Sangat Aneh Kalau Saya Di

Isu adalah "makanan" sehari-hari rakyat Indonesia saat ini. Tapi, isu yang muncul baru-baru ini ibarat petir di siang bolong. Entah dari mana sumbernya, sepekan belakangan beredar isu tentang adanya rencana kudeta tentara terhadap pemerintahan Gus Dur. Bahkan, kemudian isunya lebih mengejutkan lagi. Menurut desas-desus yang beredar di kalangan masyarakat tertentu, dalang di balik rencana kudeta tersebut adalah Jenderal TNI Wiranto, Menko Polkam saat ini. Tapi apa mungkin Wiranto "tega" mendongkel Gus Dur? Jumat sore pekan lalu, wartawan FORUM, Tony Hasyim, Hanibal W.Y.W., Teguh S. Usis, dan Andrianto Soekarnen, mewawancarai Wiranto. Wawancara berlangsung di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Jakarta. Berikut petikannnya.

ANNAS

Di masyarakat beredar rumor mengenai isu rencana kudeta dari TNI terhadap Presiden Gus Dur. Persoalannya apakah ada kemungkinan seperti itu?

Saya terus terang tidak paham mengapa isu kudeta digulirkan secara deras dan cukup luas cakupannya, bahkan sampai ke AS. Padahal kita tahu bahwa dari pengalaman-pengalaman empirik yang sudah kita lalui, kudeta itu bukan suatu perilaku dari TNI. Dalam sejarah, tentunya Anda tahu bagaimana perilaku TNI sejak zaman Pak Dirman. Dan, Anda tentu masih ingat, bagaimana sikap TNI ketika terjadi pergantian pimpinan nasional dari Pak Harto ke Pak Habibie. Waktu itu, saya selaku Panglima ABRI/Menhankam sebetulnya mengantongi surat perintah yang mengisyaratkan untuk mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan bangsa dan negara jika keadaan darurat (maksudnya Tap MPR No. V Tahun 1998, Red.). Tapi, itu tidak kita mamfaatkan. .

Kemudian, saat kita melaksanakan Sidang Istimewa MPR (November 1998), ada keinginan sekelompok masyarakat untuk menduduki gedung DPR/MPR. Waktu itu, mereka tinggal beberapa langkah lagi memasuki gedung MPR. Mayjen Nugroho Djayusman (Kapolda Metro Jaya) melapor kepada saya bahwa dia sudah kewalahan menahan massa yang merangsek sangat kuat di kawasan Semanggi. Mayjen Nugroho bertanya, "Saya harus berbuat apa, Pak?" Kalau waktu itu kita menginginkan suatu pengambilalihan kekuasaan, tentunya kita biarkan saja massa menduduki gedung MPR/DPR dan mendeklarasikan suatu pemerintahan presidium. Setelah itu, kita tinggal melakukan suatu pengambilalihan kembali (*counter coup*) terhadap upaya kudeta pihak tertentu itu. Dan itu sangat realistis terjadi.
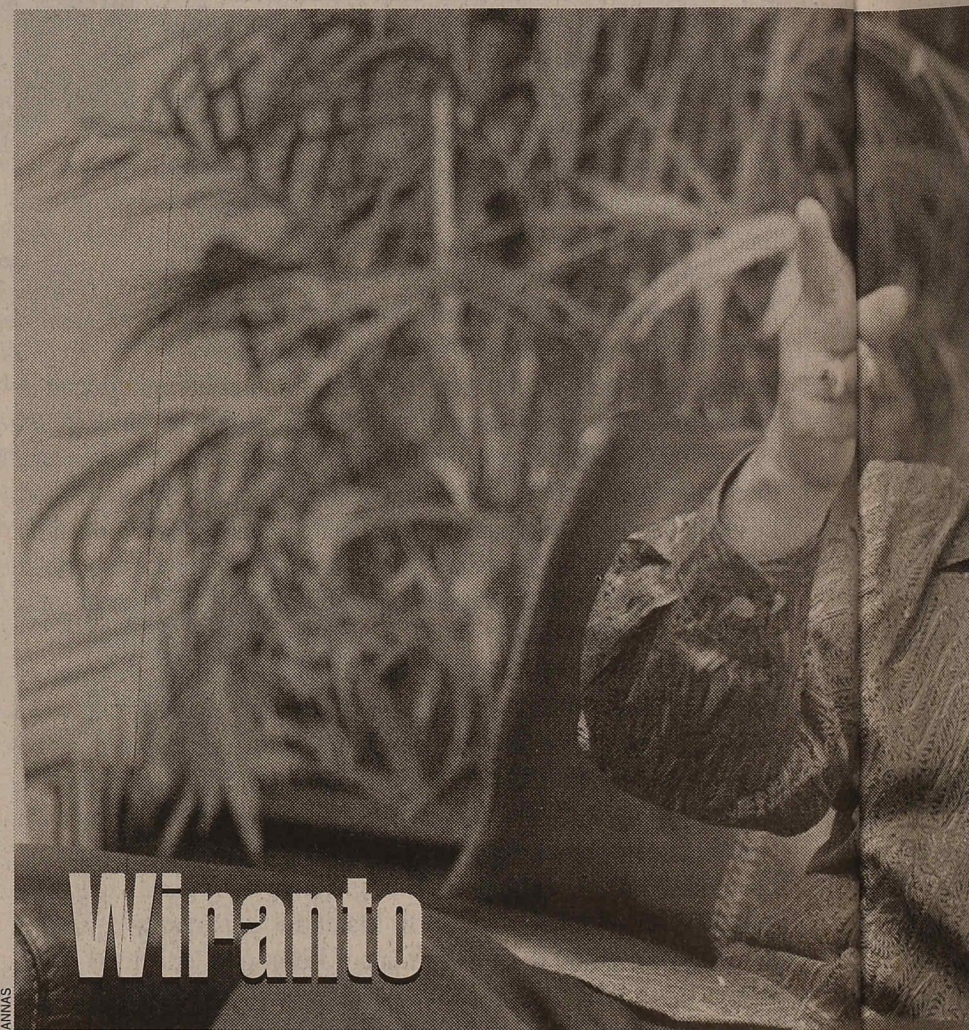
Tapi, itu pun tidak saya lakukan. Saya justru memerintahkan Pak Nugroho, "Pertahankan sampai titik darah penghabisan." Tapi, bukan perintah untuk berperang mati-matian mempertahankan pemerintahan, melainkan untuk mempertahankan konstitusi sampai optimal. Karena rambu-rambu konstitusi harus tegak. Kalau itu runtuh, kita tidak tahu apa yang akan terjadi.

Nah, apakah itu tidak cukup memberi bukti bahwa kudeta itu bukan suatu kebiasaan atau perilaku dari TNI? Bahkan, kalau kita bicara tentang kekuasaan, dalam Sidang Umum terakhir, saya selaku pimpinan TNI bersedia mundur dari pencalonan sebagai wakil presiden. Itu saya

aya Dianggap Berbahaya"

lakukan karena pertimbangan menghindari bentrokan massa. Saya kira itu semua merupakan suatu jawaban bahwa kudeta itu hanya sekadar isu yang digulirkan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan politis yang akan mengganggu persatuan bangsa dan negara.

Apakah pertimbangan Anda untuk tidak melakukan kudeta itu semata-mata berdasarkan perilakua TNI, apa tidak ada pertimbangan lain, misalnya kalau kudeta situasi akan lebih buruk?

Saya kira pertimbangan yang lebih dominan karena adanya nilai-nilai dasar yang melekat di dalam tubuh TNI yang diwariskan Pak Dirman. Bahwa TNI adalah bhayangkari negara. Sebagai bhayangkari yang ditugasi mengamankan bangsa dan negaranya, apakah kita tega mengambil alih kekuasaan? Kemudian dalam sumpah prajurit yang pertama berbunyi: kami bersumpah demi Allah akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945. Kata-kata setia ini nilainya tinggi sekali. Selama pemerintah itu sah secara konstitusi dan masih mendapatkan mandat dari MPR, maka dia harus dibela. Kecuali kalau mandat itu sudah diambil, tapi pemerintah masih nekat, itu lain soal.

Secara institusi TNI memang tidak pernah melakukan kudeta. Tapi, bukankah dalam sejarah TNI pernah ada sekelompok oknum perwira yang melakukan percobaan kudeta?

Oke. Berarti itu suatu tindakan yang sangat bodoh. Sebab, kalau kudeta hanya dilakukan oleh oknum, itu berarti bunuh diri.

Kini, tiba-tiba muncul isu kudeta, bahkan sampai muncul peringatan dari Dubes AS di PBB agar TNI tidak melakukan kudeta. Apa latar belakangnya?

Anda tanyakan langsung kepada mereka. Apa dasarnya mengatakan hal tersebut?

Tapi, di masyarakat kini beredar rumor seolah-olah orang yang akan melakukan kudeta itu Anda. Komentar Anda sendiri bagaimana?

Ya, enggak apa-apa. Apa kalau kita diisukan, kita harus menanggapinya secara emosional. Saya sudah memberikan bukti-bukti apa yang telah saya lakukan di masa lalu. Saya kira itu sudah cukup kuat untuk mengatakan bahwa saya selalu dalam posisi memegang teguh konstitusi.

Di kalangan tertentu konon beredar sebuah dokumen mengenai rencana kudeta. Apa dokumen sudah sampai ke tangan Anda?

Komentar saya, itu tidak ada. Tapi Anda tanyakan kepada Panglima TNI. Tapi, menurut saya, sangat tidak mungkin ada suatu dokumen yang mengisyaratkan suatu rencana kudeta. Kalau memang mau kudeta, kan tidak usah diumum-umumkan. Mana ada kudeta yang diumum sebelumnya, lalu dokumennya dibocor-bocorkan. Itu kudeta apa? Justru karena itulah saya yakin ini rumors, itu isu agar suasana lebih kalut lagi. Dan sasaran akhirnya adalah kepada pemerintah yang sah saat ini, di mana saya sendiri sekarang ada di dalam pemerintahan itu.

Kabarnya, isi dokumen itu berupa *contingency plan* dari TNI jika Gus Dur berhalangan tetap sebagai presiden?

Saya enggak tahu. Saya sendiri engggak pernah *contingency plan*, bikin masalah itu. Dan saya sebagai Menko Polkam tidak pernah mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun *contingency plan* semacam itu. Begini sajalah, tolong dokumennya dicarikan, tunjukkan kepada saya. Kita panggil orang yang membuatnya, apa itu asli atau tidak. Lalu ekspos kepada masyarakat. Jangan kita cuma berasumsi ada dokumen, tapi enggak jelas. Ini sangat menggelisahkan.

Apa pengamat yang menilai, secara *de facto*, Anda masih menjadi "Panglima TNI". Kabarnya Anda masih bisa mengantur-atur di TNI. Bagaimana komentar Anda?

Nah, kalau soal itu saya bisa jawab," tidak". Sebagai prajurit profesional, saya tahu di mana posisi saya. Jadi, saya tidak pernah dan tidak akan memerintah lagi TNI yang merupakan hak dari Panglima TNI saat ini. Saya campur tangan mutasi perwira TNI, tidak. Saya campur tangan masalah pembinaan karir perwira, tidak. Apalagi saya campur tangan menyangkut hal-hal operasional TNI.

Yang saya lakukan sekarang adalah mengkoordinasi segala hal yang menyangkut keterlibatan TNI dalam konteks tugas terpadu dengan departemen yang lain. Jadi, pertanyaan Anda itu bisa saya pastikan, bahwa itu tidak benar. Memang saya juga mendengar ada orang bilang,

ANNAS
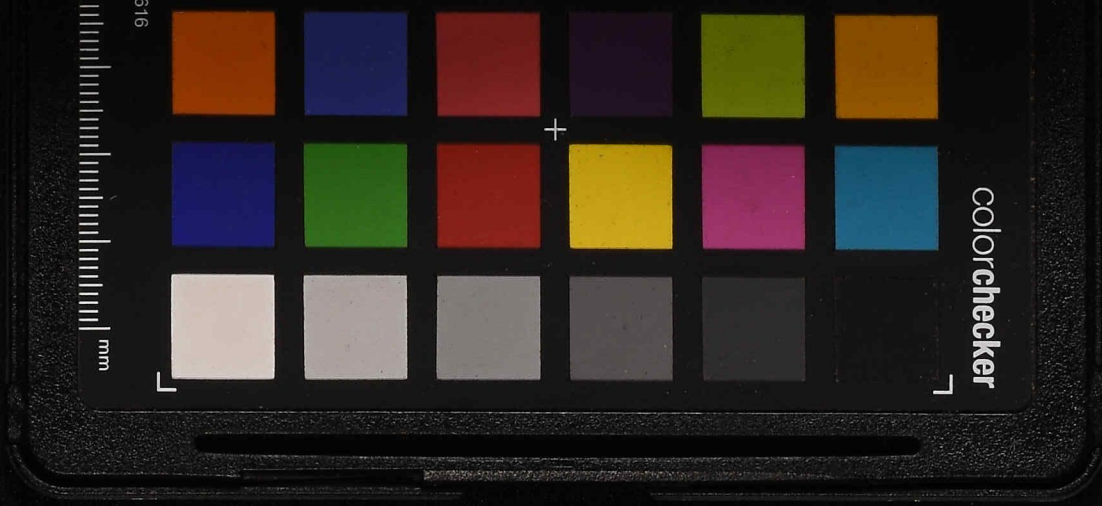
PEMERIKSAAN WIRANTO DI KOMNAS HAM. *Bisa menimbulkan reaksi.*

"Oh, sebenarnya yang mengatur-atur adalah Wiranto." Saya dengar omongan begitu.. Jangan dikira saya enggak dengar.

Baru-baru ini juga beredar kabar bahwa Anda akan dicopot sebagai Menko Polkam. Konon, itu karena Anda dianggap orang berbahaya?

Kalau ini merupakan sinyalemen, saya kira tidak betul. Karena Gus Dur sudah secara jelas mengungkapkan tidak akan ada *reshuffle*, termasuk untuk jabatan Menko Polkam. Artinya, beliau sudah menepis isu-siu itu. Mengenai saya dianggap berbahaya, itu hal yang agak aneh. Saya tanya, siapa yang menganggap saya berbahaya? Mengapa saya dianggap berbahaya? Bagi saya, pemerintahan adalah perahu saya. Saya ada dalam satu kapal bersama Gus Dur sebagai nakhoda dan Ibu Mega sebagai wakil nakhoda. Saya merupakan salah satu dari anak buah kapal tersebut. Kesalahan nakhoda adalah kesalahan saya. Kalau nakhoda menenggelamkan kapal, saya juga ikut tenggelam. Hingga saat ini apa yang saya lakukan sekarang adalah membantu nakhoda dan wakil nakhoda untuk mengendalikan kapal ini agar lolos menghadapi gelombang yang sangat besar, agar kapal bisa mencapai tujuan yang sudah diarahkan. Karena itu, sungguh aneh kalau saya dianggap berbahaya di dalam satu kapal. Kecuali yang mengatakan itu adalah bajak laut di kapal lain, ha ha ha...

Maksudnya?

Ya, kalau mereka yang bilang saya berbahaya, berarti bagus. Artinya saya dianggap orang yang berbahaya oleh bajak laut itu karena saya yang mengamankan kapal presiden dan wapres. Tapi kalau mereka mengatakan saya berbahaya, lalu awak kapal saya juga juga latah mengatakan saya bahaya, wah ini bisa rusak. Padahal, sudah jelas, dengan melihat pengalaman masa lalu, di mana ada dua kesempatan yang sangat terbuka peluang saya untuk kudeta, tapi tidak saya lakukan. Saya juga pernah punya peluang secara konstitusional untuk maju sebagai wakil presiden. Tapi mengingat adanya risiko konflik di masyarakat, saya pun memilih mundur. Jadi, kalau sekarang saya dituduh berbahaya, logikanya bagaimana? Cobalah kita berpikir jernih. Kecuali kalau saya ini orang yang sudah berkali-kali gagal melakukan kudeta. Kalau saya seperti itu, baru berbahaya sekali.

> "Ada dua kesempatan yang sangat terbuka peluang saya untuk kudeta, tapi tidak saya lakukan"

Artinya Anda bukan tipikal "Gringo Honasan"?

Nah, itu dia. Sekarang kabarnya dia jadi senator kan?

Sebagai anak buah kapal yang baik, berarti tidak mungkin Anda mendongkel posisi Gus Dur dan Mbak Mega?

Ya, tulis saja itu. Karena saya selalu mengacu kepada kosntitusi. Sudah saya buktikan beberapa kali, kok.

Menurut Anda apakah kapal yang di nakhodai Gus Dur ini sudah *on the right track* dalam rangka mengatasi krisis nasional saat ini?

Begini, barangkali ada kesan, penilaian dan spekulasi bahwa kabinet sekarang enggak kompak atau kinerjanya masih lamban. Itu penilaian yang tidak *fair*. Memang, kita sekarang terdiri dari tokoh-tokoh dari multipartai, LSM, pakar, dan kaum profesional yang tergabung dalam suatu kabinet. Tentu kita buutuh waktu konsolidasi. Tapi bukan berarti kita tidak kompak. Menurut saya, kita *on the right track* dalam arti kita sudah masuk dalam suatu keputusan politik yang sudah dipahami anggota kabinet. Tapi, kalau kabinet ini harus membuktikan sudah mampu menyelesaikan berbagai permasalahan nasional dalam seratus hari, menurut saya juga tidak *fair*. Kalau tuntutannya seperti itu, di mana dalam seratus hari harus sudah menyelesaikan persoalan yang sangat komplikatif, yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya dan juga merupakan akumulasi permasalahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang sudah bertumpuk, saya kira siapa pun tidak akan sanggup.

Karena itu, saya optimis, kalau tidak ada goncangan, tidak ada gangguan, dan tidak ada yang beritikad mengganggu kapal ini, kita bisa berbuat banyak untuk republik ini. Karena itu, saya dalam kapasitas Menko Polkam mengimbau kepada masyarakat untuk melihat secara jernih berbagai permasalahan bangsa Indonesia yang sedang dipikul oleh Kabinet Persatuan Nasional ini. Dan saya berharap agar masyarakat memberikan dukungan moril dan memberikan dorongan yang positif agar kabinet ini bisa bekerja dengan baik. Kalau mau kritik, mau kasih saran boleh. Sejauh bersifat membangun, itu baik-baik saja.

Kembali ke soal isu kudeta tadi. Bebeberapa kalangan mencium indikasi adanya suatu niat kudeta ketika Letjen Djadja Suparman menyatakan bahwa prajurit TNI gelisah melihat para jenderalnya diperiksa oleh KPP HAM. Menurut Anda apakah pemeriksaan itu bisa memicu suatu kudeta?

Saya kira, itu sesuatu yang dihubung-hubungkan. Hanya suatu analisis yang tidak berdasarkan argumentasi yang tepat.

Nah sekarang setelah isu kudeta sudah memperoleh klarifikasi dari Panglima TNI, jangan lalu menghalalkan perlakuan sewenang-wenang kepada TNI.

D&R

WIDODO A.S. DAN GUS DUR. *Kudeta bukan naluri TNI.*

Reaksi keras dalam rangka mencari keadilan itu bisa saja terjadi karena dalam tubuh TNI sarat dengan nilai-nilai kebersamaan, kesetiaan dan loyalitas.Reaksinya tidak mesti kudeta dan juga tidak kepada pemerintah. Tapi lebih ditujukan kepada pihak-pihak yang menzalimi TNI secara tidak bermoral.

Tapi tampaknya ada suatu kelompok tertentu yang secara sistematis melontarkan analisis mengenai kemungkinan perebutan kekuasaan oleh TNI. Menurut Anda apa motif mereka?

Begini saja, ya, Anda tentu ingat, isu kudeta ini tidak hanya sekarang. Waktu saya masih menjabat Panglima TNI, isu kudeta itu sudah sering muncul. Nah, menurut pengamatan saya, isu kudeta itu selalu muncul bersamaan pada saat terjadi tekanan yang sangat kuat terhadap institusi TNI. Ketika tekanan muncul, disusul dengan isu kudeta. Saya kira ada suatu korelasi antara tekanan dengan isu tersebut. Apakah motifnya karena ada suatu kekhawatiran yang berlebihan akan adanya reaksi yang keras dari TNI seperti yang diisyaratkan Pak Djadja? Apakah ada suatu kekhawatiran terhadap suatu itikad-itikad yang terselubung? Atau, apakah ada maksud tertentu untuk membuat suasana menjadi panas dan saling mencurigai? Saya tidak tahu pasti.

Tapi, menurut saya, lebih baik kita mencari hikmah di balik isu tersebut. Pertama, untuk mengingatkan kembali kepada institusi TNI bahwa kudeta bukan perilaku TNI. Kedua, untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terlalu berlebihan menekan TNI. Yang di satu sisi selalu ditempatkan sebagai tulang punggung bangsa dan negara untuk mengamankan situasi, tapi di satu sisi dihantami terus. Ketiga, untuk mengingatkan kepada pemerintah yang sah bahwa TNI adalah bhayangkari negara yang harus dipercaya dan dihargai. Jadi, lebih baik kita ambil hikmahnya ketimbang kita mencari siapa yang membuat isu tersebut.

> Isu kudeta itu selalu muncul bersamaan pada saat terjadi tekanan sangat kuat terhadap institusi TNI

Apakah Anda menganggap tekanan kepada TNI saat ini sudah berlebihan?

O iya. Jelas berlebihan. Enggak usah tanya saya, anak SD saja tahu, kok.

Contohnya tekanan seperti apa?

Ya, banyak. Misalnya, kejadian di Ambon. Tentara datang ke sana. Bayangkan, mereka harus pisah dengan keluarganya yang dalam keadaan ekonomi sangat berat, tapi mereka harus barangkat untuk memisahkan orang yang berkelahi. Tapi, begitu sampai di sana, mereka malah dituduh sebagai provokator. Saya sendiri, sejak awal sudah datang ke sana, untuk lihat pengungsi dan membantu rehabilitasi rumah ibadah. Kemudian kita mencoba menetralisir situasi dengan mengirim pasukan. Lalu, kita melakukan rehabilitasi pemukiman dengan mengirim pasukan zeni tempur. Dan yang terakhir saya kirimkan para mediator TNI, sebanyak 19 perwira asal Ambon yang berbeda agama. Saya beri waktu satu bulan untuk segera selesaikan pertikaian dan mengajak saudara-saudara mereka untuk masuk dalam proses rekonsiliasi. Satu bulan berhasil. Saya datang lagi ke sana. Kita melakuan doa bersama, ada upacara adat, lalu kita tanda tangan naskah perjanjian perdamaian bersama. Bayangkan, kita sudah berusaha sejauh itu. Tapi sekarang muncul tuduhan-tuduhan yang sangat emosional kepada TNI. Itu kan tekanan-tekanan yang berlebihan.

Lalu, contohnya lagi dalam kasus Aceh. Dalam 3 bulan terakhir, 73 polisi dan tentara menjadi korban GAM. Tapi itu tidak pernah disebut sebagai tindakan sewenang-wenang dari pihak lain kepada polisi dan TNI. Justru aparat keamanan yang selalu dituding melakukan pelanggaran HAM. Saya kira hal seperti itu merupakan suatu permasalahan yang harus dikembalikan kepada masyarakat untuk menilainya. Sehingga kita bisa memulai suatu kehidupan baru yang bernuasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya.

Bagaimana pendapat Anda mengenai kerusuhan di Maluku tersebut. Mengapa sampai berlarut-larut? Dan mengapa TNI terkesan kurang sigap menangani?

Saya kira, soal kesan TNI kurang sigap itu perlu diklarifikasi dahulu karena sebenarnya yang menangani soal kerusuhan itu bukan TNI, tapi polisi. Dalam keadaan tertib sipil, yang bertanggung jawab terhadap kamtibams adalah polisi. Nah, TNI merupakan suplemen bagi polisi, jika polisi tidak mampu menangani kerusuhan.

Mengapa terkesan TNI kurang sigap? Ya, kalau TNI menangani terlalu sigap, berarti kembali ke zaman dulu. Yang harus sigap itu polisi dulu. Kalau polisi tidak bisa menangani, baru minta bantuan TNI. Artinya, polisi minta bantuan TNI untuk melaksanakan tindakan-tindakan kepolisian. Tapi, komandonya masih polisi. Kalau lebih berat lagi, namanya bantuan militer. Dilaksanakan oleh gubernur. Dia minta bantuan Pangdam. Dan Pangdam atas izin Panglima TNI membantu pelaksanaan di daerah itu, lalu komando pengendalian beralih kepada komandan militer setempat.

Lantas apa yang menyebabkan kerusuhan itu tidak bisa cepat diatasi?

Ada suatu prinsip dasar, kalau terjadi suatu kerusuhan, maka kerusuhan itu dianggap sebagai suatu pengingkaran terhadap hukum yang berlaku. Maka

KRUS HARYANTO
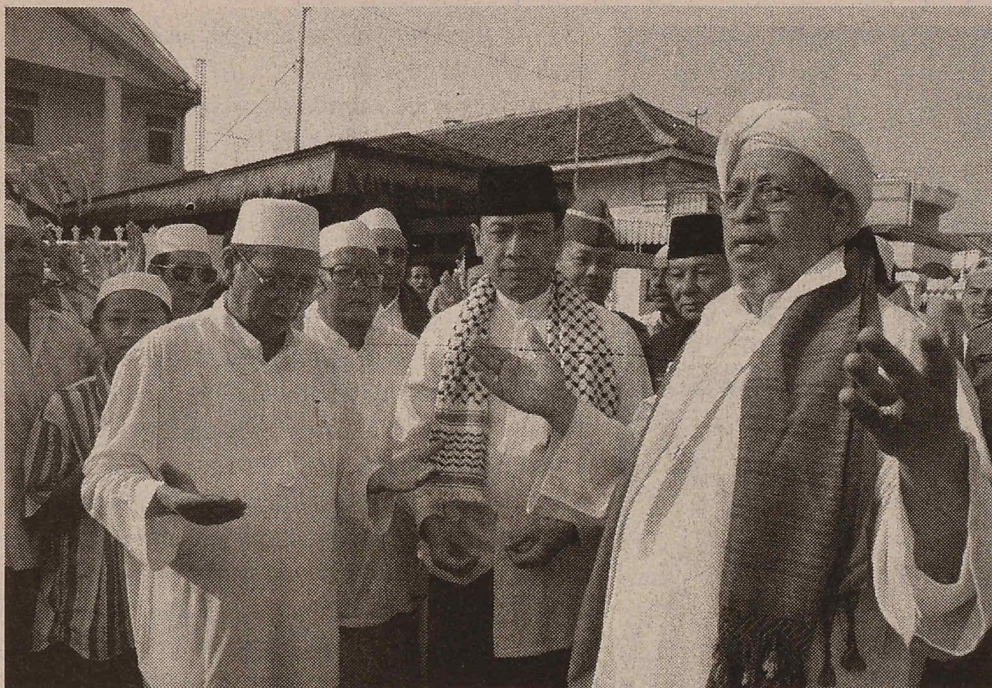
WIRANTO DENGAN ULAMA. *Melerai masyarakat yang bertikai.*

yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana hukum ditegakkan di daerah itu. Kalau hukum biasa tidak dapat dilakukan, maka sudah ada toleransi hukum yang lebih tinggi lagi sifatnya. Dalam keadaan tertentu bisa dilaksanakan bantuan militer, atau bahkan keadaan darurat. Tapi masalah yang sekarang dihadapi pemerintah, di satu sisi kalau kita melaksanakan keadaan darurat, atau suatu tingkat penerapan hukum yang lebih keras, maka implikasinya cukup luas di bidang lain, terutama di sektor ekonomi. Terutama menyangkut *image* dunia internasional mengenai keadaan di negara kita sehingga akan mengganggu proses investasi yang sekarang sedang kita bangun. Tapi, itu barangkali, ya. Karena itu, kita memilih tidak melakukan darurat militer, melainkan melakukan langkah-langkah lain yang sejenis. Tentu dengan langkah lain itu, tidak bisa secepat kalau menggunakan tingkatan hukum yang lebih keras. Tapi, ya sudahlah, kita tidak perlu saling menyalahkan. Karena inilah langkah terbaik yang kita sepakati. Presiden Gus Dur sudah memutuskan tidak ada darurat militer. Ya, mari kita hormati keputusan Presiden.

Kabarnya, pada zaman Pak Habibie, Anda sudah mengusulkan agar diberlakukan darurat militer di Ambon. Tapi ditolak oleh Habibie. Apa benar begitu?

Ya, memang sudah ada, tapi terbentur oleh persoalan itu tadi.

Kalau kerusuhan itu diatasi dengan darurat militer apakah bisa diatasi lebih cepat?

Barangkali, iya. Tapi, masalahnya bukan menerapkan darurat militer atau tidak. Melainkan bagaimana kita menegakkan hukum dalam suasana yang kisruh. Tentunya itu harus melalui suatu penerapan hukum yang keras dan tegas. Sebab kalau acuan hukumnya tidak jelas, maka yang akan sangat terpengaruh adalah aparat keamanan yang ditugaskan mengatasi situasi itu. Mereka jadi ragus-ragu karena tidak ada payung hukumnya. Mau menembak, takut dikenai pelanggaran HAM. Tapi kalau dibiarkan, dikira tidak punya semangat untuk menyelesaikan masalah. Senjata banyak beredar di masyarakat, tapi mau menggeledah rumah, tidak boleh. Mau memberlakukan jam malam, tidak boleh. Tapi karena tidak ada jam malam, orang bisa menyerang kapan saja. Mau pagi, mau malam, seenaknya saja. Tapi apakah aparat bisa menjaga 24 jam? Jadi banyak kesulitan yang dihadapi bilamana tidak ada suatu penerapan hukum yang lebih kuat dan yang lebih mengayomi pelaksanaan aparat keamanan di lapangan dalam menegakkan hukum.

Dalam kasus kerusuhan di Maluku ada pendapat mengatakan bahwa TNI adalah bagian dari permasalahan tersebut. Sehinngga disarankan agar seluruh pasukan TNI ditarik keluar dari wilayah tersebut. Bagaimana menurut Anda?

Lagi-lagi itu adalah adalah tuduhan yang tidak punya bukti kuat. Sejauh pengamatan saya, kalau betul TNI bagian dari permasalahan, maka sudah lama negara kita ini hancur. Tapi kenyataannya, apa yang terjadi saat ini, TNI sudah mampu melakukan perannya secara baik dalam melaksanakan agenda reformasi. Pada saat terjadi pergantian kemimpinan nasional dari Pak Harto ke Pak Habibie, sampai Sidang MPR terakhir, kan penuh dengan gejolak. Tapi nyatanya itu bisa kita lalui dengan selamat. Dan saat ini, di beberapa tempat keadaannya cukup aman. Di Jakarta bisa Anda lihat sendiri kehidupan masyarakat berjalan cukup tenang. Malam hari Anda bisa keluar dengan aman. Kalau kita berpikir secara jernih dan tulus, situasi itu kan tercipta karena jasanya aparat keamanan. Bayangkan kalau mereka sebagai provokator atau bagian dari masalah, tentu negeri kita tidak bisa bertahan lama. Makanya saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Tapi kalau ada oknum-oknum TNI atau polisi yang terlibat dalam kerusuhan, itu tidak saya pungkiri. Saat ini, di semua bagian komponen bangsa kita dapati hal semacam itu. Ada penyimpangan yang disebabkan perilaku orang sendiri atau ada desakan kebutuhan yang membuat mereka melanggar hukum. Ini realita. Jadi, jangan gegabah mencap TNI bagian dari permasalahan dan menjadi provokator.

Omong-omong kapan Anda pensiun dari dinas TNI?

Saya akan konsisten kepada peraturan yang saya buat. Dalam peraturan itu pejabat di luar struktur TNI diharapkan memilih untuk tetap berada pada jabatan di luar struktur dengan dengan status pensiun atau berpindah status sebagai pegawai negeri sipil. Kalau tidak mau pensiun dia mesti masuk kembali ke struktur TNI, tapi tidak bisa memilih jabatan. Nah saya kan masih kurang tiga tahun masuk usia pensiun. Tapi saya memilih untuk pensiun dini.

> Kalau betul TNI bagian dari permasalah, maka sudah lama negara kita ini hancur

Tapi, kabarnya, Panglima TNI sekarang merasa tidak enak hati untuk memensiunkan Anda?

Itu sudah saya serahkan sepenuhnyakepada Panglima TNI. Saya sudah melapor ke Panglima TNI, "Pak Panglima, saya ini bagian dari institusi TNI. Karena saya ini jenderal tidak ada jabatan di TNI, tapi punya jabatan di tempat lain, maka saya tunduk kepada Anda sebagai pembina korps dan pembina personel."Jadi itu sudah saya sampaikan kepada Panglima TNI. Dan saya omong begitu di depan orang lain, ada Kasum. Saat itu juga saya katakan, bahwa keputusan dari Panglima TNI akan saya laksanakan. Tap, juga saya katakan bahwa saya tidak berkehendak melanggar aturan yang saya ciptakan sendiri. Sudah jelas kan. ❑

SETNEG

GUS DUR DAN WIRANTO. *Orang yang patut diwaspadai?*

Siapa Menggoyang Pusat Kekuasaan

Isu kudeta merebak setelah beberapa pejabat Amerika Serikat mengulasnya. Mengapa Wiranto dianggap yang paling mungkin melakukannya?

Jakarta seolah tengah diguncang gempa berkekuatan tinggi, pekan lalu. Soalnya, di pusat kekuasaan terasa ada guncangan yang cukup dahsyat. Guncangan ini berasal dari sebuah isu: Akan ada kudeta. Uniknya, isu itu justru muncul pertama kali dari seberang lautan, melalui Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Richard C. Holbrooke. Pernyataan "panas" itu dilemparkan Holbrooke dalam sebuah telewawancara dengan wartawan di Jakarta dan New York.

Sebenarnya, yang dibahas dalam wawancara jarak jauh itu adalah soal pengungsi di Timor Barat dan perhatian pemerintah AS terhadap kondisi di Jakarta. Telewawancara yang dimulai pukul 20.00 itu berlangsung di kediaman Konselor Penerangan dan Kebudayaan Kedubes AS di Jakarta, Richard D. Gong, di Jalan Senjaya III No. 2 Kebayoran Baru. "Telewawancara dilakukan untuk memenuhi permintaan wawancara dari banyak media, baik di Jakarta dan New York, kepada Duta Besar AS di PBB," kata sumber FORUM di Kedutaan AS.

Dalam acara itu, Holbrooke tidak mengeluarkan pernyataan resmi pemerintah AS. Ia hanya memberi pengantar tanya-jawab. Salah satu poin kata pengantarnya adalah soal pertarungan antara kekuatan demokrasi dengan kekuatan korupsi dan militerisme masa lalu. "Pertarungan ini akan sangat berpengaruh terhadap masa depan," ujarnya.

Besoknya, muncullah kutipan wawancara Holbrooke di beberapa media nasional. Bahkan, di harian *Berita Buana* ada pula komentar panjang Holbrooke tentang isu kudeta itu. "Kami mendapat laporan lengkap soal rencana kudeta itu. Mudah-mudahan isu itu tidak benar. Sebab, di tingkat pemimpin AURI dan ALRI hal itu sangat kuat dibicarakan, dan mereka telah menyatakan tak akan mendukungnya," ujar Holbrooke

Nah, karena seorang pejabat pemerintah AS yang angkat bicara, hebohlah masyarakat Indonesia. Apalagi, Duta Besar AS untuk Indonesia, Robert Gelbard, segera menemui Presiden Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, untuk menjelaskan pernyataan Holbrooke. Konon, kepada Gus Dur, ia pun menyampaikan pesan khusus Presiden AS, Bill Clinton, tentang posisi AS yang akan mendukung Gus Dur. Rumor tentang kudeta itu berkembang.

Pemimpin TNI tentu saja segera memberikan klarifikasi kepada Gus Dur bahwa TNI tak pernah punya niat melakukan kudeta. Klarifikasi pun segera disusul bantahan atas pemberitaan di koran. "Kamu ini *ndak* pernah melihat sejarah, ya? *Ndak* ada TNI yang kudeta itu," kata Panglima TNI Laksamana Widodo kepada pers. Para pejabat militer lainnya juga ikut membantah. "TNI tetap loyal kepada Presiden," ujar Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI, Letjen Agus Widjojo.

Meski begitu, isu yang dilansir Holbrooke
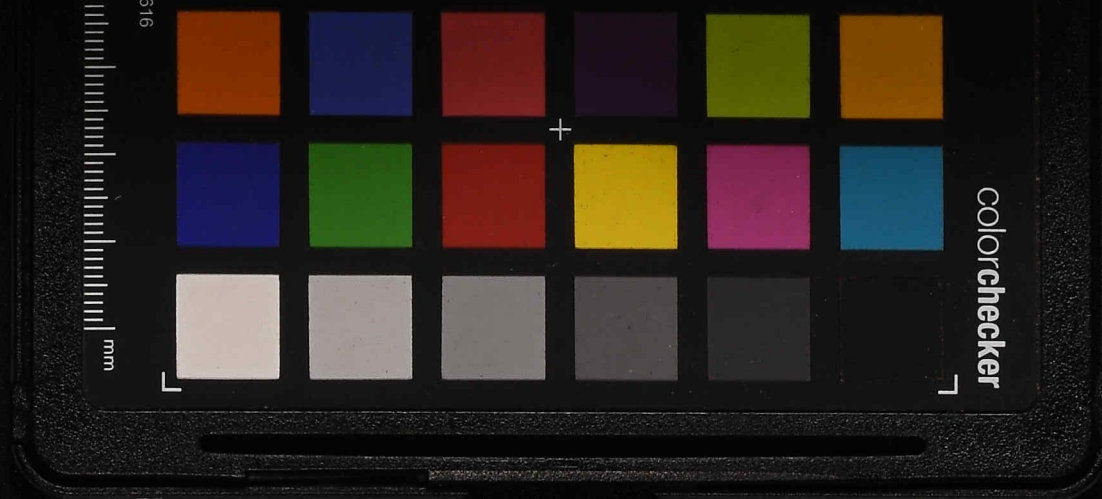
telah mendapat angin. Kalangan pengamat politik dan militer, sebagian percaya dan sebagian lagi tidak mempercayainya. "Tentara sekarang tidak akan populer di dunia internasional jika mereka mengambil alih kekuasaan politik," ujar pengamat politik Salim Said.

Sementara, pengamat politik LIPI, Indria Samego, menilai kemunculan isu kudeta itu adalah cara TNI untuk membangun *image* bahwa TNI masih memiliki kekuatan. "Pernyataan Holbrooke adalah suatu spekulasi yang bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar," ucapnya.

Gus Dur sendiri pun tak terlalu tegas menepis isu itu dan terkesan masih menyiratkan kemungkinan usaha kudeta. "Jangan berpikir ada kudeta. Kalaupun memang ada yang mencoba melakukannya, kami akan mengambil tindakan tegas," katanya.

Memang, sebagian masyarakat belum yakin bahwa isu kudeta cuma bualan Holbrooke. Soalnya, belakangan, kegiatan-kegiatan pasukan TNI tampak sedikit *show of force*, sehingga menguatkan kesan ada situasi yang gawat. Tengoklah apa yang dilakukan jajaran Kodam Jaya dalam acara apel Komandan Satuan di Ciampea Bogor, pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Pangdam Jaya, Mayjen Ryamizard Ryacudu pun tampak memakai peralatan tempur dan ikut memakai coreng moreng. "Apel komandan satuan ini bertujuan mempererat persatuan, kebersamaan, loyalitas, dan kesetiaan," ujarnya. Maklumlah, Kodam Jaya adalah benteng pertama yang harus ditundukkan jika sebuah kudeta akan berlangsung.

Seorang sumber FORUM di intelijen mengamati bahwa memang sudah ada gejala persiapan kudeta. Ia menyatakan bahwa beberapa personal militer mendatangi mantan KSAD Jenderal TNI Rudini beberapa waktu lalu. "Mereka mendesak Rudini menjadi *cucuk lampah* (pemimpin) kudeta," ujar sumber tadi.

Tapi, Rudini membantah cerita itu. "Enggak ada. Orang menghubungi saya itu dalam rangka bertanya apakah ada kudeta atau tidak. Saya bilang: Enggak akan ada kudeta," ujarnya kepada Yus Ariyanto dari FORUM.

Masih menurut sumber FORUM, setelah "ditolak" Rudini, langkah kelompok yang berhubungan dengan kekuatan politik lama itu untuk melakukan aksi tak surut. Apalagi, mereka memiliki dana dan kemampuan cukup besar. "Ada tiga tokoh yang menurut informasi terlibat," ujarnya. Konon, kelompok ini tengah berupaya menggalang massa secara besar-besaran dengan memakai sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kebetulan, saat ini kasus pertikaian di Maluku memang cukup membangkitkan emosi. Kasus Maluku itu mereka garap sebagai langkah percepatan menuju situasi instabilitas. Konon, Tabligh Akbar Sejuta Umat untuk kaum muslimin Ambon di silang Monas, sehari menjelang Lebaran itu, akan dipakai sebagai momentum. "Penumpukan massa emosional seperti itu memang sangat memungkinkan untuk melakukan tekanan massa terhadap pemerintah," kata sumber itu.

Ada cerita, pada acara di Monas tersebut, sebagian orang ingin memanfaatkan acara itu untuk melakukan bakar-bakaran. Bila hal itu terjadi, berjalanlah skenario "Ambonisasi Jakarta". Apalagi, saat itu beredar pula isu tentang kedatangan puluhan ribu pemuda muslim Ambon yang hendak melakukan pembalasan di Jakarta.

Untunglah, para mubalig yang hadir cepat sadar. Begitu mereka mendengar bisik-bisik tentang rencana itu, mereka segera men-

Pengalaman Sudah Cukup

Coup d'Etat. Revolusi. Putsch. Pronounciamiento. Junta. Nama boleh bermacam-macam, tapi artinya sama: penggulingan kekuasaan pemerintah yang sah. Itulah kudeta. Mengambil alih kekuasaan tentu saja bukanlah kerja yang sederhana. Apalagi jika menginginkan kudeta yang sukses. Terkadang, sebuah kudeta yang dirancang rapi pun bisa gagal bila faktor-faktor yang memperlancar jalannya kudeta tidak terjadi.

Ada berbagai kondisi yang memungkinkan terjadinya proses kudeta. Kondisi itu, antara lain, masyarakat yang gelisah, keadaan sosial ekonomi yang carut-marut, pertikaian antarelite politik di tengah kemandekan politik, ketegangan yang memuncak antarkelompok masyarakat, delegitimasi dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah, serta keinginan sekelompok elite epolitik dan militer untuk mengubah keadaan.

"Kudeta adalah campuran bahaya dan peluang," kata Edward Luttwak dalam bukunya yang berjudul *Coup d'Etat*. Orang-orang yang dekat dengan rezim biasanya akan menganggap kudeta sebagai sebuah peluang. Mereka bisa menerima kudeta sambil merundingkan imbalan posisi, atau bahkan mereka memanfaatkan suasana instabilitas untuk kemudian melancarkan kudeta lanjutan dan merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri.

Sementara itu, mereka yang jauh dari rezim yang digulingkan akan menganggap kudeta sebagai sebuah bahaya. Meskipun demikian, tindakan mereka bisa bermacam-macam. Ada yang sekadar berdiam diri sampai krisis reda, ada yang melarikan diri ke luar negeri, tapi ada pula yang dengan gagah berani melawan kudeta. Bahkan, ada juga yang kemudian berbalik menjadi pendukung kudeta tersebut.

Bangsa Indonesia sebetulnya sudah cukup berpengalaman dalam urusan "kudeta". Pengalaman pertama adalah usaha kudeta yang dikenal dengan Peristiwa 3 Juli 1946. Pada peristiwa itu, Ahmad Soebardjo, Iwa Kusumah Sumantri, dan Panglima Divisi Yogyakarta, Jenderal Mayor Soedarsono, mencoba memaksa Presiden Soekarno untuk membubarkan kabinet serta menyerahkan kekuasaan politik dan militer kepada kelompok mereka. Alasannya, pemerintah telah menangkap para pemimpin oposisi, termasuk Tan Malaka dari Persatuan

IPPHOS
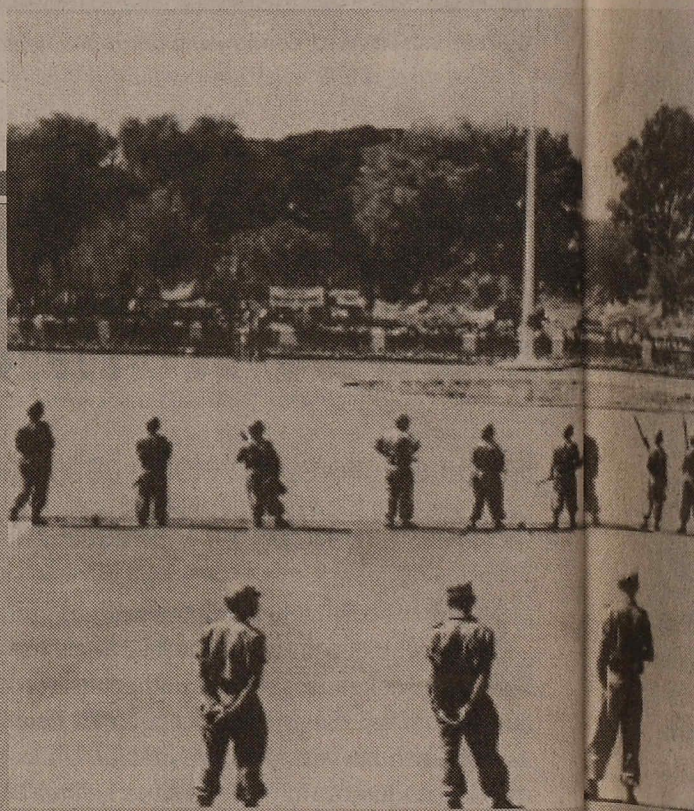
PERISTIWA 17 OKTOBER 1952. *Bubar setelah dinasihati Soe*
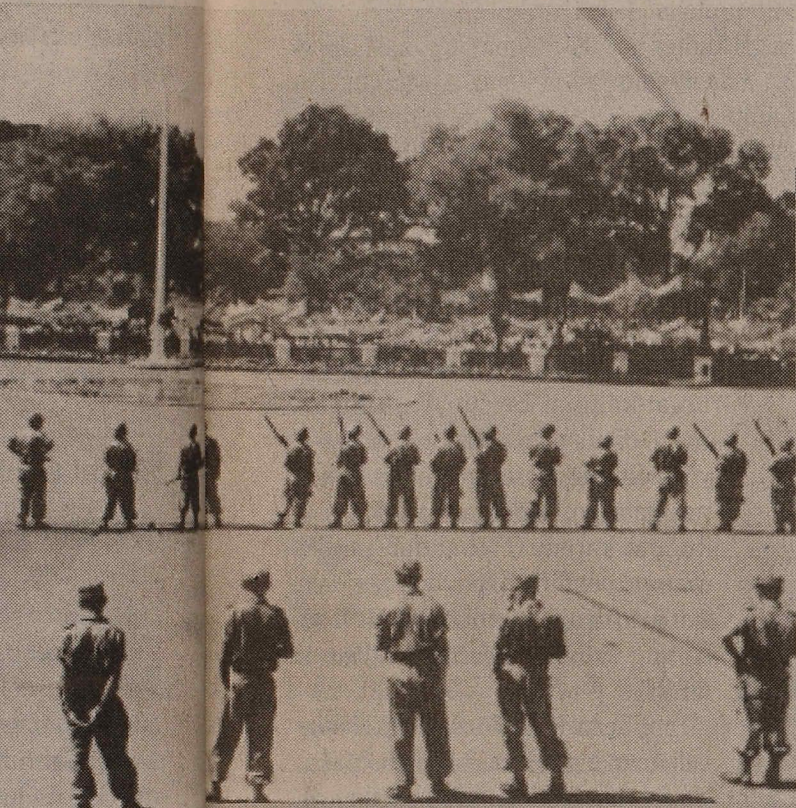
cegahnya. "Kita telah disusupi provokator, jangan sampai ada yang mengotori acara damai ini dengan melakukan segala sesuatu yang tak diinginkan," kata H. Hussein Umar dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Walhasil, hal yang tidak diinginkan tak terjadi di situ.

Sementara, Gus Dur langsung berkomentar keras tentang acara di Monas. Ia menuding bahwa aksi itu bertujuan untuk memaksanya agar berhenti dari jabatan Presiden. "Mereka yang di Monas itu adalah kelompok-kelompok kecil. Jadi, tak ada artinya," ujarnya tegas.

Malangnya, "rencana" yang gagal di Monas seakan berpindah ke Mataram. Menurut sebuah sumber FORUM yang dekat dengan kalangan intelijen, kelompok misterius itu memang hendak melakukan serangkaian kerusuhan di beberapa daerah. "Di antaranya adalah Mataram, Palembang, Jambi, Makassar, Surabaya, dan Jakarta," kata sumber tadi.

Dengan strategi "Desa Mengepung Kota" milik Ketua Mao, pemimpin revolusi Cina, diharapkan kemudian muncul ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Pada gilirannya, jika situasi makin tidak menentu, ditambah kondisi sosial ekonomi yang masih kacau, rakyat akan marah dan bangkit untuk mendesak MPR mencabut mandatnya dari presiden.

KRIS HARYANTO

DJADJA SUPARMAN DAN WIRANTO. *Prajurit bisa sakit hati.*

Kemungkinan lain, serangkaian kerusuhan itu memang disengaja untuk membuat Gus Dur capek dan akhirnya berhalangan tetap. Langkah selanjutnya—jika Wakil Presiden Megawati yang naik ke kursi kepresidenan—tampaknya bisa dianggap mudah. "Faktor Mega tidak terlalu diperhitungkan," ujar

...telah dinasihati Soe...

Perjuangan, kelompok yang berseberangan dengan Soekarno, pada 17 Maret 1946.

Namun, upaya kudeta yang diawali dengan penculikan Perdana Menteri Sutan Syahrir itu akhirnya gagal karena strategi yang kurang jitu. Soedarsono sendiri ditangkap di Istana tanpa perlawanan setelah di-*apusi* (dibohongi) Letkol Soeharto, anak buahnya sendiri. "Saya mau di-*apusi*. Tidak ada jalan lain, selain balas *ngapusi* dia," kata Soeharto dalam bukunya, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.*

Pengalaman kedua adalah Peristiwa 17 Oktober 1952. Ketika itu, para perwira menuntut agar presiden membubarkan parlemen. Sementara itu, di luar istana demonstran beraksi. Bahkan Mayor Kemal Idris pun menodongkan beberapa moncong meriam ke Istana. Tapi, upaya ini pun gagal. Para demonstran akhirnya bubar setelah "dinasihati" Presiden Soekarno yang menolak membubarkan Parlemen.

Peristiwa G30S/PKI adalah penrcobaan kudeta ketiga yang dialami bangsa Indonesia. Dibandingkan dengan dua upaya terdahulu, G30S/PKI adalah upaya penggulingan kekuasaan yang paling besar. Soalnya, selain didukung PKI yang saat itu adalah salah satu kekuatan politik terbesar, kudeta ini juga didukung pasukan bersenjata dan perwira berpikiran maju seperti Letkol Untung, Brigjen Soepardjo, dan lain-lain. Percobaan kudeta ini berhasil memakan korban 6 jenderal dan seorang perwira pertama.

Meski "Untung *Putsch*" itu punya dampak paling luas, umurnya hanya sehari. Sebab, kekuatan Angkatan Darat lainnya di bawah koordinasi Pangkostrad Mayjen Soeharto berhasil memukul mereka. Bahkan, menurut W.F. Wertheim, pengamat politik Indonesia asal Belanda, Soeharto kemudian melakukan *counter coup* termasuk dengan memanfaatkan Surat Perintah 11 Maret. Soalnya, ketika itu sebenarnya praktis telah terjadi dualisme kepemimpinan.

Memang, baru itulah pengalaman bangsa ini dalam bidang rebut-merebut kekuasaan. Jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kudeta di negara-negara Amerika Latin. Di sana, antara tahun 1930-1971, telah terjadi 87 kali kudeta militer yang berhasil.

Namun, pengalaman di atas, paling tidak, menunjukkan bahwa kemungkinan melakukan kudeta di Indonesia selalu terbuka. Pengalaman pun menunjukkan bahwa di setiap upaya kudeta, militer punya peran yang cukup besar. Tapi, kini masihkah ada orang senekat Soedarsono, Kemal Idris, dan Untung?

Han

Arifin. Melihat pola yang diterapkan ini tampaknya isu kudeta yang berkembang itu bukan murni kudeta militer karena ada faktor gerakan massa yang hendak dijadikan instrumen pendorong.

Kendati demikian, dalam setiap percobaan pengambilalihan kekuasaan, selalu saja peran militer tak dapat dielakkan. Maklum, merekalah yang memegang senjata. Tak mengherankan jika lantas isu kudeta akhirnya dihubung-hubungkan dengan berbagai perkembangan terakhir di kalangan TNI. Misalnya, ketika Pangkostrad Letjen Djadja Suparman berkomentar keras ketika Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM tengah memeriksa sejumlah jenderal TNI yang diduga terlibat dalam kasus kerusuhan pascajajak pendapat di Timor Timur. "Prajurit bisa sakit hati," ujar Djadja.

Kasus Timor Timur memang membuat TNI terpojok dan terus dikritik. Menurut Kapuspen TNI Mayjen Sudrajat, TNI masih berusaha untuk tetap sabar. Namun, ia berpesan agar masyarakat mengkritik TNI dalam batas kepatutan. Soalnya, jika tidak, TNI akan menilai hal itu sebagai suatu agenda politik untuk menghancurkan TNI. "Jika demikian, TNI akan mengambil sikap karena juga berarti upaya penghancuran Republik Indonesia," ujar Sudrajat. Tanggapannya inilah yang kemudian banyak diterjemahkan sebagai "peringatan" TNI kepada politisi sipil.

Apalagi, sebelumnya, Sudrajat juga menyatakan bahwa presiden bukanlah Panglima Tertinggi (Pangti) yang bisa mencampuri urusan TNI. "Presiden hanya memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam ketatanegaraan," ujarnya. Hal itu diatur jelas dalam Pasal 10 UUD 1945. Menurut Sudrajat, sebagai pemegang kekuasaan atas semua angkatan, bukan berarti presiden berwenang mengatur posisi personel TNI.

Dari ucapan-ucapan para petinggi TNI itu, sumber FORUM menduga, ada ketidakpuasan yang terpendam dari mereka dan kelompok perwira menengah di sekitar mereka, tentang campur tangan Presiden dalam pengaturan posisi personel TNI. Pengangkatan orang Angkatan Laut sebagai pucuk pimpin TNI bukan tak mungkin juga menimbulkan kekecewaan di kalangan para perwira Angkatan Darat.

Di sisi lain, mantan Panglima TNI, Jenderal Wiranto, yang kini menjadi Menko Polkam juga diperiksa KPP HAM. Ditambah pula, ada rumor, ia bakal dicopot dari jabatan Menko Polkam. Maka, kecurigaan pun diarahkan kepada Wiranto. Apalagi, Djadja dan Sudrajat dianggap orang dekat Wiranto. "Meski kini Wiranto tak punya pasukan, konon Djadja siap mengerahkan Kostrad," ujar sumber FORUM di kalangan TNI mencoba menganalisis. Secara *de facto*, kata sumber itu menguatkan analisisnya, Wiranto masih menjadi "panglima" di TNI.

Wiranto tentu saja membantah dugaan itu. Demikian pula Djadja dan Sudrajat. Wiranto malah merasa heran bila ia dianggap sebagai orang yang patut diwaspadai. "Apa saya ini bertampang kriminal," ujarnya. Ia malah menunjukkan dua kesempatan yang lampau yang bisa dimanfaatkannya untuk melakukan kudeta. "Tapi, itu tidak saya lakukan," ujarnya. Menurut Wiranto, TNI tidak punya kultur melakukan kudeta (lihat: *Sangat Aneh Kalau Saya Dianggap Berbahaya*).

Kalau soal upaya kudeta ini dikembalikan ke sumbernya, Amerika Serikat, urusan ini mungkin sekadar kesalahan interpretasi. Ada kabar, agen pemerintah AS mendapatkan sebuah dokumen yang dikeluarkan TNI beberapa waktu lalu. Konon, dokumen yang disalahtafsirkan itu adalah dokumen yang menyangkut dengan proposal pemekaran institusi teritorial TNI, Koramil sampai Kodam. Padahal, waktu itu ada beberapa perwira—di antaranya Agus Wirahadikusumah—yang meminta agar komando teritorial justru dihapuskan. Karena usulan pemekaran komando teritorial itu cukup mendetail, berjumlah 12 halaman, agen pemerintah AS yang mendapatkannya menafsirkan sebagai dokumen penyusunan kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan Gus Dur.

Soal kudeta ini juga dibahas koran *Washington Post*, medio Januari lalu. Koran itu mengutip pernyataan Sudrajat yang mengesankan TNI tak sejalan dengan kebijakan Gus Dur. Namun, menurut Sudrajat, *Washington Post* keliru menafsirkan pernyataannya, seperti pernyataan tentang pemeriksaan para jenderal oleh KPP HAM dan penyelesaian kasus Aceh. Kepada Victoria Sidjabat dari FORUM, Sudrajat langsung menunjukkan kalimat-kalimat berita *Washington Post*—dibukanya melalui internet—yang ditafsirkan secara keliru. Ia pun mengatakan, "Tidak pernah akan ada kudeta karena TNI sudah punya *channel* sendiri. Kalau ada ketidaksetujuan dengan pemerintah, TNI sekarang sudah punya perwakilan di DPR."

Tapi, benarkah AS salah tafsir? Bisa jadi memang sesederhana itu. Maka, wajar pula jika Amerika Serikat dituduh mempunyai kepentingan tertentu dengan melansir isu kudeta tersebut. Ada kesan, pernyataan Holbrooke itu seperti api yang diembuskan ke lingkungan elite politik. Setelah itu, buru-buru Gelbard menemui Gus Dur dan menyatakan AS siap menjadi pelindungnya. Ah, Amerika....

Hanibal W.Y. Wijayanta, Widiarsi Agustina, dan Teguh S. Usis

THAMRIN

TABLIG AKBAR DI MONAS. *Telah disusupi provokator.*

■ TIMOR TIMUR

Menanti Rekomendasi Komisi

KPP HAM segera menyelesaikan laporan. Keterlibatan para jenderal dalam kerusuhan di Timor Timur diuji lagi. Kesaksian Uskup Belo cukup menentukan.

AFP PHOTO

TIM PEMBELA PERWIRA TNI DI TIMOR TIMUR. *Tak merespon permintaan Belo.*

Para anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM untuk kasus Timor Timur kini bisa sedikit bersantai. Setelah lebih dari sebulan mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah jenderal, tugas mereka hampir usai. Laporan pun sudah 90 persen lebih disusun. Jika tak ada halangan, awal Februari ini berkas itu sudah siap. Selanjutnya, mereka akan menyerahkannya ke Kejaksaaan Agung. Jadi, "Sekarang tinggal laporan akhir saja," ujar Asmara Nababan, Sekretaris KPP HAM.

Sambil merampungkan laporan yang bakal menentukan nasib para jenderal itu, KPP HAM akan mengadakan pertemuan terakhir. Rapat pleno itu akan digelar 27 hingga 29 Januari ini. Hasil kunjungan KPP HAM terakhir ke Timor Timur juga akan dibahas.

Senin, pekan ini, sebuah tim kecil KPP HAM memang bakal terbang lagi ke Dili. Tim yang dipimpin H.S. Dillon itu akan mencari data dan sejumlah informasi pendukung. Tapi, target penting mereka: Menemui Uskup Dili Carlos Filipe Ximenes Belo.

Harus diakui, Uskup Belo merupakan salah seorang sumber penting yang tak mungkin diabaikan informasinya. Sebagai tokoh agama dan masyarakat di bumi Loro Sae, Belo bisa dibilang tahu banyak mengenai sepak terjang TNI, kelompok prokemerdekaan, ataupun prointegrasi. Kedua kubu itulah yang bertikai dan membuat Timor Timur terbakar. Cuma, persoalannya, siapa yang membakar? Benarkah ada skenario dari TNI untuk membumihanguskan wilayah Timor Timur usai jajak pendapat Agustus 1999?

Sebenarnya KPP HAM sudah mendapat jawaban dari Belo. Saat diwawancarai tim KPP HAM beberapa waktu lalu, ia menyebut kerusuhan yang terjadi di Timor Timur itu dilakukan para milisi prointegrasi. Karena itulah, pada 9 September 1999, ketika bertemu dengan Jenderal Wiranto, ia meminta Panglima TNI tersebut untuk menghentikan kerusuhan. Belo yakin, jika TNI turun tangan, setidaknya kerusuhan dan pembantaian yang terjadi di Timor Timur akan mereda. Tapi, menurut pengakuan Uskup Dili itu, Wiranto ternyata tak merespon sama sekali permintaannya. Tak urung, kerusuhan pun terus meledak dan menjalar ke mana-mana. Jika benar, kesaksian tersebut jelas menyudutkan Wiranto.

Namun, jenderal yang kini menjadi Menko Polkam itu menyanggah. Kepada Ketua KPP HAM Albert Hasibuan, Wiranto menegaskan, sebagai Panglima TNI, ia merespon permintaan yang diajukan Belo. Selain itu, menjelang jajak pendapat pun Wiranto malah terlihat aktif memprakarsai pertemuan antara pemimpin kelompok prointegrasi dan pasukan Falintil.

Tak cuma itu. Wiranto juga sudah membeberkan kebijakan TNI mengenai masalah Timor Timur kepada anggota komisi, 24 Desember 1999. Intinya, ia menyatakan TNI tak berada di belakang, apalagi melatih milisi bersenjata. Wiranto menegaskan pula bahwa tak ada sama sekali perintah pembumihangusan Timor Timur. Apalagi, rencana pembersihan etnik (*genocide*) yang, menurut Wiranto, diembuskan sejumlah media asing.

Karena ada bantahan Wiranto itu, rupanya KPP HAM ingin menguji lagi kesaksian Belo.

"Kami akan mengecek apakah ia masih berkukuh dengan keterangannya," kata Asmara Nababan. Tim KPP HAM juga akan meminta kesediaan Belo menjadi saksi jika suatu saat pengadilan para jenderal ini digelar. Ini permintaan yang sebenarnya sulit. Sebab, sebagai tokoh agama yang langsung di bawah kendali Paus di Roma, tentulah Belo tak bisa begitu saja menyatakan bersedia.

Selain bertemu Belo, tim kecil itu juga mendatangi narasumber yang menyatakan kehadiran Staf Ahli Panglima TNI, Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, di Timor Timur usai jajak pendapat. Sebab, kepada komisi Sjafrie menyatakan, pada 6 September, saat kerusuhan meletus di Dili, ia berada di Markas TNI di Cilangkap.

Ternyata, bukan hanya Tim KPP HAM yang ingin ke Timor Timur. Setelah sebulan lalu sempat ditolak masuk, Kamis pekan lalu, Tim Advokasi HAM TNI juga datang lagi ke Dili. Tim pembela para jenderal yang dipimpin Adnan Buyung Nasution mengunjungi

sejumlah tempat yang disebut-sebut korban pembumihangusan. Tim Buyung juga akan menemui Uskup Belo, Xanana, dan sejumlah narasumber penting lainnya.

Menurut Yan Juanda Saputra, Sekretaris Tim Advokasi TNI, mereka tidak mencari bahan sanggahan terhadap temuan KPP HAM. "Kami akan mengecek data yang kami miliki sendiri," katanya. Salah satu data yang mereka kantongi menunjukkan bahwa pembakaran sejumlah tempat di Dili dilakukan warga Timor Timur sendiri. Pasalnya, mereka kecewa karena jajak pendapat itu berlangsung dengan sejumlah kecurangan. Unamet, badan perwakilan PBB, sebagai penyelenggara yang seharusnya netral, cenderung berpihak kepada kelompok prokemerdekaan.

Tapi, rupanya Belo dan Xanana *emoh* bertemu dengan tim Buyung tersebut. Soalnya, kata Xanana seperti dikutip Kantor Berita AFP, kehadiran Buyung tak lain hanya untuk mengalihkan perhatian dari keterlibatan Wiranto dalam pembunuhan dan peluluhlantakan Timor Timur.

Apa pun hasilnya, yang jelas kunjungan terakhir kedua tim ini cukup menentukan. Paling tidak, akan memperjelas terlibat-tidaknya Jenderal Wiranto dan para jenderal lainnya dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. KPP HAM sendiri tak bakal memvonis apakah Wiranto bersalah atau tidak. "Kejaksaan Agung yang akan menyidik dan menentukan status hukumnya," ujar Asmara Nababan. Yang jelas, menurut Asmara, dalam laporannya komisi akan memberi semacam rekomendasi terhadap seseorang yang patut disidik dengan memberikan sejumlah alasannya.

Jadi, kalaupun kerja komisi rampung dan para jenderal direkomendasi untuk disidik, masih ada "pertempuran lanjutan" di Kejaksaan Agung. Di situ akan ditentukan apakah mereka bakal diadili. Karena itu, tunggu saja. L.R. Baskoro

AP PHOTO

TENTARA INTERFET DAN GADIS-GADIS TIMOR TIMUR. *Berkulit putih asal Australia.*

Pasukan Interfet Memperkosa?

Bisik-bisik itu akhirnya muncul juga menjadi berita. Setelah sekian lama menjadi bahan pembicaraan para pengungsi Timor Timur di Haumaen Anan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, akhirnya ada juga korban yang membuka mulut. Namanya Dominggas Gellu. Dengan murung, perempuan berumur 20-an tahun itu melaporkan nasib malang yang menimpanya kepada Polres TTU, 4 Januari lalu. Isinya membuat orang miris. Bersama sejumlah pengungsi lainnya, ia diperkosa pasukan Interfet di Gereja Passabe, Kecamatan Ambeno.

Laporan ibu muda itu tentu saja mengejutkan Polres TTU. Apalagi, sejumlah rekan Dominggas yang mengaku menjadi korban memberi kesaksian yang sama. Adapun yang memperkosa mereka adalah pasukan berkulit putih asal Australia.

Kisahnya bermula dari kepulangan Dominggas bersama sekitar 250 pengungsi lainnya ke Timor Timur. Setelah didata UNTAET (United Nations Transition Administration for East Timor) di Desa Passabe, mereka ditampung Kecamatan Passabe. Kaum laki-lakinya disuruh tidur terpisah dengan kaum perempuan dan anak-anaknya diinapkan di gereja.

Sekitar pertengahan Desember lalu, saat tengah malam, menurut Dominggas, sekitar 20 pasukan Interfet masuk ke dalam gereja dan membangunkan sejumlah kaum perempuan. "Mereka berbahasa Inggris dan Indonesia," kata Dominggas kepada polisi. Ada 20 perempuan yang secara paksa diseret pasukan Interfet ke pojok ataupun sekitar gereja. Lantas, mereka diperkosa. Menurut para korban, selama empat hari mereka mendapat pelecehan seksual itu. Dan, itulah yang mendorong Dominggas memilih balik ke wilayah Indonesia, dan membuka aibnya ke polisi.

Bukan hanya perempuan pengungsi semacam Dominggas yang mengalami nasib sial ini. Di Dili, cerita-cerita penjemputan perempuan secara paksa oleh Interfet untuk dijadikan budak nafsu pasukan PBB itu sudah lama berlangsung. Cuma, sejauh ini, pihak Interfet selalu membantah kasus itu. Apalagi, banyak perempuan Timor Timur korban pemerkosaan yang memilih menutup mulut.

Kalau pengakuan Dominggas benar, itu memang sangat ironis. Pasukan PBB yang ditugasi melindungi HAM malah berbuat sewenang-wenang.

LRB

WAWANCARA

Mulchis Anwar:

"Seorang Wiranto Bisa Datang dan Pergi"

Kegerahan para prajurit gara-gara sejumlah jenderal diperiksa oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM membuat Mayjen TNI (Purn.) Mulchis Anwar angkat bicara. Menurut mantan Asisten Personalia KSAD ini, reaksi itu berlebihan. "Selama ini, seolah-olah jenderal itu lepas dari hukum," ujarnya.

Bahkan, diduga kegelisahan itu direkayasa oleh sekelompok perwira. Untuk memperjelas hal itu, wartawan FORUM M. Faried Cahyono menemui Mulchis Anwar. Berikut petikannya.

Mengapa sebagian prajurit TNI tidak senang jenderal mereka diperiksa?

Pemeriksaan sejumlah jenderal dianggap identik dengan pemojokan TNI. Tapi, itu pendapat berlebihan. Itu hasil rekayasa pihak tertentu. Sebagian besar pelakunya perwira TNI sendiri. Padahal, yang dilakukan KPP HAM [untuk kasus Timor Timur] adalah tugas penting. Tak hanya bagi TNI, tapi juga bagi bangsa. Jika ada yang diadili dan terbukti bersalah ada yang dihukum, di dalam TNI, terutama perwira muda, akan muncul kesadaran baru. Mereka akan berpikir, "Jangankan saya yang prajurit biasa, jenderal saja bisa dihukum kalau melanggar HAM." Selain itu, kalau kasus Timor Timur bisa diungkap, masalah pelanggaran di Aceh, Irianjaya, Tanjungpriok, juga yang lain, akan lebih gampang ditangani.

Mengapa TNI sering dicerca?

Sudah 32 tahun TNI diselewengkan. Selama itu TNI yang sesungguhnya alat negara berubah menjadi alat kekuasaan semata, bahkan kekuasaan seseorang saja. Ini menyebabkan TNI jauh dari rakyat, lantas dilecehkan banyak pihak. Karena itu, TNI harus kembali menjadi jati dirinya. Anggota TNI adalah pejuang dan profesional. Sebagai pejuang, ia ada di pihak rakyat, dan sebagai profesional ia harus punya kemampuan dan mampu bertanggung jawab. Tapi, sekarang, jangankan bertanggung jawab, baru dipanggil saja sudah ribut. Itu karena mereka memang belum sadar hukum.

KRIS HARYANTO

MULCHIS ANWAR. *Jenderal Sudirman akan bangkit dari kubur.*

Siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan di Timor Timur?

Yang bertangung jawab atas keamanan Timor Timur pascajajak pendapat adalah TNI. Kalau ada bumi hangus, para petinggi TNI harus bertanggung jawab. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum di ketentaraan jelas disebutkan: Seorang perwira harus bertanggung jawab terhadap tindakan anak buahnya. Anda bisa lihat Tragedi Santa Cruz, Dili, dulu. Sewaktu kejadian, Sintong Panjaitan (saat itu Pangdam Udayana) ada di Magelang. Toh, ia dicopot dari jabatannya. Juga dalam peristiwa Malari 1974, Jenderal Soemitro juga bertanggung jawab, ia mengundurkan diri. Kini, ada peristiwa bumi hangus di Timor Timur, tak ada yang bertanggung jawab. Seharusnya yang bertanggung jawab adalah Pangdam Udayana, juga perwira dua tingkat di atasnya, yaitu Panglima TNI.

Sebenarnya, kepada siapa seharusnya prajurit loyal?

Saya setuju pendapat Agus Wirahadikusumah (Pangdam VII/Wirabuana). Loyalitas TNI tak tergantung pada perseorangan, tapi pada negara, pada institusi. Seorang Wiranto bisa datang dan pergi. Wiranto bukanlah TNI. Dulu kan ada pendapat, jika Wiranto diganti, TNI akan mengkudeta. Nyatanya, ketika ia diganti, toh tak terjadi apa-apa. Tradisi memberontak atau mengkudeta memang tak ada pada TNI. Kalau ada pihak mau mengkudeta, pasti ada *counter* dari dalam tubuh TNI sendiri. Lihat saja, yang terjadi di masa lalu, misalnya kasus Vence Sumual dan juga Simbolon.

Tapi, kini isu kudeta santer terdengar...

Selain rekayasa pihak militer, mungkin juga karena ada politisi sipil dan pengusaha yang ingin militer tetap berkuasa. Mereka berlindung di ketiak militer dan menungganginya. Karena itu, tak usah ragu. Jika sampai TNI melakukan kudeta, Jenderal Sudirman dan Sarwo Edi akan bangkit dari kubur. Kalau orang seperti Djadja Suparman (Panglima Kostrad) melontarkan bahwa tentara sakit hati—atau bahkan ada anggota TNI lain yang mengatakan akan ada kudeta—itu akan ditentang komponen TNI yang lain. Bahkan, saya yakin pendapat Djadja akan ditentang Willem da Costa (Panglima Divisi II Kostrad), yang anak buahnya sendiri. Karena itu, politisi sipil tak usah takut menertibkan TNI. Kalau TNI tidak ditata, tidak diubah, dan masih seperti sekarang, TNI akan jadi Dinosaurus. Negara-negara lain sudah berubah, kok kita tidak. □
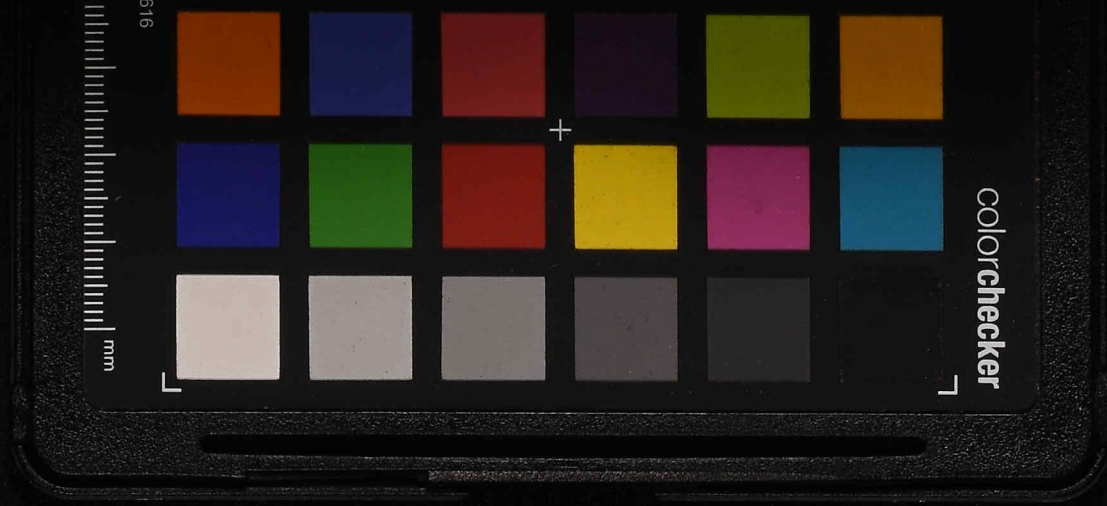
ACEH

Dendam nan Tak Kunjung Padam

TNI dan AGAM terus berperang di Aceh. Opsi referendum baru sebatas janji. Akankah kedatangan Gus Dur, pekan depan, menentramkan rakyat?

Isu kudeta di Jakarta tak sebanding dengan perang yang terjadi antara pasukan TNI dan Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) akhir-akhir ini. Hampir di seluruh wilayah Daerah Istimewa Aceh tiap hari jatuh korban dari kedua pihak akibat saling serang dan saling balas. Sepanjang pekan kemarin, belasan orang penduduk sipil, anggota TNI, dan pasukan AGAM tewas diterjang peluru dan puluhan lainnya terluka.

Dalam konflik tersebut, memang sulit menilai siapa yang lebih dulu menabuh genderang perang. Pasalnya, kedua belah pihak lagi-lagi saling tuding. TNI menuduh AGAM yang lebih dulu membikin gara-gara. Tengok saja, sejak Desember sampai Januari ini, tak kurang dari 20-an anggota polisi dan TNI tewas diberondong peluru AGAM.

Di pihak lain, AGAM juga menyatakan tekadnya untuk angkat senjata karena gerah melihat ulah aparat keamanan. Mereka ini kerap meluluhlantakkan harta benda penduduk setempat setiap kali bentrok dengan AGAM. "Kalau kelakuan aparat terus menyengsarakan rakyat, terpaksa kami mengingatkan TNI," ujar Panglima AGAM, Teungku Abdullah Syafi'ie, menjelang Lebaran lalu. Balas dendam? Itulah yang kini terjadi di Serambi Mekah.

Benar saja, setiap ada kesempatan, berbagai pos aparat keamanan diberondong peluru dan lemparan granat. Pada 20 Desember lalu, misalnya, AGAM menyerang di dua tempat. Mereka menghadang dan melempar granat ke dua truk pasukan TNI Yonif 111 dan Brimob di Seuneubok Meuku, Peudawa, tiga kilometer dari Idi Rayeuk. Menurut Dandim 0104 Aceh Timur, melalui Perwira Seksi Operasi Kapten Sugeng Santoso, penghadangan itu menyebabkan empat prajurit luka. AGAM sendiri mengklaim berhasil menghancurkan dua truk militer dan melukai puluhan prajurit.

Akibat kekalahan militer dalam baku tembak itu, menurut sejumlah sumber Koran Serambi, sekitar tiga desa di Kecamatan Idi Rayeuk menjadi lautan api. Sedikitnya 30 rumah, ruko, gudang, kedai, dan sepeda motor di Desa Seuneubok Teungoh, Keutapang Dua dan Matang Rayeuk, dibakar aparat. Seorang warga sipil terkena peluru nyasar. Tapi Kapten Sugeng menyatakan belum tahu insiden tersebut. "Yang jelas, tidak ada perintah membakar. Anggota yang melanggar perintah ini akan kami tindak," ujarnya.

MURIZAL HAMZAH

TEUNGKU ABDULLAH SYAFI'IE DAN ANAK BUAHNYA. *Saling membalas dendam.*

Belum reda ketegangan di Aceh Timur, giliran mobil pasukan Brimob yang melintas di Desa Sukaramai Relung Gunung, Bukit, Aceh Tengah, yang diserang gerilyawan AGAM. Dalam baku tembak ini, seorang anggota Brimob diterjang peluru.

Tak pelak, serangan bertubi-tubi itu membuat aparat dibakar emosi. Ketika mereka melakukan *sweeping* (pembersihan) di Desa Sukaramai, sedikitnya delapan ruko dan beberapa pondok wisata dilalap api. Akibatnya, ratusan penduduk mengungsi ke hutan karena ketakutan. Dalam setiap operasi militer, target utama TNI sebenarnya menangkap Syafi'ie. Sayang, tokoh nomor satu AGAM ini ibarat bayang-bayang, bisa menghilang.

Di Aceh Utara, situasi porak-poranda juga bisa dijumpai di Desa Cut Ijeu, Peusangan. Sehari sebelumnya, diperkirakan 80 bangunan musnah dan tiga warga sipil tewas, usai bentrok antara sekelompok orang bersenjata dan Brimob. "Aparat membawa jerigen minyak dan membakar toko dan kedai-kedai," ujar seorang saksi mata.

Situasi Aceh yang terus memanas seharusnya segera diredakan pemerintah Indonesia. Mudah-mudahan saja rencana kedatangan Presiden Abdurrahman Wahid ke Aceh, Kamis depan, membawa sejumput harapan dan ketenangan bagi rakyat Aceh.

Menurut juru bicara AGAM Wilayah IV, Abu Sabar, pada prinsipnya mereka menginginkan Aceh merdeka secara damai. "Referendum dengan opsi merdeka merupakan cara demokratis dan bisa diterima semua pihak," katanya.

Karena itu, pihaknya butuh berdialog (dengan Indonesia) dengan pengawasan PBB atau internasional, bukan dengan peluru. Ia juga menandaskan, bahwasanya AGAM mencoba menghindari kontak senjata yang menyebabkan rakyat sipil menjadi ladang kemarahan aparat. Seperti juga dikatakan Ketua MUI Aceh, Teungku Muslim Ibrahim. "Semua pihak harus menahan diri dari kemarahan. Apa kita harus terus hidup dalam konflik?" ujarnya.

Imbauan tokoh Aceh itu sudah patut diindahkan. Seruan itu tidak cuma untuk AGAM, tapi juga aparat militer yang sempat mengancam; satu nyawa tentara melayang, satu tempat pula terbakar. Ironis.

Sen Tjiauw dan Murizal Hamzah (Aceh)

Bassra Terancam Bubar

MADURA: Nasib Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) yang selama ini cukup kritis kepada pemerintah kini tengah terancam. Soalnya, 90 persen dari anggota Bassra ingin mundur. Konon, mereka memilih untuk lebih mengaktifkan jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Menurut Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, K.H. Nuruddin A. Rahman, dulu Bassra yang didirikan tahun 1990 dimaksudkan sebagai alat kontrol pemerintah. Soalnya, bila mereka mengatasnamakan NU, dinilai bisa membahayakan jam'iyah. Apalagi, hubungan Gus Dur dan Soeharto saat itu agak renggang. Tapi, kini NU berada di pusat kekuasaan. "Karena itu, Bassra sudah tidak diperlukan lagi," kata Nuruddin.

Wakil Sekjen Rabithah Ma'ahidil Islam, K.H. Dr. Imam Ghazali Said, pun menganggap sikap mereka wajar-wajar saja. Soalnya, ulama Madura terbagi dua kelompok, yaitu kelompok ulama NU dan kelompok ulama Syarikat Islam (SI). Karena para ulama SI ikut menyerukan jihad untuk kasus Ambon dan menunjukkan sikap negatif terhadap pemerintahan Gus Dur, para ulama NU menarik diri. "Padahal, mayoritas ulama Madura dari NU," ujarnya. ❑

Tak Perlu Izin Lagi

JAKARTA: Warga keturunan Cina wajib bersyukur karena sejak tahun ini mereka boleh menyelenggarakan perayaan Imlek tanpa izin khusus. Keinginan yang lama terpendam ini menjadi kenyataan setelah keluar Keppres No. 6 Tahun 2000 sejak 17 Januari lalu.

KRIS HARYANTO

Keppres ini mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967. Soalnya, Inpres yang mengatur tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dinilai diskriminatif. Menurut Menteri Dalam Negeri Soerjadi Soedirdja, pencabutan Inpres itu suatu tuntutan lumrah dan harus dilakukan di era demokratisasi ini.

Menurut Ketua Umum Partai Reformasi Tionghoa, Lieus Sungkharisma, kebebasan itu harus dimanfaatkan secara positif. "Perayaan Imlek yang jatuh pada 5 Februari nanti hendaknya diisi dengan kegiatan spiritual," ujarnya. Sebab, selama ini nilai substansi yang dikandung Hari Imlek cenderung diabaikan. ❑

Sparring Partner Gus Dur

JAKARTA: Ibarat permainan tinju, politik pun tak akan seru tanpa lawan. Karena itulah, pekan lalu, dalam peringatan 26 tahun peristiwa Malari, Hariman Siregar dkk. membuat gebrakan. Mereka bertekad menjadi lawan "bertinju" Gus Dur dan Megawati.

Jelasnya, mereka bersepakat menggalang kekuatan oposisi terhadap pemerintah dalam sebuah wadah bernama Indonesian Democracy Monitor atau InDemo. Selain Hariman, Sekjen KIPP Muljana W. Kusumah dan Amir Husin Daulay pun bergabung.

Melihat undangan yang hadir, ada yang menyebut kelompok

KRIS HARYANTO

ini berbau PSI (Partai Sosialis Indonesia). Tapi, ada juga cibiran lain. Itu karena belakangan Hariman sangat dekat dengan mantan Presiden B.J. Habibie. Bahkan, ia disebut-sebut sebagai dedengkot tim sukses Habibie. Karena itu, tekad menjadi *sparring partner* pemerintah dinilai tak akan efektif. "Apalagi, dalam kabinet ini ada 10 orang menteri kader PSI," kata pengamat politik M.T. Arifin. ❑

Misi Khusus Yusril

DEN HAAG: Perjalanan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra ke luar negeri ternyata membawa misi khusus. Pemerintah berupaya melakukan rekonsiliasi dengan para pelarian politik pasca-G30S. Hal itu terungkap dari pertemuan Yusril dengan mereka di Kedutaan Besar RI di Den Haag, awal pekan lalu.

Dalam pertemuan itu hadir, antara lain, mantan anggota CC PKI Sidik Kertapati, aktivis Lekra Koeslan Boediman, dan bekas Bendahara PWI Oemar Said. "Pemerintah ingin menghidupkan status kewarganegaraan mereka," kata Yusril. Mereka pun akan diperbolehkan pulang ke Tanah Air. Karena itu, Dubes RI untuk Negeri Belanda, Abdul Irsan, mengatakan bahwa pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal bagi upaya rekonsiliasi.

Tapi, tunggu dulu, di Jawa Timur ada 18 prajurit yang merasa dilupakan. Mereka adalah tentara yang ditangkap dan dipenjara tanpa diadili oleh pemerintah Orde Baru gara-gara diindikasikan terlibat G30S. Memang, akhirnya mereka dibebaskan, sekitar tahun 70-an. Tapi, status mereka sebagai TNI sudah hilang. Kini, mereka ingin pemerintah merehabilitasi nama baik mereka. "La *wong* yang divonis terlibat PKI saja dibebaskan, masak mereka tidak mendapat rehabilitasi," kata Ketua Komisi Perlindungan Hukum (KPH) Prajurit Sipil, Sunarto Edy Wibowo, kepada M. Toha dari FORUM. ❑

Yang Dicari Simfoni, Yang Datang Soneta

Format RAPBN 2000 lebih transparan, tapi belum bisa memacu pemulihan ekonomi. Pengurangan subsidi bisa jadi bumerang jika tak hati-hati.

Ibarat musik, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2000 tak ubahnya musik pengantar tidur, sebuah soneta yang tak dinamis, miskin stimulus dan miskin inovasi. Padahal, saat ini kondisi perekonomian Indonesia membutuhkan musik simfoni yang lebih dinamis, penuh rangsangan dan keindahan, sehingga mampu untuk menggeliatkan kembali komponen-komponen ekonomi yang selama ini sedang terpuruk.

Selain peningkatannya rendah (dengan inflasi sekitar 4,8 persen, secara riil peningkatan anggaran tahun ini, 1 April sampai 31 Desember 2000, sekitar 11 persen ketimbang RAPBN 1999/2000), rancangan anggaran itu dinilai belum optimal menggali sumber pembiayaan dalam negeri. "Kami sangat kecewa. Tak ada nilai lebih dari RAPBN ini sehingga tak mampu memacu pemulihan ekonomi," kata pengamat ekonomi Rizal Ramli.

Dalam anggaran kali ini, pengeluaran pembangunan (investasi pemerintah) sekitar Rp 39,2 triliun, lebih rendah ketimbang anggaran sebelumnya (untuk periode sembilan bulan) yang sekitar Rp 45,6 triliun. Sementara investasi dari swasta (domestik dan asing) masih sulit diharapkan. Jadi, "Harus ada policy ekonomi dan politik untuk mendorong. Kalau tidak, jangan harap pertumbuhan bisa tercapai," kata Tadjuddin Noor, bekas anggota DPR. Pendapat yang sama juga dilontarkan Rizal. "Kami tak melihat ada upaya pemerintah mendorong investasi luar atau dalam negeri dan menggenjot ekspor. Padahal, di sinilah motor penggerak pemulihan ekonomi," kata pengamat dari Econit itu.

Memang dalam RAPBN 2000 yang dibacakan Wapres Megawati, Kamis pekan lalu, pemerintah menargetkan beberapa indikator ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi, misalnya, 3,8 persen, tingkat inflasi 4,8 persen, harga ekspor minyak mentah US$ 18 per barel dan kurs Rp 7.000 per dolar Amerika Serikat. "Tapi angka-angka itu sebagai pegangan. Dalam prakteknya tak pernah bisa sama sebab ekonomi bukan ilmu fisika atau matematika yang dihitung eksak," kata Menko Ekuin Kwik Kian Gie, Rabu pekan silam.

ANNAS

KWIK KIAN GIE, BAMBANG SUDIBYO, DAN DJUNAEDI HADISUMARTO. *Tidak kreatif melakukan inovasi.*

Berbeda dengan anggaran selama ini, RAPBN 2000 menggunakan format baru dengan standar internasional. Periode anggaran disesuaikan dengan tahun kalender sehingga RAPBN 2000 berlaku hanya sembilan bulan (sebagai masa transisi). Pemerintah pun lebih jujur karena defisit anggaran tercantum dalam neraca. "Selain lebih transparan dan informatif, cara ini juga mempermudah analisis strategi kebijakan fiskal," kata Kwik.

Defisit RAPBN 2000 ditargetkan sebesar Rp 45,4 triliun atau sekitar lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Itu akan ditutup oleh pembiayaan dalam negeri Rp 22,1 triliun dan luar negeri Rp 31,7 triliun (belum dikurangi dengan pembayaran cicilan utang pokok luar negeri Rp 8,6 triliun). Sumber dari dalam negeri berasal dari privatisasi BUMN Rp 5,9 triliun dan penjualan aset perbankan yang dikelola BPPN Rp 16,2 triliun. Sedangkan pinjaman luar negeri diharapkan dari Consultative Group on Indonesia (CGI). "Diperkirakan tahun ini pinjaman itu sekitar US$ 4,1 miliar. Sebab, pinjaman tahun lalu yang US$ 6,2 miliar belum semuanya cair," kata Ketua Bappenas Djunaedi Hadisumarto.

Defisit ini terjadi karena belanja negara (pengeluaran rutin dan pembangunan) sekitar Rp 183,1 triliun, sementara itu pendapatan (dalam negeri dan hibah) sekitar Rp 137,7 triliun. Pendapatan ini berasal dari pajak dalam negeri (antara lain pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai) sekitar Rp 91,9 triliun dan pajak perdagangan internasional (bea masuk dan pungutan/pajak ekspor) sekitar Rp 5,9 triliun. Sedangkan penerimaan bukan pajak (antara lain minyak dan gas bumi serta penerimaan lainnya) sekitar Rp 39,9 triliun.

Sekitar Rp 143 triliun dari anggaran pendapatan dan pinjaman itu dialokasikan untuk pengeluaran rutin, sedangkan sisanya untuk pengeluaran pembangunan. Sebagian besar dari anggaran rutin itu untuk membayar bunga utang luar negeri sekitar Rp 16,6 triliun dan utang dalam negeri (bunga obligasi rekapitalisasi perbankan) sekitar Rp 42,3 triliun.

Yang dialokasikan untuk belanja pegawai negeri (termasuk kenaikan gaji) sekitar Rp 29,3 triliun. Rencananya kenaikan gaji ini dilakukan dua tahap, yaitu pada April dan Oktober 2000. Pentahapan ini untuk mengurangi dampak inflasi. "Alokasi pembagiannya belum diputuskan. Kalaupun ada daftar yang

beredar, hal itu bukan kajian dari RAPBN," kata Kwik. Yaitu, daftar skenario kenaikan gaji (lihat: Lebih Banyak Tersedot buat Pejabat).

Selain mendongkrak gaji, pemerintah juga menaikkan subisidi BBM sekitar 100 persen menjadi sekitar Rp 18,3 triliun, sedangkan non-BBM (listrik, beras, dan kredit bunga program) turun menjadi sekitar Rp 8,4 triliun. Tapi, dengan kenaikan subsidi BBM ini bukan berarti harga BBM turun. Kenaikan subsidi itu terjadi karena harga patokan minyak mentah naik dari US$ 10 per barel (patokan anggaran berjalan) menjadi US$ 18 per barel. Nah, diperkirakan harga BBM naik 20-30 persen. "Berapa pastinya, akan diskusikan dengan DPR," kata Mentamben Soesilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah juga berdiskusi untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) yang direncanakan 35 persen.

Supaya masyarakat menengah kecil tak terbebani kenaikan BBM dan TDL, pemerintah akan mengubah struktur subsidi. Untuk angkutan umum, BBM diupayakan tidak naik. Begitu juga minyak tanah dan solar kebutuhan rumah tangga. Untuk TDL, pemerintah memproteksi rumah tangga berpenghasilan rendah, fasilitas sosial, dan industri kecil.

Masalah subsidi menjadi perhatian Tadjuddin. Harga BBM yang rendah bagi industri sebenarnya bertujuan merangsang agar industri dalam negeri bisa bersaing di pasar internasional karena tingginya suku bunga dalam negeri. "Di sini dilemanya. Ternyata pengusaha tak bisa membuat industrinya efisien. Akibatnya, jika BBM naik, ekspor semakin merosot dan akhirnya mempengaruhi devisa negara," tutur bekas anggota Komisi APBN itu. Pengurangan subsidi juga akan memacu inflasi. Kalau itu terjadi, bunga obligasi rekapitalisasi yang dihitung berdasarkan inflasi akan membengkak. Maka, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar bunga obligasi itu pun meroket pula. "Artinya, bukan cuma sia-sia. Tapi, bisa jadi bumerang bagi kesejahteraan rakyat juga. Saya berharap DPR lebih kritis melihat masalah tersebut," kata Tadjuddin, pekan lalu.

Sementara itu, Rizal menilai Tim Ekuin yang dipimpin Kwik tak kreatif melakukan inovasi menggali sumber penerimaan. Dari pengumpulan sumber pajak, misalnya, seharusnya bisa digali pajak barang mewah. "Impor mobil mewah sekarang melonjak. Itu seharusnya jadi target penerimaan pajak," kata Rizal. Sumber lain penerimaan dalam negeri, sebenarnya juga tersimpan pada dana kehutanan

RAPBN 2000 1)
(dalam miliar rupiah)

	Jumlah	% thd PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah	137.695,7	15,1
I. Penerimaan Dalam Negeri	137.695,7	15,1
1. Penerimaan Perpajakan	97.780,7	10,7
a. Pajak Dalam Negeri	91.881,9	10,1
b. Pajak Perdagangan Internasional	5898,8	0,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	39.915,0	4,4
a. Penerimaan Sumber Daya Alam (a.l. migas)	30.319,0	3,3
b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	4.000,0	0,4
c. PNBP lainnya	5.596,0	0,6
II. Hibah	—	—
B. Belanja Negara	183.069,2	20,1
I. Pengeluaran Rutin	143.682,3	15,8
1. Belanja Pegawai	29.355,1	3,2
2. Belanja Barang	8.940,5	1,0
3. Belanja Rutin Daerah	17.105,0	1,9
4. Pembayaran Bunga Utang	58.989,9	6,5
5. Subsidi	26.666,4	2,9
a. Subsidi BBM	18.300,0	2,0
b. Subsidi non BBM	8.366,4	0,9
6. Pengeluaran Rutin Lainnya	2.625,4	0,3
II. Pengeluaran Pembangunan	39.386,9	4,3
C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	-45.373,5	-5,0
D. Pembiayaan, bersih (D.I + D.II = D = C)	45.373,5	5,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri	22.189,5	2,5
II. Pembiayaan Luar Negeri, bersih (D.II.1 + D.II.2)	23.184,0	2,5
Produk Domestik Bruto (PDB)	910.431,7	

1) *Periode 1 April - 31 Desember 2000*

dan pertambangan. "Dana reboisasi, misalnya, seharusnya bisa dimasukan dalam pos penerimaan," katanya.

Dua tahun silam, sebenarnya anggota DPR sudah mendesak pemerintah agar dana-dana tersebut masuk kas negara menjadi penerimaan nonbudgeter. Apalagi sebenarnya sudah ada UU Penerimaan Bukan Pajak yang disahkan 1998. "Meski dikatakan berlaku lima tahun setelah disahkan, sebenarnya itu bisa dipakai saat kondisi perekonomian sekarang ini," kata Tadjuddin. Apalagi hingga Oktober 1999 lalu, dana reboisasi masih tersisa Rp 4,1 triliun.

Bukan cuma dana reboisasi, masih banyak dana nonbudgeter lain bernilai triliunan rupiah sekarang tak terdengar kabarnya. Maklum, semasa Orba, instansi kerap melakukan retribusi tanpa memasukkan ke kas negara. Depnaker, misalnya, pernah memungut restribusi dari tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Besarnya sekitar US$ 100 dolar per orang. Selain itu, Departemen Pariwisata juga memungut retribusi dari Pemda yang kemudian 'katanya' dana yang masuk rekening Menparpostel dipakai untuk melakukan kegiatan promosi pariwisata. Begitu juga di sektor pertambangan. "Dengan masuk ke kas negara, setidaknya pemakaian dan penerimaannya akan optimal dan terkontrol," kata Tadjuddin yang dari dulu paling ngotot supaya dana nonbudgeter itu masuk dalam APBN. Sebab, kalau semua terkumpul bisa mengurangi pinjaman luar negeri untuk menambal defisit.

Maka, tak salah kalau Rizal menilai kelebihan RAPBN ini hanya formatnya yang lebih transparan ketimbang APBN sebelumnya. Tapi belum bisa menjadi stimulus untuk mempercepat pemulihan ekonomi. "RAPBN yang ditunggu-tunggu ini ternyata bukan suatu simfoni yang penuh dinamika, stimulus, dan inovasi. Tapi hanya soneta yang datar dan miskin stimulus," tutur Rizal. Nah, hanya DPR yang bisa mengubah soneta itu menjadi simfoni.

Irawati dan Andrianto Soekarnen

Lebih Banyak Tersedot buat Pejabat

Di tengah hiruk-pikuk pemulihan ekonomi, tiba-tiba pemerintah berencana mendongkrak gaji para pejabat. Tak tanggung-tanggung, rata-rata naik di atas 400 persen. Ironisnya, kenaikan gaji pegawai negeri golongan menengah-bawah hanya sekitar 16 persen. Padahal, tidak ada jaminan bahwa dengan kenaikan itu korupsi bakal berkurang.

Gaji presiden, misalnya, naik sekitar 400 persen menjadi Rp 107 juta per bulan—sekitar sepuluh persen dari gaji Presiden AS Bill Clinton—dan wapres sekitar Rp 89,5 juta. Gaji menteri naik lebih 500 persen menjadi sekitar Rp 44,8 juta. Sedangkan ketua DPR, DPA, dan MA masing-masing menjadi Rp 45,9 juta. Untuk pejabat eselon I, misalnya dirjen dan irjen, menjadi sekitar Rp 18,9 juta. Gaji anggota DPR menjadi Rp 27 juta. Sedangkan gaji gubernur dan wakilnya menjadi Rp 17,9 juta dan Rp 14,7 juta.

Diperkirakan, untuk meningkatkan gaji pejabat itu diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp 200 miliar per tahun. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2000 (1 April-31 Desember 2000), pos belanja pegawai sekitar Rp 29,4 triliun. Berarti ada peningkatan sekitar 16 persen atau Rp 4 triliun ketimbang RAPBN 1999/2000 untuk periode yang sama. Setelah dikurangi jatah kenaikan gaji pejabat, hanya sekitar Rp 3,7 triliun yang dialokasikan kepada sekitar 4,5 juta pegawai menengah ke bawah. Jika dihitung secara kasar, kenaikan gaji golongan ini paling banter 16 persen.

Rencana pemerintah mendongkrak gaji itu dilontarkan jauh-jauh hari sebelum RAPBN 2000 diumumkan Kamis pekan silam. Waktu itu, menurut Menteri Keuangan Bambang Sudibyo, sistem penggajian yang berlaku saat ini tidak sehat. Misalnya, gaji ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)—setingkat eselon I di Departemen Keuangan—sekitar Rp 45 juta per bulan. Sementara, gaji presiden sekitar Rp 33 juta dan menteri keuangan Rp 9,93 juta. Jadi, "Gaji presiden dan menteri keuangan kalah dengan gaji ketua BPPN. Masak gaji atasan lebih rendah dari bawahan," kata Bambang.

ABB/DOK FORUM

KEHIDUPAN KELUARGA PEGAWAI MENENGAH-BAWAH. *Ya, harus gigit jari.*

Jika Menteri Keuangan menggunakan pendekatan perbandingan, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwik Kian Gie melihatnya dari upaya mengurangi korupsi. "Selama kehidupan para pejabat tak mencukupi, sulit bagi Presiden mengambil tindakan tegas terhadap koruptor," kata Kwik. Selama ini, gaji menteri dianggap belum cukup. Mereka mendapat tambahan dari jabatan komisaris di BUMN. Hal itu membuat mereka tak berkonsentrasi bertugas. "Nah, kalau gaji sudah cukup, tak ada alasan lagi melakukan korupsi. Kalau masih, tanpa ampun dipecat dan masuk penjara," kata Kwik.

Namun, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aberson M. Sihaloho, meragukan para pejabat yang diberi gaji *gede* tidak akan melakukan korupsi. "Tak ada jaminan pejabat tinggi itu tak melakukan korupsi lagi," kata Aberson. Selain itu, menurut pengamat ekonomi Rizal Ramli, kenaikan itu tak bisa dipertanggungjawabkan. "Mengukir prestasi saja belum, sudah minta kenaikan gaji," kata pendiri Econit Advisory Group itu.

Apalagi, menurut Teten Masduki, Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), kenaikan gaji pegawai itu dirasakan tak adil karena gaji pejabat lebih diperhatikan. Padahal, yang perlu ditingkatkan pendapatannya adalah golongan pegawai menengah ke bawah. Sebab, merekalah yang selama ini lebih merasakan pedihnya krisis ekonomi ketimbang pejabat. "Saya sangat prihatin jika kenaikan gaji pejabat yang berlipat itu dilaksanakan," kata Amien Rais, Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN, pekan lalu.

Memang, besaran kenaikan gaji pejabat itu belum final. Itu baru sebatas ancar-ancar. Sebab, itu masih perlu dibahas lagi dengan DPR. Tapi, jika DPR dan pemerintah bermain mata—karena toh, anggota DPR juga ikut menikmati kenaikan gaji—bukan mustahil kenaikan penghasilan yang terasa *njomplang* itu benar benar terlaksana. Lantas, siapa yang memperjuangkan nasib pegawai golongan menengah dan bawah? Ya, gigit jarilah. □

PENJUALAN SAHAM

Melicinkan Investor Amerika Masuk Astra

Edwin Soeryadjaya bertindak sebagai penasihat dan pemberi informasi bagi GGEP dan Newbridge dalam membeli saham Astra.

Di mata Cacuk Sudarijanto, barangkali direksi Grup Astra dianggap "penghalang utama" bagi masuknya konsorsium Gilbert Global Equity Partners (GGEP) dan Newbridge Asia II untuk membeli saham perusahaan otomotif itu. Karena itulah, pada 14 Januari lalu, Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu mengirimkan surat kepada direksi PT Astra International Tbk. tentang penambahan agenda Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS)—yang akan dilaksanakan pada awal Februari mendatang.

Agenda baru yang diusulkan bekas Direktur Utama PT Telkom Indonesia itu adalah perubahan direksi Grup Astra. Alasannya, untuk meningkatkan *shareholder value* (nilai kepemilikan saham perusahaan). Padahal, sebelumnya sudah disepakati tiga agenda, yaitu pengangkatan komisaris baru, peninjauan ulang penerbitan 25 persen saham baru tanpa hak memesan terlebih dahulu, dan strategi penjualan aset Grup Astra. Dua agenda terakhir ini dimaksudkan agar kinerja Astra makin "cantik" dengan selesainya restrukturisasi utang.

Karena itu, wajar jika Sofjan Wanandi menilai Astra ini merupakan salah satu perusahaan yang baik. Selama masa krisis ekonomi ini, menurut Ketua Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN) itu, di bawah komando Rini Mariani Sumarno Soewandi, Astra berbalik dari rugi sekitar Rp 2,4 triliun pada 1998 jadi untung Rp 500 miliar lebih pada 1999. "Masalahnya, sekarang ada perusahaan asing Amerika Serikat yang mau membeli 39,3 persen saham Astra. Tentu manajemen itu mau kalau Astra betul-betul *pure public company*, jangan ada penguasaan satu investor, yang sama sekali enggak tahu mau apa. Pembelinya kan *financial player*," kata Sofjan, yang sudah melepas sahamnya di Astra.

Jadi, terasa janggal kalau keinginan Ketua BPPN mengganti direksi Astra (yang baru akan berakhir masa baktinya pada 2002) dengan alasan untuk menggenjot *shareholder value*. Apalagi Rini terpilih sebagai the Best CEO (Chief Executive Officer) 2000 versi majalah *Swa*, yang diumumkan 1 Februari ini. Peringkat kedua Robby Djohan (Direktur Utama Bank Mandiri), dan ketiga Eva Riyanti Hutapea (CEO PT Indofood Sukses Makmur). Sedangkan Cacuk sendiri pada peringkat kelima untuk kelompok the Best CEO in Crisis.

KRIS HARYANTO

RINI MARIANI SUMARNO SOEWANDI. *Setuju due diligence.*

LABA(RUGI) BERSIH GROUP ASTRA PER SAHAM
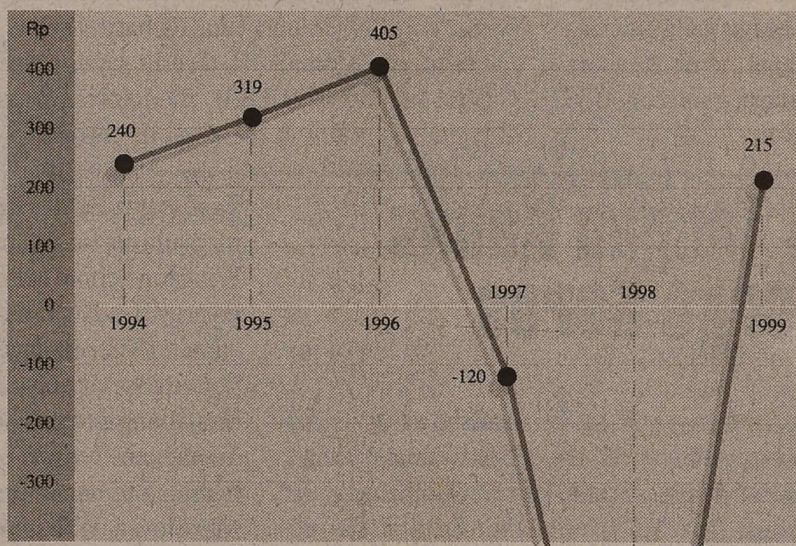
Sumber: • *1994 - 1998 dari Laporan Tahunan Astra 1998*
• *Untuk data 1999, perkiraan dari Sumber Forum*

Karena itu, menurut sumber FORUM, usulan penggantian direksi itu lebih karena Rini dkk. dianggap menghalangi GGEP dan Newbridge untuk melakukan *due diligence* (penilaian tuntas) terhadap Astra. Padahal, "Astra mendukung tujuan BPPN dan setuju bekerja sama dalam aktivitas *due diligence* dalam batas ruang kerja yang diterima," kata Aminuddin, Vice President Public Relations PT Astra International Tbk., dalam pelbagai kesempatan.

Salah satu yang ditakutkan Astra adalah kalau hasil *due diligence*, terutama menyangkut struktur biaya produksi, jatuh ke tangan pesaing. Jika "kebocoran" ini terjadi, konon mitra Astra seperti Toyota Motor Corp. dan Isuzu sangat keberatan. Karena itulah, manajemen minta kepada BPPN agar GGEP dan Newbridge menandatangani Confidentiality Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) atas informasi yang diberikan. Isi Perjanjian itu antara lain ganti rugi kepada perusahaan Grup Astra, direksi, komisaris, dan karyawan Astra, terhadap kemungkinan munculnya tuntutan akibat penyerahan informasi itu. Tapi, sampai 23 Januari lalu, manajemen Astra belum memperoleh Perjanjian tersebut dari BPPN. Yang diterima manajemen malahan usulan agenda baru untuk mengganti direksi.

Sebenarnya, saham Astra yang terdaftar atas nama BPPN hanya 5,21 ribu lembar atau 0,2 persen. Sedangkan yang lainnya atas nama

PT Holdiko Perkasa (Liem Sioe Liong) 19,7 persen, PT Gentala Sanggrahan (Usman Admadjaja) 8,7 persen, Nusamba (Bob Hasan) 5,7 persen, dan Delta Mustika (Prajogo Pangestu) 5,0 persen. Liem, Usman, Bob, dan Prajogo melepas saham itu ke BPPN untuk membayar kewajibannya kepada pemerintah.

Pada 30 Agustus 1999, GGEP dan Newbridge menandatangani Letter of Intent dengan BPPN (waktu itu ketuanya Glenn M.S. Yusuf) untuk membeli saham Astra yang dikuasai badan tersebut. Pada 2 Desember 1999, Ketua BPPN (Glenn M.S. Yusuf), Bien Kiat Tan (Managing Director Newbridge Capital (S) Pte Ltd), dan Eric H.C. Wei (Managing Director Gilbert Global Equity Capital Asia Ltd) menandatangani Surat Perjanjian. Isinya, jika mereka berhasil membeli lebih dari 30 persen, nilai penawarannya Rp 3.750 sampai Rp 3.825 per lembar. Tapi, kalau kurang, harganya Rp 3.000 per lembar. Diperkirakan, dari penjualan itu, BPPN mengantongi US$ 500 juta (sekitar Rp 3,5 triliun).

Tapi, penawaran itu bersifat *preferred bidder* (penawar yang memiliki hak pertama). Jadi, jika ada investor lain yang menawar dengan harga, misalnya Rp 4.000 per lembar, GGEP dan Newbridge berhak menyamakan harga penawaran karena mereka mempunyai hak istimewa, *right to match*, sehingga merekalah yang memenangkan penawaran itu. Tapi, jika kedua investor itu tidak memanfaatkan hak istimewa itu, keduanya mendapat kompensasi 15 persen dari selisih harga yang mereka tawar. Dan, jika mereka gagal membeli saham Astra, mereka akan mendapat ganti rugi US$ 1,5 juta dari BPPN.

Susunan Komisaris dan Direksi Grup Astra

Presiden Komisaris	: Somala Wiria
Wakil Preskom	: Abdul Rachman Ramly
Komisaris	: Anthony Salim
Komisaris	: Usman Admadjaja
Komisaris	: Torstein Stephansen
Komisaris	: Benjamin Arman Suriadjaya
Komisaris	: Theodore Permadi Rachmat
Komisaris	Benny Subianto
Komisaris	: Mikio Nomura
Presiden Direktur	: Rini Mariani Sumarno Soewandi
Wakil Presdir	: Budi Setiadharma
Direktur	: Rudyanto Hardjanto
Direktur	: Himawan Surya
Direktur	: Michael Dharmawan Ruslim
Direktur	: Danny Bonifasius Walla
Direktu	: Hagianto Kumala
Direktur	: Dorys Setiawati Herlambang

Dalam transaksi internasional, menurut Cacuk, kompensasi itu wajar saja. Analoginya, kata Ketua Persatuan Daulat Rakyat (PDR) itu, ada seseorang yang mendapat izin untuk membuka hutan perawan dan berhasil membangun helipad. Sampai pada pembangunan helipad itu dibuat perjanjian bahwa setelah itu akan dibuka tender dan dipersilakan semuanya untuk melanjutkan pembukaan hutan itu. "Jika yang menang tender investor lain, kepada investor perintis diberikan *brake up fee*," tutur Cacuk, pekan silam.

Memang, selain kedua investor di atas, ada investor lain yang berminat membeli saham Astra. Pada 17 Januari lalu, Richard Taylor, Direktur Pelaksana PT Credit Lyonnais Capital Indonesia (CLSA), mengirim surat kepada Cacuk untuk membeli saham Astra dengan harga minimum Rp 3.750 per lembar. Dalam surat itu, Taylor mengakui bahwa pemberian hak istimewa kepada GGEP dan Newbridge menjadi penghalang bagi CLSA untuk memenangkan transaksi tersebut. Konon, surat ini belum ditanggapi pihak BPPN.

Lantas, sejauh mana peran Edwin Soeryadjaya, Presiden Direktur PT Saratoga Investama Sedaya, dalam memuluskan konsorsium GGEP dan Newbridge? Apakah putra William Soeryadjaya, pendiri Grup Astra, itu berminat membeli saham Astra? "Secara jujur, dari lubuk hati yang dalam, sebagai putra dari *founder* Astra International, kami berminat membeli kembali saham Astra. Tapi, kami tidak punya dana untuk melakukan transaksi sebesar itu," katanya kepada Andrianto Soekarnen dari FORUM melalui e-mail, pekan lalu.

Edwin membantah punya saham di GGEP dan Newbridge. Kedua perusahaan itu, kata Edwin, merupakan perusahaan investasi yang berbasis di Amerika Serikat yang sangat aktif di Asia. "Dalam merencanakan investasi di Indonesia, banyak investor asing datang kepada kami untuk meminta advis dan informasi, termasuk GGEP dan Newbridge," kata Edwin. Jadi, "Kami tak mempunyai hubungan kepemilikan pada kedua perusahaan itu."

Apakah kedua investor itu berhasil masuk ke Astra? Tergantung sejauh mana BBPN bisa menggusur direksi yang mungkin dianggap "tidak sejalan" dengan badan pemerintah itu. Apakah 60,7 persen pemegang saham lainnya akan setuju menggusur direksi Grup Astra?

Syatrya Utama, Anne L. Handayani, dan Ronald Raditya

Bekas Tangan Kanan George Soros

Pemilik GGEP bukan sembarang orang. Perusahaan yang berdiri pada 1997 ini milik Steven J. Gilbert, 52 tahun, bekas tangan kanan George Soros. Ia bermitra dengan Frank Russel Company, yang mengelola dana pensiun US$ 1,5 triliun, dan Capital Group International Inc., investor institusional dari AS. Hingga saat ini, menurut *Sydney Morning Herald*, koran terbitan Australia, 15 Juni 1999, doktor lulusan Harvard Law School, AS, ini mengelola dana sekitar US$ 2 miliar.

Sebelum dipertemukan temannya, C. Gerard E. Manolovici, dengan George Soros, ia memulai karirnya di perusahaan investasi Morgan Stanley, awal 1970-an. Sepuluh tahun kemudian ia memulai peruntungan di Hollywood dengan mendanai Lion's Gate Films. Tapi, gagal. Lalu, ia mengelola studio, menulis naskah film, dan tetap menjaga portofolio investasinya. Selain itu ia bersekolah ekonomi di Wharton School of Finance di Universitas Pennsylvania, dan meraih gelar MBA dari Harvard Business School.

Pada 1983, orang yang tidak mau difoto ini membangun Chemical Venture (sekarang Chase Capital Partners). Setelah beberapa tahun bergabung dengan George Soros, ia membentuk Soros Capital, yang menangani *private equity fund*. Setelah keluar dari Soros Capital, bersama teman-temannya, antara lain Eric H.C. Wei, C. Gerard E. Manolovici, W. Paul Wallace, Michael Lam, Eric L. Bunting, Akarin Gaw, Richard W. Gaenzle, Jr., dan Arvind Rao, ia mendirikan GGEP. Di perusahaan ini ia ditunjuk sebagai ketua.

Karena kehebatannya, selama enam belas tahun terakhir, ia bisa memberikan keuntungan kepada investor yang mempercayakan uang kepadanya sekitar 38 persen per tahun. Tentu saja, dengan prestasi ini membuat orang yang suka mengambil risiko tinggi ini menjadi salah seorang *fund manager* yang patut dihormati di samping George Soros dan Warren Buffett. ❑

Investor Indonesia di Balik DBC

Para investor di balik Deutsche Bourse Clearing hanya menguasai saham Bank Bali tak lebih dari lima persen. Tapi, ada indikasi, investor itu tunggal.

Upaya Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melacak investor di balik Deutsche Bourse Clearing (DBC) AG Jerman agaknya mulai menemukan titik terang. Tapi, itu bukan berarti penyelidik Bapepam bisa mulus membuka identitas investor itu. Sebab, selain perangkat hukumnya tak memadai, si tokoh pun konon bukan orang sembarangan.

Petunjuk membuka kedok investor misterius itu tersirat setelah lembaga dari Jerman itu memberi tahu Tim Pengelola Bank Bali (TPBB). Surat 6 Januari 2000 itu berisi daftar nama nasabah (*omnibus account*) DBC di sejumlah perbankan Jerman dan bank internasional di kota Hamburg, Bremen, Dusseldorf, Stuttgart, Hanover, dan Frankfurt.

Total jumlah nasabah DBC yang membeli saham Bank Bali itu 10 ribu *beneficial owner*. Rata-rata mereka memiliki 50-336 ribu saham. "Tapi, tak ada *beneficial owners* yang memiliki saham perseroan lebih dari lima persen," tulis surat itu. Tapi, pengelola bursa Jerman itu tak keberatan membantu kelancaran rekapitalisasi Bank Bali dengan memberikan identitas nasabahnya lebih detail. Syaratnya, harus mendapat izin dari ribuan investor itu.

Menurut Ketua Bapepam, Herwidayatmo, pihaknya tetap melakukan pelacakan. Sebab, per 20 Agustus 1999, saham Bank Bali di DBC tercatat 227.763.319 untuk 166 nasabah. "Semua harus hati-hati. Sebab menyangkut haknya orang lain," kata mantan Deputi Kantor Menteri Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN yang akrab dipanggil Herwid itu.

Masalahnya, kalau misteri DBC itu belum terungkap, ada kemungkinan rencana Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) dan *right issue* Maret 2000 bakal tertunda lagi setelah gagal RULBPS akhir Desember 1999. Sebab, kalau semakin lama ditunda, biaya rekapitalisasi Bank Bali yang diperkirakan Rp 4,05 triliun bisa membengkak.

Sementara, DBC yang sekarang mengantongi 37 persen saham Bank Bali dianggap melanggar peraturan pasar modal. Pertama, SK Ketua Bapepam No. 22 tanggal 16 Agustus 1995 tentang *tender offer* yang wajib dilakukan jika membeli saham lebih dari 20 persen. Kedua, Pasal 87 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang isinya kewajiban melapor bagi semua pihak yang membeli saham emiten minimal lima persen.
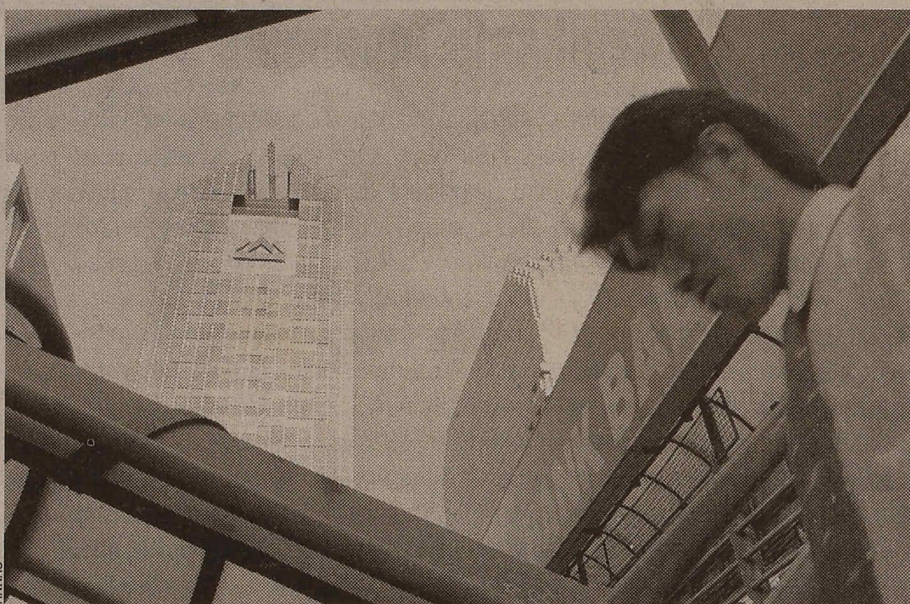
GEDUNG BANK BALI. *Investor tunggal dengan banyak nama.*

Lalu, apa sanksinya? Herwid mengakui bahwa sanksi hukum pelanggaran di pasar modal belum tegas. "DBC pun belum bisa langsung dianggap melanggar. Semua harus dicek dulu," kata Herwid. Posisi DBC memang belum jelas. Kalau benar para nasabahnya hanya memiliki saham kurang dari lima persen dan cara membelinya tak langsung besar, berarti tak ada pelanggaran. Tapi, kalau tidak, DBC bisa dianggap bersalah karena tak transparan atau menyembunyikan informasi. Artinya, mereka terancam pidana penjara selama tiga tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar sesuai dengan Pasal 107 UU Pasar Modal.

Penyelidikan Bapepam bisa menguak tokoh yang menarik keuntungan dari mencuatnya skandal Bank Bali yang menghebohkan pada 1999. Tokoh yang dicurigai adalah Rudy Ramli, bekas Dirut dan pemilik Bank Bali. Ia disebut-sebut berkongsi dengan Mu'min Ali Gunawan (pemilik Bank Panin), Hari Tanoesoedibyo (Bhakti Investama), dan Herman Ramly (adik kandung Rudy). Alasannya, keluarga Ramli yang masih memiliki 18,11 persen lewat PT Sarijaya Wirasentosa itu berpeluang besar meraih kembali banknya setelah Standard Chartered Bank (SCB) mundur. Rudy membantah tuduhan itu. "Untuk membeli saham itu diperkirakan butuh dana Rp 350 miliar-Rp Rp 400 miliar. Lo, kalau saya punya uang segitu buat apa mengundang investor asing masuk Bank Bali," katanya.

Kabarnya, Danareksa Securities dan Vikers Ballas Tamara disebut-sebut aktif membeli saham Bank Bali dalam jumlah besar. "Mereka membeli atas nama DBC," ucap sumber FORUM. Tike Sukrani, Coorporate Secretary PT Danareksa, tak membantah tuduhan itu. "Tapi kami hanya perantara. Jumlah yang dibeli pun tak banyak: hanya 2 juta lembar. Investornya swasta lokal, bukan Danareksa," kata Tike, yang merahasiakan investor itu.

Lantas, siapa tokoh di balik aksi borong DBC? Sumber FORUM yakin bahwa dia bukan investor asing, tapi orang Indonesia. Alasannya, sesama perusahaan asing memiliki etika. "Tak mungkin dia mau menyikut SCB," katanya. Tokoh itu pun rajin memburu saham Bank Bali, tak peduli ada Baligate atau bank itu diambil alih pemerintah. Ada dua kemungkinan tujuan membeli saham Bank Bali, yaitu *profit taking* saat *right issue* dan si investor berniat menguasai Bank Bali. Siapa dia? "Dia investor tunggal tapi memakai banyak nama dan perusahaan, sehingga identitasnya tetap aman," kata sumber FORUM.

Ira dan Anton Bahtiar Rifa'i

KRIS HARYANTO
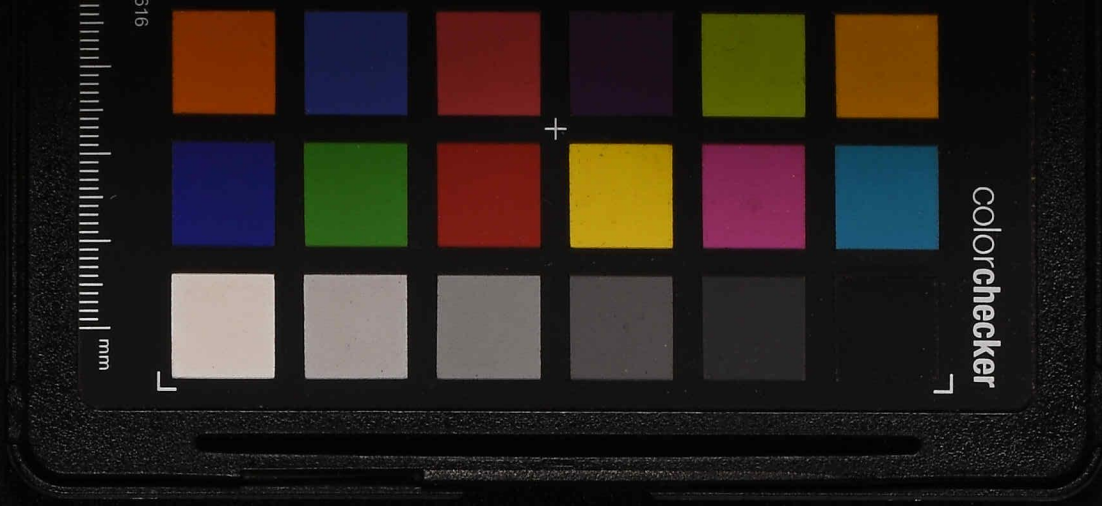
Integritas Bankir

BANK INDONESIA (BI) mengeluarkan ketentuan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)* bagi pemilik dan pengelola bank. Peraturan BI No. 2/1/PBI/2000 yang mulai berlaku 14 Januari 2000 itu bertujuan menciptakan bank yang tangguh dan efisien. "BI akan melakukan evaluasi terhadap *fit and proper test* itu secara berkala atau setiap waktu jika diperlukan," kata Gubernur BI Sjahril Sabirin. Ruang lingkup penilaian itu meliputi integritas dan kompetensi.

Faktor integritas ini antara lain menyangkut larangan bagi pemegang saham pengendali, pengurus, dan pejabat eksekutif bank yang pernah terlibat dalam rekayasa dan praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan. Sedangkan kompetensi, antara lain soal kemampuan di bidang perbankan. Bankir juga dituntut independen dan tidak mempan intervensi yang memungkinkan mereka menyalahi peraturan perbankan. Bankir dan pemilik bank harus mempertanggungjawabkan kredit macet di banknya. "Sebelum bankir mengundurkan diri atau pemilik bank mengalihkan sahamnya, semua harus diselesaikan [terlebih dahulu]," kata Sjahril. □

Steady Safe Melepas CMNP

PT STEADY SAFE (SS) akan melepaskan kepemilikan sahamnya di PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Langkah itu sebagai upaya menyelamatkan perusahaan itu dari ancaman *delisting* di PT Bursa Efek Jakarta (BEJ). "Kami akan menawarkan saham itu kepada PricewaterhouseCoopers (PwC), Hong Kong, agar perusahaan terselamatkan," kata Wakil Direktur Utama SS, Shadik Wahono.

BEJ mengeluarkan ancaman *delisting* lantaran hasil audit akuntan independen terhadap SS *disclaimer* (tak memberikan opini). Soalnya, utang CMNP—milik Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut—dalam bentuk dolar membuat perusahaan transportasi yang dikelola Jopie Widjaya itu bermodal negatif. Pada 1997, SS membeli 19,9 persen CMNP Rp 100 miliar. Untuk membeli saham dan ekspansi, Jopie meminjam uang kepada Perigrine Fixed Income (PFI) sebesar US$ 270 juta. Tapi, awal Januari 1998, PFI dilikuidasi dan diambil alih oleh PwC Hong Kong. □

Bank Putera Bugar Lagi

HANYA dalam tempo kurang dari dua bulan, Bank Putera Multikarsa (BPM) sekarang tak lagi berstatus bank dalam penyehatan. Sebab, hasil audit BPPN menyatakan bahwa mulai 19 Januari lalu, bank milik Marimutu Sinivasan, Bos Kelompok Texmaco, itu sudah bisa mengikuti kliring lagi. "BPM sudah dinyatakan sehat kembali. Tak ada persoalan serius pada bank kami. Semua terjadi lantaran sentimen negatif dari isu Texmaco," kata Dirut BPM, Masyhud Ali, pekan lalu.

KRIS HARYANTO

Memang, ketika kredit macet Texmaco sebesar Rp 9,9 triliun di BNI terbongkar, BPM mengalami *rush*. Hal tersebut membuat bank di bawah Grup Texmaco itu bersaldo merah. Kendati begitu, menurut Masyhud, BPM tak pernah berstatus *short position* di pasar uang: kewajibannya lebih kecil ketimbang tagihan. "Begitu juga dengan kecukupan modal (CAR), pernah mencapai 12 persen. Sekarang memang merosot menjadi enam persen, tapi masih di atas empat persen," kata Masyhud. □

Ramai-Ramai Membantu Indonesia

Safari berkeliling dunia yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid agaknya tak terlalu sia-sia. Buktinya, dua negara yang dilobi untuk membantu Indonesia, yaitu Singapura dan Amerika Serikat, mulai mengulurkan tangannya. "AS akan mendukung pemulihan ekonomi, seperti rekapitalisasi perbankan, utang swasta, dan penegakan transparansi," kata Menteri Keuangan AS, Lawrence H. Summers.

Untuk itu, bersama 30 pengusaha, Lawrence berkunjung ke Indonesia selama tiga hari pada 18-20 Januari silam. Di antara perusahaan AS yang mengirim delegasinya adalah General Electric Company, McDermott Inc, Edison Mission Energy, dan Daimler Chyssler. "Meski tantangan yang dihadapi pemerintah RI sangat besar, kami siap membantu dengan membawa keahlian iptek," kata *Chairman US-Indonesia Business Committee* (UIBC), Michael Gadbaw.

Sebelumnya, PM Singapura Goh Chok Tong juga datang ke Indonesia. Dalam kunjungannya selama dua hari, 13-14 Januari lalu, Goh bersama 60 pengusaha asal negeri jiran itu berniat melakukan investasi senilai US$ 500 juta dan Sin$ 400 juta. Lima sektor industri yang diincar adalah manufaktur, perdagangan, keuangan, agroindustri, dan pariwisata. "Kami juga akan mengundang pengusaha mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia," kata Goh. □

M. RIZAL

IRONI RAPBN 2000

DIDIK J. RACHBINI
Pengamat Ekonomi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan catatan transaksi, keadaan keuangan negara, sekaligus strategi suatu pemerintah untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomiannya. Karena itu, apabila RAPBN suatu tahun tertentu tidak sesuai dengan harapan, sesungguhnya hal itu merupakan kondisi dari proses sebelumnya.

Menurut RAPBN 2000, secara total kebutuhan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan selama sembilan bulan pada tahun 2000 mendatang (April-Desember) mencapai Rp 183 triliun. Sementara itu, penerimaan dalam negeri dari perolehan pos pajak dan pos bukan pajak mencapai Rp 137,7 triliun. Dengan demikian, RAPBN itu mengalami defisit sekitar Rp 45 triliun.

Pada sisi penerimaan, kelompok penerimaan pajak tetap dicirikan oleh dominannya tiga unsur, yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan cukai. Secara keseluruhan, penerimaan pajak meningkat hampir 40 persen, dari Rp 66,37 triliun menjadi Rp 91,88 triliun. Pajak pertambahan nilai tidak secara nyata ditingkatkan karena memang kondisi sektor riil dan kegiatan produksi tidak bisa diharapkan meningkat drastis. Pos penerimaan ini hanya meningkat 0,9 persen, dari Rp 26,02 triliun menjadi Rp 26,26 triliun. Ini berbeda dengan penerimaan dari PPh yang direncanakan meningkat pesat, sekitar 74 persen, dari Rp 30,45 triliun menjadi Rp 53,02 triliun. Hal ini sebenarnya baik-baik saja. Cuma, bagaimana pemerintah dapat mencapai sasaran yang ambisius ini. Jika cara dan sistem pemungutannya tidak dibenahi, sasaran itu bisa meleset.

Sementara itu, rancangan anggaran pengeluaran yang diajukan pemerintah ternyata begitu besar. Ini akan menyebabkan peluang APBN untuk menjadi stimulus fiskal semakin kecil. Beban anggaran pengeluaran rutin merupakan komponen besar, hampir 80 persen dari seluruh anggaran pengeluaran. APBN habis hanya untuk membiayai pengeluaran rutin, sehingga pengaruhnya terhadap sektor riil akan sangat terbatas.

"Ada ironi ketidakadilan di sini karena pajak rakyat harus dikucurkan untuk bank-bank yang buruk dan debitor-debitor yang ngemplang"

Ada tiga komponen biaya rutin yang sangat besar, yaitu belanja pegawai (pusat dan daerah) serta belanja barang, pembayaran bunga utang, dan subsidi. Ketiga komponen ini sebenarnya warisan masa lalu, kecuali subsidi, yang sangat diperlukan untuk mengurangi beban sosial masyarakat menengah ke bawah.

Pengeluaran yang tergolong besar adalah untuk pembayaran bunga utang dalam negeri maupun luar negeri, tidak kurang dari Rp 60 triliun. Ini berarti dua per tiga dari perolehan pajak kita dibayarkan untuk bunga utang. Sebenarnya, struktur ini dapat dikurangi jika pemerintah menyadari rekapitalisasi perbankan tidak bisa mutlak 100 persen karena tidak mungkin semua dipulihkan kembali. Dan, ada ironi ketidakadilan di sini karena pajak rakyat harus dikucurkan untuk bank-bank yang buruk dan debitor-debitor yang *ngemplang*. Ketidakadilan ini tidak bisa dibiarkan karena menguras sejumlah besar uang perolehan pajak, berarti mengurangi hak-hak rakyat untuk mendapatkan manfaat program-program pembangunan langsung dari pemerintah. Karena itu, pengeluaran dana untuk rekapitalisasi tersebut perlu ditinjau kembali. Angkanya sedapat mungkin mendekati perolehan penjualan aset di BPPN, yang dalam RAPBN 2000 direncanakan sebesar Rp 16,25 triliun.

Pengeluaran rutin untuk belanja pegawai (pusat dan daerah) serta belanja barang juga menempati posisi yang sulit dan tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Gaji pegawai negeri secara rasional memang harus meningkat secara signifikan, tapi prasyarat perampingannya harus dilaksanakan lebih dahulu untuk menghapus inefisiensi dan barisan pembonceng gratis yang besar.

Pengeluaran untuk subsidi akan tetap terjebak ke dalam pola irasional secara ekonomi, tapi dianggap rasional secara politik. Subsidi minyak membengkak terus karena harga minyak di pasar internasional memang terus melambung. Selain itu, dampak lanjutannya diperkirakan akan sangat luas, sementara kita tidak terbiasa mampu mencegahnya dan kekurangan instrumen untuk menahan laju inflasi akibat harga dari komoditas yang dikelola pemerintah dilepas ke pasar. Jika itu yang terjadi, sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah diperkirakan akan meleset. Jadi, mencabut subsidi salah dan membiarkannya juga salah. Namun, ada jalan tengah yang bisa ditempuh, yakni pengurangan secara bertahap, sehingga masyarakat dapat menyesuaikannya selama beberapa tahun sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan peningkatan kesempatan kerja di tahun-tahun mendatang.

Secara umum, dengan membandingkan penerimaan dalam negeri dan pengeluaran yang diperlukan untuk pos pengeluaran rutin ataupun pos pengeluaran pembangunan, defisit RAPBN ini memang begitu besar, sehingga tetap bermasalah karena masih begitu tergantung pada utang luar negeri (Rp 23 triliun), sebagai bagian dari pembiayaan defisit.

Satu hal yang menarik dalam RAPBN 2000 adalah, ternyata dana mengalir ke daerah tidak seperti diharapkan sesuai amanat Tap MPR No. XV Tahun 1999 dan undang-undang resmi di bawahnya. Ini terjadi karena dua hal. Pertama, perancang RAPBN 2000 relatif tidak memahami persoalan ekonomi politik, aspirasi daerah, dan urgensi krisis ancaman disintegrasi saat ini. Kedua, desentralisasi keuangan pada saat krisis dan anggaran defisit memang pekerjaan yang sangat sulit, kecuali pos rutin untuk pembayaran utang dapat dikurangi dan dialihkan pada pengelolaan anggaran untuk daerah. ❑
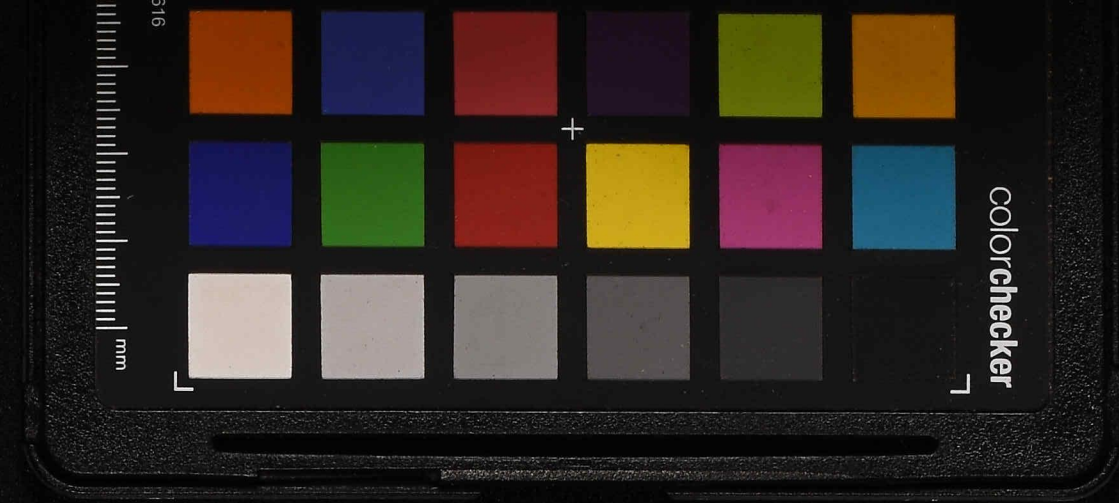
KOLOM

Kesalahan Disertasi Doktor

Dalam sebuah kolegium University of Illinois di Chicago (1919), Jack London, seorang pengarang terkenal, melancarkan tuduhan plagiator kepada seorang profesor yang baru selesai berceramah mengenai penemuannya di bidang fisika. ”Tuan Profesor, apa yang Anda katakan tadi semua ada dalam buku ini. Anda telah memplagiat kata demi kata dari buku ini!” kata Jack London sambil mengacungkan sebuah buku tebal. Keruan saja sang profesor jadi penasaran. Tapi, setelah buku itu dilihatnya, ia menjadi lega karena buku itu ternyata sebuah *dictionary*. Memang, apa yang diucapkannya kata demi kata ada dalam kamus itu. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan plagiat? Menurut Funk & Wagnals: Standard College Dictionary, plagiat adalah “to appropriate and pass off as one’s own (the writing, ideas, etc, another).” Maksudnya, mengambil dan mengakui karya tulis, ide, atau penemuan (iptek atau seni) milik orang lain sebagai kepunyaan sendiri.

Usman Pelly
Wakil Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Pusat

Berbeda dengan kasus tuduhan Jack London, kasus plagiat disertasi doktor seperti yang dituduhkan M. Nurhasim (LIPI) kepada Ipong S. Azhary (UGM) adalah menyangkut karya tulis hasil penelitian lapangannya. Masalah utamanya adalah kurang jelasnya atau tidak adanya ”pengakuan” bahwa yang dikutip atau dimasukkan ke dalam disertasi Ipong itu milik M. Nurhasim.

Menurut ketentuan dalam penulisan ilmiah, kutipan itu harus dengan jelas dinyatakan “siapa yang punya” dan dari mana sumbernya. Jadi, bukan boleh-tidak boleh dikutip atau dipergunakan. Sebab, pada hakikatnya, tidak ada suatu disertasi atau karya ilmiah yang seratus persen asli atau baru, walaupun ia berasal dari penelitian lapangan, apalagi penelitian kepustakaan. Karena itu, masalah plagiat suatu karya ilmiah sangat berhubungan tidak hanya pada pengutipan atau teknik pengumpulan data, tapi juga pada masalah keseluruhan metodologi karya ilmiah itu. Pembimbing disertasi secara tidak langsung adalah *co-author* disertasi itu. Sebab, tidak ada bagian yang “bebas” tanpa persetujuannya. Mungkin, pertanyaan yang penting dalam hubungan ini ialah, siapa yang harus bertanggung jawab? Calon doktor sebagai penulis disertasi, dewan pembimbing/penguji *(board of doctoral committee)*, atau institusinya? Tentu saja, dalam kasus Ipong S. Azhari, yang “paling” bertanggung jawab adalah dirinya sendiri. Apakah ia mencantumkan dengan jelas sumber pengutipannya, atau menyamarkannya, atau sama sekali tidak menyebutkannya. Di sinilah *crucial point* dari plagiat itu. Namun, pembimbing dan penguji tidak dapat lepas tangan, terutama jika disertasi itu hasil penelitian lapangan. Sebab, di samping masalah plagiat, ada persoalan metodologi di sana. Seberapa jauh ketua dan anggota dewan pembimbing/pengujinya *aware* terhadap metodologi, termasuk teknik pengumpulan data calon doktor yang dibimbingnya. Mungkin kasus Dr. Castaneda dari University of California at Los Angeles (UCLA) yang mendadak menjadi miliuner dapat menjelaskannya.

NOUFAL

Carlos Castaneda menerbitkan buku-buku dari hasil disertasi doktornya yang berjudul *The Teaching of Don Juan: a Yacui Way of Knowledge* (1966). Buku ini laku keras. Rumor dan kecurigaan kemudian muncul bahwa disertasi doktornya mengenai kehidupan mistik orang Indian itu bukan hasil penelitian lapangannya, tapi imaginasi (khayalan) Castenda saja. Orang berspekulasi menyamakan buku mengenai Don Juan itu dengan buku-buku Winnetou Gugur karangan Karl May yang juga hasil imajinasi. Masyarakat kampus menduga Departemen Antropologi UCLA kali itu kecolongan. Suatu hari, mereka dikagetkan oleh berita bahwa mantan ketua dewan penguji dan pembimbing disertasi Carlos Castenda meletakkan jabatannya sebagai guru besar UCLA dengan pernyataan diri bersalah dan penyesalan yang mendalam karena tidak meminta dan mengecek catatan lapangan *(field notes)* Castenda.

Berbeda dengan Dr. Castenda, seorang peneliti berkebangsaan Belanda, Marie van Reuter, doktor antropologi dan peneliti Suku Badui Jawa Barat (1950-an), secara sukarela menanggalkan gelar doktor yang disandangnya beberapa tahun. Masalahnya, setelah kembali ke lapangan dan hidup bersama Suku Badui, ia menemukan kesalahan dalam teknik pengumpulan data karena menggunakan kuesioner tertutup dengan mengharapkan jawaban ya atau tidak. Dalam sistem nilai budaya masyarakat Badui, seseorang tidak sopan mengatakan “tidak” kepada orang lain *(out group)*. Dengan demikian, data yang dikemukakan dalam disertasinya itu tidak valid sama sekali. Marie menemui kembali komisi pengujinya dan mohon agar ia diuji ulang dengan disertasi doktor yang baru.

Kedua kasus terakhir tersebut memberikan ilustrasi betapa kesalahan metodologi dalam disertasi merupakan produk ”kerja sama” seorang calon doktor dan pembimbing atau pengujinya. Soalnya, kedua belah pihak terlibat dalam usaha mencari kebenaran ilmiah. Universitas sebagai lembaga pengelola tidak dapat disalahkan, kecuali terbukti bahwa ”konspirasi” mencari jalan pintas itu—seperti plagiat—merupakan sistem yang dianut lembaga itu. Dalam hubungan ini, orang membedakan rasa malu *(shame)* dan rasa bersalah *(guilty feeling)*. Yang satu muncul lantaran ketahuan orang lain, sedangkan yang kedua karena menemukan sendiri kesalahan itu. Maka, dalam penulisan disertasi doktor yang di dalamnya terjadi masalah plagiat dan kesalahan metodologi, seperti yang dituduhkan kepada Ipong Azhari, orang dapat menebak siapa yang merasa malu dan siapa pula yang merasa bersalah, atau kedua-duanya? ❑
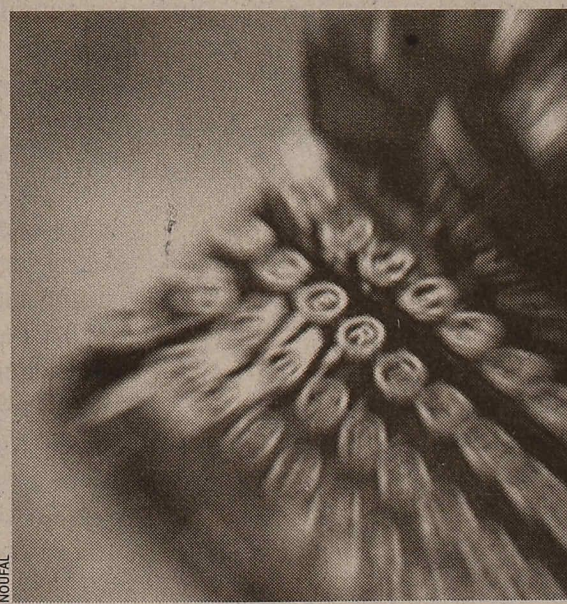
Infiltrasi Teknologi dalam Seni Foto

Karin Sukarya mencoba menyodorkan fotografi sarat sentuhan komputer. Teknologi digunakan demi menutupi kelemahan teknis seorang fotografer?

KARIN SUKARYA

Ketajaman, komposisi, dan harmonisasi warna bukan satu-satunya penentu keistimewaan sebuah karya fotografi. Sebab, keistimewaan itu terletak pada daya gugah karya tersebut. Dan itu, harus diakui, lebih mudah dicapai lewat medium film berwarna. Inilah, rupanya, yang diyakini Karin Sukarya. Bahkan, sebagaimana terlihat dalam karya-karyanya yang digelar Galeri Cahya, Jakarta Pusat, sampai akhir Januari ini, ia memperkaya potensi film berwarna tadi dengan teknologi digital.

Maka, wajar bila enam foto Karin yang bertema pohon terasa menyentak dan mampu menghadirkan nuansa yang sangat berbeda dibanding foto-foto berformat konvensional yang ikut dipamerkan. Tengok saja, *Colorful Dream*. Arah sinar dari belakang obyek *(back light)* mampu tampil lebih menawan lewat bantuan komputer. Efek warna yang dihasilkan mampu menutupi keklisean obyek foto dan teknik pengambilan gambar. Sedangkan dalam *Inferno*, permainan warna langit yang menyerupai efek cat air terasa pas. Dan, panas warna senja juga mampu dihadirkan dalam *Red Dawn* yang dipotret perempuan kelahiran Jerman itu di Gunung Ijen, Jawa Timur.

Memang, dalam *Wasteland*, Karin seakan keasyikan bermain dengan *mouse* komputer. Gradasi warna yang terlampau "eksplosif" di atas garis horizontal membuat obyek utama foto, yang sejatinya bisa menjadi karya unggulan, menjadi tenggelam. Toh, secara umum, Karin terkesan sangat taat dengan aturan-aturan baku fotografi, semacam komposisi, keseimbangan pencahayaan, dan efek kedalaman. Khusus untuk yang terakhir, imaji yang hadir lewat bantuan teknologi terasa menonjol dari sisi tiga dimensi. Seolah pemirsanya dapat merasakan kontur obyeknya, sesuatu yang dengan mudah dicapai dengan film hitam-putih.

"Saya percaya pada abad teknologi," ujar Karin. Artinya, ia tidak mengharamkan campur tangan teknologi dalam karya fotonya. Padahal, hal itu kerap diperdebatkan para fotografer. Bahkan, secara ekstrem sering dikatakan bahwa foto hasil olahan komputer masuk ke dalam wilayah seni grafis, bukan lagi seni foto *fine arts*. Kemampuan fotografer memanfaatkan mesin pintar dalam berkarya pun sering dipandang sebelah mata. "Foto jelek pun dapat tampil bagus dengan rekayasa komputer," demikian tuduhan yang kerap muncul.

Pendapat lain meyakini bahwa revolusi teknologi harus dimanfaatkan para fotografer, sehingga mau tak mau karya-karya foto digital selayaknya diterima sebagai karya fotografi. Salon Foto Indonesia 1995, lomba foto bergengsi, mulai melombakan digitalisasi foto itu. Tentu, dengan syarat, bahan baku yang direkayasa haruslah foto asli karya sang fotografer. Sebab, kemampuan menampilkan gagasan asli akan membedakan seorang seniman dengan tukang.

Itu pula yang dilakukan Karin. "Foto aslinya karya saya sendiri, yang kemudian *slide* (film positif)-nya di-*scan*. Tentu, foto aslinya harus bagus," ujarnya. Setelah itu, *software* Adobe Photoshop mulai dilibatkan dan warna merupakan obyek utama yang digarap. "Kalau warnanya biru, saya ingin menjadi biru sekali," kata Karin menjelaskan proses kreatifnya yang banyak menggunakan teknik *masking*. Secara tradisional, teknik ini bertujuan menutupi bagian putih atau bening serta menghapus elemen tertentu pada *slide* orisinal menjadi nada gelap atau hitam total. Dengan bantuan teknologi dan keahlian seni grafis, proses rumit yang biasanya memakan waktu itu bisa dipersingkat.

KARIN SUKARYA

KARYA KARIN. *Kolaborasi fotografi, grafis, dan teknologi digital.*

Walhasil, kolaborasi foto dan komputer ala Karin ini mampu mencuatkan karya yang "lain". Warna-warna kontras mampu menghasilkan efek dramatis, walaupun kadang-kadang terjebak dalam kegenitan. Memang, biasanya, semakin sederhana tema yang diangkat, unsur teknik kian dituntut untuk menciptakan unsur dramatis. Tentu saja, teknik merupakan unsur elementer yang harus selalu berada dalam proporsi yang terukur.

Ronald Raditya

DUET JUDD DAN LEE JONES DALAM DOUBLE JEOPARDY. *Terlalu pagi membuka kedok.*

Diselamatkan Akting dan Karakter

Berkisah tentang upaya balas dendam seorang istri yang dikorbankan suaminya. Kurang unsur kejutan, tapi karakter yang ditampilkan menarik.

Tak semua film beruntung dibekali skenario andal atau ditangani sutradara yang mampu menciptakan kejutan. *Double Jeopardy* adalah salah satunya. Dari awal, drama-*thriller-action* garapan Bruce Beresford ini sudah tercium ke mana kisah akan melangkah. Sebabnya, ia terlalu pagi membuka kedok si penjahat. Padahal, untuk film jenis ini, lazimnya, si penulis skenario menyimpan identitas si Jahat sampai detik-detik terakhir.

Untungnya, kejutan cuma salah satu syarat keberhasilan sebuah film. Masih ada faktor lain yang membuat sebuah film layak disimak. Misalnya, kekuatan akting para pendukungnya. Nah, aspek inilah yang menyelamatkan *Double* dari cap *thriller* kacangan. Ashley Judd, meski namanya belum meroket benar, berhasil menunjukkan akting yang lebih dari memuaskan. Ia mampu beralih karakter dari perempuan ringkih menjadi perempuan tegar dengan dendam membara. Ditunjang penampilannya yang anggun, penonton dengan mudah jatuh hati pada karakter yang diperankannya.

DOUBLE JEOPARDY

Produser	: Leonard Goldberg
Sutradara	: Bruce Beresford
Pemain	: Tommy Lee Jones, Ashley Judd

Tommy Lee Jones berperan sebagai Travis Lehman, petugas pembebasan bersyarat yang pemabuk. Karakter ini sebenarnya tak banyak beda dengan karakter yang diperankannya dalam *The Fugitive* atau sekuel *US Marshal*. Hanya, sosok Lehman lebih manusiawi ketimbang tokoh *supercop* dalam dua film terdahulu. Karena itu, meski hanya tampil di paruh kedua film, Jones mampu memberikan penampilan terbaiknya dengan segala kesinisan dan kegetirannya.

Dan ketimbang memfokuskan diri pada struktur cerita, unsur itulah, rupanya, yang sengaja ditonjolkan penulis skenario dan sutradara. Karena memang karakter-karakter yang ditampilkannya menarik. Meskipun tentunya semua itu tak lepas dari kekuatan akting Judd dan Jones. Bisa jadi, karakter itu pula yang membuat *Double* menangguk lebih dari US$ 100 juta di Amerika sana.

Adalah Libby Parsons (Ashley Judd) yang mengira hidupnya sempurna. Suaminya, Nick Parson (Bruce Greenwoods), tak hanya pengusaha kaya dan kolektor lukisan yang memberinya satu anak. Tapi, juga mencintainya. Namun, ternyata, semua itu semu belaka. Suatu malam, di atas perahu yang terapung di tengah laut, Libby menemukan dirinya bersimbah darah, sementara Nick menghilang. Belum habis kekagetannya polisi datang. Bukti-bukti yang ada, termasuk pisau berlumur darah, membuat ia jadi tersangka tunggal. Di pengadilan, juri percaya, ia membunuh suami demi uang asuransi US$ 2 juta. Hukuman penjara pun menimpanya.

Sebelum menjalani hukuman, Libby menitipkan anaknya kepada Angie, sahabatnya. Namun, apa lacur, Anggie kemudian menghilang. Kala melacak keberadaan Angie itulah, ia menemukan fakta yang lebih mengejutkan: Sang suami ternyata masih hidup. Libby, rupanya, korban rekayasa Nick. Seorang mantan pengacara, teman Libby di penjara, memberi saran jitu berlandaskan amandemen kelima: Seseorang tak bisa dihukum dua kali untuk kasus yang sama. Artinya, bila sudah keluar penjara, Libby bebas membunuh Nick. Tangan hukum tak bisa lagi menjeratnya.

Penuh keinginan balas dendam, selama di penjara ia mempersiapkan fisik dan mentalnya. Namun, ketika ia bebas bersyarat, keinginannya untuk buru-buru mencari anaknya dan membalas dendam terhalang petugas pembebasan bersyaratnya yang keras, Travis Lehman. Toh, setelah berhasil meloloskan diri dari pegawasan Lehman dan melacak keberadaan Nick, sukacitanya terwujud. Lehman tak hanya sadar bahwa Lybby hanya korban keserakahan Nick. Tapi, ia juga bersepakat untuk sama-sama meringkus bajingan itu.

Sri Raharti

PT HOTEL INDONESIA NATOUR: BENDERA BARU BUAT ASET LAMA

AKHIR Desember lalu, Ir. A.M. Suseto, Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour, menandatangani MOU dengan Merpati Nusantara Airlines, untuk bersama-sama mengembangkan sayap bisnis mereka menembus ajang persaingan global abad ke-21.

Kendati baru sekitar Maret nanti nama PT Hotel Indonesia Natour diresmikan, bendera baru untuk hotel-hotel yang dulu berada di bawah panji-panji PT Hotel Indonesia International-Natour itu mulai berkiprah lincah. Sejumlah langkah mulai digerakkan untuk mencatat prestasi baru.

Untuk bisa menjual kamar-kamar hotel yang dikelolanya, PT Hotel Indonesia Natour merasa tak harus berjalan sendiri. Mitra yang saling menunjang dalam dunia yang sama bisa diajak bersinergi. Merpati, misalnya, di bawah manajemen baru, tampaknya punya prinsip dan pandangan serta pengalaman profesional yang cocok untuk diajak bekerja sama, menawarkan paket-paket wisata yang lebih menarik dan saling menguntungkan kedua belak pihak.

Manajemen PT Hotel Indonesia-Natour yang bertugas sejak 28 Oktober 1999 ini tak tanggung-tanggung dalam memasang target tingkat laba tahun 2000. Mereka berani membidik tingkat keuntungan 62,8 persen dari Rp 15 miliar yang bisa dibukukan di tahun 1999.

Proyeksi target itu bukan tanpa perhitungan. Membaiknya perekonomian Indonesia sejalan dengan membaiknya situasi sosial-politik dalam negeri diyakini akan berdampak positif bagi bisnis pariwisata dan memulihkan arus masuk wisatawan mancanegara di tahun 2000-an, yang mereka proyeksikan sebesar 10 persen, dengan asumsi inflasi enam persen dan kurs dolar berada pada angka Rp 7.000. Angka ini jauh lebih tinggi dari proyeksi Departemen Pariwisata sendiri yang hanya memproyeksikan 5,3 persen atau sebanyak empat juta pendatang di tahun 2000 ini.

Lagi pula, aset-aset BUMN ini terletak di lokasi-lokasi prima yang strategis. Lihat saja, Hotel Indonesia di jantung keramaian Kota Jakarta, yang ikut jadi bagian dari sejarah bangsa dan dianggap sebagai cikal-bakal BUMN perhotelan yang bertaraf internasional. Di Bali, ada The Grand Bali Beach yang eksotis di Pantai Sanur, yang menjadi perintis hotel pantai modern di Pulau Dewata. Biar banyak pesaing, tetap saja punya daya tarik yang menjual. ❑

TELKOM-AMERICAN EXPRESS CO-BRAND CARD

TANGGAL 21 Desember lalu, Atul Mathur, Wakil Presiden Direktur dan Country Manager American Express TRS Indonesia, menandatangani perjanjian kerja sama menghadirkan sebuah produk baru berupa kartu *co-brand* pertama di Indonesia.

Bank yang bermarkas di New York dan beroperasi sejak 1850 itu menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia untuk bisa melahirkan Telkom-American Express Co-brand Card. Dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut, PT Telkom diwakili oleh A.A. Nasution yang mewakili Direksi BUMN telekomunikasi itu.

Kartu tersebut memang baru diluncurkan ke masyarakat di tahun 2000 ini dan ditawarkan secara eksklusif kepada pelanggan PT Telkom, disertai berbagai keuntungan tambahan dari Telkom dan Amex sendiri. Misalnya, dengan kartu ini nasabah mempunyai akses terhadap semua pelayanan pembayaran Telkom, program penghargaan keanggotaan yang berlaku bagi pemegang kartu Amex, asuransi, dan manfaat lainnya.

Selain kerja sama Co-brand Card, Amex dan PT Telkom juga akan bekerja sama dalam hal penerimaan pembayaran jasa telekomunikasi melalui kartu Amex, termasuk Telkom-American Express Co-brand Card itu tadi. Perjanjian kerja sama kedua perusahaan raksasa ini akan berlaku selama tiga tahun.

Proses penyusunan kesepakatan ini dimulai dari surat permintaan

Telkom kepada Amex dan beberapa bank lainnya pada 14 November 1997. Setelah dilakukan klarifikasi proposal dan evaluasi atas semua penawaran kerja sama dari bank-bank yang dihubungi, Telkom lalu memilih Amex sebagai mitra Co-branding Credit Card pada 8 Mei 1998. Faktor kehati-hatian yang tinggi dari kedua belah pihak menyebabkan penandatanganan kerja sama ini baru terlaksana setelah melalui suatu proses lebih dari dua tahun.

Dengan kartu ini, baik Amex maupun Telkom akan memperoleh keuntungan dan keduanya menambah satu lagi kemudahan bagi masyarakat pemegang kartu Amex serta para pelanggan Telkom. ❑

KOLOM

Gus Dur 2000

Noorca M. Massardi

Agama telah menjadi amunisi bagi senapan para serdadu yang panas. Tapi, Gus Dur, pemerintah, dan aparat keamanan masih juga belum tampak awas. Kitab suci telah menjadi mesiu bagi peluru yang ditembakkan oleh dendam. Tapi, Gus Dur menyerahkan penyelesaian kepada masyarakat awam yang memikul dendam. Kalam Illahi telah menjadi hukum untuk kebiadaban dan kekejaman. Tapi, Gus Dur hanya mengatakan bahwa kesabaran ada batasnya dan ia hanya mengingatkan akan mengambil tindakan terhadap "kawan-kawan" penyebar kerusuhan.

Rumah-rumah ibadah telah menjadi kawah, yang di dalamnya besi amarah ditempa setiap saat. Tapi, para menteri hanya sibuk melihat jam, menghitung berapa menit lagi jabatan bisa disandang. Amal dan santunan telah menjadi bahan bakar untuk menyalakan kebencian. Tapi, Gus Dur masih sibuk membagi-bagi jatah kekuasaan dan membengkakkan lingkaran kerabat kepresidenan.

Alat-alat angkutan telah menjadi sarana penyebarluasan kerusuhan. Tapi, Gus Dur hanya mengatur jadwal penerbangan dan lawatan ke pelbagai negara. Media massa telah menjadi kipas bagi bara kerusuhan yang hampir padam. Tapi, Gus Dur hanya mengeluh, kok para wartawan tidak membantu mendamaikan. Maka, apa yang harus terjadi, terjadilah. Dan, itulah gerangan persepsi masyarakat terhadap ucapan dan tindakan Gus Dur sejak ia menjadi Presiden RI, menjadi imam negeri ini.

Lalu, apa salah Megawati, Amien Rais, Akbar Tandjung, Wiranto, media massa, para pakar, pengamat, dan masyarakat? Bukankah dalam setiap perbuatan, tak ada yang seratus persen salah, dan tidak ada yang seratus persen benar, sebagaimana kata orang bijak? Lalu, mengapa perubahan seolah tak kunjung datang dan perbaikan juga enggan bertamu? *Lagian*, benarkah perbaikan dan perubahan itu harus datang dari Gus Dur yang belum lagi seratus hari di singgasananya, dan yang saat terpilihnya juga sudah merupakan "masalah" tersendiri?

Pada mulanya memang adalah kata. Dan, dari situlah semua bermula. Tak hanya kearifan, hukum, dan kebenaran, tapi juga kesombongan, keangkuhan, dan kekuasaan. Pada mulanya adalah reformasi. Dan, dari situlah semua bermakna dan berawal. Reformasi tak hanya menumbuhkan kearifan dan memompa pelbagai upaya untuk mencari kebenaran dan menegakkan hukum, tapi juga turut melahirkan kekerabatan, keangkuhan, dan kekuasaan.

Dan, pada mulanya adalah juga Gus Dur. Ia memang tak hanya senang berkata-kata atau bermain kata, tapi juga asyik mengatakan apa yang seharusnya tidak diucapkan, dan mengucapkan apa yang belum lagi sesuai dengan kebenaran, atau tidak sejalan dengan apa yang ingin dikatakannya, *lapse* atau lapsus.

Karena itu, tak mengherankan bila dalam seratus hari rezim Gus Dur, kita hanya sibuk mengurus kata dan kata-kata. Para politisi, para wakil rakyat, dan para anggota kabinet, yang belum tahu bagaimana berbicara benar di tengah iklim kebebasan, begitu tergagap-gagap menghadapi apa saja pernyataan Gus Dur. Karena itu pula, tak salah bila Gus Dur menyebut mereka ibarat murid taman kanak-kanak.

Gus Dur dan pelbagai pernyataannya yang "aneh-aneh" itu memang telah menjebak hampir semua kalangan. Pernyataan soal tiga menteri KKN, *reshuffle* kabinet, tangan-tangan jahat, apel akbar Monas yang cuma 20 ribu, kenaikan gaji pejabat tinggi negara, ancaman kudeta dan bukan kudeta, dan seterusnya, seolah tak habis dibahas oleh hampir semua orang. Termasuk—anehnya—oleh Amien Rais, Akbar Tandjung, para pengamat, dan para wakil rakyat. Maka, mereka pun terperangkap dalam turbulensi kata-kata, mencari makna dan kebenaran di antara guyonan dan setengah lelucon.

Padahal, di tengah apa yang dikatakan Eep Saefulloh sebagai "turbulensi di masa transisi" ini, yang justru harus dilakukan Amien dan Akbar adalah segera menata perangkat keras berupa sirkulasi para aktor, pemantapan institusi, penetapan perundangan, dan pengaturan mekanisme semua itu, sebelum menyusun wacana paradigma baru tentang demokrasi dan apa yang disebut "Indonesia Baru".

Dengan demikian, kita tak akan kehilangan momentum dan esensi dari reformasi. Duet Amien-Akbar harus segera menuntaskan amandemen UUD 1945, menyesuaikan atau melahirkan produk perundangan yang sejalan dengan kehendak para reformis. Terutama, yang berhubungan dengan pemberantasan KKN; penyalahgunaan kekuasaan; pembatasan, pemilihan, dan pergantian presiden bila presiden berhalangan tetap; dan seterusnya.

Dengan kata lain, hentikanlah polemik dan perang kata-kata, *words war, la guerre des mots.* Apa pun kata Gus Dur, pakailah logika Gus Dur: *"Gitu aja kok repot-repot."*

Demi masa, tak ada tempo untuk memahami Gus Dur. Berikan saja kesempatan yang cukup kepada pemerintahannya untuk melakukan apa yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Tunggulah apa yang dihasilkan oleh para menterinya, yang harus berinisiatif dan mandiri tanpa perlu menunggu petunjuk Gus Dur. Tak ada waktu, dan bukan zamannya lagi memohon petunjuk. Para menko dan menteri itulah yang harus segera membuat strategi besar atau desain besar untuk negeri ini.

SELO SUMARSONO

Dengan kata lain, bila turbulensi kata-kata Gus Dur bisa dihindari, para pembantunya harus bisa menjadi pancaindera Gus Dur. Selebihnya, serahkan kepada Gus Dur dan Tuhan. Jadi, bila pemerintahan Gus Dur sukses, itu semata-mata karena kebesaran dan karunia Allah swt. kepada bangsa dan negeri ini. Dan, bila ia gagal, itu tak lain karena kekurangan Gus Dur dan kekurangan kita semua yang telah memilihnya menjadi imam.

Dan kudeta? Itu cuma antisipasi dan *cotingency plan* partai politik dan tentara bila tiba-tiba Gus Dur berhalangan tetap. *Gitu aja kok repot.* ❑